



# RPJMD

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

2021 - 2026



H. Jeje Wiradinata

H. Ujang Endin Indrawan

Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan

- Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3,  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran  
Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
dan  
BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Batasan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pangandaran.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
6. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/ Kota di Daerah Provinsi.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/ atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Daerah.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung risiko.
11. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah Kabupaten Pangandaran.
12. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
13. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2025, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Pangandaran.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan

dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Pangandaran, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
20. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan, untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih Unit Kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan Daerah yang dityetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Maksud penetapan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam:
- penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
  - penyusunan RKPD;
  - penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk:
- menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah Daerah;
  - menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan perencanaan penganggaran;
  - mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota, serta dengan daerah kabupaten/kota yang berbatasan.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 3

RPJMD merupakan:

- penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan Daerah Kabupaten, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan Daerah Kabupaten, dengan mempertimbangkan RPJPD dan RTRW; dan
- dokumen perencanaan Daerah Kabupaten yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam

mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

### BAB III SISTEMATIKA

#### Pasal 4

Sistematika RPJMD meliputi :

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
- BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;
- BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
- BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- BAB IX : Penutup.

### BAB IV ISI DAN URAIAN RPJMD

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 25 Agustus 2021  
BUPATI PANGANDARAN,



H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,



H. KUSDIANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2021 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,  
PROVINSI JAWA BARAT 4 / 118 / 2021

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2021-2026**

**I. UMUM.**

Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan telah terpilihnya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada Tahun 2020 untuk masa jabatan 2021 hingga 2026, maka sesuai dengan Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah dilantik.

RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan dan menjadi panduan bagi pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun di Kabupaten Pangandaran.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup Jelas

Pasal 2  
    Cukup Jelas

Pasal 3  
    Cukup Jelas

Pasal 4  
    Cukup Jelas

Pasal 5  
    Cukup Jelas

Pasal 6  
    Cukup Jelas

Pasal 7  
    Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 4



# RPJMD

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

2021 - 2026



H. Jeje Wiradinata

H. Ujang Endin Indrawan

Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran 2021-2026 dapat diselesaikan. RPJMD adalah



H. JEJE WIRADINATA  
BUPATI PANGANDARAN

H. UJANG ENDIN INDRAWAN  
WAKIL BUPATI PANGANDARAN

penjabaran visi, misi, janji-janji kampanye dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati kepada Warga Kabupaten Pangandaran dalam kurun waktu lima tahun. Penyusunan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan RPJMD bertujuan untuk memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat Kabupaten Pangandaran selama lima tahun kedepan dengan menyelaraskan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, isu strategis, program strategis, kerangka pendanaan, indikator kinerja, dan gambaran pengelolaan keuangan daerah. Dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026 merupakan pedoman dalam perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran, Renstra dan Renja SKPD dalam merencanakan Program Prioritas dan kegiatan-kegiatan setiap tahunnya yang menyentuh kebutuhan masyarakat serta memenuhi harapan warga Kabupaten Pangandaran dalam mewujudkan Visi, **“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”**.

Harapan kami dalam mengembangkan amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran adalah mengajak semua pemangku kepentingan secara bersama-sama berbuat untuk membenahi dan mensejahterakan warga Kabupaten Pangandaran secara lahir dan batin. Dengan bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas, Insya Allah apa yang kita cita-citakan dapat terwujud.





## DAFTAR ISI

|  |               |
|--|---------------|
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>i</b>      |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>   | <b>ii</b>     |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>   | <b>viii</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>   | <b>I-1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang.....  | I-1           |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....   | I-6           |
| 1.3 Hubungan Antar Dokumen .....   | I-11          |
| 1.4 Maksud Dan Tujuan .....  | I-12          |
| 1.5 Sistematika Penulisan .....  | I-12          |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH .....</b>                             | <b>II-1</b>   |
| 2.1 Aspek Geografi dan Demografi .....   | II-1          |
| 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....  | II-32         |
| 2.3 Aspek Pelayanan Umum .....   | II-51         |
| 2.4 Aspek Daya Saing Daerah .....  | II-103        |
| 2.5 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....                               | II-108        |
| 2.6 Capaian Indikator Kinerja RPJMD .....  | II-118        |
| <b>BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH .....</b>                                    | <b>III-1</b>  |
| 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu .....   | III-2         |
| 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....                                | III-13        |
| 3.3 Kerangka Pendanaan .....   | III-18        |
| <b>BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.....</b>                     | <b>IV-1</b>   |
| 4.1 Permasalahan Pembangunan .....   | IV-1          |
| 4.2 Isu Strategis.....   | IV-56         |
| <b>BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .....</b>                                | <b>V-1</b>    |
| 5.1 Visi .....   | V-2           |
| 5.2 Misi.....  | V-4           |
| 5.3 Tujuan dan Sasaran .....   | V-8           |
| <b>BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM.....</b>                         | <b>VI-1</b>   |
| <b>PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>  | <b>VI-1</b>   |
| 6.1 Strategi .....   | VI-1          |
| 6.2 Arah Kebijakan .....   | VI-17         |
| <b>BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH .....</b> | <b>VII-1</b>  |
| <b>BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....</b>                   | <b>VIII-1</b> |
| <b>BAB IX PENUTUP.....</b>   | <b>IX-1</b>   |
| 9.1 Kaidah Pelaksanaan .....   | IX-1          |
| 9.2 Pedoman Transisi .....   | IX-2          |



## **DAFTAR TABEL**

|             |  |       |
|-------------|--|-------|
| Tabel 2. 1  | Luas Administratif Kecamatan di Kabupaten Pangandaran .....  | II-4  |
| Tabel 2. 2  | Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran.....   | II-4  |
| Tabel 2. 3  | Kondisi Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran....<br>.....   | II-6  |
| Tabel 2. 4  | Jenis Batuan di Kabupaten Pangandaran .....  | II-10 |
| Tabel 2. 5  | Jenis Tanah di Kabupaten Pangandaran.....  | II-12 |
| Tabel 2. 6  | Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Pangandaran .....  | II-12 |
| Tabel 2. 7  | Penggunaan Lahan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 .....   | II-16 |
| Tabel 2. 8  | Luasan Potensi Gempa di Kabupaten Pangandaran ..<br>.....  | II-18 |
| Tabel 2. 9  | Luasan Potensi Tsunami di Kabupaten Pangandaran ...<br>.....   | II-19 |
| Tabel 2.10  | Luasan Potensi Gerakan Tanah di Kabupaten Pangandaran .....  | II-20 |
| Tabel 2. 11 | Luasan Potensi Bencana Banjir di Kabupaten Pangandaran .....   | II-21 |
| Tabel 2. 12 | Jumlah Penduduk, dan Jumlah KK di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 .....   | II-22 |
| Tabel 2. 13 | Persentase Penyebaran Penduduk Per-Kecamatan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 .....                           | II-23 |
| Tabel 2. 14 | Struktur Usia Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.....                               | II-24 |
| Tabel 2. 15 | Angka Beban Ketergantungan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 .....              | II-25 |
| Tabel 2. 16 | Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pangandaran 2020.....                                    | II-26 |
| Tabel 2. 17 | Data Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.....                                | II-28 |
| Tabel 2. 18 | Data Ketenagakerjaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 .....  | II-30 |
| Tabel 2. 19 | Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 .....                                     | II-31 |
| Tabel 2. 20 | Rencana Pola Ruang Kabupaten Pangandaran .....   | II-35 |
| Tabel 2. 21 | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pangandaran (miliar rupiah) Tahun 2016-2020 ..... | II-38 |
| Tabel 2. 22 | Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2020 .....   | II-42 |
| Tabel 2. 23 | Angka Melek Huruf Kabupaten Pangandaran .....  | II-46 |



|   |       |
|---|-------|
| Tabel 2. 24 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020..... | II-47 |
| Tabel 2. 25 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pangandaran 2016-2020 .....                    | II-48 |
| Tabel 2. 26 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....   | II-49 |
| Tabel 2. 27 Hasil Capaian Kinerja Urusan Olahraga Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....   | II-50 |
| Tabel 2. 28 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....   | II-52 |
| Tabel 2. 29 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....  | II-54 |
| Tabel 2. 30 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....                          | II-59 |
| Tabel 2. 31 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....                    | II-61 |
| Tabel 2. 32 Hasil Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketentraman Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....                           | II-62 |
| Tabel 2. 33 Hasil Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....   | II-64 |
| Tabel 2. 34 Hasil Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....                                    | II-66 |
| Tabel 2. 35 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....                         | II-67 |
| Tabel 2. 36 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....   | II-68 |
| Tabel 2. 37 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....   | II-69 |
| Tabel 2. 38 Hasil Capaian Kinerja Urusan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020II-70                                     |       |
| Tabel 2. 39 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020.....   | II-72 |
| Tabel 2. 40 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....                           | II-73 |
| Tabel 2. 41 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....               | II-75 |
| Tabel 2. 42 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....  | II-76 |



|   |       |
|---|-------|
| Tabel 2. 43 Hasil Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....            | II-77 |
| Tabel 2. 44 Hasil Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2016-2020.....                                       | II-78 |
| Tabel 2. 45 Hasil Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2016-2020 .....  | II-79 |
| Tabel 2. 46 Hasil Capaian Kinerja Urusan Olahraga Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....   | II-80 |
| Tabel 2. 47 Jumlah Publikasi Statistik Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....  | II-81 |
| Tabel 2. 48 Hasil Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....                                       | II-82 |
| Tabel 2. 49 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....   | II-83 |
| Tabel 2. 50 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....                                     | II-85 |
| Tabel 2. 51 Persentase Perangkat Daerah Pengelola Arsip Baku Tahun 2016-2020 .....  | II-86 |
| Tabel 2. 52 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....       | II-88 |
| Tabel 2. 53 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....                   | II-89 |
| Tabel 2. 54 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pertanian Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020...                       | II-90 |
| Tabel 2. 55 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....                           | II-91 |
| Tabel 2. 56 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....                         | II-92 |
| Tabel 2. 57 Hasil Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....                 | II-93 |
| Tabel 2. 58 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....                          | II-94 |
| Tabel 2. 59 Hasil Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....   | II-95 |
| Tabel 2. 60 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 ..... | II-96 |



|  |        |
|--|--------|
| Tabel 2. 61 Hasil Capaian Kinerja Urusan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....                           | II-97  |
| Tabel 2. 62 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pengawasaan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....                                      | II-98  |
| Tabel 2. 63 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....   | II-99  |
| Tabel 2. 64 Hasil Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....  | II-100 |
| Tabel 2. 65 Hasil Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran .....  | II-101 |
| Tabel 2. 66 Hasil Kinerja Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....                                 | II-102 |
| Tabel 2. 67 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kemampuan Ekonomi Daerah.....   | II-103 |
| Tabel 2. 68 Hasil Capaian Kinerja Urusan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2020 .....                          | II-105 |
| Tabel 2. 69 Hasil Capaian Kinerja Urusan Iklim Investasi Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2020 .....   | II-106 |
| Tabel 2. 70 Rasio Kelulusan S1/S2/S2 Tahun 2016 – 2020..   | II-107 |
| Tabel 2. 71 Hasil Capaian Kinerja Urusan Sektor Pariwisata Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2020   | II-108 |
| Tabel 2. 72 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020 .....   | II-109 |
| Tabel 2. 73 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran ..... | II-112 |
| Tabel 2. 74 Capaian Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 .....  | II-120 |
| Tabel 3. 1 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016-2020 Kabupaten Pangandaran .....                                  | III-5  |
| Tabel 3. 2 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Pangandaran .....   | III-12 |
| Tabel 3. 3 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Pangandaran ....   | III-15 |
| Tabel 3. 4 Defisit Rill Anggaran Kabupaten Pangandaran .....   | III-16 |
| Tabel 3. 5 Komposisi Penutup Rill Defisit Anggaran Kabupaten Pangandaran .....   | III-16 |
| Tabel 3. 6 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Pangandaran .....   | III-17 |
| Tabel 3. 7 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022-2026 .....   | III-19 |



|             |   |        |
|-------------|---|--------|
| Tabel 3. 8  | Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran .....                                | III-27 |
| Tabel 3. 9  | Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah .....   | III-29 |
| Tabel 4. 1  | Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....   | IV-3   |
| Tabel 4. 2  | Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kabupaten Pangandaran .....   | IV-23  |
| Tabel 4. 3  | Keterkaitan Isu Strategis Nasional dan Isu Strategis Provinsi.....  | IV-57  |
| Tabel 4. 4  | Keterkaitan Isu Strategis Provinsi dan Isu Strategis Kabupaten Pangandaran .....  | IV-58  |
| Tabel 4. 5  | Identifikasi Isu Strategis Daerah Kabupaten Pangandaran .....   | IV-60  |
| Tabel 4. 6  | Penjabaran Identifikasi Isu Strategis Daerah Kabupaten Pangandaran .....  | IV-63  |
| Tabel 4. 7  | Skor Kreteria Penentuan Isu-Isu Strategis .....   | IV-65  |
| Tabel 4. 8  | Skor Kriteria Rata-rata.....  | IV-67  |
| Tabel 4. 9  | Hasil Pembobotan Skor.....  | IV-68  |
| Tabel 4. 10 | Urutan Isu Strategis Berdasarkan Urgensi.....   | IV-80  |
| Tabel 5. 1  | Pokok-Pokok Visi Kabupaten Pangandaran .....  | V-2    |
| Tabel 5. 2  | Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 .....  | V-4    |
| Tabel 5. 3  | Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran 2021-2026.....   | V-11   |
| Tabel 5. 4  | Korelasi Sasaran RPJMD dengan Janji Politik Bupati Terpilih .....   | V-15   |
| Tabel 6. 1  | Analisis SWOT dan Strategi Pembangunan Kabupaten Pangandaran .....  | VI-2   |
| Tabel 6. 2  | Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kabupaten Pangandaran .....   | VI-14  |
| Tabel 6. 3  | Perumusan Arah Kebijakan Kabupaten Pangandaran Tahun 2022-2026 .....  | VI-18  |
| Tabel 6. 4  | Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pangandaran .....  | VI-21  |
| Tabel 6. 5  | Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Pangandaran .....   | VI-23  |
| Tabel 7. 1  | Kerangka Pendanaan Daerah 2022-2026 Kabupaten Pangandaran .....   | VII-2  |
| Tabel 7. 2  | Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 – 2026 ..... | VII-4  |
| Tabel 8. 1  | Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Pangandaran.....   | VIII-2 |



|            |  |         |
|------------|--|---------|
| Tabel 8. 2 | Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran .....  | VIII-4  |
| Tabel 8. 3 | Penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional..... | VIII-14 |



## **DAFTAR GAMBAR**

|              |  |       |
|--------------|--|-------|
| Gambar 1. 1  | Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....  | I-12  |
| Gambar 2. 1  | Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budaya Kabupaten Pangandaran .....                       | II-1  |
| Gambar 2. 2  | Peta Administrasi Kabupaten Pangandaran .....  | II-2  |
| Gambar 2. 3  | Peta Topografi Kabupaten Pangandaran.....  | II-7  |
| Gambar 2. 4  | Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran.....  | II-8  |
| Gambar 2. 5  | Peta Geologi Kabupaten Pangandaran.....  | II-9  |
| Gambar 2. 6  | Peta Sebaran Jenis Tanah Kabupaten Pangandaran.....  | II-11 |
| Gambar 2. 7  | Peta Batas DAS Kabupaten Pangandaran .....   | II-13 |
| Gambar 2. 8  | Peta Curah Hujan .....   | II-15 |
| Gambar 2. 9  | Peta Penggunaan Lahan.....   | II-16 |
| Gambar 2. 10 | Peta Rawan Gempa .....   | II-18 |
| Gambar 2. 11 | Peta Rawan Tsunami.....  | II-19 |
| Gambar 2. 12 | Peta Pergerakan Tanah .....  | II-20 |
| Gambar 2. 13 | Peta Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Pangandaran.....  | II-33 |
| Gambar 2. 14 | Peta Rencana Struktur Ruang.....   | II-33 |
| Gambar 2. 15 | Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pangandaran.....   | II-36 |
| Gambar 2. 16 | Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pangandaran.....   | II-36 |
| Gambar 2. 17 | Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 ..... | II-38 |
| Gambar 2. 18 | Gini Rasio Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2020 .....   | II-40 |
| Gambar 2. 19 | Laju Inflasi Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2020 .....   | II-43 |
| Gambar 2. 20 | Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pangandaran 2016-2020.....  | II-45 |
| Gambar 4. 1  | Korelasi CSF dengan SWOT .....   | IV-22 |

# *RPJMD*

RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

---

2021 - 2026

# BAB I

---

## PENDAHULUAN



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah pada hakikatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen daerah untuk mengubah suatu keadaan yang belum ideal menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Dalam upaya tersebut, perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan diperlukan terutama untuk memberikan arah dan prioritas bagi pembangunan daerah.

Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang substansinya saling berkaitan dan mampu menjadi kerangka acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hal tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Ayat 3 dan juga dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 260 Ayat 1. Perencanaan pembangunan yang disusun secara sinergi oleh semua pemangku kepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama, kedua undang-undang tersebut diharapkan bisa menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 5 Ayat 2, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang berpedoman kepada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 harus mengacu dan berpedoman kepada dokumen perencanaan pembangunan pusat dan provinsi.

Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 akan dijadikan sebagai acuan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan perencanaan tahunan dan juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), sebagai bentuk pelaksanaan RPJMD dan keselarasan perencanaan tahunan dengan perencanaan jangka menengah serta keselarasan perencanaan tingkat pemerintah daerah dengan perencanaan tingkat perangkat daerah. Oleh karena itu, dokumen RPJMD



harus menggunakan konsep SMART-C (*Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bounded, and Continuously Improve*).

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada Tahun 2020, maka Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menerapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 Ayat 1, yang ditegaskan kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 7, menyatakan bahwa dalam menyusun RPJMD menggunakan 4 (empat) pendekatan, 1) politis; 2) teknokratik; 3) Partisipatif; 4) atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*).

Penyusunan dokumen RPJMD ini dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan:

- a. Relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;



- c. Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
- d. Keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarginalkan utamanya gender;
- e. Terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
- f. Terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

Pendekatan politis dalam penyusunan RPJMD adalah upaya untuk menterjemahkan program-program pembangunan yang ditawarkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye dengan yang mengacu pada ketentuan Pasal 8 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam Rencana RPJMD, melalui tahapan:

1. Menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
2. Melakukan konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
3. Melakukan pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

Pendekatan yang terakhir digunakan dalam penyusunan RPJMD adalah perpaduan antara pendekatan *bottom up* dan *top down*, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi



pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Didasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tersebut juga mengatur bahwa dalam RPJMD harus memiliki keterkaitan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), bertujuan untuk menjaga sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026. Konsistensi antar dokumen perencanaan ini akan berdampak saat dilakukan evaluasi pada akhir tahun anggaran maupun pada akhir masa periodesasi RPJMD.

Output dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 akan menjadi panduan bagi pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun di Kabupaten Pangandaran. Proses penerjemahan visi dan misi kepala daerah yang terpilih merupakan aspek utama dalam proses administratif penyusunan dokumen RPJMD.

Implementasi perencanaan pembangunan pada RPJMD, akan berhasil sesuai target apabila asumsi-asumsi yang tersaji berjalan dalam keadaan normal. Pada akhir periode RPJMD 2016-2021, pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) menyerang hampir seluruh dunia memiliki dampak cukup signifikan bagi daerah termasuk Kabupaten Pangandaran. Hal ini mempengaruhi capaian target kinerja RPJMD. Oleh karena itu dalam dokumen ini akan dijabarkan strategi dan tahapan mitigasi untuk bangkit dari dampak pandemi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bersamaan.



## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Periode 2021-2026 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
19. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat



Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

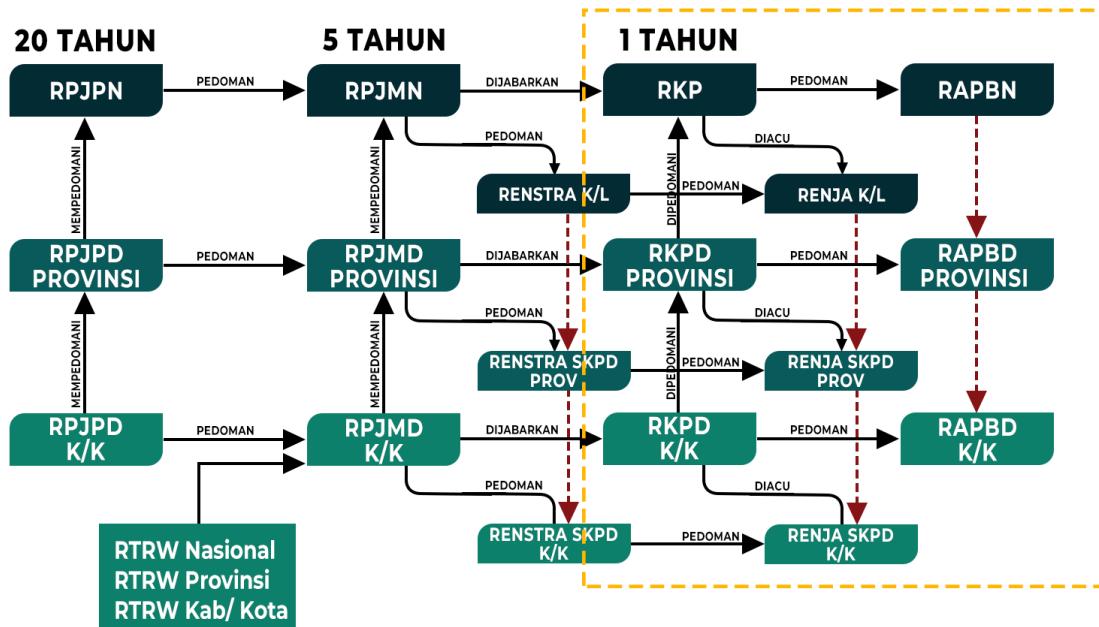
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3 Seri No Reg Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat 3/103/2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);



28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10).

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga dalam penyusunannya RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025, Program Nawacita melalui RPJM Nasional 2020-2024 sesuai dengan urusan daerah, serta RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023. Agar RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain. Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar di bawah ini.



(Sumber : Data Diolah, 2021)

**Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

#### 1.4 Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Periode 2021-2026 disusun untuk menjabarkan gambaran umum, potensi, permasalahan, isu strategis, Rencana visi misi serta kebijakan dan strategi Kabupaten Pangandaran melalui kerangka berpikir ilmiah.

Selanjutnya tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Periode 2021-2026 sebagai bahan acuan pelaksanaan program dan kegiatan dari setiap perangkat daerah.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana disajikan dalam uraian di bawah ini.



## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD, maksud dan tujuan penyusunan, landasan normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah saat ini, dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu lima tahun. Bab ini diperjelas dan diperinci ke dalam sub bab sebagai berikut:

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

## BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan gambaran umum keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan yang pada akhirnya akan diketahui kemampuan daerah dalam membiayai program-program pembangunan. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3. Kerangka Pendanaan



## **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Bab ini berisi uraian tentang permasalahan pembangunan yang akan dianalisis sehingga menghasilkan isu-isu strategis sebagai pijakan perumusan kebijakan pembangunan daerah yang akan dijabarkan menjadi Strategi, Arah Kebijakan dan Program prioritas.

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

## **BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini berisi uraian tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang menunjukkan satu kesatuan logika perencanaan yang utuh dan konsisten.

- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan dan Sasaran

## **BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM**

### **PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini berisi uraian tentang strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.



## **BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi uraian tentang program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

## **BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Bab ini berisi uraian tentang penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci pada akhir periode masa jabatan.

## **BAB IX PENUTUP**

Pada bagian penutup akan disajikan dua bagan penting, yaitu Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan, yang memberikan petunjuk bagaimana masa peralihan dokumen ini di waktu yang akan datang, serta keterkaitannya dengan dokumen lainnya seperti RKPD dan Renstra.

# *RPJMD*

**RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN**

---

2021 - 2026

# BAB II

---

## GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



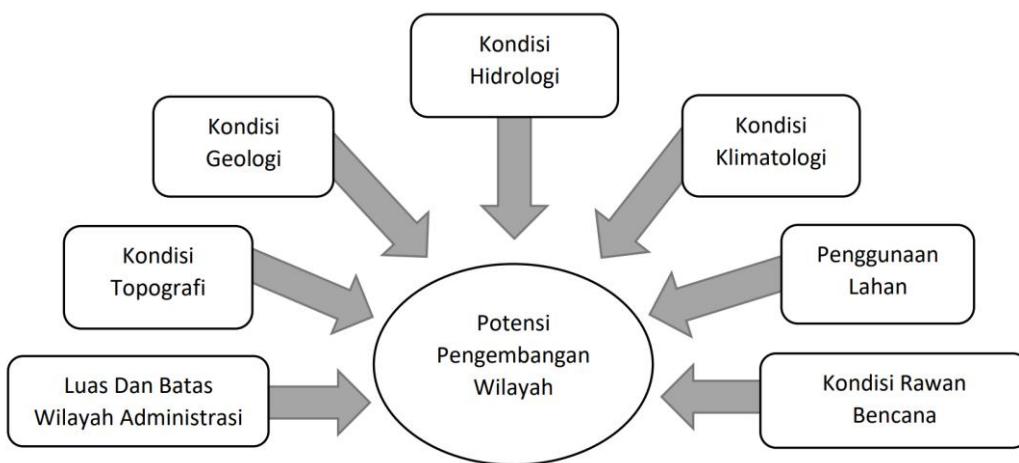
## BAB II

### GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

Bab ini menyajikan secara rinci mengenai informasi kondisi umum daerah yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Selain itu gambaran umum daerah ini bisa dijadikan acuan dalam perumusan arah kebijakan dan pengambilan keputusan penting kedepannya. Data yang digunakan dalam penyusunan dokumen RPJMD ini adalah data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

#### 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Pada sub bab ini akan menjelaskan mengenai kondisi umum daerah yang terbagi menjadi tiga, yaitu aspek geografi, aspek demografi dan potensi pengembangan wilayah. Penjelasan dibawah ini adalah untuk menginformasikan mengenai keadaan Kabupaten Pangandaran secara umum. Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Pangandaran sangat dipengaruhi oleh beberapa kondisi wilayah existing, seperti yang disajikan pada gambar di bawah ini:



(Sumber: Diolah Penyusun, 2021)

**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya Kabupaten Pangandaran**



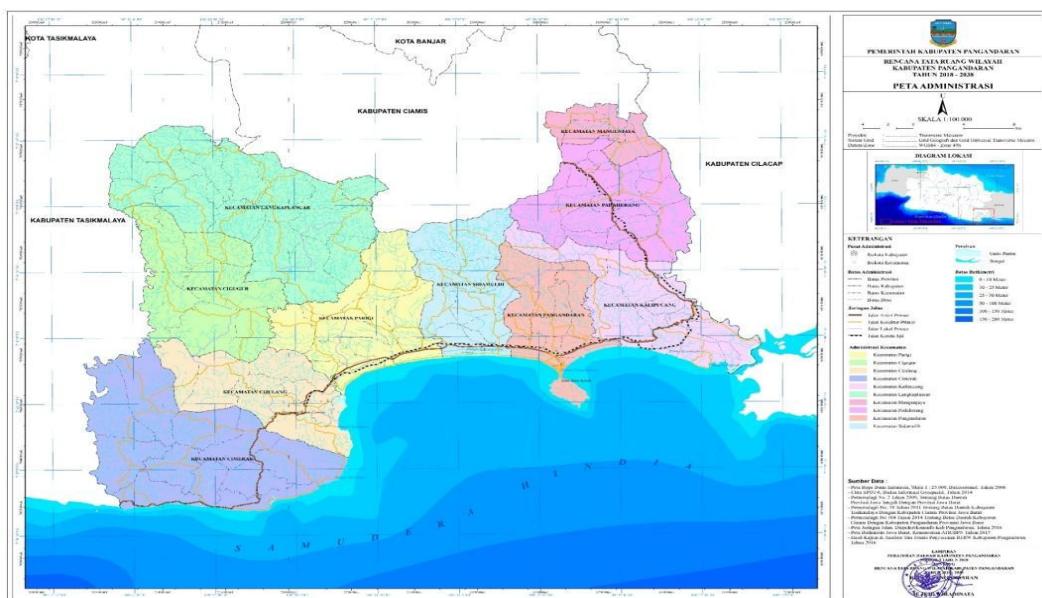
## 2.1.1 Kondisi Geografis

Kondisi yang mempengaruhi potensi kawasan Kabupaten Pangandaran meliputi luas dan batas wilayah administrasi, kondisi topografi, kondisi geologi, kondisi hidrologi, kondisi klimatologi, kondisi penggunaan lahan, dan kondisi daerah rawan bencana. Indikator-indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut:

### 2.1.1.1 Luas dan batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat yang baru ditetapkan pada tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Pangandaran terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Barat, dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Cilacap).

Secara lebih detail, berikut adalah peta batas administratif Kabupaten Pangandaran yang menunjukkan batas kabupaten dan batas kecamatan.



(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW  
Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

**Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Pangandaran**



Berdasarkan letak astronomis, Kabupaten Pangandaran terletak pada  $108^{\circ}8'0''$  sampai dengan  $108^{\circ}50'0''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}24'0''$  sampai dengan  $7^{\circ}54'20''$  Lintang Selatan. Sedangkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, batas administratif wilayah Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

- A. Sebelah Utara : Desa Ciulu, Desa Pasawahan, Desa Cikupa Kecamatan Banjarsari, Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi, Desa Sidamulih Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dan Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya, Desa Cisarua Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya
- B. Sebelah Timur : Desa Tambaksari, Desa Sidanegara, Desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja, Desa Sidamukti, Desa Patimuan, Desa Rawaapu, Desa Cinyawang, Desa Purwodadi Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
- C. Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- D. Sebelah Barat : Desa Neglasari, Desa Tawang, Desa Panca Wangi, Desa Mekarsari, Kecamatan Pancatengah, Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong, Desa Mulyasari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Pangandaran memiliki Ibu Kota Kabupaten di Kecamatan Parigi, dengan cakupan wilayah terdiri atas 10 Kecamatan dan 93 Desa. Luas wilayah Kabupaten Pangandaran kurang lebih 1.134,23 Km<sup>2</sup>. Pembagian luas wilayah per-kecamatan disajikan pada tabel di bawah ini:



**Tabel 2.1 Luas Administratif Kecamatan di Kabupaten Pangandaran**

| No            | Kecamatan     | Luas Wilayah (Km2) | Jumlah Desa | Jumlah Dusun | Jumlah RW  | Jumlah RT    |
|---------------|---------------|--------------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| 1             | Parigi        | 111,23             | 10          | 53           | 122        | 399          |
| 2             | Cijulang      | 94,37              | 7           | 38           | 90         | 252          |
| 3             | Cimerak       | 190,22             | 11          | 51           | 99         | 357          |
| 4             | Cigugur       | 117,82             | 7           | 39           | 64         | 200          |
| 5             | Langkaplancar | 205,54             | 15          | 66           | 115        | 414          |
| 6             | Mangunjaya    | 31,98              | 5           | 28           | 47         | 233          |
| 7             | Padaherang    | 112,76             | 14          | 60           | 142        | 443          |
| 8             | Kalipucang    | 104,27             | 9           | 29           | 80         | 291          |
| 9             | Pangandaran   | 75,57              | 8           | 33           | 90         | 344          |
| 10            | Sidamulih     | 90,47              | 7           | 33           | 68         | 263          |
| <b>Jumlah</b> |               | <b>1.134,23</b>    | <b>93</b>   | <b>430</b>   | <b>917</b> | <b>3.196</b> |

(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

### 2.1.1.2 Kondisi Topografi

Kabupaten Pangandaran berada pada ketinggian antara 0 - 700 m di atas permukaan laut (dpl). Elevasi Kabupaten Pangandaran cenderung semakin tinggi dari arah selatan ke utara kecuali bagian barat pesisir yang wilayahnya perbukitan karst. Kondisi masing-masing kecamatan tercantum dalam tabel 2.2 di bawah ini.

**Tabel 2.2 Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran**

| No | Kecamatan | Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran  |
|----|-----------|--|
| 1  | Cimerak   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kondisi geografis: bagian selatan dominan pesisir bertebing curam dan ke bagian utara merupakan perbukitan kapur.</li> <li>Ketinggian: 3-80 mdpl dengan daerah dataran rendah atau pantai.</li> </ul> |
| 2  | Cijulang  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan kecamatan yang berada di daerah pesisir pantai.</li> <li>Ketinggian: 2-185 mdpl dengan daerah dataran rendah/pantai.</li> </ul>   |
| 3  | Cigugur   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wilayah ini merupakan daerah bukan pesisir melainkan perbukitan dan dataran tinggi.</li> <li>Ketinggian wilayah di Kecamatan Cigugur relatif sama antara 200-500 mdpl.</li> </ul>                     |



| No | Kecamatan     | Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran  |
|----|---------------|--|
| 4  | Langkaplancar | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wilayah ini merupakan dataran tertinggi di Kabupaten Pangandaran.</li> <li>Ketinggian wilayah di Kecamatan Langkaplancar relatif sama antara 400-1.000 mdpl.</li> </ul>   |
| 5  | Parigi        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketinggian wilayah bervariasi antara 5-500 mdpl</li> <li>Desa yang berada di dataran rendah yakni Desa Parigi, Karangjaladri, Cibenda, Karangbenda dan Ciliang.</li> </ul>  |
| 6  | Sidamulih     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan kecamatan yang berada di daerah pesisir pantai.</li> <li>Ketinggian: 3-250 mdpl dengan daerah dataran tingginya yakni desa Kersaratu dan Kalijati.</li> </ul>   |
| 7  | Pangandaran   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan daerah pesisir pantai, merupakan ODTW Nasional dan memiliki Cagar Alam yang dilindungi.</li> <li>Ketinggian: 3-500 mdpl.</li> </ul>   |
| 8  | Kalipucang    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketinggian wilayah bervariasi antara 2-400 mdpl, dengan desa yang berada di dataran tinggi yakni Desa Ciparakan (400 mdpl) dan Emplak (160 mdpl).</li> <li>Daerah lainnya merupakan dataran rendah berkisar antara 2-8 mdpl.</li> </ul>   |
| 9  | Padaherang    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wilayah ini bukan pesisir.</li> <li>Ketinggian wilayah di Kecamatan Padaherang bervariasi antara 13-600 mdpl.</li> <li>Daerah yang berada di dataran tinggi yakni Desa Panyutran (600 mdpl) dan Bojongsari (245 mdpl).</li> <li>Sedangkan daerah lainnya merupakan dataran yang relatif sama berkisar antara 13-24 mdpl.</li> </ul> |
| 10 | Mangunjaya    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wilayah ini merupakan daerah bukan pesisir.</li> <li>Ketinggian wilayah di Kecamatan Mangunjaya relatif sama antara 13-17 mdpl.</li> </ul>  |

(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)



Jika dilihat dari kondisi atau tingkat kemiringan lerengnya, Kabupaten Pangandaran memiliki kemiringan lereng yang bervariasi antara 0% hingga lebih dari 40%. Kemiringan lereng yang besar terdapat di daerah perbukitan dan terdapat garis sesar di bagian tengah timur Kabupaten Pangandaran yang memanjang arah tenggara-barat laut sehingga kemiringan lerengnya sangat curam. Kondisi masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.3 Kondisi Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran**

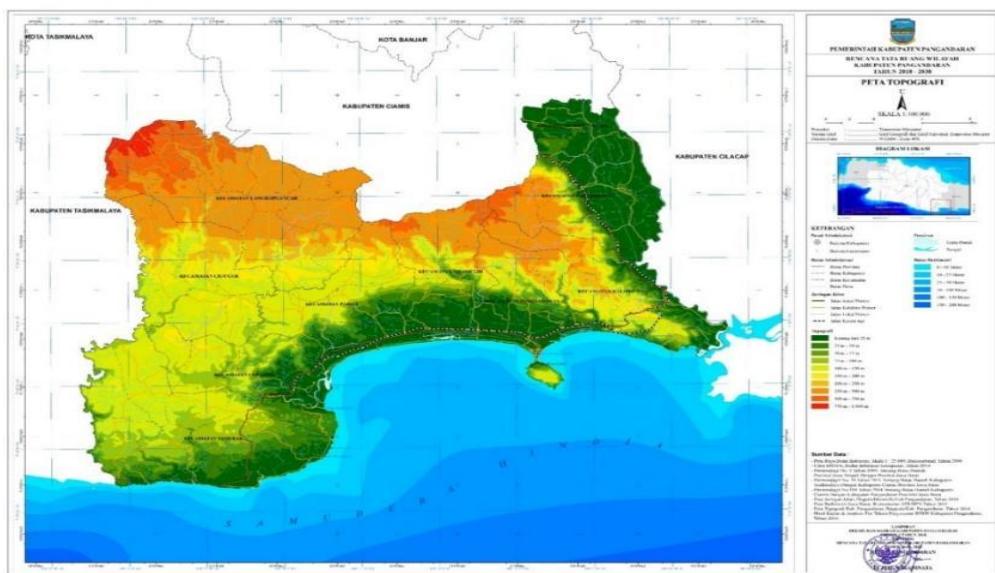
| No | Kecamatan     | Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran  |
|----|---------------|--|
| 1  | Cimerak       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kemiringan lereng merata pada hampir semua desa dengan Kemiringan lereng sekitar 5% - 15%.</li> </ul>   |
| 2  | Cijulang      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kemiringan lereng merata pada hampir semua desa dengan Kemiringan lereng sekitar 5% - 15%.</li> <li>Sebagian kecil wilayah di Desa Kertayasa dan Margacinta memiliki kemiringan lereng 15%-25%.</li> </ul>                                |
| 3  | Cigugur       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kemiringan lereng bervariasi antara 5% - lebih dari 40%.</li> <li>Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil Desa Harumandala dan Pagerbumi.</li> </ul>   |
| 4  | Langkaplancar | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kemiringan lereng bervariasi antara 5% - lebih dari 40%.</li> <li>Wilayah dengan Kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian besar Desa Jayasari, Pangkalan, Bojongkondang, Bangunjaya, Langkaplancar, dan Cimanggu.</li> </ul> |
| 5  | Parigi        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kemiringan lereng bervariasi antara 2% - lebih dari 40%.</li> <li>Wilayah dengan Kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil Desa Selasari.</li> </ul>  |
| 6  | Sidamulih     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kemiringan lereng bervariasi antara 2% - lebih dari 40%.</li> <li>Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil Desa Kalijati, Sidamulih, dan Kersaratu.</li> </ul>  |
| 7  | Pangandaran   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kemiringan lereng bervariasi antara 2% - lebih dari 40%.</li> <li>Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil Desa Pagergunung dan Sukahurip.</li> </ul>   |



| No | Kecamatan  | Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran  |
|----|------------|--|
| 8  | Kalipucang | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kemiringan lereng bervariasi antara 5% - lebih dari 40%.</li> <li>Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil wilayah Desa Putrapinggan.</li> </ul>  |
| 9  | Padaherang | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kemiringan lereng bervariasi antara 0%-40%.</li> <li>Wilayah pada bagian timur jalan provinsi hampir merata memiliki kemiringan lereng 0% - 8%.</li> <li>Wilayah pada bagian barat jalan provinsi memiliki Kemiringan lereng yang bervariasi antara 8% - lebih dari 40%.</li> </ul> |
| 10 | Mangunjaya | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kemiringan lereng merata hampir pada seluruh desa dengan kisaran kemiringan lereng antara 0% - 5%.</li> </ul>   |

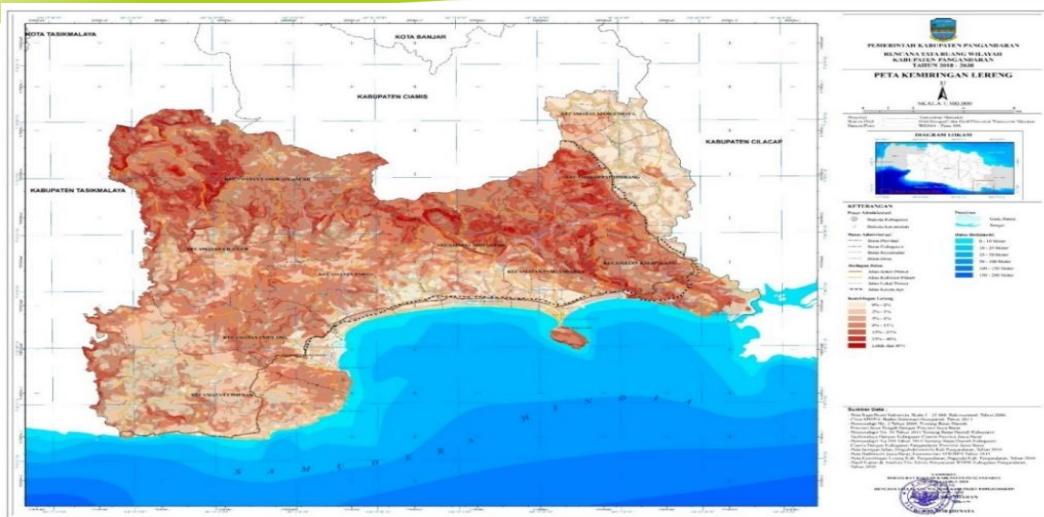
(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

Wilayah dengan kemiringan lereng >40% perlu dipertahankan tanaman tegakannya, karena jika ditebang akan berpotensi menimbulkan bencana longsor apabila tidak dikelola dengan baik. Gambaran sebaran topografi dan kemiringan lereng di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Sebagai gambaran topografi dan kemiringan lereng wilayah Kabupaten Pangandaran, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

**Gambar 2.3 Peta Topografi Kabupaten Pangandaran**

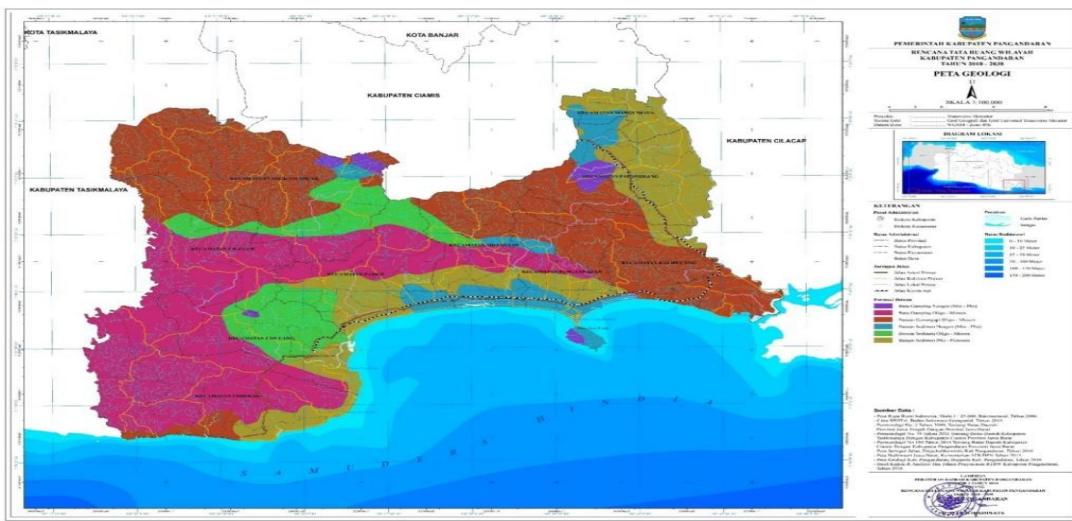


(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

**Gambar 2.4 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran**

#### 2.1.1.3 Kondisi Geologi

Menurut kondisi geologi, Kabupaten Pangandaran merupakan daratan yang terbentuk pada periode tersier kecuali pada pantai yang landai merupakan daratan baru yang terbentuk akibat endapan laut yang berumur holosen. Kontrol struktur geologi sangat kuat di daerah ini. Di bagian tengah - timur terdapat patahan yang memanjang sepanjang perbukitan dengan arah tenggara - barat laut. Di daerah ini juga banyak dijumpai adanya lipatan-lipatan batuan sehingga kontrol geologi sangat berperan besar di Kabupaten Pangandaran yang mengakibatkan daerah ini rawan gempa.



(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

**Gambar 2.5 Peta Geologi Kabupaten Pangandaran**



Satuan geologi yang terdapat di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dalam lingkungan tertentu, diantaranya:

1. Satuan Geologi Lingkungan Dataran: Satuan berupa dataran dengan kemiringan lereng < 5%. Ketinggian antara 0-50 m di atas permukaan air laut. Melempar di pesisir pantai antara Pangandaran - Parigi - Cijulang dan Kalipucang.
2. Satuan Geologi Lingkungan Perbukitan Terjal: Kemiringan lereng >25%, ketinggian antara 100 - 700 m di atas permukaan laut, tersusun oleh breksi, batu pasir, batuan beku, batu gamping, dan tufa. Menghampar di bagian tengah memanjang ke arah Barat Daya Tenggara dan sebagian kecil di Bukit Pananjung membagi dua bagian zona pemisah air. Adapun yang paling banyak dijumpai yaitu di Kecamatan Langkaplancar.
  - a. Perbukitan Terjal Padaherang-Kalipucang
    - 1) Tanah lapukan berupa lempung pasiran-kerikilan, pasir lempungan, tebal berkisar antara 10-50 cm, daya dukung sedang-tinggi, agak kompak-kompak, permeabilitas sedang, porositas sedang. Muka air tanah berkisar antara 3-10 m, debit sumur gali <5 l/detik. Mata air debit <10 l/detik. Kualitas air tanah baik, jernih, tidak bau, warna air agak kekuningan.
    - 2) Longsoran mudah terjadi pada bukit terjal daya dukung tinggi kompak dan keras. Peruntukan ruang sebaiknya untuk pengembangan hutan produksi dan yang lebih baik adalah untuk hutan lindung atau sebagai konservasi lahan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan baik pula untuk pengembangan komoditas perkebunan tanaman keras atau tanaman tahunan sebagai penguat tanah yang akan mengurangi gerakan tanah. Jalur jalan Kalipucang - Pangandaran bertumpu pada batuan yang kurang stabil. Sumber bahan galian terdiri atas batu belah lempung



sebagai bahan bata merah, tras, dan tanah urug serta batu kapur.

b. Perbukitan Terjal Pananjung

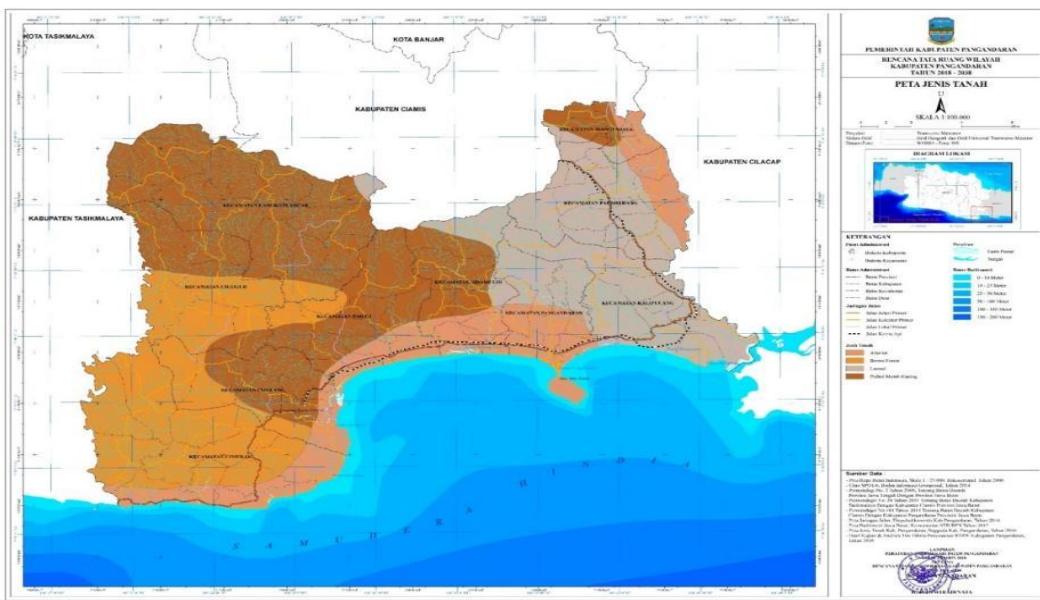
Saat ini merupakan cagar alam dan hutan lindung untuk kepentingan pelestarian alam sekaligus sebagai obyek wisata. Fungsi kawasan lindung sangat baik yang berfungsi sebagai daerah resapan.

3. Satuan Geologi Lingkungan Perbukitan Karst (Batu Gamping): Merupakan morfologi yang khas batu gamping, batu gamping pasiran, permukaan kasar dan kemiringan lereng curam. Morfologi ini terhampar cukup luas di sekitar Pangandaran- Cijulang-Parigi hingga Cimerak dan meluas ke utara yaitu Padaherang-Kalipucang, dan penting sebagai daerah resapan. Debit air mata air >50 l/detik. Tanah lapukan umumnya berupa lempung berkerikil yang sangat subur untuk budidaya pertanian pada lahan kering. Ketebalan umumnya <1 m daya dukung sedang sampai dengan tinggi. Badan jalan yang bertumpu pada batuan ini sering terjadi jalan yang amblas, karena jenis batuan ini sangat labil. Adapun jenis batuan di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.4 Jenis Batuan di Kabupaten Pangandaran**

| No           | Jenis Batuan                       | Luas (Ha)         |
|--------------|------------------------------------|-------------------|
| 1            | Batu Gamping Neogen (Mio - Plio)   | 1.649,77          |
| 2            | Batu Gamping Oligo - Miosen        | 35.296,43         |
| 3            | Batuan Gunungapi Oligo - Miosen    | 37.349,30         |
| 4            | Batuan Sedimen Neogen (Mio - Plio) | 6.869,57          |
| 5            | Batuan Sedimen Oligo - Miosen      | 11.800,95         |
| 6            | Batuan Sedimen Plio - Plistosien   | 20.358,12         |
| <b>Total</b> |                                    | <b>113.324,15</b> |

(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)



(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

**Gambar 2.6 Peta Sebaran Jenis Tanah Kabupaten Pangandaran**

Pada Kabupaten Pangandaran terdapat 4 jenis tanah yang berbeda, antara lain alluvial, brown forest, latosol, dan podsol merah kuning. Tanah alluvial merupakan jenis tanah yang masih muda, belum mengalami perkembangan, berasal dari bahan induk aluvium, tekstur beraneka ragam, belum terbentuk struktur, konsistensi dalam keadaan basah lekat. Penyebarannya di daerah dataran aluvial sungai, dataran aluvial pantai dan daerah cekungan (depresi).

Jenis tanah brown forest merupakan jenis tanah mineral yang telah mengalami perkembangan profil, solum agak tebal, warna agak coklat kekelabuan hingga hitam, kandungan organik tinggi, tekstur geluh berdebu, struktur remah, konsistensi gembur dan bersifat licin berminyak (*smeary*), dan peka terhadap erosi. Tanah ini berasal dari batuan induk abu atau tuff vulkanik.

Jenis tanah latosol telah berkembang atau terjadi diferensiasi horizon, kedalaman dalam, tekstur lempung, struktur remah hingga gumpal, konsistensi gembur hingga agak teguh, warna coklat merah hingga kuning. Penyebarannya di daerah beriklim basah, curah hujan



lebih dari 300-1000 meter, batuan induk dari tuff, material vulkanik, breksi batuan beku intrusi.

Jenis tanah podsol merah kuning merupakan tanah mineral yang telah berkembang, solum (kedalaman) dalam, tekstur lempung hingga berpasir, struktur gumpal, konsistensi lekat, bersifat agak asam (pH kurang dari 5.5), kesuburan rendah hingga sedang, dan peka erosi. Tanah tersebar di daerah beriklim basah tanpa bulan kering, curah hujan lebih dari 2.500 mm/tahun. Luasan jenis tanah di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.5 Jenis Tanah di Kabupaten Pangandaran**

| No           | Jenis Tanah         | Luas (Ha)         |
|--------------|---------------------|-------------------|
| 1            | Alluvial            | 17.789,60         |
| 2            | Brown Forest        | 26.458,61         |
| 3            | Latosol             | 25.848,21         |
| 4            | Podsol Merah Kuning | 43.228,93         |
| <b>Total</b> |                     | <b>113.325,35</b> |

(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

#### 2.1.1.4 Kondisi Hidrologi

Kabupaten Pangandaran dilalui oleh satu sungai besar, yaitu sungai Citanduy yang merupakan muara bagi beberapa sungai kecil dengan muara terakhir sungai Citanduy ini adalah Sagara Anakan. Sungai Citanduy ini mengalir dari Panumbangan sampai Kalipucang. Kabupaten Pangandaran berada dalam dua Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu, DAS Ciwulan-Cilaki dan DAS Citanduy. Luasan masing-masing DAS yang tercakup dalam wilayah Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.6 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Pangandaran**

| No            | Nama DAS             | Luas (Ha)         |
|---------------|----------------------|-------------------|
| 1             | DAS Ciwulan – Cilaki | 91.250,39         |
| 2             | DAS Citanduy         | 22.074,72         |
| <b>Jumlah</b> |                      | <b>113.325,11</b> |

(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)



(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW  
Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

**Gambar 2.7 Peta Batas DAS Kabupaten Pangandaran**

Hidrologi di Kabupaten Pangandaran dibedakan dalam 2 estimasi produktivitas air tanah, yaitu:

1. Akuifer dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir. Akuifer dengan produktifitas air sangat tinggi dengan kedalaman 10 meter terdapat pada fisiografi perbukitan bergelombang (lereng 15-40%). Komposisi litologi merupakan vulkan yang terdiri dari breksi gunung berapi, lava dan tufa, batu pasir, pasir tufaan, batu lanau, batu lempung sisipan lignit dan konglomerat. Akuifer ini terdapat di Kecamatan Pangandaran dan Parigi.
2. Akuifer dengan aliran melalui celahan, rekahan dan saluran. Akuifer ini terdapat dengan produktivitas sangat besar mencapai 10-100 liter/detik. Terdapat ada isiografi datar bergelombang dengan komposisi litologi alivium terdiri dari lempung, lanau, pasir dan kerikil. Penyebarannya terdapat di Kecamatan Cijulang dan Cimerak.

Air tanah dangkal di Kabupaten Pangandaran di kawasan pantai berasal langsung dari peresapan air hujan. Muka air tanah sangat



bervariasi berkisar antara 2-9 m, pH berkisar antara 6-9 menunjukkan angka yang cukup tinggi. Mata air banyak dijumpai di daerah kaki bukit di daerah batu camping dan breksi vulkanik. Debit mata air bervariasi di antara 0,2 liter/detik hingga 20 liter/detik bahkan ada juga yang mencapai 100 liter/detik.

Mata air di sekitar Kecamatan Cijulang dan Kecamatan Parigi sudah dimanfaatkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sekitar. Kabupaten Pangandaran memiliki sumber air baku (mata air) yang merupakan milik Pemerintah Daerah yaitu:

1. Mata air Kalisodong yang terdapat di Desa Selasari Kecamatan Parigi, Debit 105,0 C/det;
2. Mata air Guha Hawu yang terdapat di Desa Selasari Kecamatan Parigi, Debit 7,5 C/det;
3. Mata air Madasari yang terdapat di Desa Masawah Kecamatan Cimerak, Debit 7,5 C/det;
4. Mata air Cijumleng yang terdapat di Desa Cikalang Kecamatan Sidamulih, Debit 32,5 C/det.

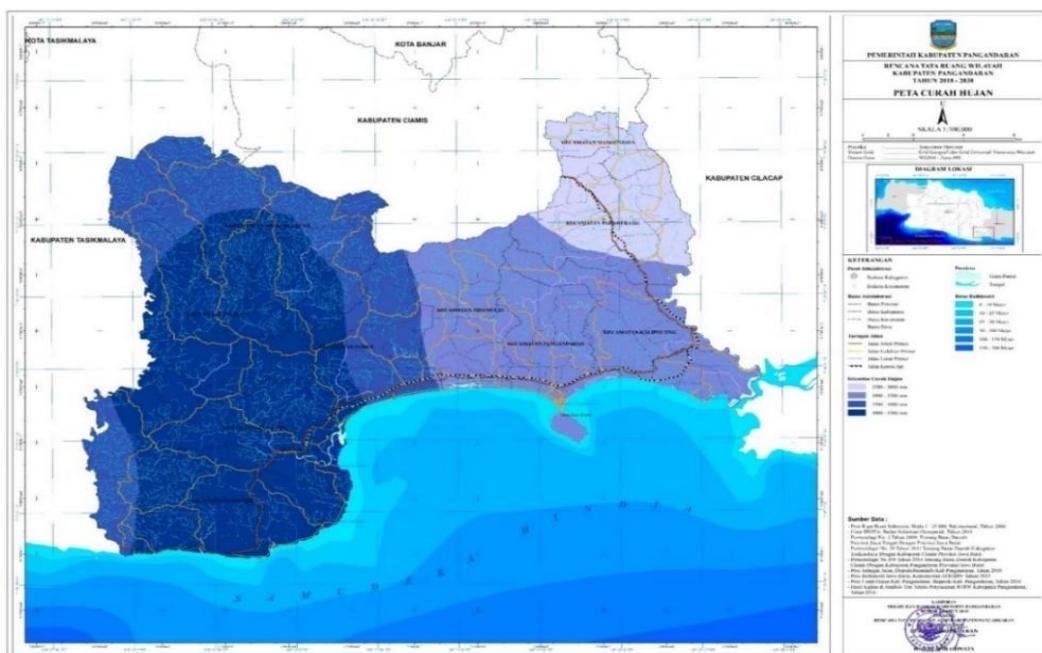
#### **2.1.1.5 Kondisi Klimatologi**

Secara umum Kabupaten Pangandaran beriklim tropis dengan 2 musim yaitu musim kemarau (musim timur) dan musim penghujan (musim barat) dengan curah hujan rata-rata per tahun sekitar 1.647 mm, kelembaban udara antara 85-89% dengan suhu 20-30<sup>0</sup> C. Musim timur dan musim barat secara langsung akan mempengaruhi musim penangkapan ikan di perairan Pangandaran.

Musim timur terjadi pada bulan Mei sampai Oktober, dimana pada saat musim ini laut tidak berombak besar dan perairan dalam keadaan tenang, sehingga operasi penangkapan ikan di laut tidak terganggu. Pada saat musim timur angin bersifat kering, karena membawa massa udara kering yang berdampak terjadi musim kemarau. Angin musim timur bergerak dari Australia ke Asia.



Pada saat musim barat angin bertiup dari wilayah Asia kemudian melewati samudra Hindia menuju ke benua Australia. Pada kondisi ini, kedudukan semu matahari berada di belahan bumi selatan dan akan menyebabkan tekanan tinggi di kawasan Asia termasuk Indonesia, namun tekanan menjadi rendah di kawasan Australia. Peta sebaran curah hujan Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

**Gambar 2.8 Peta Curah Hujan**

#### 2.1.1.6 Kondisi Penggunaan Lahan

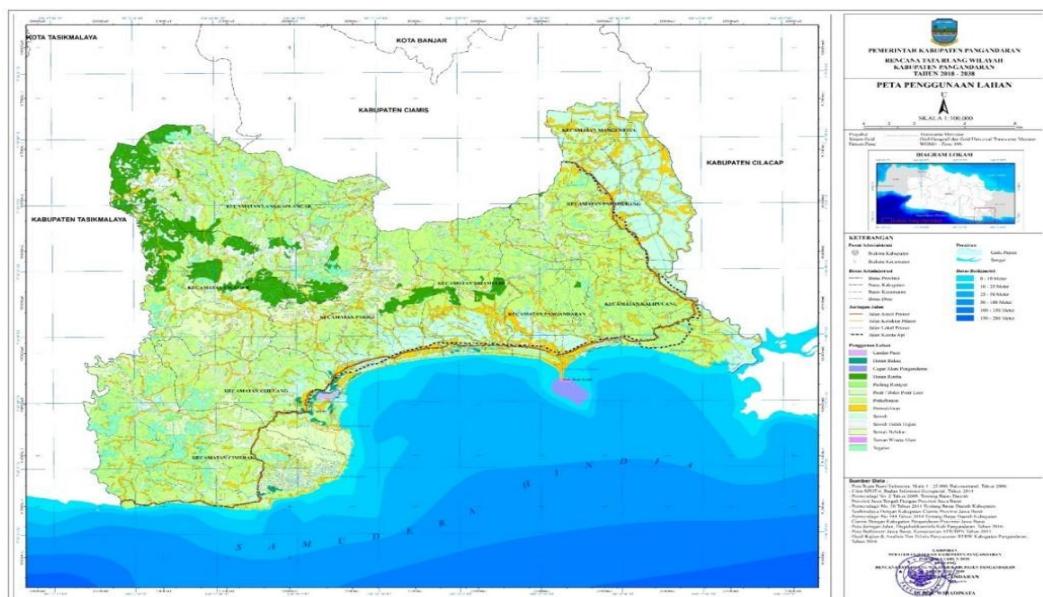
Penggunaan lahan di Kabupaten Pangandaran sangat bervariatif, karena Kabupaten Pangandaran merupakan Kabupaten yang cukup ramai perkembangan penduduknya. Penggunaan lahan terbesar yaitu penggunaan untuk lahan hutan rakyat yaitu seluas 30.202,04, kedua untuk lahan perkebunan negara atau swasta yaitu seluas kurang lebih 4.342,35 ha. Berikutnya penggunaan untuk lahan pekarangan dan bangunan seluas 24.678 Ha. Untuk lebih rinci penggunaan lahan di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel 2.7 Penggunaan Lahan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020**

| No                 | Penggunaan Lahan            | Luas (Ha)         |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1                  | Irigasi teknis              | 9.651,00          |
| 2                  | Irigasi setengah teknis     | 3.578,98          |
| 3                  | Irigasi sederhana PU        | 1.950,00          |
| 4                  | Irigasi sederhana Non PU    |                   |
| 5                  | Tadah hujan                 | 8.906,00          |
| 6                  | Pasang surut                | 9,00              |
| 7                  | Lebak                       | 607,00            |
| 8                  | Rawa                        | -                 |
| 9                  | Pekarangan dan bangunan     | 24.678,00         |
| 10                 | Tegal/kebun/ladang/huma     | 24.917,00         |
| 11                 | Penggembalaan/padang rumput | 1.758,00          |
| 12                 | Sementara tidak diusahakan  | 9.031,00          |
| 13                 | Hutan Rakyat                | 30.202,04         |
| 14                 | Hutan Negara                | 17.047,56         |
| 15                 | Hutan Mangrove              | 310,00            |
| 16                 | Perkebunan negara/swasta    | 4.342,35          |
| 17                 | Rawa yang ditanami          | -                 |
| 18                 | Tambak                      | -                 |
| 19                 | Kolam/empang                | 13.272,00         |
| 20                 | Lain-lain                   | -                 |
| <b>Grand Total</b> |                             | <b>150.259,93</b> |

(Sumber: LKPJ Kab. Pangandaran, 2020)



(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

**Gambar 2.9 Peta Penggunaan Lahan**

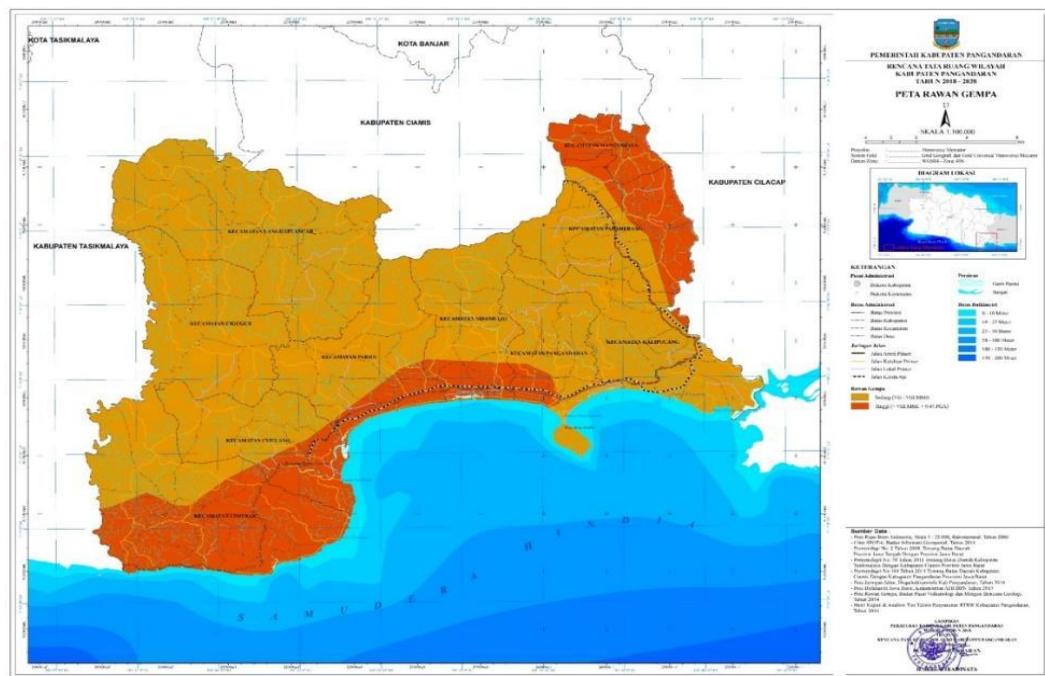


### 2.1.1.7 Kondisi Rawan Bencana

Kabupaten Pangandaran merupakan wilayah yang rawan terhadap kejadian bencana alam. Kejadian bencana alam sering terjadi di sebagian besar wilayah Kabupaten Pangandaran. Beberapa jenis bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Pangandaran antara lain tsunami, gempa bumi, longsor, dan banjir. Tsunami rawan terjadi karena wilayah selatan Kabupaten Pangandaran berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, sementara banjir sering terjadi karena wilayah Kabupaten Pangandaran dilewati sungai besar dengan debit air yang cukup tinggi. Gempa bumi juga rawan terjadi karena terdapat patahan-patahan di wilayah Kabupaten Pangandaran, sementara bencana longsor dapat terjadi akibat jenis tanah yang memang rawan dan kemiringan terjal di beberapa tempat di Kabupaten Pangandaran.

#### 1. Rawan Bencana Gempa Bumi Tektonik dan Tsunami

Di bagian tengah-timur Pangandaran terdapat patahan yang memanjang sepanjang perbukitan dengan arah tenggara-barat laut. Di daerah ini juga banyak dijumpai adanya lipatan-lipatan batuan sehingga kontrol geologi sangat berperan besar di Kabupaten Pangandaran yang mengakibatkan daerah ini rawan gempa. Letak Kabupaten Pangandaran yang rawan gempa dan berbatasan langsung dengan laut mengakibatkan Kabupaten Pangandaran juga sangat rawan terkena bencana tsunami.



(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

## Gambar 2.10 Peta Rawan Gempa

Pantai Pangandaran yang berbentuk teluk dan memanjang dengan kemiringan lereng yang landai menjadi semacam “kantung tsunami” sehingga kawasan pesisirnya rawan bencana tsunami. Berikut adalah luasan wilayah Kabupaten Pangandaran yang rawan gempa dan tsunami. Berikut tabel luasan potensi gempa dan tsunami di Kabupaten Pangandaran:

**Tabel 2.8 Luasan Potensi Gempa di Kabupaten Pangandaran**

| No           | Kerawanan Gempa | Luas (Ha)         |
|--------------|-----------------|-------------------|
| 1            | MMI. VII – VIII | 84.879,54         |
| 2            | MMI. > VII      | 28.445,56         |
| <b>Total</b> |                 | <b>113.325,10</b> |

(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

Tabel diatas menunjukan bahwa potensi terbesar gempa di Kabupaten Pangandaran berada di skala MMI. VII – VIII dengan luas wilayah sebesar 84.879,54 Ha. Sedangkan 28.445,56 Ha ada di skala MMI. > VII.

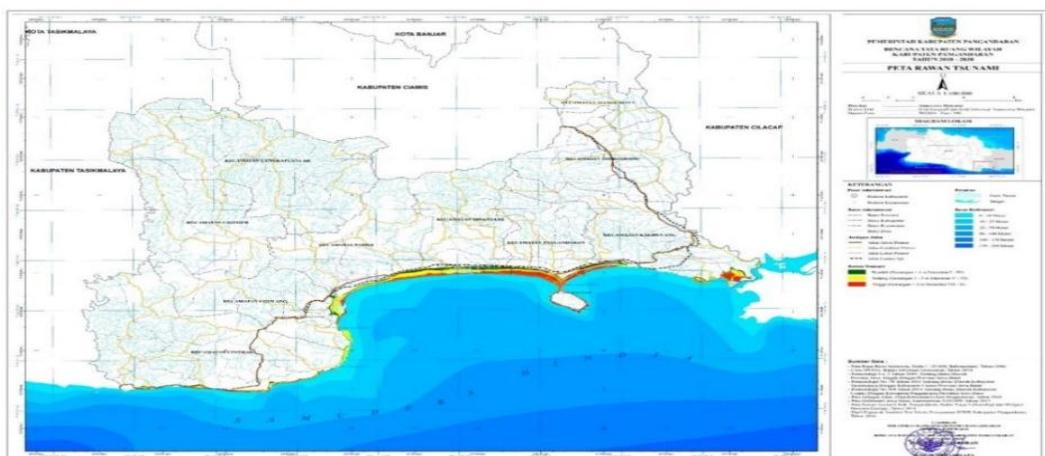


**Tabel 2.9 Luasan Potensi Tsunami di Kabupaten Pangandaran**

| No | Kerawanan Tsunami         | Luas (Ha)       |
|----|---------------------------|-----------------|
| 1  | Zona Rawan Rendah Total   | 691,25          |
| 2  | Zona Rawan Menengah Total | 1.148,45        |
| 3  | Zona Rawan Tinggi Total   | 1.425,42        |
|    | <b>Total</b>              | <b>3.265,12</b> |

(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

Tabel diatas menunjukkan bahwa total luasan potensi tsunami di Kabupaten Pangandaran sebesar 3.265,12 Ha. Luas potensi tsunami ini dibagi menjadi 3 (tiga) zona, yakni zona rawan rendah total dengan luas sebesar 691,25 Ha, zona rawan menengah total dengan luas sebesar 1.148,45 Ha, dan zona rawan tinggi total dengan luas sebesar 1.425,42 Ha.



(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

**Gambar 2.11 Peta Rawan Tsunami**

## 2. Rawan Bencana Gerakan Tanah

Kondisi tanah yang tidak stabil dan kemiringan lereng yang besar mengakibatkan daerah perbukitan Pangandaran rawan bencana gerakan tanah. Curah hujan tinggi serta alih fungsi lahan di daerah perbukitan juga menjadi faktor penyebab meningkatnya potensi gerakan tanah. Daerah perbukitan dengan kemiringan lereng yang besar sebaiknya dikelola dan dikonservasi dengan baik. Dengan adanya kawasan-kawasan yang rawan gerakan tanah, berarti lahan permukiman harus berada pada tingkat kemiringan lereng yang rendah. Potensi gerakan tanah di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut.

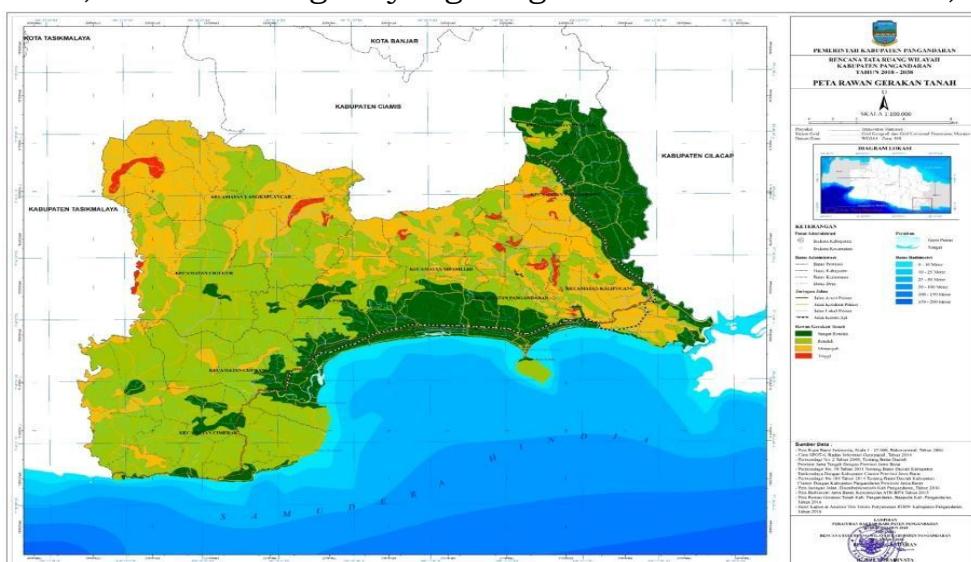


**Tabel 2.10 Luasan Potensi Gerakan Tanah di Kabupaten Pangandaran**

| No           | Kerawanan Gerakan Tanah | Luas (Ha)         |
|--------------|-------------------------|-------------------|
| 1            | Sangat Rendah           | 25.774,32         |
| 2            | Rendah                  | 51.309,74         |
| 3            | Menengah                | 34.519,48         |
| 4            | Tinggi                  | 1.721,57          |
| <b>Total</b> |                         | <b>113.325,11</b> |

(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

Dari tabel diatas menunjukan bahwa total luasan potensi gerakan tanah di Kabupaten Pangandaran sebesar 113.325,11 Ha. Hampir separuh dari luas total tersebut Kabupaten Pangandaran memiliki tingkat kerawanan gerakan tanah yang rendah yakni sebesar 51.309,74 Ha dan tingkat yang sangat rendah sebesar 25.774,32 Ha.



(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

**Gambar 2.12 Peta Pergerakan Tanah**

### 3. Rawan Bencana Banjir

Wilayah Kabupaten Pangandaran yang berupa dataran rendah merupakan hasil proses pengendapan material laut dan sungai sehingga sesuai kodrat alam, daerah yang dekat dengan sungai merupakan daerah dataran banjir yang selalu tergenang jika debit air sungai meningkat. Dataran banjir ini adalah daerah yang cukup subur namun tidak dapat



dikembangkan secara maksimal. Berikut adalah luasan wilayah Kabupaten Pangandaran yang rawan banjir.

**Tabel 2.11 Luasan Potensi Bencana Banjir di Kabupaten Pangandaran**

| No | Kerawanan Banjir   | Luas (Ha)         |
|----|--------------------|-------------------|
| 1  | Tidak Rawan Banjir | 95.144,98         |
| 2  | Rawan Banjir       | 18.180,35         |
|    | <b>Total</b>       | <b>113.325,33</b> |

(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

Berdasarkan tabel diatas Kabupaten Pangandaran memiliki luas wilayah 18.180,35 Ha yang berpotensi mengalami bencana banjir. Meskipun sedikit namun daerah rawan banjir ini hendaknya segera diminimalisir untuk mengurangi dampak yang terjadi kedepannya.

### 2.1.2 Aspek Demografi

Pada sub bab aspek demografi akan menjelaskan secara umum keadaan demografi di Kabupaten Pangandaran. Adapun yang dibahas dalam sub bab ini adalah mengenai jumlah penduduk, kepadatan penduduk, komposisi penduduk, jumlah penduduk berdasarkan pendidikan hingga jumlah penduduk yang bekerja.

Data disajikan dengan prinsip legal formal dan diperoleh dari instansi yang berwenang. Artinya bahwa data yang tersaji betul-betul langsung salah satunya dari aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan berdasarkan kartu identitas/KTP. Namun terkadang informasi dalam KTP tidak sesuai dengan kondisi saat ini yang dapat diakibatkan tidak diupdatenya kartu identitas/KTP oleh pemegangnya sehingga mengakibatkan perbedaan data dengan kenyataan di lapangan.



### 2.1.2.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2020 yaitu 426.483 jiwa. Dari jumlah tersebut proporsi penduduk laki-laki dan perempuan terlihat hampir seimbang yaitu 212.910 dan 213.573 jiwa.

Berdasarkan KK, jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Padaherang dengan KK sebanyak 25.435 KK, sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Cigugur dengan KK sebanyak 8.391 KK. Kecamatan Parigi sebagai ibukota kabupaten memiliki penduduk dengan KK sebanyak 17.730 KK. Pada tabel berikut dapat dilihat jumlah penduduk, kepadatan, dan jumlah KK di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2020.

**Tabel 2.12 Jumlah Penduduk, dan Jumlah KK di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020**

| No            | Kecamatan     | Penduduk (Jiwa) |                | Jumlah (Jiwa)  | Jumlah (KK)    |
|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |               | Laki-Laki       | Perempuan      |                |                |
| 1             | Parigi        | 22.954          | 23.385         | 46.339         | 17.541         |
| 2             | Cijulang      | 13.751          | 14.163         | 27.914         | 10.596         |
| 3             | Cimerak       | 24.849          | 24.684         | 49.533         | 17.780         |
| 4             | Cigugur       | 11.712          | 11.357         | 23.069         | 8.273          |
| 5             | Langkaplancar | 26.087          | 25.495         | 51.582         | 17.972         |
| 6             | Mangunjaya    | 16.524          | 16.521         | 33.045         | 11.705         |
| 7             | Padaherang    | 34.653          | 34.485         | 69.138         | 24.740         |
| 8             | Kalipucang    | 19.603          | 19.386         | 38.989         | 13.887         |
| 9             | Pangandaran   | 29.586          | 29.290         | 58.876         | 20.674         |
| 10            | Sidamulih     | 14.822          | 14.935         | 29.757         | 11.191         |
| <b>Jumlah</b> |               | <b>214.541</b>  | <b>213.701</b> | <b>428.242</b> | <b>154.359</b> |

(Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pangandaran, Semester 2 Tahun 2020)

### 2.1.2.2 Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk ini dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk dengan luas wilayah. Pada tahun 2020, penyebaran penduduk Kabupaten Pangandaran bervariasi antar Kecamatan, mulai dari yang terendah sebesar 194,07 jiwa per kilometer persegi yaitu di Kecamatan Cigugur yang luas wilayahnya 117,82 kilometer persegi, dan kepadatan penduduk terendah kedua yaitu Kecamatan Langkaplancar dengan tingkat kepadatan 250,23 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan



kepadatan penduduk tertinggi yaitu di Kecamatan Mangunjaya dengan kepadatan 1.036,73 jiwa per kilometer persegi, dan tertinggi kedua yaitu di Kecamatan Pangandaran dengan kepadatan 766,34 jiwa per kilometer persegi dari luas wilayah 75,57 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 57.913 jiwa. Berikut ini gambaran luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.

**Tabel 2. 13 Persentase Penyebaran Penduduk Per-Kecamatan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020**

| No            | Kecamatan     | Luas Wilayah<br>(Km2) | Jumlah<br>Penduduk | Kepadatan<br>Penduduk |
|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|               |               |                       | (Jiwa)             | (Jiwa)                |
| [1]           | [2]           | [3]                   | [4]                | [5]                   |
| 1             | Parigi        | 111,23                | 46.339             | 416,61                |
| 2             | Cijulang      | 94,37                 | 27.914             | 295,79                |
| 3             | Cimerak       | 190,22                | 49.533             | 260,40                |
| 4             | Cigugur       | 117,82                | 23.069             | 195,80                |
| 5             | Langkaplancar | 205,54                | 51.582             | 250,96                |
| 6             | Mangunjaya    | 31,98                 | 33.045             | 1.033,30              |
| 7             | Padaherang    | 112,76                | 69.138             | 613,14                |
| 8             | Kalipucang    | 104,27                | 38.989             | 373,92                |
| 9             | Pangandaran   | 75,57                 | 58.876             | 779,09                |
| 10            | Sidamulih     | 90,47                 | 29.757             | 328,92                |
| <b>Jumlah</b> |               | <b>1.134,23</b>       | <b>428.242</b>     | <b>377,56</b>         |

(Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pangandaran, Semester 2 Tahun 2020)

### 2.1.2.3 Komposisi Penduduk

Penduduk merupakan objek sasaran pembangunan sekaligus sebagai subjek pelaku pembangunan yang turut berperan dalam menentukan arah dan keberhasilan pembangunan. Potensi dan tantangan pembangunan daerah turut ditentukan oleh keadaan riil kependudukan dan sumber daya alam yang dimiliki daerah. Oleh karenanya pembangunan daerah harus menempatkan penduduk sebagai titik sentral dari seluruh kebijakan pembangunan yang dilakukan. Komposisi jumlah penduduk berdasarkan struktur usia mulai dari usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas, komposisi ini menggambarkan angka beban ketergantungan (*dependency ratio*), hal



tersebut dapat menggambarkan semakin banyak jumlah penduduk yang produktif semakin rendah angka ketergantungannya dan sebaliknya. Untuk lebih jelasnya angka komposisi penduduk di Kabupaten Pangandaran tahun 2020 seperti pada tabel berikut:

**Tabel 2.14 Struktur Usia Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pangandaran Tahun 2020**

| No            | Struktur Usia | Laki-Laki<br>(Jiwa) | Perempuan<br>(Jiwa) | Jumlah (Jiwa)  |
|---------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1             | 0-4           | 14.095              | 13.170              | 27.265         |
| 2             | 05-09         | 16.564              | 15.368              | 31.932         |
| 3             | 10-14         | 17.457              | 16.326              | 33.783         |
| 4             | 15-19         | 15.977              | 15.555              | 31.532         |
| 5             | 20-24         | 17.777              | 16.800              | 34.577         |
| 6             | 25-29         | 16.626              | 15.739              | 32.365         |
| 7             | 30-34         | 14.536              | 13.988              | 28.524         |
| 8             | 35-39         | 14.961              | 15.169              | 30.130         |
| 9             | 40-44         | 14.297              | 15.115              | 29.412         |
| 10            | 45-49         | 14.752              | 15.837              | 30.589         |
| 11            | 50-54         | 14.264              | 15.479              | 29.743         |
| 12            | 55-59         | 12.990              | 13.886              | 26.876         |
| 13            | 60-64         | 11.392              | 11.892              | 23.284         |
| 14            | 65-69         | 8.228               | 7.585               | 15.813         |
| 15            | 70-74         | 4.938               | 5.173               | 10.111         |
| 16            | 75+           | 5.687               | 6.619               | 12.306         |
| <b>Jumlah</b> |               | <b>214.541</b>      | <b>213.701</b>      | <b>428.242</b> |

(Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pangandaran, Semester 2 Tahun 2020)

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan diantaranya terlihat pada komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 ke atas) yang



berarti semakin rendahnya angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) karena semakin kecil angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya serta mengembangkan kemampuan pada segala bidang. Tabel di bawah ini menyajikan angka beban ketergantungan penduduk.

**Tabel 2.15 Angka Beban Ketergantungan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020**

| No | Jenis Kelamin | Usia Produktif | Usia Tidak Produktif |               | Dependency Ratio |
|----|---------------|----------------|----------------------|---------------|------------------|
|    |               | (15 – 64)      | 0 - 14               | 65 +          |                  |
| 1  | Laki-laki     | 147.572        | 48.116               | 18.853        | 48.129           |
| 2  | Perempuan     | 149.460        | 44.864               | 19.377        | 44.877           |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>297.032</b> | <b>92.980</b>        | <b>38.230</b> | <b>92.993</b>    |

(Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pangandaran, Semester 2 Tahun 2020)

Tampak angka beban tanggungan telah kurang dari 50%. Hal ini berarti telah memasuki periode bonus demografi. Bila bonus demografi dimanfaatkan secara baik maka akan membuka *window of opportunity*. Kesempatan untuk mempercepat roda ekonomi menjadi lebih besar karena berlimpah nya penduduk usia produktif. Namun, bila periode bonus demografi tersebut tidak termanfaatkan maka bukan *window of opportunity* yang diperoleh tetapi yang ada bencana sosial. Tingkat pengangguran, kemiskinan dan kriminalitas bisa jadi meningkat. Bonus demografi yang disertai pembangunan manusia akan memberi dampak besar bagi kemajuan daerah. Usia produktif secara bersama-sama menggerakkan roda ekonomi. Hal ini dapat berdampak pada pengangguran berkurang dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Pada akhirnya, puncak bonus demografi dan produktivitas penduduk diharapkan mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Tersedianya lapangan kerja akan mencegah sumber daya manusia berpendidikan tinggi mencari dan pindah ke Kabupaten lain. Semakin banyak sumber daya manusia berkualitas tinggal di daerahnya maka keberhasilan pembangunan manusia semakin kentara. Terkait dengan besarnya angka ketergantungan akan



mengurangi keluasan pilihan bagi usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap turun dan naiknya angka IPM.

#### 2.1.2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk suatu daerah akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) karena salah satu faktor dalam IPM yaitu Pendidikan, yang merupakan gabungan dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Makin banyak jumlah penduduk yang bersekolah dan menamatkan pendidikannya maka akan mendongkrak nilai Indeks Pendidikan.

Untuk lebih jelasnya kondisi penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pangandaran 2020**

| NO     | STATUS PENDIDIKAN                | JENIS KELAMIN |           |         |
|--------|----------------------------------|---------------|-----------|---------|
|        |                                  | LAKI-LAKI     | PEREMPUAN | JUMLAH  |
| 1      | Tidak/Blm Sekolah                | 53.281        | 49.846    | 103.127 |
| 2      | Belum Tamat SD/Sederajat         | 15.694        | 14.360    | 30.054  |
| 3      | Tamat SD/Sederajat               | 78.841        | 90.160    | 169.001 |
| 4      | SLTP/Sederajat                   | 34.467        | 32.801    | 67.268  |
| 5      | SLTA/Sederajat                   | 25.126        | 19.376    | 44.502  |
| 6      | Diploma I/II                     | 845           | 875       | 1.720   |
| 7      | Akademi/Diploma III/Sarjana Muda | 1.068         | 1.329     | 2.397   |
| 8      | Diploma IV/Strata I              | 4.791         | 4.756     | 9.547   |
| 9      | Strata-II                        | 407           | 188       | 595     |
| 10     | Strata-III                       | 21            | 10        | 31      |
| Jumlah |                                  | 214.541       | 213.701   | 428.242 |

(Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pangandaran, Semester 2 Tahun 2020)

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran yang telah menamatkan pendidikan sampai jenjang



pendidikan strata 1 sebanyak 9.169 orang, tingkat Diploma I dan II sebesar 1.765 orang , SLTA/Sederajat sebesar 43.869 orang dan SLTP/Sederajat sebesar 67.124 orang. Hal tersebut menggambarkan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Pangandaran mulai meningkat jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tidak/belum sekolah sebanyak 96.524 orang. Dari capaian tersebut maka menghasilkan Indeks Pendidikan sebesar 59,33. Angka dimaksud masih rendah apabila dibandingkan dengan Indeks Pendidikan Kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat sehingga perlu ada program pemerintah daerah untuk mendongkrak angka Indeks Pendidikan Kabupaten Pangandaran.

#### **2.1.2.5 Jumlah Penduduk yang Bekerja**

Dalam bidang ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan, selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun, sehingga angka pengangguran dapat dikurangi dengan semakin banyaknya angka pengangguran yang tersalurkan pada lapangan kerja yang tersedia.

Pada bidang ketenagakerjaan, indikator kesempatan kerja (*demand for labour*) merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan/lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan



atas tenaga kerja. Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif sebagai sumber daya manusia. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

**Tabel 2.17 Data Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Usaha  
Kabupaten Pangandaran Tahun 2020**

| NO  | Pekerjaan                        | Jumlah Orang |           | Jumlah<br>(Orang) |
|-----|----------------------------------|--------------|-----------|-------------------|
|     |                                  | Laki-Laki    | Perempuan |                   |
| 1.  | Belum/tidak bekerja              | 74.726       | 62.248    | 136.974           |
| 2.  | Mengurus rumah tangga            | 30           | 89.982    | 90.012            |
| 3.  | Pelajar/mahasiswa                | 15.052       | 12.146    | 27.198            |
| 4.  | Pensiunan                        | 1.492        | 662       | 2.154             |
| 5.  | Pegawai Negeri Sipil (PNS)       | 2.253        | 1.767     | 4.020             |
| 6.  | Tentara Nasional Indonesia (TNI) | 152          | 1         | 153               |
| 7.  | Kepolisian (Polri)               | 196          | 3         | 199               |
| 8.  | Perdagangan                      | 1.806        | 1.197     | 3.003             |
| 9.  | Petani/pekebun                   | 41.379       | 22.564    | 63.943            |
| 10. | Peternak                         | 75           | 18        | 93                |
| 11. | Nelayan/perikanan                | 2.370        | 32        | 2.402             |
| 12. | Industri                         | 115          | 13        | 128               |
| 13. | Konstruksi                       | 24           | 3         | 27                |
| 14. | Transportasi                     | 155          | -         | 155               |
| 15. | Karyawan swasta                  | 6.044        | 2.252     | 8.296             |
| 16. | Karyawan BUMN                    | 328          | 47        | 375               |
| 17. | Karyawan BUMD                    | 58           | 20        | 78                |
| 18. | Karyawan honorer                 | 1.355        | 1.590     | 2.945             |
| 19. | Buruh harian lepas               | 13.469       | 1.972     | 15.441            |
| 20. | Buruh tani/perkebunan            | 14.243       | 6.347     | 20.590            |
| 21. | Buruh nelayan/perikanan          | 891          | 46        | 937               |
| 22. | Buruh peternakan                 | 61           | 21        | 82                |
| 23. | Pembantu rumah tangga            | 4            | 374       | 378               |
| 24. | Tukang cukur                     | 30           | -         | 30                |
| 25. | Tukang listrik                   | 24           | 1         | 25                |
| 26. | Tukang batu                      | 144          | 2         | 146               |
| 27. | Tukang kayu                      | 644          | -         | 644               |
| 28. | Tukang sol sepatu                | 8            | 1         | 9                 |
| 29. | Tukang las/pandai besi           | 89           | 1         | 90                |
| 30. | Tukang jahit                     | 473          | 316       | 789               |
| 31. | Tukang gigi                      | 4            | -         | 4                 |
| 32. | Penata rias                      | 3            | 42        | 45                |
| 33. | Penata busana                    | -            | 2         | 2                 |



| NO  | Pekerjaan                   | Jumlah Orang |           | Jumlah<br>(Orang) |
|-----|-----------------------------|--------------|-----------|-------------------|
|     |                             | Laki-Laki    | Perempuan |                   |
| 34. | Penata rambut               | 5            | 6         | 11                |
| 35. | Mekanik                     | 335          | 1         | 336               |
| 36. | Seniman                     | 60           | 16        | 76                |
| 37. | Tabib                       | 6            | -         | 6                 |
| 38. | Paraji                      | 1            | 56        | 57                |
| 39. | Perancang busana            | 2            | -         | 2                 |
| 40. | Penerjemah                  | 2            | -         | 2                 |
| 41. | Imam masjid                 | 105          | -         | 105               |
| 42. | Pendeta                     | 2            | 1         | 3                 |
| 43. | Pastor                      | -            | -         | -                 |
| 44. | Wartawan                    | 19           | -         | 19                |
| 45. | Ustadz/mubaligh             | 269          | 37        | 306               |
| 46. | Juru masak                  | 1            | 6         | 7                 |
| 47. | Promotor acara              | -            | -         | -                 |
| 48. | Anggota DPR RI              | -            | -         | -                 |
| 49. | Anggota DPD RI              | -            | -         | -                 |
| 50. | Anggota BPK                 | -            | -         | -                 |
| 51. | Presiden                    | -            | -         | -                 |
| 52. | Wakil Presiden              | -            | -         | -                 |
| 53. | Anggota Mahkamah Konstitusi | -            | -         | -                 |
| 54. | Anggota Kabinet Kementerian | -            | -         | -                 |
| 55. | Duta Besar                  | -            | -         | -                 |
| 56. | Gubernur                    | -            | -         | -                 |
| 57. | Wakil Gubernur              | -            | -         | -                 |
| 58. | Bupati                      | 1            | -         | 1                 |
| 59. | Wakil Bupati                | 1            | -         | 1                 |
| 60. | Walikota                    | -            | -         | -                 |
| 61. | Wakil Wali Kota             | -            | -         | -                 |
| 62. | Anggota DPRD Provinsi.      | 2            | -         | 2                 |
| 63. | Anggota DPRD Kabupaten/Kota | 32           | 8         | 41                |
| 64. | Dosen                       | 18           | 13        | 31                |
| 65. | Guru                        | 394          | 584       | 978               |
| 66. | Pilot                       | -            | -         | -                 |
| 67. | Pengacara                   | 4            | -         | 4                 |
| 68. | Notaris                     | 3            | 1         | 4                 |
| 69. | Arsitek                     | 3            | -         | 3                 |
| 70. | Akuntan                     | 1            | -         | 1                 |
| 71. | Konsultan                   | 11           | 3         | 14                |
| 72. | Dokter                      | 30           | 31        | 61                |
| 73. | Bidan                       | -            | 219       | 219               |
| 74. | Perawat                     | 76           | 86        | 162               |
| 75. | Apoteker                    | 6            | 12        | 18                |
| 76. | Psikiater/psikolog          | -            | -         | -                 |
| 77. | Penyiar televisi            | -            | -         | -                 |
| 78. | Penyiar radio               | 1            | 2         | 3                 |
| 79. | Pelaut                      | 44           | -         | 44                |
| 80. | Peneliti                    | 4            | -         | 4                 |
| 81. | Sopir                       | 1.231        | -         | 1.231             |
| 82. | Pialang                     | 4            | 2         | 6                 |



| No     | Pekerjaan          | Jumlah Orang   |                | Jumlah<br>(Orang) |
|--------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|
|        |                    | Laki-Laki      | Perempuan      |                   |
| 83.    | Paranormal         | 1              | -              | 1                 |
| 84.    | Pedagang           | 3.071          | 2.637          | 5.708             |
| 85.    | Perangkat Desa     | 947            | 190            | 1.137             |
| 86.    | Kepala Desa        | 76             | 1              | 77                |
| 87.    | Biarawan/biarawati | -              | -              | -                 |
| 88.    | Wiraswasta         | 30.057         | 6.090          | 36.147            |
| 89.    | Pekerjaan lainnya  | 19             | 28             | 47                |
| Jumlah |                    | <b>214.541</b> | <b>213.701</b> | <b>428.242</b>    |

(Sumber: Disdukcapil Kab. Pangandaran, Semester 2 Tahun 2020)

Data dimaksud merupakan gambaran jenis pekerjaan yang diajukan oleh penduduk saat pengurusan KTP, sehingga ada kemungkinan tidak menggambarkan kondisi riil dikarenakan tidak adanya updating pekerjaan pada KTP yang disampaikan kepada Disdukcapil.

Berdasarkan Tabel 2.17, dapat disampaikan bahwa masih relatif tingginya jumlah yang belum dan atau tidak bekerja mengindikasikan bahwa usia yang masih belum siap bekerja (anak-anak) dan angkatan kerja yang cukup besar kurang lebih sebesar 130,149 orang dari total penduduk Kabupaten Pangandaran. Hal tersebut menggambarkan yang masuk pada usia kerja masih belum terserap secara maksimal oleh sektor-sektor produksi, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang masih kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang masih rendah. Oleh karenanya, upaya peningkatan kualitas SDM bagi penduduk menjadi mutlak terus difungsikan, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Karena investasi pada “*human capital*” ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian di Kabupaten Pangandaran.

Adapun data secara khusus mengenai ketenagakerjaan dapat ditampilkan sebagai berikut :

**Tabel 2.18 Data Ketenagakerjaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020**

| No | Item   | Jumlah |
|----|--|--------|
| 1  | Jumlah pencari kerja yang dilatih (BLK, LPK, Swasta dan Perangkat Daerah/PD lainnya) | 260    |
| 2  | Jumlah data BLK, LPK Swasta dan kejuruananya   | 9      |
| 3  | Jumlah pencari kerja yang terdaftar(laki-laki dan perempuan)                         | 1.833  |



| No | Item   | Jumlah                 |
|----|--|------------------------|
| 4  | Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang bekerja   | 649                    |
| 5  | Jumlah pencari kerja yang bersertifikat  | 550                    |
| 6  | Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (dalam negeri dan luar negeri)                                    | LN : 59<br>DN : 649    |
| 7  | Data perusahaan penempatan migran indonesia(P2MI) dan sending dan organization(SO untuk negara tujuan) | 14                     |
| 8  | Rencana ketenagakerjaan Kabupaten/Kota   | 1                      |
| 9  | Jumlah tenaga kerja yang dirumahkan dan PHK  | 1.114                  |
| 10 | Data perusahaan yang mulai operasi Kembali   | 384                    |
| 11 | Angka perselisihan hubungan industrial antar pekerja dan perusahaan                                    | 5                      |
| 12 | Jumlah perselisihan industrial yang diselesaikan   | 5                      |
| 13 | Kepesertaan sistem jaminan sosial (Ketenagakerjaan dan Kesehatan)                                      | Ket :1078<br>Kes :3841 |

(Sumber : Disnakertrans Kabupaten Pangandaran Tahun, 2020)

Dari tabel diatas terlihat bahwa kualitas tenaga kerja di Kabupaten Pangandaran cukup baik yaitu ada 550 orang pencari kerja yang bersertifikat. Peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja harus terus dilakukan sebagai upaya penanggulangan pengangguran di Kabupaten Pangandaran. Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya pemberian pelatihan terhadap pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Perluasan kesempatan kerja masih tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, diantaranya melalui kegiatan pemberian kerja sementara di desa (padat karya) dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Masih rendahnya kesadaran warga untuk pemutakhiran data status pekerjaan juga dapat dilihat dari data jumlah penduduk dengan pekerjaan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran sebagai berikut:

**Tabel 2.19 Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021**

| Instansi     | Pendidik |         | Tenaga Kependidikan |         | Kepsek | Jumlah      |
|--------------|----------|---------|---------------------|---------|--------|-------------|
|              | PNS      | NON PNS | PNS                 | NON PNS |        |             |
| SD NEGERI    | 1171     | 949     | 8                   | 217     | 220    | 2565        |
| SD SWASTA    | 0        | 15      | 0                   | 2       | 1      | 18          |
| SMP NEGERI   | 587      | 315     | 18                  | 181     | 28     | 1129        |
| SMP SWASTA   | 0        | 150     | 0                   | 14      | 14     | 178         |
| <b>Total</b> |          |         |                     |         |        | <b>3890</b> |

(Sumber: Disdikpora Kabupaten Pangandaran per Bulan Juni Tahun 2021)

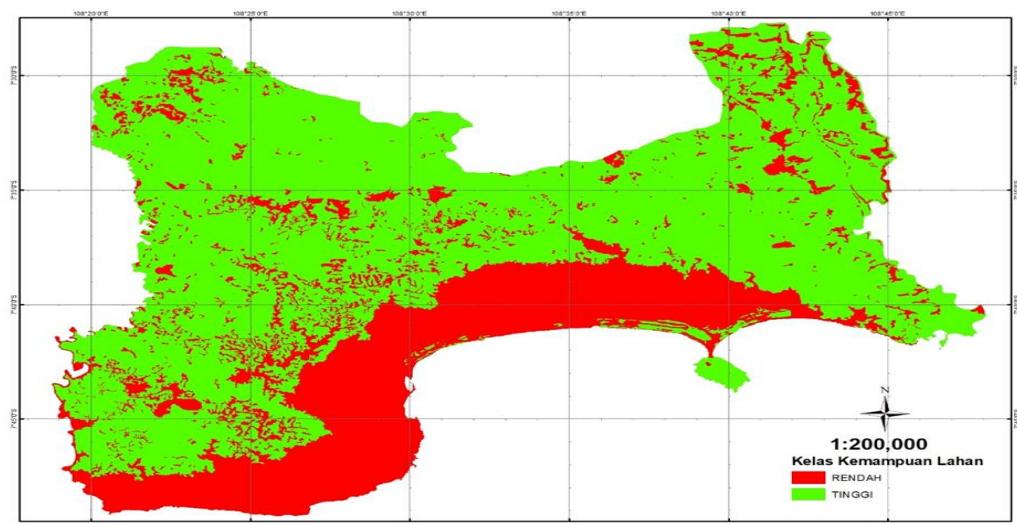


Berdasarkan perbedaan data dimaksud, untuk kepentingan pengambilan kebijakan sektoral, maka data yang digunakan adalah data yang bersumber dari data sektoral. Data diatas menunjukkan masih banyak pendidik dan tenaga kependidikan yang masih berstatus Non Pegawai Negeri Sipil (PNS).

### 2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

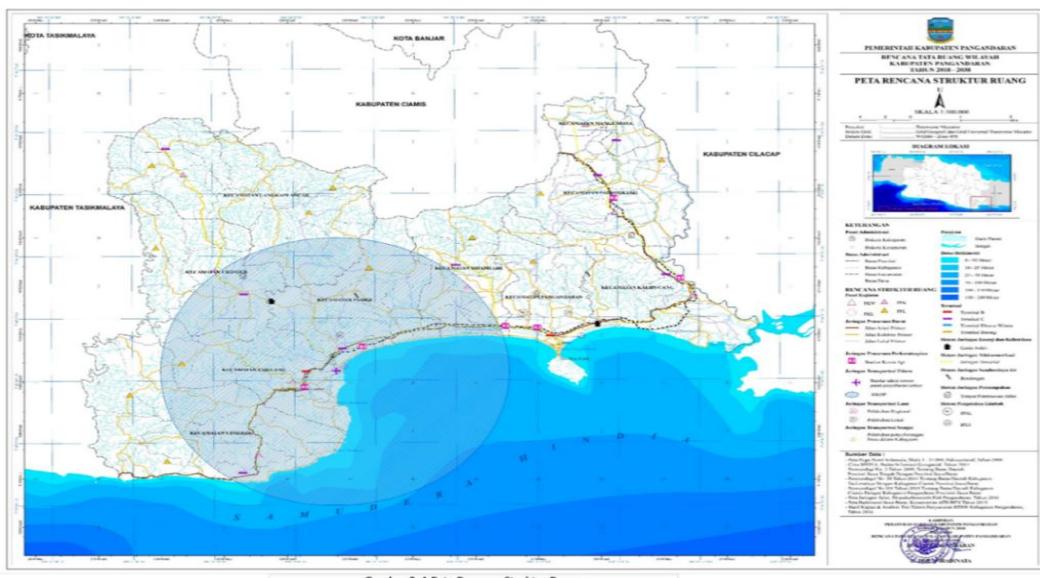
Daya dukung Potensi Pengembangan Wilayah didapatkan dari hasil analisis satuan kemampuan lahan (SKL). Inti dari analisis keseluruhan SKL ini merupakan analisis kemampuan lahan yang melihat daya dukung lahan yang cocok untuk dikembangkan sebagai kawasan perkotaan/perdesaan dengan intensitas kegiatan budidaya di dalamnya, baik itu permukiman, pertanian, perkebunan dan aktivitas budidaya lainnya.

Dalam analisis SKL yang menghasilkan kemampuan pengembangan, lahan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu rendah dan tinggi. Kawasan dengan kelas kemampuan pengembangan tinggi, untuk menjadi kawasan budidaya, sementara kawasan dengan kelas kemampuan pengembangan rendah hanya bisa digunakan untuk kawasan lindung. Peta kemampuan lahan dapat dilihat pada peta berikut ini.



(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomr 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

**Gambar 2.13 Peta Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Pangandaran**



(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

**Gambar 2. 14 Peta Rencana Struktur Ruang**

Rencana Pola Ruang Kabupaten Pangandaran terdiri antara Rencana Kawasan Lindung dan Budidaya. Pembagian proporsi antara rencana kawasan lindung dan budidaya yaitu sebesar 22,66% untuk kawasan lindung dan 77,34% untuk kawasan budidaya.

### 1. Kawasan Lindung

Pada rencana kawasan lindung terdapat kawasan resapan air sebesar 3,02% dari jumlah luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, kawasan sempadan pantai sebesar 0,56% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, kawasan sempadan sungai sebesar 3,50% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, kawasan sekitar danau/situ/embung sebesar 0,03% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, cagar alam pananjung Pangandaran sebesar 0,40% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, cagar alam laut pananjung Pangandaran sebesar 0,41% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, kawasan pantai berhutan bakau sebesar 0,17% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, taman wisata alam pananjung



sebesar 0,03% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, kawasan lindung geologi sebesar 13,95% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran dan kawasan bencana tsunami sebesar 0,59% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran.

## 2. Kawasan Budidaya

Pada rencana kawasan budidaya terdapat hutan produksi sebesar 7,58% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, hutan produksi terbatas sebesar 7,12% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, pertanian lahan basah sebesar 13,28% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, pertanian lahan kering sebesar 7,12% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, perkebunan sebesar 26,26% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, kawasan industri sebesar 0,50% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, kawasan permukiman perkotaan sebesar 7,57% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran dan kawasan permukiman perdesaan sebesar 10,65% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.20 Rencana Pola Ruang Kabupaten Pangandaran**

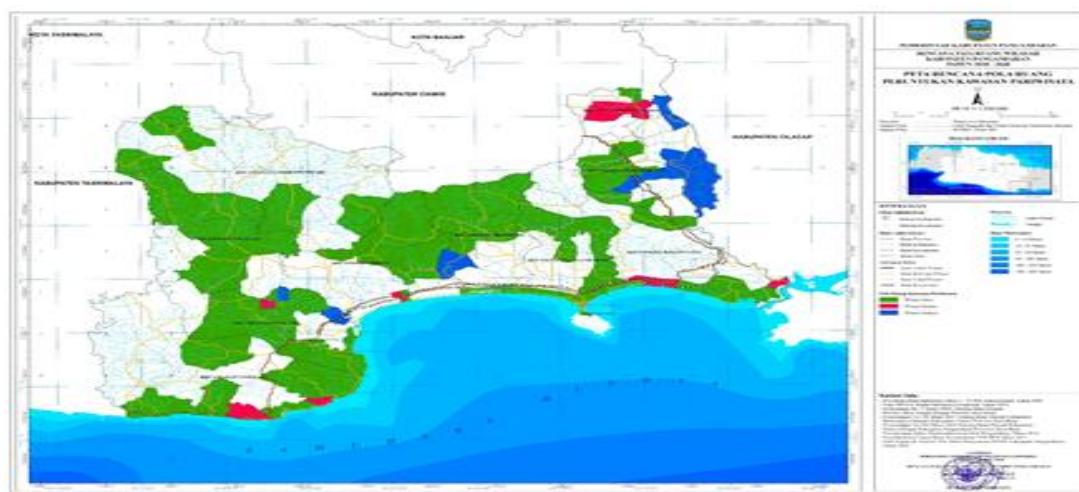
| No                       | Rencana Pola Ruang                    | Luas (Ha) | (%)     |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|
| Rencana Kawasan Lindung  |                                       |           |         |
| 1                        | Kawasan Resapan Air                   | 3.441,07  | 3,02 %  |
| 2                        | Kawasan Sempadan Pantai               | 636,60    | 0,56 %  |
| 3                        | Kaswasan Sempadan Sungai              | 3.990,00  | 3,50 %  |
| 4                        | Kawasan Sekitar danau/situ/embung     | 33,06     | 0,03 %  |
| 5                        | Cagar Alam Pananjung Pangandaran      | 454,62    | 0,40 %  |
| 6                        | Cagar Alam Laut Pananjung Pangandaran | 470       | 0,41 %  |
| 7                        | Kawasan Pantai Berhutan Bakau         | 188,00    | 0,17 %  |
| 8                        | Taman Wisata Alam Pananjung           | 34,32     | 0,03 %  |
| 9                        | Kawasan Lindung Geologi               | 15.882,42 | 13,95 % |
| 1                        | Kawasan Bencana Tsunami               |           |         |
| 0                        |                                       | 674,00    | 0,59 %  |
| Jumlah                   |                                       | 25.804,09 | 22,66 % |
| Rencana Kawasan Budidaya |                                       |           |         |
| 1                        | Hutan Produksi                        | 8.626,00  | 7,58 %  |
| 2                        | Hutan Produksi Terbatas               | 8.102     | 7,12 %  |



| No                     | Rencana Pola Ruang           | Luas (Ha)  | (%)     |
|------------------------|------------------------------|------------|---------|
| 3                      | Pertanian Lahan Basah        | 15.125,00  | 13,28 % |
| 4                      | Pertanian Lahan Kering       | 4.997,00   | 7,12 %  |
| 5                      | Perkebunan                   | 29.894,00  | 26,26 % |
| 6                      | Kawasan Industri             | 565,08     | 0,50 %  |
| 7                      | Kawasan Permukiman Perkotaan | 8.614,00   | 7,57 %  |
| 8                      | Kawasan Permukiman Perdesaan | 12.125,00  | 10,65 % |
| Jumlah                 |                              | 88.046,87  | 77,34 % |
| Jumlah Total Kabupaten |                              | 113.850,98 | 100%    |

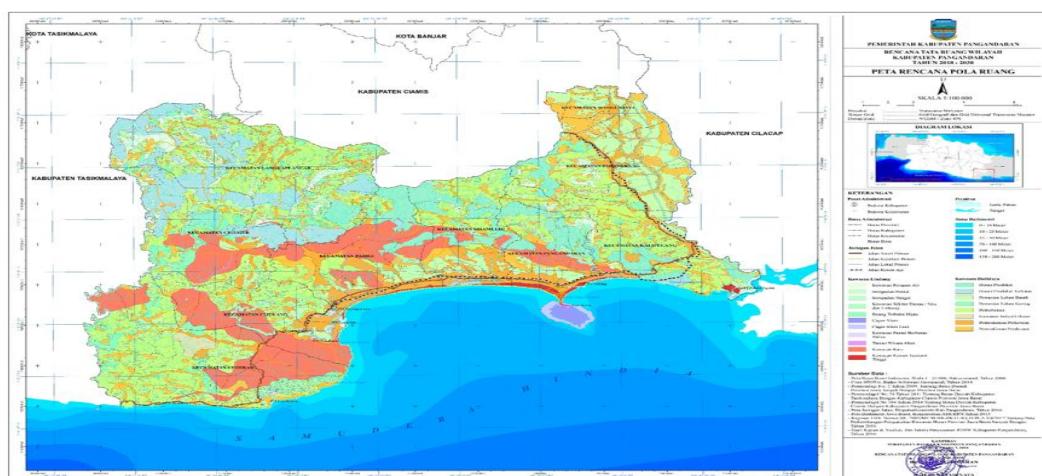
(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

Di bawah ini adalah peta rencana pola ruang kawasan wisata dan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pangandaran.



(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

**Gambar 2.15 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pangandaran**



(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

**Gambar 2.16 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pangandaran**



## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Mewujudkan masyarakat yang sejahtera terdapat beberapa aspek-aspek pembangunan yang penting dan harus diperhatikan, meliputi aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan fokus seni budaya dan olahraga. Analisis terhadap aspek tersebut dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhinya. Berikut adalah penjelasan secara rinci indikator-indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Pangandaran.

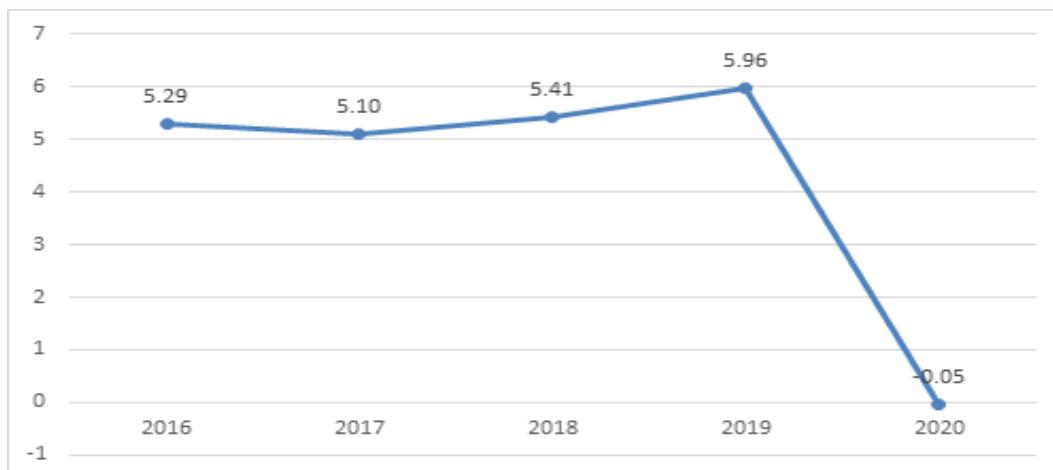
### 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi menganalisis kinerja terhadap indikator-indikator yang mempengaruhinya kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Indikator-indikator tersebut meliputi pertumbuhan PDRB, indeks gini, persentase penduduk miskin, laju inflasi, dan indeks pembangunan manusia. Penjabaran terkait indikator tersebut, sebagai berikut:

#### 2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah dan dengan periode waktu tertentu, jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah ditunjukkan dalam satuan rupiah.

Indikator pengukuran dengan PDRB dibedakan atas dasar harga konstan dan harga berlaku. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan total nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi dan dihitung pada satu tahun tertentu, dan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun. Selanjutnya, PDRB atas dasar berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut, dan dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi.



(Sumber: BPS Ciamis, Kabupaten Pangandaran Dalam Angka, 2021)

**Gambar 2.17 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Dalam pembangunan ekonomi, fokus tujuan utamanya adalah mengupayakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat dengan diikuti distribusi yang semakin merata. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator pengukuran yang dijadikan sebagai acuan awal dalam menjelaskan kinerja ekonomi dalam lingkup sederhana.

Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran menunjukkan tren positif dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Namun demikian tahun 2020 terkoreksi tinggal mencapai -0,05 yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19.

**Tabel 2.21 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pangandaran (miliar rupiah) Tahun 2016-2020**

| Kategori | Uraian   | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| A        | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                      | 2 445,30 | 2 564,11 | 2 822,71 | 3 050,50 | 3 143,79 |
| B        | Pertambangan dan Penggalian                              | 62,84    | 60,72    | 62,74    | 62,34    | 64,07    |
| C        | Industri Pengolahan                                      | 425,18   | 455,73   | 501,95   | 542,22   | 549,57   |
| D        | Pengadaan Listrik dan Gas                                | 6,40     | 7,14     | 7,58     | 7,96     | 8,16     |
| E        | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 1,05     | 1,24     | 1,45     | 1,67     | 1,84     |
| F        | Konstruksi   | 727,32   | 800,97   | 893,88   | 1 004,70 | 928,67   |



| <b>Kategori</b>                       | <b>Uraian</b>  | <b>2016</b>     | <b>2017</b>     | <b>2018</b>      | <b>2019</b>      | <b>2020</b>      |
|---------------------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| G                                     | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 1 767,24        | 1 919,31        | 2 085,53         | 2 281,84         | 2 243,97         |
| H                                     | Transportasi dan Pergudangan                                   | 1 052,90        | 1 144,39        | 1 234,67         | 1 318,35         | 1 330,79         |
| I                                     | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 732,52          | 823,30          | 932,14           | 1 060,12         | 1 091,41         |
| J                                     | Informasi dan Komunikasi                                       | 128,75          | 146,71          | 158,39           | 169,64           | 229,65           |
| K                                     | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 171,69          | 185,38          | 201,70           | 208,23           | 214,09           |
| L                                     | Real Estate  | 218,51          | 242,24          | 269,48           | 298,43           | 328,40           |
| M,N                                   | Jasa Perusahaan  | 80,,72          | 89,16           | 100,79           | 124,32           | 112,47           |
| O                                     | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 285,63          | 297,23          | 314,16           | 316,30           | 318,26           |
| P                                     | Jasa Pendidikan  | 435,91          | 501,88          | 584,42           | 658,67           | 728,21           |
| Q                                     | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 18,71           | 20,88           | 23,07            | 25,67            | 25,14            |
| R,S,T,U                               | Jasa lainnya   | 123,17          | 140,31          | 157,55           | 180,73           | 179,78           |
| <b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b> |  | <b>8 683,89</b> | <b>9 400,78</b> | <b>10 352,22</b> | <b>11 311,69</b> | <b>11 498,28</b> |

(Sumber: BPS Ciamis; Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2021)

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses dalam pertumbuhan output perkapita yang dilihat secara jangka panjang. Pengertian jangka panjang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang digambarkan dalam peningkatan output perkapita yang secara bersamaan memberikan berbagai alternatif dalam hal konsumsi barang dan jasa serta beriringan pada peningkatan daya beli masyarakat dan bersamaan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

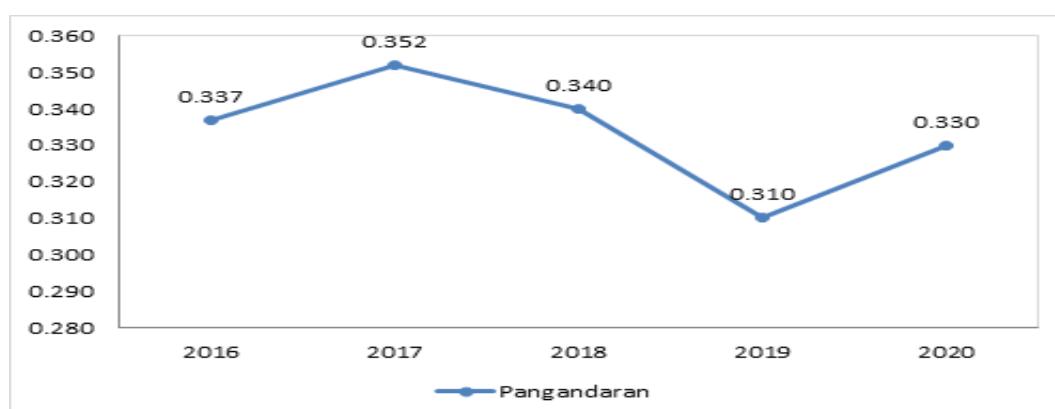
Untuk mengetahui kondisi ekonomi pada suatu wilayah/regional dalam periode tertentu salah satu indikator pengukurnya adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dengan kurun waktu tertentu.



Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat pergeseran kontribusi sektor lapangan usaha yang terpengaruh oleh Pandemi Covid-19. Sektor pertanian merupakan sektor yang cukup stabil dan tidak terpengaruh oleh adanya Pandemi Covid-19. Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar sektor-sektor yang berpengaruh terhadap kontribusi PDRB, tetap mengalami kenaikan. Hanya beberapa faktor saja yang mengalami penurunan, seperti sektor Konstruksi, Jasa perusahaan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta Jasa lainnya. Dengan demikian, beberapa sektor tersebut jangan dijadikan program unggulan.

#### 2.2.1.2 Indeks Gini

Peningkatan akan kesejahteraan masyarakat diukur dengan melihat peningkatan pendapatan penduduk pada suatu wilayah. Peningkatan pendapatan yang terjadi sudah seharusnya merata dan dapat dirasakan oleh semua tingkatan sosial masyarakat yang berarti bahwa dalam aspek pemerataan pendapatan merupakan suatu hal yang menjadi penting untuk dipantau, karena pemerataan pendapatan merupakan ukuran keberhasilan dari hasil pembangunan suatu wilayah dalam hal ini yaitu Kabupaten Pangandaran. Kekhawatiran akan adanya ketimpangan pada hasil pembangunan mengarah pada timbulnya masalah-masalah sosial dalam masyarakat nantinya.



(Sumber: BPS Ciamis; Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2021)

**Gambar 2.18 Gini Rasio Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**



Indeks gini digunakan untuk mengukur tingkat ketidakmerataan/ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh dengan melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Indeks gini sebagai ukuran pemerataan pendapatan memiliki nilai berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi.

Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Gini rasio Kabupaten Pangandaran menunjukkan angka yang tidak tetap atau fluktuatif dari tahun 2016-2020, pada tahun 2017 meningkat dengan sebesar 0,352%, pada tahun 2018 menurun 0.340%, kemudian pada tahun 2019 menurun hingga 0.030% yaitu 0.310% dan pada tahun 2020 terdapat peningkatan menjadi 0.330%. Hal ini terjadi salah satunya akibat dampak Pandemi Covid-19.

#### **2.2.1.3 Persentase Penduduk Miskin**

Pembangunan merupakan sebuah proses untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan merata. Pada tingkat kesejahteraan secara ekonomi ditunjukkan dengan meningkatnya kemakmuran masyarakat dilihat dari tingkat konsumsi sebagai akibat adanya peningkatan pendapatan masyarakat. Salah satu indikator utama dalam keberhasilan pembangunan adalah menurunnya jumlah penduduk miskin.

Masalah kemiskinan masih menjadi salah satu tugas utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah, termasuk juga bagi Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Pemerintah telah berupaya melaksanakan berbagai macam kebijakan dan program-program pengentasan



kemiskinan yang diharapkan akan dapat menekan angka kemiskinan sampai pada tingkat yang serendah-rendahnya.

Ukuran kemiskinan didasarkan dengan membandingkan pendapatan atau pengeluaran rumah tangga dengan garis kemiskinan yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

**Tabel 2.22 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2020**

| Keterangan                      | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Persentase Penduduk Miskin (P0) | 10,23 | 10,00 | 8,12  | 7,71  | 8,99  |
| Jumlah Penduduk Miskin (ribu)   | 40,14 | 39,46 | 32,19 | 30,73 | 36,05 |

(Sumber: BPS Ciamis; Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2021)

Capaian program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pangandaran dari tahun 2016-2019 cukup berhasil yang ditunjukkan dengan penurunan penduduk miskin dari tahun ke tahun. Namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,28% yang salah satunya disebabkan oleh adanya wabah Pandemi Covid-19.

Jumlah penduduk miskin ini dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain adalah jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dan juga bisa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat secara rata-rata. Penurunan dari tahun 2016-2019 menunjukkan usaha dari perangkat daerah terkait penurunan penduduk miskin cukup berhasil.

#### 2.2.1.4 Laju Inflasi

Inflasi merupakan suatu keadaan dimana terjadi peningkatan harga pada barang, jasa, maupun faktor produksi. Menurut Bank Indonesia inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak



dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas mencangkap barang, jasa, atau faktor produksi yang lainnya. Inflasi mengakibatkan adanya penurunan pada daya beli masyarakat, yang diartikan bahwa pada tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami guncangan atau terganggu karena ketidakmampuan masyarakat dalam mengkonsumsi barang maupun jasa.

Di Provinsi Jawa Barat, BPS secara rutin menghitung inflasi di 7 kota (biasa disebut kota Indeks Harga Konsumen). Kota-kota tersebut yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya. Khusus untuk wilayah Priangan Timur (Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran), data inflasi daerah yang dihitung hanya Kota Tasikmalaya, oleh Tim TPID Pihak Bank Indonesia (BI) Cabang Tasikmalaya bersama Tim Kabupaten/Kota dan BPS. Oleh karena di Kabupaten Pangandaran belum tersedia data inflasi tahunan karena tidak ada survei harga konsumen secara rutin, maka inflasi di Kabupaten Pangandaran dapat didekati pola/data inflasi kabupaten/kota yang kondisi perekonomiannya mirip diantaranya Kota Tasikmalaya, walaupun pada kenyataannya pasti akan sedikit berbeda, tapi diharapkan perbedaannya sedikit.



(Sumber: BPS Ciamis, 2021)

**Gambar 2.19 Laju Inflasi Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2020**



Pada tahun 2020, perhitungan inflasi Kabupaten Pangandaran, berdasarkan data BPS yang mengacu pada tingkat inflasi di Kota Tasikmalaya, menunjukkan kondisi peningkatan harga-harga yang terkendali dibandingkan tahun sebelumnya, dimana selama kurun waktu 2016-2020 inflasi secara umum telah mencapai 1,61%. Hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa beban hidup rumah tangga secara makro di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar kurang lebih 0,11%.

Inflasi akan mendorong perekonomian menjadi lebih baik dengan meningkatnya pendapatan nasional, dan orang akan semakin semangat untuk bekerja, menabung, serta berinvestasi. Bagi pengusaha, inflasi akan memberikan keuntungan karena akan memberikan perolehan yang lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi.

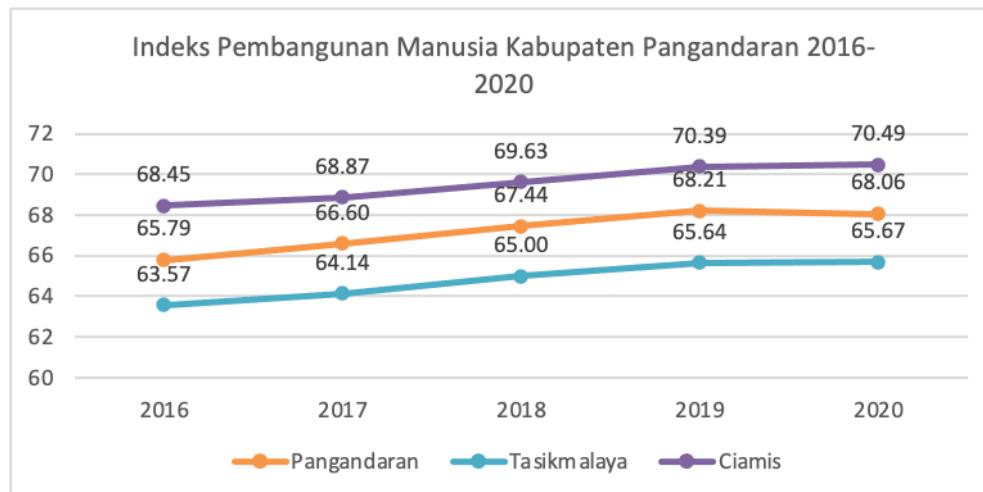
#### **2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengetahui keberhasilan proses pembangunan yang berorientasi pada manusia dengan mengukur perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup. IPM sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk kedalam negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Dalam pengukuran peringkat negara, *United Nations Development Programme* (UNDP) memeringkatkan semua negara dari skala 0 (terendah) sampai 1 (tertinggi) dalam hal pembangunan manusia pada tiap-tiap negara tersebut.

IPM merupakan indikator komposit tunggal yang tidak dapat digunakan untuk mengukur keseluruhan dimensi dari pembangunan manusia, namun mampu digunakan untuk mengukur tiga dimensi pokok dalam pembangunan manusia yang mencerminkan



kemampuan dasar (*basic capabilities*) masyarakat. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.



(Sumber: BPS Ciamis; Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2021)

**Gambar 2.20 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pangandaran 2016-2020**

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangandaran yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Secara umum IPM Kabupaten Pangandaran mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga tahun 2019, dan menurun pada kurun waktu tahun 2020, perkembangan angka tersebut menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik dari tahun ke tahun, namun mengalami penurunan kualitas pada tahun 2020.

Kondisi ini menjadi indikasi adanya penurunan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan angka capaian tersebut walaupun mengalami penurunan di tahun 2020 namun telah melebihi angka target capaian akhir RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 yaitu sebesar 67,42 poin. Menurut konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kinerja pembangunan manusia di



Kabupaten Pangandaran masih dapat dikategorikan sedang, yaitu capaian IPM antara 60-70.

### **2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial**

Pada fokus kesejahteraan sosial merupakan fokus yang berupaya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Fokus kesejahteraan sosial menganalisis kinerja terhadap beberapa indikator antara lain Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar, dan tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka. Indikator-indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

#### **2.2.2.1 Angka Melek Huruf**

Untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

**Tabel 2.23 Angka Melek Huruf Kabupaten Pangandaran**

| <b>Kelompok Umur</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|----------------------|-------------|-------------|
| 15-24                | N/A         | 99,46       |
| 15-44                | N/A         | 99,69       |
| 15+                  | N/A         | 98,59       |
| 45+                  | N/A         | 97,47       |

(Sumber: BPS Ciamis; Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2021)

Tabel diatas menunjukan bahwa data angka melek huruf pada tahun 2019 di Kabupaten Pangandaran tidak tersedia. Sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 99,46 persen kelompok umur 15 tahun keatas dan sebanyak 97,47 persen kelompok umur 45 keatas sudah melek huruf. Hal ini menunjukkan hampir seluruh penduduk Kabupaten Pangandaran melek huruf.



Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pangandaran berhasil dalam meningkatkan angka melek huruf di Kabupaten Pangandaran melalui pendidikan dan usaha lain sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pangandaran.

#### **2.2.2.2 Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar**

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APM digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. APK digunakan Untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan.

- Untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. Selain itu, APK juga sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya.



**Tabel 2.24 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020**

| Jenjang Pendidikan   | APM   |       | APK   |        |
|----------------------|-------|-------|-------|--------|
|                      | 2019  | 2020  | 2019  | 2020   |
| SD/MI/Sederajat      | 95,19 | 95,76 | 99,55 | 102,81 |
| SMP/MTs/Sederajat    | 84,72 | 84,62 | 94,64 | 95,72  |
| SMA/SMK/MA/Sederajat | 67,92 | 67,48 | 85,83 | 83,94  |

(Sumber: BPS Ciamis; Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2021)

Berdasarkan tabel di atas, tahun 2020 APM di Kabupaten Pangandaran cenderung turun kecuali untuk jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat terdapat kenaikan. Sementara APK sebaliknya cenderung naik, kecuali jenjang pendidikan SMA/ SMK/ MA/ Sederajat terdapat penurunan.

Angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar yang naik menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Pangandaran memiliki partisipasi yang tinggi. Hal ini dikarenakan fasilitas dan layanan pendidikan di Kabupaten Pangandaran cukup memadai. Selain itu dukungan dari pihak yang lain juga membantu masyarakat dalam meningkatkan minat pendidikan di Kabupaten Pangandaran.

### **2.2.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator terkait pengukuran ketenagakerjaan yang memberikan gambaran mengenai masyarakat di suatu wilayah yang aktif secara ekonomi dengan menghitung rasio antara Angkatan kerja (semua yang saat ini bekerja) dengan total penduduk usia kerja pada kurun waktu tertentu.

**Tabel 2.25 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pangandaran 2016-2020**

| Indikator Capaian Tenaga Kerja            | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | N/A     | N/A     | 77,74   | 75,08   | 76,79   |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)        | 4.20    | 3.34    | 3,58    | 4,48    | 5,08    |
| Jumlah Penduduk Usia Kerja                | 223.403 | 243.702 | 240.175 | 234.003 | 245.619 |

(Sumber: BPS Ciamis; Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2021)



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pangandaran berfluktuatif namun cenderung naik setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari data tingkat pengangguran terbuka mulai naik dari 4,48 pada tahun 2019 menjadi 5,08 pada tahun 2020. Padahal data di tahun 2017 menunjukkan nilai 3,34.

Mayoritas data di tahun 2020 mengalami peningkatan. Salah satu faktornya adalah ketersediaan lapangan usaha yang belum memadai dibandingkan penduduk usia kerja. Apalagi pada tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19, sehingga sangat berpengaruh terhadap kenaikan tingkat pengangguran yang signifikan.

### **2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga**

Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah dan olahraga, maka terdapat beberapa indikator kinerja sebagai wujud dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada aspek budaya dan olahraga. Penjabaran indikator capaian tersebut, disajikan di bawah ini:

#### **2.2.3.1 Seni Budaya**

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Pangandaran bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah yang digambarkan dengan indikator meliputi penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi, serta jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu. Indikator-indikator tersebut disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.26 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

| Indikator Urusan Kebudayaan                               | Tahun |      |      |      |      |
|---|-------|------|------|------|------|
|   | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya                  | 6     | 15   | 18   | 4    | N/A  |
| Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi | N/A   | N/A  | 2    | 2    | N/A  |
| Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu          | N/A   | N/A  | 30   | 30   | 30   |

(Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, 2021)



Capaian dari Kabupaten Pangandaran dalam aspek urusan kebudayaan cenderung stagnan dan berfluktuatif. Adapun penjabarannya adalah jumlah penyelenggaraan festival sangat berfluktuatif. Jumlah karya budaya yang dilestarikan juga stagnan. Hal ini juga diikuti dengan jumlah cagar budaya yang dilestarikan tetap pada 30 cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2020.

Data di tahun 2020 terkait jumlah cagar budaya signifikan dikarenakan Pandemi Covid-19 yang menyebabkan adanya kegiatan pembatasan sosial yang berdampak pada kegiatan kebudayaan di Kabupaten Pangandaran. Pembatasan sosial ini dimaksudkan untuk mengurangi kerumuman dan mencegah penularan virus yang lebih luas.

### 2.2.3.2 Olahraga

Pembangunan bidang pemuda dan olahraga dilakukan melalui berbagai pembinaan generasi muda dan olahraga. Pembangunan pemuda dan olahraga dilihat dari indikator capaian yang meliputi jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga. Adapun capaian fokus tersebut disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.27 Hasil Capaian Kinerja Urusan Olahraga Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

| Indikator              | Tahun |      |      |      |      |
|------------------------|-------|------|------|------|------|
|                        | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Jumlah Klub Olahraga   | 127   | 127  | 127  | 127  | 146  |
| Jumlah Gedung Olahraga | 42    | 42   | 42   | 117  | 117  |

(Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, 2021)

Capaian Kabupaten Pangandaran dalam aspek urusan kepemudaan dan olahraga adalah peningkatan jumlah klub olahraga yang ada di Kabupaten Pangandaran yang berjumlah 146 klub pada tahun 2020. Peningkatan ini juga diikuti dengan peningkatan jumlah gedung olahraga yang berjumlah 117 pada tahun 2020.



Peningkatan jumlah klub olahraga di Kabupaten Pangandaran menunjukkan bahwa partisipasi olahraga di kabupaten ini cukup tinggi. Fasilitas gedung olahraga yang menunjukkan jumlah 117 gedung juga menjadi bukti bahwa olahraga di Kabupaten Pangandaran cukup digemari.

### **2.3 Aspek Pelayanan Umum**

Kinerja Pembangunan pada aspek pelayanan umum ditandai diantaranya dengan meningkatnya taraf pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, lingkungan hidup yang dilaksanakan menurut urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib pelayanan non dasar, urusan pilihan, dan urusan penunjang pemerintahan.

#### **2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib**

Dalam UU nomor 23 Tahun 2014 urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial. Berikut penjabaran masing-masing urusan.

##### **2.3.1.1 Pendidikan**

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting, sehingga pembangunan dalam bidang pendidikan tidak hanya pada pendidikan formal, namun juga meliputi pendidikan nonformal. Dalam pemenuhan pelayanan di bidang pendidikan, pemerintah Kabupaten pangandaran didukung dan dikuatkan oleh masyarakat dan swasta secara signifikan. Berikut adalah data capaian kinerja urusan pendidikan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020.



**Tabel 2.28 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

| Indikator  | Satuan | Realisasi       |                 |                 |              |                 |
|--|--------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|  |        | 2016            | 2017            | 2018            | 2019         | 2020            |
| Jumlah Siswa PAUD                                      | Orang  | N/A             | 7220            | 7347            | 7181         | 8005            |
| Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A                  | %      | 106,34          | 100,64          | 104,5           | 97,03        | 96              |
| Angka Partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B                | %      | 105,75          | 98,2            | 98,82           | 99,29        | 98              |
| Angka partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C             | %      | 60,29           | 63              | 0               | 0            | 0               |
| Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A            | %      | 91              | 78              | 93              | 88           | 91              |
| Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B          | %      | 69              | 72              | 78              | 67           | 69              |
| Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C      | %      | 44,15           | 43              | 0               | 0            | 0               |
| Jumlah Anak Usia 5 - 6 tahun                           | Orang  | 11.230          | 12.071          | 12.451          | 12.553       | 12.032          |
| Jumlah gedung sekolah SD/MI                            | Unit   | 349             | 343             | 343             | 344          | 344             |
| Rasio Sekolah / penduduk Usia 13-15                    | Rasio  | 1:356,37        | 1:366,5<br>4    | 1:363,2<br>6    | 1:361,7<br>5 | 1:377,06        |
| Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun               | Orang  | 36.069          | 37.689          | 37.555          | 40.211       | 39.991          |
| Jumlah gedung sekolah SMP/MTs                          | Unit   | 84              | 85              | 87              | 86           | 85              |
| Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun              | Orang  | 18.528          | 19.427          | 19.253          | 19.173       | 19.984          |
| Rasio Sekolah SD/MI/SMP/MTS / penduduk Usia 7-12/3-15  | Rasio  | 0,129166<br>667 | 0,13402<br>7778 | 0,25833<br>3333 | 0,1375       | 0,138194<br>444 |
| Jumlah Sekolah (SD/MI + SMP/MTs)                       | Unit   | 433             | 428             | 430             | 430          | 429             |
| Jumlah Penduduk Usia (7-12) + (13-15) thn              | Orang  | 54,597          | 57,116          | 56,808          | 59,384       | 59,975          |
| Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar | Rasio  | 79.31           | 74.94           | 75.69           | 72.41        | N/A             |
| Jumlah Guru SD/MI                                      | Orang  | 3547            | 3613            | 3518            | 3539         | 1584            |
| Jumlah Murid SD/MI                                     | Orang  | 38357           | 37930           | 39246           | 39015        | 38,498          |
| Rasio  | Rasio  | 1:11,09         | 1:10,49         | 1:11,15         | 1:11,03      | 1:12,91         |
| Jumlah Guru SMP/MTs                                    | Orang  | 1629            | 1607            | 1503            | 1547         | 680             |
| Jumlah Murid SMP/MTs                                   | Orang  | 19593           | 19077           | 19026           | 19036        | 19,498          |
| Rasio  | Rasio  | 12:03           | 0.51875         | 0.54583         | 12:31        | 27              |
| Jumlah Guru (SD/MI + SMP/MTs)                          | Orang  | 5176            | 5220            | 5021            | 5086         | 2,264           |
| Jumlah Murid (SD/MI + SMP/MTs)                         | Orang  | 57950           | 57007           | 58272           | 58051        | 57,996          |
| Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar              | Rasio  | 1:12,03         | 1:11,87         | 1:12,69         | 1:12,31      | 1:12,57         |
| Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV              | Orang  | 2673            | 2283            | 2947            | 4527         | 4349            |
| Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/ SMK/ MA               | Orang  | 5176            | 5220            | 5021            | 4627         | 4531            |

(Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, 2021)



Jumlah murid di Kabupaten Pangandaran didominasi oleh tingkat SD/MI dan SMP/MTS yang jumlahnya mencapai 57,996 orang pada tahun 2020. Jika dilihat pada indikator Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Pangandaran mengalami penurunan, faktor yang mempengaruhi menurunnya APM SD/MI dan SMP/MTS antara lain, yaitu masih rendahnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya sesuai umur masuk sekolah dan keterbatasan biaya.

Sedangkan pada indikator Angka Partisipasi Murni untuk Paket A dan Paket B cenderung berfluktuatif. Sedangkan APM untuk paket C menurun hingga 0% pada tahun 2020. Hal ini memperlihatkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Dari data yang disajikan terlihat bahwa kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Pangandaran cukup baik sehingga meningkatkan indikator kinerjanya seperti Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar.

### **2.3.1.2 Kesehatan**

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu daerah.

Kualitas kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya yaitu Angka Kematian Bayi (AKB). Di Kabupaten Pangandaran, angka kematian bayi setiap tahunnya cenderung menurun. Dalam 1000 kelahiran hidup pada tahun 2017 angka kematian bayi menurun menjadi 8,24 dan pada tahun 2020 menjadi 5,43. Selain itu, Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran pada Kabupaten Pangandaran menunjukkan



bawa pada tahun 2016 yaitu 148,91. Setiap tahunnya menurun hingga tahun 2020 menjadi 49,39.

**Tabel 2.29 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

| Indikator   | Satuan | Realisasi |          |          |          |          |
|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|   |        | 2016      | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     |
| Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup                                      | Rasio  | 10,15     | 8.93     | 8.24     | 5.4      | 5.43     |
| Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup (%)                                      | Rasio  | 148.91    | 50,75    | 9.91     | 49.08    | 49,39    |
| Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Tahun                                    | Rasio  | 11,68     | 10.59    | 8.73     | 6.55     | 5,6      |
| Rasio Posyandu Per Seratus Balita   | Rasio  | 3,18      | 2,93     | 2,31     | 1,83     | 1,88     |
| Rasio puskesmas per satuan penduduk   | Rasio  | 1:27.046  | 1:27.268 | 1:27.838 | 1:28.319 | 1:28.432 |
| Rasio puskesmas pembantu per satuan penduduk  | Rasio  | 1:11.591  | 1:11.686 | 1:11.930 | 1:12.494 | 1:12.544 |
| Rasio poliklinik per satuan penduduk  | Rasio  | 1:67.614  | 1:19.477 | 1:20.024 | 1:20.228 | 1:20.309 |
| Prevalensi Balita Stunting  | %      | 4,8       | 3,7      | 4,1      | 3,3      | 3,94     |
| Angka Harapan Hidup   | Tahun  | 70,4      | 70,56    | 70,84    | 71,12    | 71,4     |
| Angka Kematian Ibu  | Orang  | 9         | 5        | 3        | 3        | 5        |
| Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih  | Jumlah | 6044      | 6191     | 6112     | 6074     | 6095     |
| Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani   | %      | N/A       | 116,22   | 103,13   | 110,19   | 97,38    |
| Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan | Rasio  | 88,03     | 93       | 99,15    | 99,23    | 102.10   |
| Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)                               | %      | 92,47     | 93,55    | 86       | 88,17    | 87,1     |
| Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan  | %      | 100       | 100      | 100      | 100      | 100      |
| Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak                                    | %      | 93,7      | 98,1     | 100,5    | 102,8    | 101,5    |



| Indikator  | Satuan | Realisasi |       |       |       |       |
|--|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|
|  |        | 2016      | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk  | %      | 0         | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani  | %      | 100       | 37,38 | N/A   | 34,39 | N/A   |
| Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA                         | %      | 51,1      | 61,7  | 59,2  | 59,2  | 40,1  |
| Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk  | Angka  | 75,2      | 89,1  | 80,8  | 93,2  | 81,5  |
| Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)                        | Angka  | 0,9       | 0,3   | 0,2   | 0     | 0,23  |
| Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS                                    | %      | 51,1      | 62    | 59    | 59    | 40    |
| Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati Dan Sembuh Dalam Program DOTS             | %      | 81,4      | 70,9  | N/A   | N/A   | 56,8  |
| Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD                             | %      | 100       | 100   | 100   | 100   | 100   |
| Penderita Diare Yang Ditangani   | %      | N/A       | 83,5  | 30,3  | 53,2  | 66,2  |
| Angka Kejadian Malaria   | Angka  | 0,02      | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  |
| Tingkat Kematian Akibat Malaria  | Angka  | N/A       | N/A   | N/A   | N/A   | N/A   |
| Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat | %      | 100       | 100   | 100   | 100   | 100   |
| Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi                                   | %      | N/A       | 0,41  | 1,18  | 1,04  | 0,27  |
| Cakupan kunjungan bayi   | %      | 100       | 100   | 100   | 100   | 100   |
| Cakupan Pelayanan Nifas  | %      | N/A       | 94,08 | 96,85 | 98,67 | 100   |
| Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani                                  | %      | 63        | 64,19 | 67,69 | 69,76 | 57,42 |
| Cakupan Pelayanan Anak Balita  | %      | 85,51     | 86,66 | 77,72 | 94,65 | 88,39 |
| Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6                          | %      | 100       | 100   | 100   | 100   | 100   |



| Indikator   | Satuan | Realisasi |      |      |      |      |
|---|--------|-----------|------|------|------|------|
|   |        | 2016      | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| -24 Bulan Keluarga Miskin   |        |           |      |      |      |      |
| Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat  | %      | 96,45     | 99   | 100  | 100  | 100  |
| Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam          | %      | 100       | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk  | %      | N/A       | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  |
| Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi                                 | %      | N/A       | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  |
| Persentase ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%)                              | %      | 100       | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)                                    | %      | 100       | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)                  | %      | 100       | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)  | %      | 100       | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)   | %      | 100       | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)             | %      | 100       | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%) | %      | 100       | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)         | %      | 100       | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Persentase penderita DM yang mendapatkan  | %      | 100       | 100  | 100  | 100  | 100  |



| Indikator   | Satuan | Realisasi |        |       |        |           |
|---|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|
|   |        | 2016      | 2017   | 2018  | 2019   | 2020      |
| pelayanan kesehatan sesuai standar (%)  |        |           |        |       |        |           |
| Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)                      | %      | 100       | 100    | 100   | 100    | 100       |
| Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)                               | %      | 100       | 100    | 100   | 100    | 100       |
| Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar (%) | %      | 100       | 100    | 100   | 100    | 100       |
| Persentase Balita Gizi Buruk/Stunting yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan (%)                  | %      | 100       | 100    | 100   | 100    | 100       |
| Nilai rata rata IKM Puskesmas   | Nilai  | N/A       | N/A    | N/A   | 86,37  | 100       |
| Persentase puskesmas akreditasi minimal madya   | %      | N/A       | 20     | 53,3  | 93,3   | 93,3      |
| Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk   | Rasio  | N/A       | N/A    | N/A   | N/A    | 1:426.483 |
| Rasio tenaga dokter per100.000 penduduk   | Rasio  | 4,48      | 3,67   | 5,62  | 10,78  | 12,42     |
| Rasio Bidan Per Seratus Ribu Penduduk   | Rasio  | 22,66     | 19,97  | 30,81 | 85,98  | 100,35    |
| Jumlah Perawat  | Orang  | 181       | 144    | 355   | 355    | 446       |
| Jumlah Bidan  | Orang  | 85        | 134    | 370   | 373    | 377       |
| Jumlah Farmasi  | Orang  | 10        | 10     | 14    | 48     | 136       |
| Jumlah Ahli Gizi  | Orang  | 9         | 11     | 12    | 20     | 20        |
| Jumlah Dokter Spesialis   | Orang  | 0         | 0      | 0     | 0      | 0         |
| Jumlah Dokter Gigi  | Orang  | 7         | 7      | 7     | 9      | 12        |
| Jumlah Dokter Umum  | Orang  | 17        | 19     | 36    | 43     | 56        |
| Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)  | Bayi   | 257       | 277    | 271   | 193    | 268       |
| BBLR Dirujuk  | Bayi   | 4         | 15     | 10    | 4      | 10        |
| Gizi Buruk  | Bayi   | 102,89    | 104,51 | 110,2 | 106,48 | 106,95    |
| Ibu Hamil Kunjungan K1  | %      | N/A       | 92,08  | 90,19 | 90,51  | 92,82     |



| Indikator   | Satuan | Realisasi |       |       |       |       |
|---|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|
|   |        | 2016      | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4  | %      | N/A       | 92,08 | 90,19 | 90,15 | 92,82 |
| Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)  | %      | 8,2       | 10,57 | 10    | 11,73 | 8,55  |
| Kasus HIV   | Orang  | N/A       | 40    | 38    | 17    | 16    |
| Angka kesakitan DBD   | Orang  | N/A       | N/A   | 137   | 158   | 194   |
| Angka kesakitan Diare   | Orang  | N/A       | N/A   | N/A   | 7873  | 4765  |
| Angka kesakitan ISPA  | Orang  | N/A       | 1249  | 5582  | 293   | 227   |
| Angka kesakitan Tuberculosis  | Orang  | N/A       | N/A   | 389   | 357   | 387   |
| Persentase sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar | %      | 13,3      | 40    | 73,3  | 100   | 100   |
| Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi  | %      | 13,3      | 40    | 73,3  | 100   | 100   |

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, 2021)

Kualitas kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya yaitu Angka Kematian Bayi (AKB). Di Kabupaten Pangandaran, angka kematian bayi setiap tahunnya cenderung menurun. Dalam 1000 kelahiran hidup pada tahun 2017 angka kematian bayi menurun menjadi 8,24 dan pada tahun 2020 menjadi 5,43. Selain itu, Rasio Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran pada Kabupaten Pangandaran menunjukkan bahwa pada tahun 2016 yaitu 148,91. Setiap tahunnya menurun hingga tahun 2020 menjadi 49,39.

Angka kematian ibu juga mengalami penurunan dari 9 jiwa pada tahun 2016 menjadi 5 jiwa pada tahun 2020. Selain itu angka harapan hidup di Kabupaten Pangandaran mengalami kenaikan dari 70,4 tahun di tahun 2016 menjadi 71,4 di tahun 2020. Peningkatan ini menjadi tanda bahwa layanan kesehatan di Kabupaten Pangandaran semakin membaik dan meningkatkan angka harapan hidup.

Kesehatan menjadi salah satu aspek penting dan menjadi komponen penyusunan indeks pembangunan manusia. Dengan meningkatnya kualitas kesehatan di Kabupaten Pangandaran akan



menjadi *multiplier effect* kepada aspek kehidupan masyarakat yang lain.

### **2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Indikator bidang pekerjaan umum di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya jalan, drainase, saluran irigasi, jumlah tempat ibadah. Indikator pada informasi penataan ruang adalah persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. Berikut adalah capaian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020.

**Tabel 2.30 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

| Indikator   | Satuan | Realisasi |           |           |           |           |
|---|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |        | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |
| Panjang Jalan Kondisi Baik                          | Km     | 97.83     | 181       | 269.75    | 401.2     | 429,129   |
| Panjang Jalan Seluruhnya                            | Km     | 500.24    | 504.31    | 504.31    | 504.31    | 504,31    |
| Jumlah Panjang Jalan Kabupaten (Km)                 | Km     | 500.24    | 504.31    | 504.31    | 504.31    | 504,31    |
| Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%) | %      | 52.86     | 52.86     | 63.58     | 63.58     | 67,57     |
| Luas Areal Irigasi                                  | ha     | 10.341,91 | 10.341,91 | 10.341,91 | 16.785,38 | 16.785,38 |
| Persentase penduduk berakses air minum (%)          | %      | N/A       | 65        | 53        | 65        | 66        |
| Panjang jalan yang terbangun                        | Km     | 0         | 0,98      | 0,98      | 0,98      | 5,94      |
| Jumlah jembatan yang terbangun                      | Unit   | 1         | 3         | 4         | 4         | 6         |
| Persentase Jalan dalam kondisi mantap               | %      | 31,98     | 47,72     | 60,09     | 83        | 85,09     |

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Pangandaran, 2021)



Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kinerja pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran dilihat dari indikator panjang jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2019 realisasi mencapai 401,20 km dan meningkat menjadi 429,12 km pada tahun 2020. Peningkatan ini akan berdampak pada kemudahan akses masyarakat menuju dan di area kawasan Kabupaten Pangandaran.

Luas saluran irigasi juga meningkat dari 9.185 ha pada tahun 2016 meningkat menjadi 16.785 ha pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Pangandaran cukup masif dan mengakomodir kebutuhan air di kawasan Kabupaten Pangandaran. Semakin luas saluran irigasinya maka meningkatkan produktifitas pertanian dan mencukupi kebutuhan air masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Selain itu jumlah jembatan yang terbangun juga meningkat dari 1 unit pada tahun 2016 menjadi 6 unit pada tahun 2020. Jembatan merupakan salah satu infrastruktur penting untuk meningkatkan konektifitas Kabupaten Pangandaran dengan daerah lain. Diharapkan dengan dibangunnya infrastruktur pendukung ini dapat mempermudah akses dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan.

#### **2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah salah satu urusan wajib yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian (Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011), sedangkan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidaketeraturan bangunan, kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan dan sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat (Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011). Sedangkan, Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan



keselamatan bangunan dan kecukupan, minimal bangunan dan kesehatan penghuni (Peraturan Menteri PU No.2/PRT/M/2017). Berikut adalah capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020.

**Tabel 2.31 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

| Indikator   | Satuan | Realisasi |       |       |      |       |
|---|--------|-----------|-------|-------|------|-------|
|   |        | 2016      | 2017  | 2018  | 2019 | 2020  |
| Ketaatan terhadap RTRW  | %      | N/A       | N/A   | 35    | 27   | 35    |
| Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi | %      | 5,71      | 5,71  | 5,717 | 5,7  | 11,43 |
| Persentase Rumah tangga bersanitasi                               | Rasio  | N/A       | 54,62 | N/A   | N/A  | N/A   |
| Indeks risiko sanitasi  | Nilai  | N/A       | N/A   | 41,31 | 38   | 32,39 |

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Pangandaran, 2021)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2020 realisasi pemenuhan sarana dan prasarana pusat pemerintahan mencapai 11,43 persen. Di mana pada tahun sebelumnya hanya terealisasi 5,7 persen. Selain itu pada indikator Ketaatan terhadap RTRW juga terjadi peningkatan yang signifikan. Di mana, pada tahun 2020 realisasi mencapai 35 persen. Sedangkan pada tahun 2019 hanya sebesar 27 persen. Sedangkan pada indikator Indeks Risiko Sanitasi, pada tahun 2020 tercatat sebesar 32,39.

Dengan demikian, capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman perlu dioptimalkan kembali kinerjanya. Hal ini dikarenakan agar kawasan tata ruang permukiman dan perumahan rakyat di Kabupaten Pangandaran dapat lebih baik. Utamanya dalam hal ini adalah meningkatkan rumah tangga bersanitasi, sarana prasarana pemerintahan yang baik dan lain sebagainya.



### **2.3.1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

Pembangunan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dilakukan untuk mewujudkan kondisi sosial yang tertib dan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan. Kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat sangat berkaitan erat dengan aspek sosial, politik, dan hukum.

Salah satu indikator pada sektor Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yaitu Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang didapatkan berdasarkan hasil perhitungan dari pelanggaran K3 yang terselesaikan, kemudian dibagi jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP. Indikator lainnya yaitu Kejadian kebakaran, yang diketahui dari berapa banyak jumlah kebakaran pada tahun tertentu di Kabupaten Pangandaran. Berikut adalah hasil capaian kinerja urusan ketentraman dan ketentraman umum Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020.

**Tabel 2.32 Hasil Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketentraman Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

| <b>Indikator</b>  | <b>Satuan</b> | <b>Realisasi</b> |             |             |             |             |
|---|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |               | <b>2016</b>      | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| Kejadian Kebakaran Kabupaten Pangandaran  | Kasus         | N/A              | 11          | 31          | 53          | 79          |
| Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP | Kasus         | N/A              | 14          | 24          | 10          | 37          |
| Pelanggaran K3 yang terselesaikan   | Kasus         | N/A              | 14          | 22          | 10          | 10          |
| Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (%)        | %             | N/A              | 100         | 91.67       | 100         | 100         |
| Petugas Linmas di Kabupaten/Kota  | Orang         | 1856             | 1886        | 1908        | 1908        | 1913        |

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran, 2021)

Dari hasil perhitungan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Kabupaten Pangandaran, selama 3 tahun terakhir menunjukkan angka diatas 90% ke atas. Pada tahun 2017 terdapat penyelesaian



pelanggaran K3 sebesar 100%. Kemudian tahun berikutnya 91,67% dan di tahun 2019 dan 2020 sebesar 100%. Dari data ini dapat dilihat bahwa permasalahan K3 dapat diselesaikan dengan baik oleh Satpol PP.

Pada tahun 2017 terdapat 11 kejadian kebakaran, kemudian naik kembali di tahun 2018 menjadi 31 sampai pada tahun 2020 menjadi 79 kejadian kebakaran namun semuanya dapat dipadamkan dengan cepat. Sehingga kinerja Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pangandaran sudah berkinerja dengan baik.

Selain itu terdapat kenaikan petugas Linmas dari 1.856 orang pada tahun 2016 meningkat menjadi 1.913 orang pada tahun 2020. Penambahan Linmas ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan keamanan di masyarakat Kabupaten Pangandaran.

#### **2.3.1.6 Sosial**

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang disabilitas, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan

lansia rawan sosial.

Dalam mengurangi angka penyandang disabilitas, diperlukan kerjasama dari semua pihak khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat. Adapun hasil capaian kinerja urusan sosial Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020, tersaji dalam tabel di bawah ini:



**Tabel 2.33 Hasil Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

| Indikator  | Satuan | Capaian Kinerja |        |        |        |         |
|--|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------|
|  |        | 2016            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020    |
| Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun                  | Jiwa   | N/A             | 52.634 | 48.272 | 45.944 | 116.458 |
| Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dalam 1 tahun yang seharunya memperoleh bantuan sosial        | Jiwa   | N/A             | 53.121 | 57.096 | 50.817 | 116.458 |
| Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani   | Jiwa   | N/A             | 52.634 | 48.272 | 45.944 | 116.458 |
| Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ada  | Jiwa   | N/A             | 53.121 | 57.096 | 50.817 | 116.458 |
| Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang diberikan bantuan  | Jiwa   | N/A             | 52.634 | 48.272 | 45.944 | 116.458 |
| Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang seharusnya menerima bantuan                              | Jiwa   | N/A             | 53.121 | 57.096 | 50.817 | 116.458 |
| Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial           | %      | N/A             | 99,01  | 84,54  | 90,41  | 100     |
| Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | %      | N/A             | 3,78   | 6,08   | 5,81   | 6,71    |
| Jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang dibina                                   | Jiwa   | N/A             | N/A    | N/A    | N/A    | 1.427   |
| Persentase PSKS yang aktif sosialisasi/penyuluhan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial                | %      | N/A             | 100    | 100    | 100    | 100     |
| Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri  | %      | N/A             | N/A    | 1,2    | 6.1    | 21,4    |
| Jumlah Panti Sosial  | Unit   | N/A             | 21     | 21     | 23     | 22      |
| Jumlah fakir miskin mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial   | Jiwa   | N/A             | 52.634 | 48.272 | 45.944 | 117.471 |



| Indikator  | Satuan | Capaian Kinerja |        |        |        |         |
|--|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------|
|  |        | 2016            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020    |
| Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat pelayanan kesejahteraan sosial | Jiwa   | N/A             | 52.634 | 48.272 | 45.944 | 117.471 |

(Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran, 2021)

Berdasarkan data di atas, jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Pangandaran mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Pada tahun 2017 yaitu 52.634 jiwa, dan menurun pada tahun 2018 menjadi 48.272 jiwa, serta terjadi peningkatan kembali pada tahun 2020 menjadi 116.458 jiwa. Peningkatan ini terjadi karena adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak kepada masyarakat yang kehilangan mata pencarhianya.

Sedangkan jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) seharusnya memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2017 yaitu 53.121 jiwa. Pada tahun 2018 menjadi 57.096 jiwa dan terjadi peningkatan kembali pada tahun 2020 menjadi 116.458 jiwa. Selain itu, Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2017 yaitu 99,01%. Menurun pada tahun 2018 menjadi 84,54% dan terjadi peningkatan kembali pada tahun 2020 menjadi 100%.

Pandemi Covid-19 secara tidak langsung berdampak kepada beberapa indikator capaian di urusan sosial. Namun pemerintah Kabupaten Pangandaran juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara pemberian bantuan sembako maupun bantuan langsung tunai. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.



### **2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar**

Fokus layanan urusan wajib non dasar mencakup: usaha kecil mikro dan menengah, tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; pemberdayaan masyarakat dan desa; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi dan UMKM, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan, yang disajikan sebagai berikut :

#### **2.3.2.1 Tenaga Kerja**

Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Dalam menjalankan segala urusan pemerintah daerah dan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat maka sangat diperlukan serapan dan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Oleh karena itu, urusan ketenagakerjaan menjadi sangat penting dalam menjalankan proses pemerintahan.

**Tabel 2.34 Hasil Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

| Indikator  | Capaian (%) |      |      |      |      |
|--|-------------|------|------|------|------|
|  | 2016        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Persentase pencari kerja yang ditempatkan                              | N/A         | N/A  | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Rasio penduduk yang bekerja  | N/A         | 40   | 14   | 90   | 80   |
| Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi | 61          | 64   | 67   | 70   | 72   |

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran, 2021)

Dari tabel diatas terlihat bahwa rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2017 adalah 40 dan terus naik hingga 90 pada tahun 2019. Namun kembali turun menjadi 80 di tahun 2020 dikarenakan



Pandemi Covid-19. Peningkatan terjadi pada indikator rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja yang menunjukkan 61 pada tahun 2016 menjadi 72 pada tahun 2020. Sedangkan indikator persentase pencari kerja stagnan di angka 0,98 dari tahun 2018-2020.

Permasalahan tenaga kerja di Kabupaten Pangandaran adalah terjadinya kesenjangan antara pencari kerja terhadap kesempatan untuk bekerja. Apalagi setelah Pandemi Covid-19, tahun 2020 terjadi lonjakan kenaikan tingkat pengangguran di Kabupaten Pangandaran sehingga mempengaruhi rasio penduduk yang bekerja.

### **2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Beberapa program dan kegiatan dijalankan untuk meningkatkan kapasitas perempuan di Kabupaten Pangandaran dan berusaha memenuhi kebutuhan anak untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Pangandaran. Berikut adalah hasil capaian kinerja urusan pemberdayaan dan perlindungan anak Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020.

**Tabel 2.35 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

| <b>Indikator</b>                     | <b>Satuan</b> | <b>Capaian</b> |             |             |             |             |
|--------------------------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                      |               | <b>2016</b>    | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| Indeks Pembangunan Gender (IPG)      | Nilai         | N/A            | 89,30       | 89,68       | 90,02       | 89,78       |
| Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)     | Nilai         | N/A            | 65,45       | 69,20       | 74,56       | 74,57       |
| Partisipasi angkatan kerja perempuan | %             | N/A            | 27,17       | 26,49       | 26,11       | 24,70       |

(Sumber: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Anak Kabupaten Pangandaran, 2021)

IPG merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan IPM perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pada tahun 2020 terjadi



pandemi virus Corona-19 sehingga salah satu dimensi tersebut, yaitu ekonomi mengalami penurunan yang akhirnya berdampak terhadap penurunan IPG Kabupaten Pangandaran.

IPG di Kabupaten Pangandaran meningkat dari 89,30 pada tahun 2017 menjadi 90,02 pada tahun 2019, namun menurun menjadi 89,78 pada tahun 2020. Selain itu indikator IDG mengalami peningkatan yang cukup baik dari 65,45 di tahun 2017 menjadi 74,57 pada tahun 2020. Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan juga mengalami penurunan dari 27,17% di tahun 2017 menjadi 24,70% di tahun 2020.

### **2.3.2.3 Pangan**

Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman beragam, bergizi dan imbang, namun juga meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan. Berikut hasil capaian kinerja urusan pangan Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020:

**Tabel 2.36 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

| Indikator                                     | Satuan        | Capaian  |          |          |          |          |
|---|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |               | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     |
| Angka kecukupan Protein perkapita             | Gram/Kap/Hari | 65,7     | 63,7     | 68,8     | 70,5     | 70,6     |
| Jumlah Desa Rawan Pangan                      | Desa          | 13       | 11       | 10       | 9        | 8        |
| Total desa pangan lestari                     | Desa          | N/A      | N/A      | 18       | 3        | 3        |
| Ketersediaan pangan utama (food availability) | Ton/Tahun     | 21887,73 | 32433,85 | 32576,42 | 61823,74 | 38727,46 |
| Skor PPH Konsumsi                             | Skor          | 87,1     | 82       | 89,5     | 93,2     | 94,5     |
| Angka ketersediaan Energi                     | Kkal/Kap/Hari | 2622,1   | 2896,2   | 3602     | 6460     | 5525,18  |
| Angka Ketersediaan Protein                    | Gram/Kap/Hari | 63,9     | 79,2     | 275,62   | 180,89   | 350,72   |
| Skor PPH Ketersediaan                         | Skor          | N/A      | 82       | 89,5     | 93,2     | 94.50    |
| Indeks Ketahanan Pangan                       | Indeks        | N/A      | N/A      | 77,18    | 82,56    | 81,99    |

(Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, 2021)



Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja urusan pangan Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020 terlihat fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari indikator skor PPH ketersediaan pada tahun 2017 mencapai 82 yang selanjutnya mengalami kenaikan pada tahun 2019 mencapai 93,2, dan terus naik pada tahun 2020 mencapai 94,5.

Selain itu juga terlihat dinamika penurunan dari capaian pada indikator total desa pangan lestari dari 18 desa pada tahun 2018 dan selanjutnya turun menjadi 3 desa tahun 2020. Naik turunnya indikator pada urusan pangan dipengaruhi oleh banyak hal seperti musim panen yang terpengaruh cuaca dan lain sebagainya.

#### 2.3.2.4 Pertanahan

Penataan wilayah dan ruang melalui pembuatan peraturan tentang tata ruang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebagai konsekuensi pembangunan dan pertambahan jumlah penduduk. Lemahnya administrasi pertanahan dan terbatasnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat maupun aparatur pemerintah juga mampu memicu konflik-konflik pertanahan di internal Kabupaten Pangandaran. Konflik tersebut dapat berupa konflik perbatasan antar kecamatan, desa maupun antar penduduk, serta dengan *stakeholders* lain, seperti kalangan pengusaha pertambangan dan perkebunan. Berikut adalah capaian kinerja urusan pertanahan Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020.

**Tabel 2.37 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

| Indikator  | Capaian |      |      |      |      |
|--|---------|------|------|------|------|
|  | 2016    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Persentase Jumlah Kebijakan umum mengenai pedoman pelaksanaan pengembangan dan penataan batas wilayah yang diterbitkan | N/A     | N/A  | N/A  | 100  | 100  |

(Sumber: BPN Kabupaten Pangandaran, 2021)



Berdasarkan tabel diatas capaian urusan pertanahan pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020 terlihat stagnan. Di mana pada tahun 2019-2020 indikator persentase jumlah kebijakan umum mengenai pedoman pelaksanaan pengembangan dan penataan batas wilayah yang diterbitkan telah terealisasi 100 persen.

#### **2.3.2.5 Lingkungan Hidup**

Sumber daya alam yang diperlukan mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Pengelolaan tersebut yang berupa pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihhan kualitas lingkungan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan peran pemerintahan.

Pengelolaan sumber daya alam memiliki tujuan yang sama yaitu agar terus tersedianya sumber daya alam yang dapat diperbaharui, menghemat dan meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui serta mencari substitusi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Berikut adalah capaian kinerja urusan lingkungan hidup Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020.

**Tabel 2.38 Hasil Capaian Kinerja Urusan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

| Indikator   | Capaian            |                    |                          |                           |                           |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   | 2016               | 2017               | 2018                     | 2019                      | 2020                      |
| Volume sampah yang ditangani (m <sup>3</sup> )              | N/A                | N/A                | 30.224 m <sup>3</sup>    | 52.954 m <sup>3</sup>     | 30.848 m <sup>3</sup>     |
| Volume produksi sampah                                      | N/A                | N/A                | 167.025,2 m <sup>3</sup> | 181.475,86 m <sup>3</sup> | 183.136,82 m <sup>3</sup> |
| Persentase Penanganan sampah                                | N/A                | N/A                | 18,10%                   | 29,18%                    | 16,84%                    |
| Indeks Kualitas Air   | N/A                | 50                 | 47.78                    | 50                        | 51.67                     |
| Indeks Kualitas Udara                                       | N/A                | 85.76              | 84.30                    | 85,68                     | 77.79                     |
| Indeks Kualitas Vegetasi/ IKTL                              | N/A                | 52.28              | 52.28                    | 52.28                     | 65.25                     |
| Jumlah daya tampung TPS (m <sup>3</sup> )                   | 120 m <sup>3</sup> | 120 m <sup>3</sup> | 120 m <sup>3</sup>       | 150 m <sup>3</sup>        | 210 m <sup>3</sup>        |
| Jumlah ketaatan terhadap Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU | N/A                | N/A                | N/A                      | 8                         | 6                         |



| Indikator  | Capaian    |            |            |           |           |
|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|  | 2016       | 2017       | 2018       | 2019      | 2020      |
| LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten   |            |            |            |           |           |
| Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota | N/A        | N/A        | N/A        | 8         | 16        |
| Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup  | 1          | 1          | N/A        | 1         | N/A       |
| Jumlah Pengaduan masyarakat yang ditangani   | 5          | 4          | 6          | 5         | 4         |
| Total pengaduan masyarakat yang terregister  | 5          | 4          | 6          | 5         | 4         |
| Total Timbunan Sampah  | 59.230     | 59.716     | 61.395     | 62.019    | 62.266,52 |
| Jumlah Sampah 3R   | -          | -          | -          | 2.211,90  | 2.573,25  |
| Total Jumlah Timbunan Sampah Kabupaten (Ton)   | 57,327.78  | 58,522.06  | 59,716.34  | 60,910.66 | 62,128.88 |
| Luas area Kabupaten  | 10,296     | 13,392     | 14,922     | 12.680,10 | 14.497,80 |
|  | 61.245.718 | 61.733.336 | 63.412.752 | 62.019    | 62.266,52 |

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran, 2021)

Berdasarkan tabel diatas capaian urusan bidang lingkungan hidup Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020 cenderung meningkat. Pada tahun 2020 volume sampah yang telah ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran sebanyak 247,16 ton. Jumlah ini naik dibandingkan tahun 2016 yang hanya mencapai 150,13 ton.

Selain itu persentase penanganan sampah juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 persentase penanganan sampah hanya 29,18%. Sedangkan tahun 2020 persentase penanganan sampah sebesar 16,84%. Selain itu jumlah sampah 3R juga mengalami peningkatan yakni pada tahun 2019 hanya sebesar 2.211,90 ton. Sedangkan tahun 2020 jumlah sampah 3R sebanyak 2.573,25 ton.

Peningkatan kinerja urusan lingkungan hidup akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih. Timbunan sampah yang menumpuk dan tidak tertangani berdampak pada



munculnya penyakit dan kuman yang berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar.

#### **2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Pengaturan serta pengelolaan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan suatu hal penting dalam kehidupan masyarakat sebagai data pendukung dalam penentuan prioritas sasaran program pembangunan di Kabupaten Pangandaran. Kependudukan selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas masyarakat, diantaranya adalah saat pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan Kepala Daerah. Berikut adalah capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020.

**Tabel 2.39 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020**

| Indikator  | Capaian |       |       |       |       |
|--|---------|-------|-------|-------|-------|
|  | 2016    | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik | 23,23   | 32,64 | 78,03 | 91,96 | 96,95 |
| Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga                        | 57,05   | 44,06 | 29,02 | 17,03 | 26,78 |
| Cakupan Perekaman maturitas Elektronik                   | 7,28    | 4,31  | 4,9   | 2,75  | 3,29  |
| Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)            | N/A     | N/A   | 3,12  | 26,51 | 14,66 |
| Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran               | 22,91   | 25,84 | 33,1  | 74,2  | 74,61 |
| Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan               | 46,57   | 50,55 | 53,32 | 57,94 | 59,54 |
| Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian                 | 35,82   | 38,2  | 52,42 | 61,05 | 67,25 |
| Persentase validasi database kependudukan                | N/A     | N/A   | 8,7   | 30,43 | 39,13 |

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, 2021)

Berdasarkan tabel diatas capaian urusan kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020 meningkat. Pada tahun 2020 cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)



Elektronik sebanyak 96,95 persen. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 91,96 persen.

Selain itu persentase validasi database kependudukan juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 persentase validasi database kependudukan hanya 30,43 persen. Sedangkan pada tahun 2020 mencapai 39,13 persen. Cakupan penerbitan kartu identitas anak juga mengalami peningkatan dari 3,12 % pada tahun 2018 meningkat menjadi 74,61% pada tahun 2020.

Semakin tingginya dan baiknya administrasi kependudukan bisa dijadikan dasar pengambilan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dasar kebutuhan ini bisa didapat dari pencatatan administrasi penduduk yang sudah dilakukan dengan baik.

#### **2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Kewenangan daerah kabupaten dalam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi kerjasama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan administrasi desa serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pasal 126 ayat 1 merumuskan tujuan pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Berikut adalah capaian urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Pangandaran pada tahun 2016-2020.



**Tabel 2.40 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

| Indikator  | Capaian |       |       |       |       |
|--|---------|-------|-------|-------|-------|
|  | 2016    | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| Persentase Desa Kategori Swasembada                                      | N/A     | N/A   | N/A   | 4,30% | 8,60% |
| Jumlah desa kategori swasembada  | N/A     | N/A   | N/A   | 4     | 8     |
| Jumlah lembaga ekonomi desa yang aktif                                   | N/A     | 56    | 73    | 83    | 87    |
| Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa kategori baik               | 6,45    | 13,98 | 26,88 | 44,09 | 59,14 |
| Jumlah PKK aktif   | 104     | 104   | 104   | 104   | 104   |
| Persentase PKK aktif   | 100     | 100   | 100   | 100   | 100   |
| Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang aktif dalam pembangunan desa | 100     | 100   | 100   | 100   | 100   |

(Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pangandaran, 2021)

Berdasarkan tabel diatas capaian urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020 terlihat mengalami peningkatan. Di mana pada tahun 2019-2020 indikator persentase desa kategori swasembada meningkat. Yang mulanya pada tahun 2019 hanya 4,30 persen, pada tahun 2020 meningkat menjadi 8,60 persen.

Selain itu indikator jumlah lembaga ekonomi desa yang aktif juga mengalami peningkatan dari tahun 2017 mencapai 56 lembaga menjadi 87 lembaga pada tahun 2020. Peningkatan beberapa capaian di urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bisa menjadi penggerak peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat desa.

### **2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Pengendalian penduduk berfokus kepada edukasi masyarakat terkait jumlah anggota keluarga yang akan ditanggung di masa depan. Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) dalam program KB akan terus ditingkatkan sehingga diharapkan angka kelahiran dapat



diturunkan. Selain itu Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan belajar berusaha memperoleh tambahan penghasilan melalui ekonomi produktif di wilayah masing-masing. Berikut adalah capaian urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020.

**Tabel 2.41 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

| Indikator         | Capaian |       |       |       |       |
|-------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
|                   | 2016    | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| TFR               | 2,22    | 2,41  | 2,42  | 2,32  | 2,29  |
| CPR               | 75,37   | 74,94 | 75,15 | 76,41 | 60,25 |
| Unmet Need        | 17,55   | 17,49 | 17,23 | 14,88 | 24,84 |
| LPP               | 0,6     | 0,58  | 0,53  | 0,53  | 0,55  |
| Ratio Akseptor KB | 75,39   | 74,99 | 75,16 | 76,43 | 60,25 |
| ASFR              | 23,89   | 22,6  | 13,45 | 17,61 | 18,01 |

(Sumber: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Anak Kabupaten Pangandaran, 2021)

Berdasarkan tabel di atas, laju pertumbuhan penduduk di Pangandaran mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2016 hingga 2019. Data dari tabel diatas menunjukkan TFR dari tahun 2017 dari 2,41 menjadi 2,29 pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan program keluarga berencanaan yang digalakkan perangkat daerah terkait sudah berjalan dengan baik.

Penurunan ini juga diikuti dengan melambatnya laju ASFR dan tingkat fertilitas wanita usia subur (TFR) yang relatif stabil pada periode yang sama. Sehingga tingkat pertumbuhan penduduk di Pangandaran dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat disimpulkan mengalami perlambatan.

### 2.3.2.9 Perhubungan

Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, kendaraan roda 2 maupun roda 4 serta angkutan umum menuntut ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai. Jumlah arus penumpang



angkutan umum selama empat tahun mengalami penurunan sebagai dampak perkembangan jumlah sepeda motor dan kendaraan pribadi yang cukup pesat. Berikut adalah capaian urusan perhubungan Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020.

**Tabel 2.42 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

| Indikator  | Capaian |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| Rasio Sarana Prasarana Perhubungan Yang Ada Dalam Kondisi Baik | 73,2    | 77,5    | 70      | 76,3    | 76,9    |
| Angka Kecelakaan Lalu Lintas                                   | N/A     | N/A     | 0,005   | 0,003   | 0,002   |
| Jumlah penumpang angkutan darat                                | N/A     | 537.805 | 358.988 | 631.396 | 474.383 |
| Persentase kecamatan yang terlayani angkutan umum              | 30      | 40      | 50      | 50      | 60      |

(Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, 2021)

Berdasarkan tabel diatas capaian urusan perhubungan Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari menurunnya angka kecelakaan lalu lintas, yang mana pada tahun 2019 angka kecelakaan lalu lintas sebanyak 0,003 persen. Sedangkan pada tahun 2020 angka kecelakaan turun di presentase 0,002 persen.

Selain itu indikator rasio sarana prasarana perhubungan yang ada dalam kondisi baik sepanjang 2018-2019 mengalami peningkatan dan penurunan secara fluktuatif. Namun pada indikator jumlah penumpang mengalami penurunan menjadi 474,383 pada tahun 2020 yang sebelumnya 631,396 pada tahun 2019. Hal ini kemungkinan dikarenakan adanya kebijakan pengaturan kapasitas penumpang angkutan umum pada masa Covid-19.

### 2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informasi menjadi suatu hal yang begitu penting di era yang modern ini. Komunikasi dan informasi dibutuhkan oleh setiap



daerah guna mengetahui perkembangan situasi, dan kondisi terkini yang sedang terjadi. Oleh karena itu urusan komunikasi dan informasi merupakan urusan yang sangat penting dalam proses kelangsungan pemerintahan di Kabupaten Pangandaran.

Kewenangan urusan Komunikasi dan Informatika menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan Informasi dan komunikasi publik, serta sub urusan Aplikasi Informatika. Rincian kewenangan untuk sub urusan informasi dan komunikasi publik yaitu Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten. Berikut adalah capaian urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020.

**Tabel 2.43 Hasil Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

| Indikator  | Capaian |      |      |      |      |
|--|---------|------|------|------|------|
|  | 2016    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Percentase aplikasi e-Government yang terintegrasi | N/A     | N/A  | 20   | 30   | 40   |
| Indeks SPBE  | N/A     | N/A  | 1.50 | 2.32 | 3.02 |
| Jumlah IKM   | 1       | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Jumlah KIM   | 100     | 100  | 100  | 100  | 100  |

(Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian, Kabupaten Pangandaran, 2021)

Berdasarkan tabel diatas capaian urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase aplikasi e-Government yang terintegrasi di mana pada tahun 2019 hanya 30 persen, sedangkan di tahun 2020 sebesar 40 persen. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintahan Kabupaten Pangandaran sudah menerapkan aplikasi terintegrasi untuk mempermudah administrasinya.

Selain itu indeks SPBE pun meningkat dari tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2019 sebesar 2.32 persen sedangkan pada tahun



2020 sebesar 3,02 persen. Sedangkan IKM dan jumlah KIM berada di posisi stagnan.

### **2.3.2.11 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Dalam rangka menguatkan perekonomian daerah, Pangandaran terus mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bergerak dalam berbagai bidang. Potensi sumber daya alam yang ada di Pangandaran menjadi peluang untuk mengembangkan usaha bagi masyarakat yang memiliki kreativitas untuk berwirausaha. Penguatan UMKM merupakan salah satu faktor penggerak pembangunan ekonomi daerah agar masyarakat dapat hidup sejahtera. Untuk mencapai pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan, Kabupaten Pangandaran perlu meningkatkan program yang memiliki dampak secara berkelanjutan kepada setiap anggota koperasi maupun UMKM. Berikut adalah capaian urusan koperasi dan UMKM Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020.

**Tabel 2.44 Hasil Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2016-2020**

| Indikator                                | Capaian |       |       |       |       |
|--|---------|-------|-------|-------|-------|
|  | 2016    | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| Persentase koperasi aktif                | 26,63   | 30,54 | 32,69 | 33,96 | 89,02 |
| Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)     | 0       | 0     | 100   | 100   | 100   |
| Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)     | 0       | 0     | 100   | 100   | 100   |
| Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi | 4,55    | 20,00 | 20,83 | 13,04 | 14,29 |
| Jumlah usaha mikro dan kecil             | 0       | 2417  | 10882 | 11360 | 11360 |

(Sumber: Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran, 2021)

Mengacu pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah koperasi aktif di Pangandaran memiliki capaian kinerja yang terus meningkat setiap tahunnya yaitu pada tahun 2016 jumlah koperasi aktif sebesar 26,63 persen dan meningkat hingga menjadi 89,02 persen di tahun 2020.



Selain itu, terdapat peningkatan persentase KSP/ USP yang naik dari 4,55 persen di tahun 2016 menjadi 14,29 persen di tahun 2020. Namun, dalam pencapaiannya, terdapat permasalahan lain yang perlu diperhatikan yaitu kurangnya data terkait jumlah anggota koperasi yang sejahtera dan perkembangan usaha UMKM.

### **2.3.2.12 Penanaman Modal**

Di era globalisasi seperti saat ini, persaingan dunia usaha semakin ketat sehingga setiap daerah berlomba-lomba untuk mengembangkan wilayahnya dengan menarik investor agar masuk ke daerah masing-masing dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berbagai upaya dilakukan seperti memanfaatkan kekayaan alam, menaikkan retribusi daerah dan ada juga yang memudahkan perizinan bagi investor yang mau menanamkan modal di daerah tersebut. Berikut adalah capaian urusan penanaman modal Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020.

**Tabel 2.45 Hasil Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2016-2020**

| Indikator Kinerja           | Satuan | Capaian Kinerja    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                             |        | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               |
| Jumlah Investor PMDN        | Jumlah | 523                | 789                | 429                | 131                | 2124               |
| Jumlah Investor PMA         | Jumlah | N/A                | N/A                | 1                  | N/A                | N/A                |
| PMA                         | Rp     | 0                  | 3,376,000,00       | 17,750,000,00      | 0                  | 0                  |
| PMDN                        | Rp     | 269.331.393.391,00 | 539.813.364.250,00 | 187.541.216.995,00 | 475.010.357.987,00 | 349.898.121.679,00 |
| Jumlah investasi (PMA/PMDN) | Rp     | N/A                | N/A                | N/A                | N/A                | 349.899 M          |

(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran, 2021)

Terdapat kenaikan jumlah investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari tahun 2016 yaitu dari 523 dengan nilai sebesar Rp. 269.331.393.391,00 menjadi 789 investor dengan nilai sebesar Rp.



539.813.364.250,00 pada tahun 2017 lalu mengalami penurunan menjadi sebanyak 429 investor dengan nilai Rp. 187.541.216.995,00 pada tahun 2018 dan kembali menurun pada tahun 2019 yang hanya memperoleh 131 investor namun dengan total nilai yang meningkat yaitu sebesar Rp. 475.010.357.987,00 lalu mengalami kenaikan cukup tajam pada 2020 dengan memperoleh 2.124 investor dengan nilai sebesar Rp. 349.898.121.679,00 Adapun jumlah investor asing (PMA) tercatat hanya terdapat 1 investor pada tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp. 17.750.000,00 yang mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang memperoleh nilai sebesar Rp. 3.376.000,00.

### **2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga**

Pengoptimalan peran pemuda di Pangandaran memiliki peran penting dalam pembangunan daerah baik dalam bidang ekonomi, politik, pertahanan, keamanan maupun sosial budaya. Pemberdayaan pemuda dapat dilakukan melalui organisasi sosial kepemudaan seperti karang taruna maupun *Non-Government Organization* (NGO) pemuda yang bergerak di berbagai bidang. Selain itu, untuk meningkatkan kesegaran jasmani serta mengembangkan minat dan bakat masyarakat dalam bidang keolahragaan juga dikembangkan sektor olahraga di Pangandaran.

**Tabel 2.46 Hasil Capaian Kinerja Urusan Olahraga Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

| Indikator              | Tahun |      |      |      |      |
|------------------------|-------|------|------|------|------|
|                        | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Jumlah Klub Olahraga   | 127   | 127  | 127  | 127  | 146  |
| Jumlah Gedung Olahraga | 42    | 42   | 42   | 117  | 117  |

(Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, 2021)

Capaian Kabupaten Pangandaran dalam aspek urusan kepemudaan dan olahraga adalah peningkatan jumlah klub olahraga yang ada di Kabupaten Pangandaran yang berjumlah 146 klub pada



tahun 2020. Peningkatan ini juga diikuti dengan peningkatan jumlah gedung olahraga yang berjumlah 117 pada tahun 2020.

#### 2.3.2.14 Statistik

Statistik merupakan upaya pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan penyajian data yang sering digunakan untuk masalah ilmiah, industri maupun sosial. Tahap pengolahan data sangat menentukan tingkat keakuratan dan ketepatan data statistik yang dihasilkan. Dengan adanya lembaga statistik diharapkan mampu menyebarluaskan produk yang berkualitas terkait hasil pembangunan di berbagai sendi kehidupan, baik lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan pemerintahan. Statistik digunakan untuk mempermudah pemerintah daerah dalam memahami kondisi daerahnya dan mempermudah dalam proses pengambilan keputusan. Adapun indikator capaian statistik Kabupaten Pangandaran sebagai berikut.

**Tabel 2.47 Jumlah Publikasi Statistik Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

| Indikator        | Capaian |      |      |      |      |
|------------------|---------|------|------|------|------|
|                  | 2016    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Jumlah Publikasi | N/A     | N/A  | 0    | 3    | 1    |

(Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Pangandaran, 2021)

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah publikasi statistik di Kabupaten Pangandaran sebanyak 3 publikasi pada tahun 2019 dan 1 publikasi pada tahun 2020. Jumlah ini belum optimal karena masih kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dengan para *stakeholders* terkait.

#### 2.3.2.15 Persandian

Semakin berkembangnya *E-Government* memunculkan banyak inovasi baru yang semakin memberikan kemudahan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan komunikasi publik. Kendati demikian, hal tersebut memunculkan permasalahan lain yaitu ancaman keamanan data maupun transaksi informasi yang dapat



dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan mereka. Disini peran persandian dan keamanan informasi berada yaitu sebagai entitas pengaman data dan informasi. Berikut adalah capaian urusan persandian Kabupaten Pangandaran.

**Tabel 2.48 Hasil Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

| Indikator   | Capaian |      |      |      |      |
|---|---------|------|------|------|------|
|   | 2016    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Jumlah Sistem Informasi yang menerapkan sistem keamanan informasi | N/A     | N/A  | 10   | 16   | 20   |

(Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Pangandaran, 2021)

Dari tabel diatas terlihat bahwa sistem informasi yang menerapkan sistem keamanan informasi meningkat dari 10 sistem pada tahun 2018 menjadi 20 sistem pada tahun 2020. Capaian bidang persandian Kabupaten Pangandaran karena merupakan bidang baru dalam pemerintahan di kabupaten Pangandaran, sehingga diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM bidang persandian dalam pelaksanaan program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

### 2.3.2.16 Kebudayaan

Pangandaran sebagai salah satu kabupaten termuda di Provinsi Jawa Barat selain terkenal dengan wisata alamnya, daerah ini juga memiliki banyak potensi wisata budaya dan wisata buatan yang menyajikan keunikan yang beragam. Dalam mewujudkan visi Kabupaten Pangandaran yaitu “Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Kaerakter Bangsa”. Pemerintah Kabupaten melakukan berbagai upaya dan berinovasi dalam mengembangkan kawasan wisata salah satunya dengan menarik wisatawan dengan memperkenalkan budaya yang ada.

Secara kultur, Pangandaran terlahir sebagai daerah yang memiliki percampuran dua budaya yaitu budaya jawa dan budaya



sunda. Wilayah Pangandaran bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya dan bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dimana kedua daerah ini memiliki kultur Sunda sedangkan wilayah Kabupaten Pangandaran bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Cilacap yang memiliki kultur Jawa.

Adapun contoh situs kesenian yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran yaitu Saung Angklung Mang Koko dimana sanggar ini merupakan sarana untuk mengenal lebih dalam mengenai alat musik tradisional Angklung Sunda dan kesenian tradisional lainnya seperti Kesenian Benjang Batok yang sering dipentaskan pada acara penyambutan para tamu dalam upacara adat atau acara-acara tertentu, seni kecapi suling, Kesenian Ronggeng Gunung, Celempungan, hingga Prosesi Karasemen Adat.

Berkembangnya era globalisasi cukup berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam melestarikan budaya. Berikut tabel capaian urusan kebudayaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam rangka melestarikan kebudayaan yang ada di Pangandaran pada tahun 2016-2020.

**Tabel 2.49 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

| Indikator   | Capaian |      |      |                            |      |
|---|---------|------|------|----------------------------|------|
|   | 2016    | 2017 | 2018 | 2019                       | 2020 |
| Penyelenggaraan festival seni dan budaya                  | 6       | 15   | 18   | 12 (Kegiatan Bidang)       | 8    |
|   | 0       | 0    | 0    | 6 (Kegiatan Diluar Bidang) | -    |
| Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi | 0       | 0    | 2    | 2                          | -    |
| Jumlah Cagar budaya yang Dikelola Secara Terpadu          | 0       | 0    | 30   | 30                         | 30   |
| Persentase kelompok budaya aktif                          | 0       | 0    | 0    | 0                          | 100  |

(Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, 2021)

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa adanya penurunan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya secara drastis dari tahun 2018 yaitu sebanyak 18 menjadi hanya 8 penyelenggaraan pada



tahun 2020. Di era pandemi pada tahun 2020 pelestarian budaya juga belum berkembang dikarenakan pelaku kesenian yang enggan beradaptasi dengan situasi terkini.

Hal ini menghambat upaya pelestarian budaya yang ada di Kabupaten Pangandaran. Beberapa indikator lain seperti jumlah cagar budaya yang dikelola juga cenderung stagnan. Selain itu kebijakan pemerintah mengenai pembatasan sosial berdampak pada kegiatan kesenian dan kebudayaan yang dilarang untuk mencengah kerumunan.

#### **2.3.2.17 Perpustakaan**

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, bahwa dari salah satu ketujuh agenda pembangunan nasional adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang bertujuan untuk membangun manusia Indonesia yang memiliki cara pikir yang terbuka, kritis, kreatif, dan memiliki karakter. Peraturan Perpustakaan nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa dalam upaya membangun kualitas manusia, budaya literasi perlu dijadikan menjadi pondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berkualitas dan sejahtera. Perkembangan literasi masyarakat di Indonesia salah satunya bergantung kepada kegemaran membaca masyarakat, tergambar dalam Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).

Budaya literasi menjadi dimensi dalam indeks pembangunan masyarakat, pada RPJMN Tahun 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa budaya literasi berkontribusi dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, berkarakter, mandiri dan berdaya saing yang pada akhirnya terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Survei BPS 2019 bahwa indeks nilai budaya literasi masih terus perlu ditingkatkan.



Perpustakaan merupakan pusat kegiatan belajar, membaca buku, dan mencari informasi berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara khususnya masyarakat Kabupaten Pangandaran, dikembangkan perpustakaan untuk memajukan ilmu pengetahuan sebagai tonggak pencerdasan dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Capaian kinerja urusan perpustakaan Kabupaten Pangandaran disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.50 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

| Indikator  | Capaian |        |        |        |        |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|
|  | 2016    | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun                        | N/A     | 925    | 1.169  | 12.567 | 3.931  |
| Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah         | N/A     | 2.077  | 3.490  | 3.709  | 4.010  |
| Jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah               | N/A     | 3.756  | 9.519  | 10.083 | 10.761 |
| Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai                   | N/A     | N/A    | N/A    | 1      | 1      |
| Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah                                  | N/A     | 925    | 1.169  | 12.567 | 3.931  |
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan | N/A     | 18,625 | 31,195 | 31,426 | 42,958 |
| Jumlah Perpustakaan  | N/A     | 277    | 295    | 325    | 325    |
| Jumlah rata-rata pengunjung pertahun                                   | N/A     | 925    | 1.169  | 12.567 | 9.151  |
| Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani                        | N/A     | 18.625 | 31.195 | 31.426 | 42.958 |

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran, 2021)

Berdasarkan data dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah pengunjung perpustakaan daerah mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2017 sebesar 925 menjadi sebesar 1.169 pada tahun 2018 dan melonjak tajam pada tahun 2019 yaitu sebesar 12.567 kunjungan lalu mengalami penurunan pada 2020 sebesar 3.931 kunjungan. Begitu pula dengan jumlah koleksi judul buku yang tersedia yaitu terus bertambah dari 2.077 koleksi pada tahun 2017 menjadi 4.010 koleksi judul buku pada tahun 2020.



Pada tahun 2019 dan 2020, dapat diketahui bahwa jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat di Kabupaten Pangandaran hanya 1 orang. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus untuk meningkatkan jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai bersertifikat untuk mengoptimalkan peran perpustakaan di Pangandaran. Selain itu, dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan pada pengunjung perpustakaan daerah pada tahun 2017-2020 sebanyak 3,931 dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 42,958 pada tahun 2020.

### **2.3.2.18 Kearsipan**

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan menyebutkan bahwa arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Era digitalisasi saat ini menuntut upaya strategis yang dilakukan lembaga Kearsipan dan lembaga pengelola kearsipan lainnya, untuk memastikan bahwa arsip baik yang bersifat statis maupun dinamis menjadi Informasi yang terkandung di dalamnya merupakan informasi yang nyata dan tidak dapat dibantah. Melalui arsip, generasi saat ini dapat mengetahui apa saja yang pernah terjadi sebelumnya dan generasi yang akan datang dapat mengetahui apa saja yang terjadi saat ini sehingga kita dapat mengetahui apa yang terjadi dari waktu ke waktu untuk dipelajari. Berikut adalah capaian urusan kearsipan Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020.



**Tabel 2.51 Persentase Perangkat Daerah Pengelola Arsip Baku  
Tahun 2016-2020**

| Indikator   | Capaian |            |            |            |            |
|---|---------|------------|------------|------------|------------|
|   | 2016    | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       |
| Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)  | N/A     | N/A        | 18         | 18         | 18         |
| Persentase arsip yang terjamin keamanannya                        | N/A     | N/A        | N/A        | 48,03      | 48,03      |
| Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)  | N/A     | N/A        | 18         | 18         | 0          |
| Pengelolaan kearsipan menunjukkan jumlah kegiatan peningkatan SDM | N/A     | 1 kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 0 kegiatan |

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran, 2021)

Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Pangandaran pada tahun 2019 dan 2020 tidak mengalami kenaikan yaitu stagnan di angka 18% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan masih rendahnya OPD yang menyelenggarakan arsip secara baku. Maka dari itu, diperlukan pengoptimalan pengarsipan secara baku diseluruh kegiatan yang ada di Pemerintahan Kabupaten Pangandaran.

Disisi lain sesuai dengan tingkat perkembangan zaman diperlukan penyelenggaraan penatakelolaan Kearsipan Berbasis Digital. Selain kebutuhan tenaga profesional, dibutuhkan pula kelengkapan dan daya dukung sarana dan prasarana.

### **2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan**

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dapat dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yang meliputi bidang urusan perikanan, pertanian, pariwisata, transmigrasi. Berikut disajikan tabel capaian dari indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintah daerah, sebagai berikut



### 2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Sumberdaya perikanan di Kabupaten Pangandaran meliputi sumberdaya perikanan tangkap dan budidaya dan memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan di masa depan, namun masih belum secara optimal tergali dan termanfaatkan. Besarnya jumlah tangkapan ikan di Kabupaten Pangandaran menunjukkan bahwa Kabupaten Pangandaran memiliki potensi perikanan yang besar. Sedangkan kelompok pelaku usaha perikanan di Kabupaten pangandaran didominasi oleh kelompok usaha nelayan. Berikut adalah capaian urusan kelautan dan perikanan Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020.

**Tabel 2.52 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

| Indikator  | Satuan           | Realisasi |           |           |           |            |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|  |                  | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020       |
| Jumlah Produksi Ikan                                   | Ton              | N/A       | 3.063,63  | 2.517,61  | 2.757,86  | 1.522,53   |
| Target Daerah  | Ton              | N/A       | 2.925     | 2.931     | 2.941     | 2.947      |
| Jumlah Konsumsi Ikan                                   | Kg/Kapita /Tahun | N/A       | 17,3      | 20,5      | 22,5      | 23,1       |
| Target Daerah  | Kg/Kapita /Tahun | N/A       | 18,88     | 20,1      | 22,04     | 22,9       |
| Jumlah Kelompok Nelayan                                | Kelompok         | 189       | 189       | 194       | 195       | 241        |
| Jumlah Produksi Ikan Kontribusi Hasil Kelompok Nelayan | Ton              | N/A       | 2.830,53  | 2.344,76  | 2.498,91  | 1.282,54   |
| Produksi benih ikan                                    | Ekor/tahun       | N/A       | 8.538.451 | 6.825.978 | 8.617.470 | 11.728.291 |

(Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangandaran, 2021)

Berdasarkan tabel diatas jumlah produksi ikan dari tahun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 jumlah produksi ikan sebanyak 2757,86 ton, sedangkan pada tahun 2020 hanya 1522,53 ton. Hal ini dapat dipengaruhi oleh indikator kontribusi hasil kelompok nelayan yang juga mengalami penurunan. Di mana pada tahun 2020 kontribusi hasil kelompok nelayan hanya mencapai 1282,54 ton dibandingkan dengan 2019 yang mencapai 2498,91 ton.

Sedangkan untuk perikanan air tawar meningkat untuk produksi benih dari 8 jutaan benih pada tahun 2016 meningkat menjadi hampir



12 juta benih pada tahun 2020. Peningkatan ini terjadi karena potensi perikanan air tawar cukup menjanjikan dalam jangka panjang.

### **2.3.3.2 Pariwisata**

Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu daerah yang berpotensi sebagai kawasan wisata andalan. Terletak di tenggara provinsi Jawa barat, Kabupaten Pangandaran secara mandiri berdiri sebagai daerah otonom baru yang harus secara optimal memanfaatkan potensi daerah. Tren kunjungan Wisata selalu naik pada setiap tahunnya, begitupun kunjungan wisata yang direncanakan. Berikut adalah capaian urusan pariwisata Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020.

**Tabel 2.53 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

| Indikator                                  | Satuan | Realisasi     |                |                |                |                |
|--|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |        | 2016          | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
| Jumlah Kunjungan Wisata                    | Orang  | 1.994.044     | 2.954.559      | 4.045.704      | 3.775.273      | 2.842.022      |
|  |        | 152.108       | 147.637        | 132.978        | 117.767        | 88.484         |
| Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata   | Rupiah | 5.732.038.150 | 14.598.742.005 | 19.813.647.250 | 18.472.858.000 | 13.786.568.250 |
| Jumlah Penerimaan Sektor Pariwisata        | Rupiah | 5.732.038.150 | 14.598.742.005 | 19.813.647.250 | 18.472.858.000 | 13.786.568.250 |
| Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB | Juta   | 732.514       | 823.303        | 932.137        | 1.060.116      | 1.091.410,69   |
| Jumlah Rumah Makan/Restoran                | Unit   | 192           | 192            | 192            | 203            | 203            |
| Jumlah Hotel                               | Unit   | 311           | 311            | 311            | 378            | 383            |

(Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, 2021)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019, kunjungan wisata mencapai 2.842.022 domestik dan 88.484 mancanegara. Namun data pada tahun 2020 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data tahun 2019. Hal ini disebabkan Pandemi Covid-19 sehingga adanya kebijakan pembatasan sosial berdampak pada jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Pangandaran.

Pariwisata juga menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah, nilainya pada tahun 2019 mencapai 18.472.858.000 dan menurun menjadi Rp. 13.786.568.250 pada tahun 2020. Nilai tersebut mengalami



penurunan di tahun sebelumnya dikarenakan Pandemi Covid 19. Jumlah hotel mengalami kenaikan menjadi 383 hotel pada 2020.

### **2.3.3.3 Pertanian**

Sektor pertanian dalam pengembangannya sangat bervariatif mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Komoditi tanaman pangan dan hortikultura yang saat ini sedang berkembang selain itu juga menjadi potensi dan peluang pasar yang cukup baik, diantaranya adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, tomat, cabe merah, cabe rawit, manggis, durian, dan pisang.

Sektor pertanian sampai saat ini masih memiliki andil yang besar dalam pembangunan Kabupaten Pangandaran, salah satunya berperan langsung terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDRB), penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat, dan penciptaan ketahanan pangan. Berikut adalah capaian urusan pertanian Kabupaten Pangandaran pada tahun 2016-2020.

**Tabel 2.54 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pertanian Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

| Indikator   | Satuan | Realisasi    |              |              |              |              |
|---|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   |        | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
| Produktivitas Padi  | Ton/Ha | N/A          | 6,01         | 6,2          | 6,21         | 6,3          |
| Luas Lahan Sawah  | Ha     | N/A          | 16.564       | 16.564       | 16.564       | 16.564       |
| Produktivitas Jagung  | Ton/Ha | N/A          | 6,59         | 6,26         | 5,97         | 6,01         |
| Produksi tanaman padi/ bahan pangan utama lokal lainnya                       | Ton    | N/A          | 202.099,56   | 209.879,34   | 205.003,38   | 205.981,12   |
| Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya per hektar                 | Ton    | N/A          | 5,93         | 5,83         | 6,17         | 6,3          |
| Jumlah kontribusi PDRB konstan dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | Rp     | 1.673.506,65 | 1.708.073,40 | 1.749.637,05 | 1.805.524,22 | 1.855.813,33 |
| Jumlah kontribusi PDRB harga  | Rp     | 2.445.301,60 | 2.564.116,10 | 2.836.506,50 | 3.065.084,70 | 3.143.789,55 |



| Indikator   | Satuan   | Realisasi |       |       |       |       |
|---|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|
|   |          | 2016      | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| berlaku dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan |          |           |       |       |       |       |
| Cakupan Bina Kelompok Tani                              | Kelompok | N/A       | 1.087 | 1.181 | 1.202 | 1.348 |

(Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran, 2021)

Dari tabel diatas terlihat peningkatan capaian urusan pertanian. Produktivitas padi meningkat dari 5,93 ton pada tahun 2016 menjadi 6,3 ton di tahun 2020. Hal ini menunjukkan produktifitas padi di Kabupaten Pangandaran semakin baik karena luas lahan sawah yang ada selama 5 tahun terakhir tidak mengalami peningkatan.

Begitupun juga dengan cakupan bina kelompok tani dari 1.087 pada tahun 2016 menjadi 1.348 pada tahun 2020. Sehingga dapat dilihat bahwa semakin banyak kelompok tani yang terbina dan dapat tercatat untuk memudahkan pemberian bantuan hingga menghitung potensi pertanian di Kabupaten Pangandaran.

#### 2.3.3.4 Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu unsur dalam mendukung urusan pemerintah untuk peningkatan ekonomi. Urusan perdagangan akan selalu menghadapi tantangan dalam mendongkrak peningkatan ekonomi dengan melihat potensi daerah Kabupaten Pangandaran. Pelayanan urusan perdagangan merupakan urusan pilihan. Capaian kinerja urusan perdagangan dalam waktu lima tahun terakhir adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.55 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

| Indikator                     | Satuan | Realisasi |      |                |                   |                    |
|-------------------------------|--------|-----------|------|----------------|-------------------|--------------------|
|                               |        | 2016      | 2017 | 2018           | 2019              | 2020               |
| Nilai ekspor daerah           | Rp     | N/A       | N/A  | 91.005.691.618 | 59.833.038.627,00 | 108.822.663.607,83 |
| Persentase Pertumbuhan ekspor | %      | N/A       | N/A  | N/A            | -34,25            | 81,88              |
| Persentase                    | %      | N/A       | N/A  | N/A            | -34,25            | 81,88              |



| Indikator   | Satuan    | Realisasi |         |         |         |         |
|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
|   |           | 2016      | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| peningkatan nilai ekspor perdagangan  |           |           |         |         |         |         |
| Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB                                     | %         | 22,84     | 22,80   | 22,71   | 22,75   | 21,95   |
| Nilai PDRB Sektor Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | Milyar Rp | 1508,27   | 1582,03 | 1659,82 | 1761,76 | 1698,73 |

(Sumber: Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran, 2021)

Berdasarkan tabel diatas persentase pertumbuhan ekspor di Kabupaten Pangandaran meningkat secara signifikan. Pada tahun 2019 persentase pertumbuhan ekspor -34,25 persen, sedangkan pada tahun 2020 pertumbuhan ekspor Kabupaten Pangandaran sebesar 81,88 persen. Hal ini juga diikuti dengan meningkatnya nilai ekspor daerah pada tahun 2020 yakni sebesar Rp. 108.822.663.607,83.

Penurunan capaian pada tahun 2020 pada seluruh indikator kecuali pada pertumbuhan ekspor menunjukkan dampak pandemi Covid-19 cukup berpengaruh terhadap perdagangan yang ada di Kabupaten Pangandaran. Lesunya perekonomian dan adanya pembatasan sosial menyebabkan perdagangan di Kabupaten pangandaran menjadi menurun signifikan pada tahun 2020.

### 2.3.3.5 Perindustrian

Perindustrian merupakan unsur dalam pelaksanaan urusan pemerintah untuk peningkatan ekonomi. Bidang perindustrian akan selalu menghadapi tantangan yang kompleks dalam peningkatan ekonomi. Urusan perindustrian termasuk dalam pelayanan urusan pilihan. Capaian kinerja urusan perindustrian dalam waktu lima tahun terakhir adalah sebagai berikut.



**Tabel 2.56 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

| Indikator                                | Satuan   | Realisasi           |                     |                     |                     |                     |
|--|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |          | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                |
| Jumlah industri baru                     | industri | N/A                 | N/A                 | N/A                 | 19                  | 13                  |
| Persentase Pertumbuhan Industri          | %        | N/A                 | N/A                 | N/A                 | 0,005               | 0,004               |
| Cakupan Bina Kelompok Pengrajin          | %        | N/A                 | N/A                 | N/A                 | 0,45                | 0,52                |
| Kontribusi sektor industri terhadap PDRB | %        | 4,90                | 4,85                | 4,85                | 4,79                | 4,78                |
| Nilai PDRB Sektor Industri               | Rp       | 425.185.<br>310.000 | 455.736.<br>160.000 | 501.953.<br>750.000 | 542.222.<br>960.000 | 549.570.<br>910.000 |

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran, 2021)

Berdasarkan tabel diatas persentase pertumbuhan industri Kabupaten Pangandaran mengalami penurunan secara signifikan dari 0,005 persen pada tahun 2019 menjadi 0,004 persen pada tahun 2020. Hal ini diikuti dengan jumlah industri baru yang menurun dari 19 industri pada tahun 2019 menjadi 13 industri pada tahun 2020.

Namun pada tahun 2020 Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran telah membina 0,45 persen pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 0,52 pada tahun 2020. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB berada di angka yang cukup stagnan dari 2016-2020 yaitu berada di kisaran 4,80an persen.

### 2.3.3.6 Transmigrasi

Pelaksanaan sektor transmigrasi melibatkan adanya Kerjasama antar pemerintah daerah baik itu melibatkan daerah pengirim maupun daerah yang menerima dengan pemerintah pusat yang menjadi fasilitator. Pola transmigrasi sudah mencerminkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat baik melalui transmigrasi umum maupun melalui transmigrasi swakarsa.



**Tabel 2.57 Hasil Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi  
Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

| Indikator                   | Satuan | Realisasi |      |      |      |      |
|-----------------------------|--------|-----------|------|------|------|------|
|                             |        | 2016      | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Jumlah Transmigran Swakarsa | KK     | 14        | 5    | 0    | 0    | 0    |

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran, 2021)

Tabel diatas menunjukan bahwa pada tahun 2019-2020 data belum tersedia. Jika dilihat dari tahun 2017 Persentase Transmigran Swakarsa mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya dari 14% pada tahun 2016 menjadi 5% di tahun 2017.

### **2.3.4 Fokus Layanan Pendukung, Penunjang, Pengawasan Urusan Pemerintahan**

Urusan penunjang urusan pemerintah pemerintah pada sub bab ini akan membahas mengenai keuangan daerah Kabupaten Pangandaran, kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Pangandaran, hingga SilPa Perhitungan anggaran.

#### **2.3.4.1 Perencanaan**

Perencanaan merupakan aspek yang utama dalam menyusun dan membangun suatu daerah. Perencanaan yang baik maka akan berdampak pula kepada pembangunan yang baik pula. Hal ini juga yang menjadi realisasi SAKIP Bappeda bisa mendapatkan nilai A. Berikut capaian urusan perencanaan Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020.

**Tabel 2.58 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

| Indikator   | Satuan | Realisasi |      |           |           |           |
|---|--------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
|   |        | 2016      | 2017 | 2018      | 2019      | 2020      |
| Nilai SAKIP Unsur Perencanaan                                 | %      | N/A       | N/A  | 22,22     | 22,09     | 22,24     |
| Persentase Sinergitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan | %      | N/A       | N/A  | 94,26     | 98,17     | 97,75     |
| Nilai SAKIP Bappeda   | %      | N/A       | N/A  | A (89,71) | A (89,86) | A (89,88) |

(Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021)



Dari tabel diatas terlihat bahwa ada peningkatan terkait capaian Nilai SAKIP unsur perencanaan dari 22,22 pada tahun 2018 menjadi 22,24 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan perencanaan di Kabupaten Pangandaran semakin baik. Selain itu indikator persentase sinergitas dan konsistensi perencanaan pembangunan juga mengalami kenaikan dari 94,26 pada tahun 2018 menjadi 97,75 pada tahun 2020. Demikian pula Nilai SAKIP Bappeda naik menjadi 89,88 pada tahun 2020 yang sebelumnya hanya 89,86 pada tahun 2019.

#### **2.3.4.1 Keuangan**

Perencanaan suatu daerah tidak hanya berfokus kepada program dan kegiatan, namun juga harus fokus kepada perencanaan keuangannya. Perencanaan keuangan yang bagus dan diikuti dengan perencanaan pembangunan yang bagus maka akan berdampak pada peningkatan kinerja daerah. Capaian Badan keuangan pada Nilai SAKIP tahun 2020 adalah A. Hal ini menunjukkan badan keuangan sudah bekerja dengan baik.

**Tabel 2.59 Hasil Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

| Indikator  | Satuan | Realisasi |       |       |      |        |
|--|--------|-----------|-------|-------|------|--------|
|  |        | 2016      | 2017  | 2018  | 2019 | 2020   |
| Nilai SAKIP dan Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran | Nilai  | N/A       | B     | A     | A    | A      |
| Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah   | Opini  | WTP       | WTP   | WTP   | WTP  | WTP    |
| Persentase Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (%)                            | %      | 2,92      | 31,22 | 30,75 | 0,8  | -27,79 |

(Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2021)

Dari tabel diatas terlihat bahwa opini BPK terhadap laporan keuangan daerah selama 5 tahun dari tahun 2016-2020 adalah WTP. Hal ini menunjukkan penyelenggaraan keuangan daerah Kabupaten Pangandaran sudah memenuhi unsur kewajaran serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.



Selain itu nilai SAKIP Badan Pengelolaan Keunagan Daerah Kabupaten Pangandaran memiliki nilai A 3 tahun berturut-turut dari tahun 2018-2020. Namun terjadi penurunan peningkatan pengelolaan PAD yang hanya mencapai -27,79% di tahun 2020 yang sebelumnya bisa 0,8% pada tahun 2019.

#### **2.3.4.2 Kepegawaian, Kependidikan, dan Pelatihan**

Peningkatan kemampuan melalui kependidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh Badan Kepegawaian untuk meningkatkan kualitas dari ASN. Semakin meningkat kualitasnya maka output yang dihasilkan juga semakin bagus yang berdampak kepada peningkatan pelayanan.

**Tabel 2.60 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

| Indikator   | Satuan | Realisasi |        |        |        |        |
|---|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|
|   |        | 2016      | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| Persentase ASN yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi Teknis                    | %      | N/A       | 0,03%  | 2,80%  | 1,40%  | 10,25% |
| Persentase Pejabat Struktural yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi Manajerial | %      | 4,80%     | 1,74%  | 14,50% | 11,80% | 14%    |
| Persentase OPD yang Tidak terdapat Hukuman Disiplin                           | %      | N/A       | 51,52% | 94,12% | 80%    | 80%    |
| Persentase ASN dengan Data Kepegawaian Akurat                                 | %      | N/A       | 58%    | 63%    | 72%    | 80%    |
| Indeks Profesionalitas ASN (1 s/d 100)  | skor   | N/A       | N/A    | 57,85  | 58,65  | 38,92  |

(Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2021)

Dari tabel diatas terlihat bahwa terdapat peningkatan capaian urusan kepegawaian di Kabupaten Pangandaran meskipun terhadap beberapa indikator yang mengalami penurunan. Persentase ASN yang memenuhi persyaratan kompetensi teknis meningkat dari 0,03% dari tahun 2017 meningkat menjadi 10,25% pada tahun 2020. Indeks profesionalitas ASN menurun dari capaian 57,85 pada tahun 2018 turun menjadi 38,92 pada tahun 2020.



### 2.3.4.3 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan adalah salah satu pioner daerah untuk terus maju dan mampu untuk menciptakan inovasi pemerintahan. Dengan banyaknya inovasi yang ada maka tujuan perwujudan *good governance* akan segera tercapai. Berikut adalah capaian urusan penelitian dan pengembangan Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020.

**Tabel 2.61 Hasil Capaian Kinerja Urusan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

| Indikator                      | Satuan | Realisasi |      |      |      |      |
|--------------------------------|--------|-----------|------|------|------|------|
|                                |        | 2016      | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Jumlah kelitbangan dalam RKPD  | Persen | N/A       | N/A  | N/A  | 0,09 | 0,06 |
| Jumlah kelitbangan dalam RPJMD | Persen | N/A       | N/A  | N/A  | 0,07 | 0,04 |

(Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021)

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase implementasi rencana kelitbangan baru tersedia data nya di tahun 2019 dan 2020 hal ini disebabkan oleh kelembagaan sub bidang Penelitian dan Pengembangan baru terpisah pada tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dan pada data tabel diatas belum menggambarkan pemanfaatan dari hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan pengambilan kebijakan

### 2.3.4.4 Pengawasan

Aspek pengawasan menjadi hal yang cukup krusial dan harus dilakukan oleh perangkat daerah yang bertugas untuk mengawasi yaitu Inspektorat. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina



dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Salah satu capaian yang didapat dari aspek pengawasan adalah persentase unit kerja yang melaksanakan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas mencapai 25%.

**Tabel 2.62 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

| Indikator  | Satuan | Realisasi |      |      |      |      |
|--|--------|-----------|------|------|------|------|
|  |        | 2016      | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Tingkat Kapabilitas Apip (1 s/d 5)   | Skor   | N/A       | N/A  | 2    | 2    | 2    |
| Tingkat Kematangan implementasi SPIP (1 s/d 5)   | Skor   | N/A       | N/A  | 3    | 3    | 3    |
| Persentase Unit Kerja yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Daerah | %      | N/A       | N/A  | 0    | 7,4  | 7,4  |

(Sumber: Inspektorat Kabupaten Pangandaran, 2021)

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian seluruh indikator urusan pengawasan stagnan dari tahun 2018-2020. Hal ini terlihat bahwa tingkat kapabilitas SAKIP berada di skor 66,67. Selanjutnya tingkat kematangan implementasi SPIP berada di skor 100. Dan yang terakhir adalah persentase unit kerja yang melaksanakan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas daerah adalah 25%.

#### **2.3.4.5 Pemerintahan Umum**

Wilayah administratif adalah wilayah kerja Perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah.



Salah satu perangkat daerah yang bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan umum adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau biasa disebut dengan Bakesbagpol. Bakesbangpol mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Berikut hasil capaian kinerja urusan pemerintahan umum Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020:

**Tabel 2.63 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

| Indikator   | Satuan  | Capaian |      |       |      |       |
|---|---------|---------|------|-------|------|-------|
|   |         | 2016    | 2017 | 2018  | 2019 | 2020  |
| Jumlah Kejadian Konflik   | Konflik | N/A     | N/A  | 1     | 1    | 0     |
| Peningkatan jumlah masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa | Orang   | 440     | 300  | 150   | 0    | 280   |
| Peningkatan cakupan kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan                 | Orang   | 225     | 238  | 75    | 238  | 190   |
| Angka Partisipasi masyarakat  | Per센    | N/A     | N/A  | 79,04 | 82,1 | 83,88 |
| Meningkatnya kesadaran berpolitik masyarakat  | Per센    | N/A     | N/A  | 79,04 | 82,1 | 83,88 |

(Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2021)

Berdasarkan tabel diatas jumlah kejadian konflik mengalami penurunan, di mana pada tahun 2018 dan 2019 terdapat 1 (satu) konflik. Sedangkan pada tahun 2020 tidak ada konflik yang terjadi di Kabupaten Pangandaran. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan konflik dilakukan dengan baik dengan cara mitigasi konflik agar tidak muncul potensi konflik di masyarakat.

Selain itu pada tahun 2020 angka partisipasi masyarakat Kabupaten Pangandaran meningkat mencapai 83,88 pada tahun 2020. Hal ini dapat diakibatkan juga dengan meningkatnya kesadaran berpolitik masyarakat Kabupaten Pangandaran di tahun 2020.



#### 2.3.4.6 Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan Lembaga teknis daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Berikut adalah capaian urusan sekretariat daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020.

**Tabel 2.64 Hasil Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

| Indikator   | Satuan   | Realisasi |      |      |               |                   |
|---|----------|-----------|------|------|---------------|-------------------|
|   |          | 2016      | 2017 | 2018 | 2019          | 2020              |
| Indeks Reformasi Birokrasi  | Predikat | N/A       | N/A  | N/A  | CC<br>(51,60) | CC<br>(52,06)     |
| Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah | %        | 90        | 88   | 98   | 166,67        | 166,67            |
| Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang sesuai dengan Juknisnya                                       | %        | 90        | 93   | 95   | 97            | 95                |
| IKM Setda   | Predikat | N/A       | N/A  | N/A  | N/A           | Sedang<br>(28,26) |
| Nilai SAKIP dan Kinerja Keuangan  | Predikat | N/A       | N/A  | N/A  | N/A           | A (80)            |
| Indeks Nilai (N-1) LPPD   | Predikat | N/A       | N/A  | N/A  | N/A           | Tinggi            |
| Survey Kepuasan Masyarakat  | Predikat | N/A       | N/A  | N/A  | N/A           | 80<br>(Baik)      |

(Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran, 2021)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Nilai SAKIP Sekretariat Daerah adalah A menunjukkan bahwa kemampuan kinerja Sekretariat Daerah sudah bagus. Selain itu berdasarkan survei kepuasan masyarakat nilai layanan sekretariat daerah mencapai angka 80 pada tahun 2020. Capaian lain adalah indeks nilai LPPD Sekretariat Daerah menunjukkan predikat tinggi sedangkan untuk IKM menunjukkan predikat sedang dengan nilai 28,26.



Namun kekurangannya adalah ada di Indeks Reformasi Birokrasi yang masih mencapai predikat CC atau 52,06 dalam nilainya. Hal ini bisa dijadikan semangat untuk perangkat daerahnya agar bisa menjadi lebih baik pada periode RPJMD berikutnya.

#### **2.3.4.7 Sekretariat Dewan**

Sekretariat dewan merupakan Lembaga yang bertugas untuk memenuhi dan mendukung kebutuhan dan operasional dari para anggota dewan yang ada di daerah. Indikator dari sekretariat dewan adalah penerbitan rencana kerja tahunan anggota DPRD Kabupaten Pangandaran. Setiap tahunnya sekretaris dewan mampu untuk menerbitkan rencana tahunan tersebut dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

**Tabel 2.65 Hasil Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran**

| Indikator   | Realisasi                  |                            |                            |                            |                            |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|   | 2016                       | 2017                       | 2018                       | 2019                       | 2020                       |
| Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten Pangandaran  | 188.4/K pts.01 /DPRD/ 2016 | 188.4/K pts.01 /DPRD/ 2017 | 188.4/Kpts.01.a /DPRD/2018 | 188.4/K pts.01 /DPRD/ 2019 | 188.4/K pts.01 /DPRD/ 2020 |
| Persentase Kenaikan Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan | N/A                        | N/A                        | 67,40%                     | 81,38%                     | 83,54%                     |

(Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran, 2021)

Dari tabel diatas terlihat persentase kenaikan tingkat kepuasan pelayanan sekretariat DPRD menjadi 83,54% pada tahun 2020 yang sebelumnya hanya mencapai 67,40%.



#### 2.3.4.1 Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana merupakan salah satu hal yang wajib menjadi aspek yang wajib untuk di utamakan dikarenakan Kabupaten Pangandaran merupakan daerah yang rawan akan bencana. Bencana tsunami dan gempa bumi merupakan dua bencana yang cukup sering terjadi dan berdampak kepada minat wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pangandaran. Nilai SAKIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah A dan menunjukkan bahwa Lembaga tersebut memiliki kinerja yang baik.

**Tabel 2.66 Hasil Kinerja Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

| Indikator   | Satuan | Realisasi |      |         |           |           |
|---|--------|-----------|------|---------|-----------|-----------|
|   |        | 2016      | 2017 | 2018    | 2019      | 2020      |
| Persentase desa/kelurahan/ kampung rawan bencana yang mendapat/memperoleh informasi peringatan dini bencana | %      | 69,3      | 71,2 | 69      | 68,8      | 68,8      |
| Persentase desa/kelurahan tangguh bencana   | %      | 17        | 20   | 24      | 27        | 29        |
| Persentase Korban Bencana yang mendapatkan penanganan   | %      | 0,78      | 5,19 | 0,09    | 0,09      | 2,4       |
| Persentase rencana pemulihan pasca bencana yang berhasil direalisasikan                                     | %      | 100       | 100  | 100     | 100       | 0         |
| Persentase jumlah kerusakan akibat bencana yang ter rehabilitasi  | %      | 100       | 100  | 100     | 100       | 0         |
| Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah   | %      | 0         | 0    | BB (80) | A (85,65) | A (86,01) |
| Indeks Kapasitas Daerah   | Indeks | 0         | 0    | 55      | 0,67      | 0,67      |
| Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit                                 | kali   | 6         | 8    | 40      | 67        | 12        |
| Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK  | kali   | 11        | 12   | 62      | 89        | 30        |

(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran, 2021)

Dari tabel di atas dapat dilihat mengenai capaian indikator penanggulangan bencana banyak yang cenderung naik seperti persentase desa tangguh bencana dari 17 desa di tahun 2016 naik



menjadi 29 desa di tahun 2020. Selain itu ada juga mengenai persentase korban bencana yang mendapatkan penanganan dari 0,09 pada tahun 2018 menjadi 2,4 pada tahun 2020.

Namun penurunan juga terjadi terkait kebakaran di WMK yang tertangani maksimal 15 menit dari 67 di tahun 2019 turun menjadi 12 di tahun 2020. Selanjutnya adalah mengenai jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK yang mengalami penurunan dari 89 kali menjadi 30 kali.

## **2.4 Aspek Daya Saing Daerah**

Pada aspek daya saing daerah dibawah ini akan menjelaskan fokus Kabupaten Pangandaran pada kemampuan ekonomi, fasilitas wilayah/ infrastruktur, iklim investasi, sumber daya manusia dan daya saing pariwisata.

### **2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah.

Menurut BPS, Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dan Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Sehingga komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia.



**Tabel 2.67 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kemampuan Ekonomi Daerah**

| Indikator                          | Realisasi         |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                    | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              |
| Pengeluaran Konsumsi per Kapita    | N/A               | N/A               | N/A               | 590.032.00        | 635.968.00        |
| Persentase Konsumsi                | N/A               | N/A               | N/A               | 1.067.368.00      | 1.131.678.00      |
| Pengeluaran Non-Makanan per Kapita | N/A               | N/A               | N/A               | 1.067.368.00      | 1.131.678.00      |
| APBD                               | 1.204.775.293.776 | 1.369.352.917.674 | 1.206.029.842.733 | 1.616.168.604.724 | 1.616.170.000.012 |
| Silpa                              | 72.021.207.850    | 28.598.897.718    | 3.811.288.680     | 16.043.940.289    | 16.043.940.289    |

(Sumber: Diolah Penyusun, 2021)

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja urusan kemampuan ekonomi daerah mengalami kenaikan di setiap indikatornya. Pada indikator pengeluaran konsumsi per kapita tahun 2020 mengalami kenaikan yakni sebesar Rp. 635.968.00. Selain itu pada indikator Pengeluaran Non-Makanan per Kapita tahun 2020 juga mengalami kenaikan yakni sebesar Rp. 1.131.678.00.

APBD dari Kabupaten Pangandaran akan memperlihatkan keuangan dari daerah tersebut. Semakin tinggi APBDnya maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerahnya. Pada tabel diatas diperlihatkan bahwa APBD Kabupaten Pangandaran mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan peningkatan pendapatan daerah yang diiringi juga dengan peningkatan pembiayaan dikarenakan beban belanja yang juga ikut meningkat. Peningkatan terlihat pada APBD Tahun 2016 1.204.775.293.776 meningkat menjadi 1.616.170.000.012 pada tahun 2020.

SILPA (dengan huruf I besar/capital) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Pada SILPA Kabupaten Pangandaran tahun 2016 adalah 72.021.207.850 dan mengalami peningkatan sampai 1.6043.940.289 pada tahun 2020.



## 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas wilayah atau infrastruktur yang menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor antara lain dapat diketahui dari beberapa indikator antara lain jumlah orang yang terangkut angkutan umum dan jumlah orang melalui terminal, penataan wilayah, fasilitas bank dan non-bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik dan telepon, restoran/rumah makan, dan ketersediaan penginapan.

Peran fasilitas wilayah/infrastruktur terhadap daya saing Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dari beberapa hal salah satunya adalah panjang jalan seperti digambarkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.68 Hasil Capaian Kinerja Urusan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2020**

| Indikator  | Satuan | Capaian Kinerja |         |         |         |         |
|--|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
|  |        | 2016            | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| Panjang Jalan  | Km     | 504,31          | 504,31  | 504,31  | 504,31  | 504,31  |
| Jumlah arus penumpang angkutan umum                    | Jumlah | N/A             | 44.238  | 58.070  | 65.311  | 48.150  |
| Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan                    | Jumlah | N/A             | 10      | 10      | 24      | 12      |
| Rasio ijin trayek                                      | Jumlah | N/A             | 0,0024  | 0,0024  | 0,0057  | 0,0028  |
| Jumlah uji kir angkutan umum                           | Jumlah | 82              | 78      | 64      | 50      | 45      |
| Jumlah Angkutan Darat                                  | Jumlah | N/A             | 2.496   | 2.685   | 2.587   | 2.405   |
| Jumlah penumpang angkutan darat                        | Jumlah | N/A             | 537.805 | 358.988 | 631.396 | 474.383 |
| Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR           | Jumlah | 80              | 87      | 101     | 129     | 132     |
| Jumlah angkutan umum                                   | Jumlah | 160             | 162     | 165     | 165     | 165     |
| Jumlah pemasangan rambu-rambu                          | Jumlah | 732             | 732     | 757     | 782     | 835     |
| Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia            | Jumlah | 1.380           | 1.380   | 1.380   | 1.380   | 1.380   |
| Tabel Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum | Jumlah | 463.952         | 469.098 | 466.838 | 458.363 | 473.231 |
| Jumlah orang/barang melalui dermaga                    | Jumlah | 6.223           | 17.081  | 18.151  | 20.515  | 33.657  |



| Indikator                            | Satuan | Capaian Kinerja |         |         |         |         |
|--------------------------------------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
|                                      |        | 2016            | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| Jumlah orang/barang melalui terminal | Jumlah | 456.179         | 449.592 | 446.110 | 435.217 | 473.231 |
| Jumlah orang/ barang melalui bandara | Jumlah | 1.550           | 2.425   | 2.577   | 2.631   | 1.576   |

(Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran 2021)

Pada tabel di atas dapat dilihat kemampuan Kabupaten Pangandaran terkait fasilitas wilayah dan infrastruktur. Panjang jalan Kabupaten Pangandaran tidak bertumbuh dan tetap pada panjang 504,31 km. Padahal arus penumpang cukup tinggi serta mobilitas masyarakat Kabupaten Pangandaran naik dengan signifikan hingga 435.217 orang/ barang yang melalui terminal. Hal ini menunjukkan kebutuhan fasilitas jalan yang tinggi. Selain itu kebutuhan infrastruktur jalan yang seharusnya tersedia sebesar 1.380 hanya mampu tersedia 782 pada tahun 2020.

#### 2.4.3 Fokus Iklim Investasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga dapat diharapkan mampu mengurangi beban pengangguran dan menanggulangi masalah kemiskinan.

Beberapa faktor yang diindikasikan mempunyai pengaruh yang sangat berarti bagi tumbuhnya iklim investasi daerah, seperti angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa. Sedangkan peran iklim berinvestasi terhadap daya saing di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dari beberapa hal salah satunya adalah investasi daerah.

**Tabel 2.69 Hasil Capaian Kinerja Urusan Iklim Investasi Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2020**

| Indikator | Satuan | Capaian Kinerja |      |      |      |      |
|-----------|--------|-----------------|------|------|------|------|
|           |        | 2016            | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |



| Indikator                   | Satuan | Capaian Kinerja        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |        | 2016                   | 2017                   | 2018                   | 2019                   | 2020                   |
| Jumlah Investor PMDN        | Jumlah | 523                    | 789                    | 429                    | 131                    | 2124                   |
| Jumlah Investor PMA         | Jumlah | N/A                    | N/A                    | 1                      | N/A                    | N/A                    |
| PMA                         | Rp     | 0                      | 3,376,000,00           | 17,750,000,00          | 0                      | 0                      |
| PMDN                        | Rp     | 269.331.393.39<br>1,00 | 539.813.364.250<br>,00 | 187.541.216.99<br>5,00 | 475.010.357.98<br>7,00 | 349.898.121.67<br>9,00 |
| Jumlah investasi (PMA/PMDN) | Rp     | N/A                    | N/A                    | N/A                    | N/A                    | 349.899 M              |

(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Pada tabel di atas dapat dilihat, jumlah investasi PMDN mengalami flukatif atau dapat dikatakan selalu berubah – ubah dari setiap tahun ke tahun. Tentu Kabupaten Pangandaran dalam hal tersebut harus lebih mengoptimalkan capaian iklim investasinya.

#### 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang fundamental dalam majunya sebuah daerah karena sumber daya manusia memberikan sumbangan pemikiran dan upaya-upaya dalam mencapai tujuan. Fokus sumber daya manusia dapat dilihat dari rasio ketergantungan yang dijelaskan pada sub bab dibawah ini.

**Tabel 2.70 Rasio Kelulusan S1/S2/S2 Tahun 2016 – 2020**

| Indikator Kinerja | Satuan | Capaian Kinerja |      |      |      |      |
|-------------------|--------|-----------------|------|------|------|------|
|                   |        | 2016            | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Lulusan S1        | Jumlah | 509             | 524  | 554  | 582  | 224  |
| Lulusan S2        | Jumlah | 53              | 55   | 58   | 61   | 0    |
| Lulusan S3        | Jumlah | 0               | 0    | 0    | 0    | 0    |

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran, 2021)

Dilihat dari tabel di atas maka akan terlihat bahwa jumlah lulusan tingkat pendidikan sarjana di Kabupaten Pangandaran cukup bervariatif. Angka lulusan yang ada berfokus kepada lulusan S1 yang mendominasi angka kelulusan sarjana.



#### **2.4.5 Fokus Daya Saing Pariwisata**

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pengembangan perekonomian nasional maupun daerah. Berkaitan dengan pengembangan kepariwisataan, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Pada pasal 2 dinyatakan penyelenggaraan kepariwisataan berasaskan manfaat, keseimbangan, kemandirian, partisipatif, kelestarian, dan berkelanjutan. Adanya manfaat-manfaat tersebut, pariwisata yang ada di Kabupaten Pangandaran dapat menunjang daya saing daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, salah satunya PAD sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran seperti digambarkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.71 Hasil Capaian Kinerja Urusan Sektor Pariwisata Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2020**

| Indikator  | Satuan | Capaian Kinerja |                |                |                |                |
|--|--------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |        | 2016            | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
| Jumlah Kunjungan Wisatawan se-Kabupaten (yang dikelola pemda)  | Jumlah | 1.994.044       | 2.954.559      | 4.045.704      | 3.775.273      | 2.261.981      |
| PAD sektor pariwisata  | Jumlah | 5.732.038.150   | 14.598.742.005 | 19.813.647.250 | 18.472.858.000 | 13.786.568.250 |
| Penyelenggaraan festival seni dan budaya                       | Jumlah | 6               | 15             | 18             | 4              | N/A            |
| Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi      | Jumlah | N/A             | N/A            | 2              | 2              | N/A            |
| Jumlah Cagar budaya yang Dikelola Secara Terpadu (yang diduga) | Jumlah | N/A             | N/A            | 30             | 30             | 30             |

(Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran)

Dilihat dari tabel diatas, PAD sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran mengalami kenaikan di tahun 2008 hingga 2019. Akan tetapi, di tahun 2020 mengalami penurunan drastis dikarenakan adanya kejadian luar biasa Covid-19.



## 2.5 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi: SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah menerapkan keenam SPM tersebut. Adapun rincian penerapan masing-masing jenis pelayanan dasar melalui program perangkat daerah terkait disajikan pada tabel di bawah.



**Tabel 2.72 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)  
Tahun 2020**

| No                          | Jenis SPM / Indikator   | Satuan | Capaian  | Perangkat Daerah |
|-----------------------------|---|--------|----------|------------------|
| <b>A. Bidang Pendidikan</b> |   |        |          |                  |
| 1.                          | Rasio Sekolah / penduduk Usia 13-15   | Rasio  | 1:377,06 | Disdikpora       |
| 2.                          | Rasio Sekolah SD/MI/SMP/MTS / penduduk Usia 7-12 /13-15                                 | Rasio  | 1:139,15 | Disdikpora       |
| 3.                          | Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar                                  | Rasio  | 1:140,81 | Disdikpora       |
| 4.                          | Rasio   | Rasio  | 1:12,91  | Disdikpora       |
| 5.                          | Jumlah Guru SMP/MTs   | Orang  | 1,550    | Disdikpora       |
| 6.                          | Jumlah Murid SMP/MTs  | Orang  | 19,498   | Disdikpora       |
| 7.                          | Rasio   | Rasio  | 1:12,57  | Disdikpora       |
| 8.                          | Jumlah Guru (SD/MI + SMP/MTs)   | Orang  | 5.431    | Disdikpora       |
| 9.                          | Jumlah Murid (SD/MI + SMP/MTs)  | Orang  | 57.996   | Disdikpora       |
| 10.                         | Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar   | Rasio  | 1:10,76  | Disdikpora       |
| 11.                         | Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV   | Orang  | 4349     | Disdikpora       |
| <b>B. Bidang Kesehatan</b>  |   |        |          |                  |
| 1.                          | Rasio Posyandu Per Seratus Balita   | Rasio  | 1,88     | Dinkes           |
| 2.                          | Rasio pustkesmas per satuan penduduk  | Rasio  | 1:28.432 | Dinkes           |
| 3.                          | Rasio pustkesmas pembantu per satuan penduduk   | Rasio  | 1:12.544 | Dinkes           |
| 4.                          | Rasio poliklinik per satuan penduduk  | Rasio  | 1:20.309 | Dinkes           |
| 5.                          | Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih  | Jumlah | 6095     | Dinkes           |
| 6.                          | Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani   | %      | 97,38    | Dinkes           |
| 7.                          | Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan | %      | 102.10   | Dinkes           |
| 8.                          | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)                               | %      | 87,1     | Dinkes           |
| 9.                          | Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan  | %      | 100      | Dinkes           |
| 10.                         | Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak                                    | %      | 101,5    | Dinkes           |
| 11.                         | Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani   | %      | N/A      | Dinkes           |
| 12.                         | Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA                              | %      | 40,1     | Dinkes           |
| 13.                         | Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS   | %      | 40       | Dinkes           |
| 14.                         | Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati Dan Sembuh Dalam Program DOTS                  | %      | 56,8     | Dinkes           |
| 15.                         | Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi  | %      | 0,27     | Dinkes           |
| 16.                         | Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 -24 Bulan Keluarga Miskin     | %      | 100      | Dinkes           |



| No                              | Jenis SPM / Indikator   | Satuan | Capaian | Perangkat Daerah |
|---------------------------------|---|--------|---------|------------------|
| 17.                             | Persentase ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%)                                      | %      | 100     | Dinkes           |
| 18.                             | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)  | %      | 99,75   | Dinkes           |
| 19.                             | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)                          | %      | 100     | Dinkes           |
| 20.                             | Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)  | %      | 97,73   | Dinkes           |
| 21.                             | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)           | %      | 91,99   | Dinkes           |
| 22.                             | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)         | %      | 95,38   | Dinkes           |
| 23.                             | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)                 | %      | 80,97   | Dinkes           |
| 24.                             | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)                         | %      | 65,78   | Dinkes           |
| 25.                             | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)                      | %      | 100     | Dinkes           |
| 26.                             | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)                               | %      | 100     | Dinkes           |
| 27.                             | Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar (%) | %      | 100     | Dinkes           |
| 28.                             | Persentase Balita Gizi Buruk/Stunting yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan (%)                  | %      | 100     | Dinkes           |
| 29.                             | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)         | %      | 95,38   | Dinkes           |
| 30.                             | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)                 | %      | 80,97   | Dinkes           |
| 31.                             | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)                         | %      | 65,78   | Dinkes           |
| 32.                             | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)                      | %      | 100     | Dinkes           |
| 33.                             | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)                               | %      | 100     | Dinkes           |
| 34.                             | Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar (%) | %      | 100     | Dinkes           |
| 35.                             | Persentase Balita Gizi Buruk/Stunting yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan (%)                  | %      | 100     | Dinkes           |
| 36.                             | Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)  | %      | 8,55    | Dinkes           |
| 37.                             | Kasus HIV   | Orang  | 16      | Dinkes           |
| 38.                             | Angka kesakitan Tuberculosis  | Orang  | 387     | Dinkes           |
| <b>C. Bidang Pekerjaan Umum</b> |   |        |         |                  |
| 1.                              | Persentase Pemenuhan kebutuhan akses air minum sehari-hari  | Persen | 76%     | DPUTRPRKP        |



| No                                | Jenis SPM / Indikator   | Satuan | Capaian | Perangkat Daerah |
|-----------------------------------|---|--------|---------|------------------|
| 2.                                | Persentase penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.   | Persen | 62%     | DPUTRPRKP        |
| <b>D. Bidang Perumahan</b>        |   |        |         |                  |
| 1.                                | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana   | n/a    | n/a     | DPUTRPRKP        |
| 2.                                | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten | n/a    | n/a     | DPUTRPRKP        |
| <b>E. Bidang Trantibum Linmas</b> |   |        |         |                  |
| 1.                                | Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP                                   | Jumlah | 37      | Kantor Satpol PP |
| 2.                                | Pelanggaran K3 yang terselesaikan   | Jumlah | 10      | Kantor Satpol PP |
| 3.                                | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (%)  | Persen | 100     | Kantor Satpol PP |
| 4.                                | pelayanan penyelamatan korban kebakaran   | Kasus  | 79      | BPBD             |
| 5.                                | Persentase desa/kelurahan tangguh bencana   | Persen | 29      | BPBD             |
| <b>F. Bidang Sosial</b>           |   |        |         |                  |
| 1.                                | Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial              | %      | 100     | Dinsos PMD       |
| 2.                                | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial    | %      | 6,71    | Dinsos PMD       |
| 3.                                | Jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang dibina                                      | Jiwa   | 1.427   | Dinsos PMD       |
| 4.                                | Persentase PSKS yang aktif sosialisasi/penyuluhan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial                   | %      | 100     | Dinsos PMD       |
| 5.                                | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat pelayanan kesejahteraan sosial  | Jiwa   | 117.471 | Dinsos PMD       |

(Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran 2021)

Selanjutnya, dari rangkaian penjelasan terhadap aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing pada Kabupaten Pangandaran disajikan dalam tabel di bawah ini :



**Tabel 2.73 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran**

| No      | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja |           |           |           |           | Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|         |  | 2016            | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |  |
| 2.2     | KESEJAHTERAAN MASAYARAKAT                                      |                 |           |           |           |           |  |
| 2.2.1.1 | Pertumbuhan PDRB   | 5,29            | 5,10      | 5,41      | 5,96      | -0,05     | <  |
| 2.2.1.2 | Indeks Gini  | 0,337           | 0,352     | 0,340     | 0,310     | 0,330     | <  |
| 2.2.1.3 | Penduduk Miskin (PO)   | 10,23           | 10,00     | 8,12      | 7,17      | 8,99      | =  |
| 2.2.1.4 | Laju Inflasi   | 3,45            | 3,48      | 3,24      | 1,72      | 1,61      | =  |
| 2.2.1.5 | Indeks Pembangunan Manusia                                     | 65,79           | 66,60     | 67,44     | 68,21     | 68,06     | =  |
| 2.2.2.1 | Angka Melek Huruf  | N/A             | N/A       | N/A       | N/A       | 99,46     | =  |
| 2.2.2.3 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)                      | N/A             | N/A       | 77,74     | 75,08     | 76,79     |  |
|         | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)                             | 4,20            | 3,34      | 3,58      | 4,48      | 5,08      |  |
| 2.2.3.1 | Penyelenggaraan Festival Seni Budaya                           | 6               | 15        | 18        | 4         | N/A       | <  |
| 2.2.3.1 | Jumlah Klub Olahraga   | 127             | 127       | 127       | 127       | 146       | >  |
| 2.3     | PELAYANAN UMUM   |                 |           |           |           |           |  |
| 2.3.1   | Pelayanan Umum Wajib Dasar                                     |                 |           |           |           |           |  |
| 2.3.1.1 | Pendidikan   |                 |           |           |           |           |  |
|         | Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A                          | 106,34          | 100,64    | 104,5     | 97,03     | 96        | =  |
|         | Angka Partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B                        | 105,75          | 98,2      | 98,82     | 99,29     | 98        | =  |
|         | Angka partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C                     | 60,29           | 63        | 0         | 0         | 0         | <  |
|         | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A                    | 91              | 78        | 93        | 88        | 91        | =  |
|         | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B                  | 69              | 72        | 78        | 67        | 69        | =  |
|         | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C               | 44,15           | 43        | 0         | 0         | 0         | <  |
|         | Jumlah Guru Berijazah S1/DIV                                   | 2673            | 2283      | 2947      | 4527      | 4349      | <  |
| 2.3.1.2 | Kesehatan  |                 |           |           |           |           |  |
|         | Prevalensi Balita Stunting                                     | 4,8             | 3,7       | 4,1       | 3,3       | 3,94      | =  |
|         | Angka Harapan Hidup  | 70,4            | 70,56     | 70,84     | 71,12     | 71,4      | =  |
|         | Jumlah Perawat   | 181             | 144       | 355       | 355       | 446       | =  |
|         | Jumlah Bidan   | 85              | 134       | 370       | 373       | 377       | =  |
|         | Jumlah Farmasi   | 10              | 10        | 14        | 48        | 136       | =  |
|         | Jumlah Ahli Gizi   | 9               | 11        | 12        | 20        | 20        | =  |
|         | Jumlah Dokter Spesialis  | 0               | 0         | 0         | 0         | 12        | <  |
|         | Jumlah Dokter Gigi   | 7               | 7         | 7         | 9         | 12        | =  |
|         | Jumlah Dokter Umum   | 17              | 19        | 36        | 43        | 56        | =  |
|         | Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi                   | 13,3            | 40        | 73,3      | 100       | 100       | =  |
| 2.3.1.3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                              |                 |           |           |           |           |  |
|         | Panjang Jalan Kondisi Baik                                     | 97.83           | 181       | 269.75    | 401.2     | 429,129   | =  |
|         | Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)            | 52.86           | 52.86     | 63.58     | 63.58     | 67,57     | =  |
|         | Luas Areal Irigasi (Ha)  | 10.341,91       | 10.341,91 | 10.341,91 | 16.785,38 | 16.785,38 | =  |
|         | Persentase penduduk berakses air minum (%)                     | N/A             | 65        | 53        | 65        | 66        | =  |
|         | Jumlah jembatan yang terbangun (unit)                          | 1               | 3         | 4         | 4         | 6         | <  |
|         | Persentase Jalan dalam kondisi mantap                          | 31,98           | 47,72     | 60,09     | 83        | 85,09     | =  |
| 2.3.1.4 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman                         |                 |           |           |           |           |  |



| No      | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah   | Capaian Kinerja |          |                          |                           |                           | Interpretasi<br>Belum<br>tercapai (<)<br>Sesuai (=)<br>Melampaui<br>(>) |
|---------|--|-----------------|----------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
|         |  | 2016            | 2017     | 2018                     | 2019                      | 2020                      |   |
|         | Persentase rumah tinggal bersanitasi   | N/A             | N/A      | 54,62                    | N/A                       | N/A                       | <   |
|         | persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi  | 5,71            | 5,71     | 5,71                     | 5,71                      | 11,43                     | =   |
| 2.3.1.5 | Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat  |                 |          |                          |                           |                           |   |
|         | Kejadian Kebakaran Kabupaten Pangandaran   | N/A             | 11       | 31                       | 53                        | 79                        | =   |
|         | Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP                                    | N/A             | 14       | 24                       | 10                        | 37                        | =   |
| 2.3.1.6 | Sosial   |                 |          |                          |                           |                           |   |
|         | Jumlah PPKS dalam 1 tahun yang seharunya memperoleh bantuan sosial   | N/A             | 53.121   | 57.096                   | 50.817                    | 116.458                   | =   |
|         | Jumlah PPKS yang tertangani  | N/A             | 52.634   | 48.272                   | 45.944                    | 116.458                   | =   |
|         | Percentase PPKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial  | N/A             | 99,01    | 84,54                    | 90,41                     | 100                       | =   |
|         | Percentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial     | N/A             | 3,78     | 6,08                     | 5,81                      | 6,71                      | <   |
|         | Jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang dibina                                       | N/A             | N/A      | N/A                      | N/A                       | 1.427                     | <   |
| 2.3.2   | Layanan Urusan Wajib Non-Dasar   |                 |          |                          |                           |                           |   |
| 2.3.2.1 | Tenaga Kerja   |                 |          |                          |                           |                           |   |
|         | Percentase pencari kerja yang diimpulkan   | N/A             | N/A      | 0,98                     | 0,98                      | 0,98                      | =   |
| 2.3.2.2 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak   |                 |          |                          |                           |                           |   |
|         | Indeks Pembangunan Gender (IPG)  | N/A             | 89,30    | 89,68                    | 90,02                     | 89,78                     | <   |
|         | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)   | N/A             | 65,45    | 69,20                    | 74,56                     | 74,57                     | <   |
|         | Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)   | N/A             | 27,17    | 26,49                    | 26,11                     | 24,70                     | <   |
| 2.3.2.3 | Pangan   |                 |          |                          |                           |                           |   |
|         | Angka kecukupan Protein perkapita  | 65,7            | 63,7     | 68,8                     | 70,5                      | 70,6                      | <   |
|         | Jumlah Desa Rawan Pangan   | 13              | 11       | 10                       | 9                         | 8                         | <   |
|         | Total desa pangan lestari  | N/A             | N/A      | 18                       | 3                         | 3                         | =   |
|         | Ketersediaan pangan utama (food availability)  | 21887,73        | 32433,85 | 32576,42                 | 61823,74                  | 38727,46                  | =   |
|         | Skor PPH Konsumsi  | 87,1            | 82       | 89,5                     | 93,2                      | 94,5                      | =   |
|         | Angka ketersediaan Energi  | 2622,1          | 2896,2   | 3602                     | 6460                      | 5525,18                   | =   |
|         | Angka Ketersediaan Protein   | 63,9            | 79,2     | 275,62                   | 180,89                    | 350,72                    | =   |
|         | Skor PPH Ketersediaan  | N/A             | 82       | 89,5                     | 93,2                      | 94,50                     | =   |
|         | Indeks Ketahanan Pangan  | N/A             | N/A      | 77,18                    | 82,56                     | 81,99                     | =   |
| 2.3.2.4 | Pertanahan   |                 |          |                          |                           |                           |   |
|         | Percentase Jumlah Kebijakan umum mengenai pedoman pelaksanaan pengembangan dan penataan batas wilayah yang diterbitkan | N/A             | N/A      | N/A                      | 100                       | 100                       | =   |
| 2.3.2.5 | Lingkungan Hidup   |                 |          |                          |                           |                           |   |
|         | Volume produksi sampah   | N/A             | N/A      | 167.025,2 m <sup>3</sup> | 181.475,86 m <sup>3</sup> | 183.136,82 m <sup>3</sup> | =   |
|         | Persentase Penanganan sampah   | N/A             | N/A      | 18,10%                   | 29,18%                    | 16,84%                    | =   |
|         | Indeks Kualitas Air  | N/A             | 50       | 47,78                    | 50                        | 51,67                     | =   |



| No       | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja  |       |       |       |       | Interpretasi<br>Belum<br>tercapai (<)<br>Sesuai (=)<br>Melampaui<br>(>) |
|----------|--|------------------|-------|-------|-------|-------|---|
|          |  | 2016             | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |   |
|          | Indeks Kualitas Udara  | N/A              | 85,76 | 84,30 | 85,68 | 77,79 | =   |
|          | Indeks Kualitas Vegetasi/IKTL  | N/A              | 52,28 | 52,28 | 52,28 | 65,25 | =   |
| 2.3.2.6  | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                       |                  |       |       |       |       |   |
|          | Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik             | 23,23            | 32,64 | 78,03 | 91,96 | 96,95 | =   |
|          | Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga                                    | 57,05            | 44,06 | 29,02 | 17,03 | 26,78 | =   |
|          | Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)                        | N/A              | N/A   | 3,12  | 26,51 | 14,66 | <   |
|          | Persentase validasi database kependudukan                            | N/A              | N/A   | 8,7   | 30,43 | 39,13 | =   |
| 2.3.2.7  | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                     |                  |       |       |       |       |   |
|          | Prosentase Desa Kategori Swasembada                                  | N/A              | N/A   | N/A   | 4,30  | 8,60  | =   |
|          | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa kategori baik           | 6,45             | 13,98 | 26,88 | 44,09 | 59,14 | =   |
|          | Jumlah PKK aktif   | 104              | 104   | 104   | 104   | 104   | =   |
| 2.3.2.8  | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                         |                  |       |       |       |       |   |
|          | TFR / Total Fertility Rate   | 2,22             | 2,41  | 2,42  | 2,32  | 2,29  | <   |
|          | CPR / Contaceptive Prevalenci Rate (%)                               | 75,37            | 74,94 | 75,15 | 76,41 | 60,25 | =   |
|          | Unmet Need   | 17,55            | 17,49 | 17,23 | 14,88 | 24,84 | =   |
|          | LPP / Laju Pertumbuhan Penduduk (%)                                  | 0,6              | 0,58  | 0,53  | 0,53  | 0,55  | =   |
|          | Ratio Akseptor KB (%)  | 75,39            | 74,99 | 75,16 | 76,43 | 60,25 | =   |
|          | ASFR / Age Spesific Fertility Rate                                   | 23,89            | 22,6  | 13,45 | 17,61 | 18,01 | =   |
| 2.3.2.9  | Perhubungan  |                  |       |       |       |       |   |
|          | Rasio Sarana Prasarana Perhubungan Yang Ada Dalam Kondisi Baik       | 73,2             | 77,5  | 70    | 76,3  | 76,9  | =   |
|          | Persentase kecamatan yang terlayani angkutan umum                    | 30               | 40    | 50    | 50    | 60    | =   |
| 2.3.2.10 | Komunikasi dan Informatika   |                  |       |       |       |       |   |
|          | Indeks SPBE  | N/A              | N/A   | 1,50  | 2,32  | 3,02  | =   |
|          | IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat /Standart Kepuasan Masyarakat )     | 1                | 1     | 1     | 1     | 1     | =   |
| 2.3.2.11 | Usaha Mikro Kecil Menengah   |                  |       |       |       |       |   |
|          | Persentase koperasi aktif  | 26,63            | 30,54 | 32,69 | 33,96 | 89,02 | >   |
|          | Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)                                 | 0                | 0     | 100   | 100   | 100   | =   |
|          | Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)                                 | 0                | 0     | 100   | 100   | 100   | =   |
| 2.3.2.12 | Penanaman Modal  |                  |       |       |       |       |   |
|          | Jumlah Investor PMDN   | 523              | 789   | 429   | 131   | 2124  | >   |
|          | Jumlah Investor PMA  | N/A              | N/A   | 1     | N/A   | N/A   | <   |
| 2.3.2.13 | Kepemudaan dan Olahraga  |                  |       |       |       |       |   |
|          | Jumlah Klub Olahraga   | 127              | 127   | 127   | 127   | 146   | =   |
|          | Jumlah Gedung Olahraga   | 42               | 42    | 42    | 117   | 117   | =   |
| 2.3.2.14 | Statistik  |                  |       |       |       |       |   |
|          |  | Jumlah Publikasi | N/A   | 0     | 3     | 1     | <   |
| 2.3.2.15 | Persandian   |                  |       |       |       |       |   |
|          | Jumlah Sistem Informasi yang menerapkan sistem keamanan informasi    | N/A              | N/A   | 10    | 16    | 20    | <   |
| 2.3.2.16 | Kebudayaan   |                  |       |       |       |       |   |



| No       | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah   | Capaian Kinerja |                |                |                  |                | Interpretasi<br>Belum<br>tercapai (<)<br>Sesuai (=)<br>Melampaui<br>(>) |
|----------|--|-----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---|
|          |  | 2016            | 2017           | 2018           | 2019             | 2020           |   |
|          | Penyelenggaraan festival seni dan budaya                               | 6               | 15             | 18             | 12 (Keg. Bidang) | 8              | <   |
|          | Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi              | -               | -              | 2              | 2                | -              | <   |
|          | Jumlah Cagar budaya yang Dikelola Secara Terpadu                       | -               | -              | 30             | 30               | 30             | =   |
| 2.3.2.17 | Perpustakaan   |                 |                |                |                  |                |   |
|          | Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun                        | N/A             | 925            | 1.169          | 12.567           | 3.931          | =   |
|          | Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah         | N/A             | 2.077          | 3.490          | 3.709            | 4.010          | =   |
|          | Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai                   | N/A             | N/A            | N/A            | 1                | 1              | =   |
|          | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan | N/A             | 18,625         | 31,195         | 31,426           | 42,958         | =   |
| 2.3.2.18 | Kearsipan  |                 |                |                |                  |                |   |
|          | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)       | N/A             | N/A            | 18             | 18               | 18             | =   |
|          | Persentase arsip yang terjamin ke amanannya                            | N/A             | N/A            | N/A            | 48,03            | 48,03          | =   |
| 2.3.3    | Urusan Pilihan   |                 |                |                |                  |                |   |
| 2.3.3.1  | Kelautan dan Perikanan   |                 |                |                |                  |                |   |
|          | Jumlah Produksi Ikan (ton)   | N/A             | 3063,63        | 2517,61        | 2757,86          | 1522,53        | <   |
|          | Target Daerah (ton)  | N/A             | 2925           | 2931           | 2941             | 2947           | =   |
|          | Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)                                 | N/A             | 17,3           | 20,5           | 22,5             | 23,1           | =   |
|          | Target Daerah (kg/kapita/tahun)  | N/A             | 18,88          | 20,1           | 22,04            | 22,9           | =   |
|          | Jumlah Kelompok Nelayan  | 189             | 189            | 194            | 195              | 241            | =   |
|          | Jumlah Produksi Ikan Kontribusi Hasil Kelompok Nelayan                 | N/A             | 2830,53        | 2344,76        | 2498,91          | 1282,54        | =   |
|          | Produksi benih ikan  | N/A             | 8.538.451      | 6.825.978      | 8.617.470        | 11.728.291     | =   |
| 2.3.3.2  | Pariwisata   |                 |                |                |                  |                |   |
|          | Jumlah Kunjungan Wisata  | 1.994.044       | 2.954.559      | 4.045.704      | 3.775.273        | 2.842.022      | <   |
|          | Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata                               | 5.732.038,150   | 14.598.742,005 | 19.813.647,250 | 18.472.858,000   | 13.786.568,250 | <   |
|          | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB                             | 732.514         | 823.303        | 932.137        | 1.060.116        | 1.091.410,69   | =   |
| 2.3.3.3  | Pertanian  |                 |                |                |                  |                |   |
|          | Produktivitas Padi   | N/A             | 6,01           | 6,2            | 6,21             | 6,3            | <   |
|          | Luas Lahan Sawah   | N/A             | 16.564         | 16.564         | 16.564           | 16.564         | =   |
|          | Produktivitas Jagung   | N/A             | 6,59           | 6,26           | 5,97             | 6,01           | =   |
|          | Produksi tanaman padi/ bahan pangan utama lokal lainnya                | N/A             | 202.099,56     | 209.879,34     | 205.003,38       | 205.981,12     | =   |
| 2.3.3.4  | Perdagangan  |                 |                |                |                  |                |   |
|          | Persentase Pertumbuhan ekspor  | N/A             | N/A            | N/A            | -34,25           | 81,88          | =   |
|          | Prosentase peningkatan nilai ekspor perdagangan                        | N/A             | N/A            | N/A            | -34,25           | 81,88          | =   |
|          | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB                            | 22,84           | 22,80          | 22,71          | 22,75            | 21,95          | <   |
| 2.3.3.5  | Perindustrian  |                 |                |                |                  |                |   |
|          | Persentase Pertumbuhan Industri  | N/A             | N/A            | N/A            | 0,005            | 0,004          | <   |



| No      | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                      | Capaian Kinerja |       |           |           |           | Interpretasi<br>Belum<br>tercapai (<)<br>Sesuai (=)<br>Melampaui<br>(>) |
|---------|---|-----------------|-------|-----------|-----------|-----------|---|
|         |   | 2016            | 2017  | 2018      | 2019      | 2020      |   |
|         | Cakupan bina kelompok pengrajin (%)   | N/A             | N/A   | N/A       | 0,45      | 0,52      | >   |
| 2.3.3.6 | Transmigrasi  |                 |       |           |           |           |   |
|         | Persentase Transmigran Swakarsa   | 14              | 5     | 0         | 0         | 0         | <   |
| 2.3.4   | Layanan Pendukung, Penunjang, Pengawasan Urusan Pemerintahan  |                 |       |           |           |           |   |
| 2.3.4.1 | Perencanaan   |                 |       |           |           |           |   |
|         | Nilai SAKIP Unsur Perencanaan (%)   | N/A             | N/A   | 22,22     | 22,09     | 22,24     | =   |
|         | Persentase Sinergitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan                                       | N/A             | N/A   | 94,26     | 98,17     | 97,75     | =   |
|         | Nilai SAKIP Bappeda   | N/A             | N/A   | A (89,71) | A (89,86) | A (89,88) | =   |
| 2.3.4.1 | Keuangan  |                 |       |           |           |           |   |
|         | Nilai SAKIP dan Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                                  | N/A             | B     | A         | A         | A         | =   |
|         | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran                                    | WTP             | WTP   | WTP       | WTP       | WTP       | =   |
|         | Persentase Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (%)                                       | 2,92            | 31,22 | 30,75     | 0,8       | -27,79    | =   |
| 2.3.4.2 | Kepegawaian, Kependidikan, dan Pelatihan  |                 |       |           |           |           |   |
|         | Persentase ASN yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi Teknis  | N/A             | 0,03  | 2,80      | 1,40      | 10,25     | >   |
|         | Persentase Pejabat Struktural yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi Manajerial                       | 4,80            | 1,74  | 14,50     | 11,80     | 14        | =   |
| 2.3.4.3 | Penelitian dan Pengembangan   |                 |       |           |           |           |   |
|         | Jumlah kelitbangan dalam RKPD   | N/A             | N/A   | N/A       | 6         | 8         | =   |
|         | Jumlah kelitbangan dalam RPJMD  | N/A             | N/A   | N/A       | 8         | 8         | =   |
|         | Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan   | N/A             | N/A   | N/A       | 75        | 100       |   |
| 2.3.4.4 | Pengawasan  |                 |       |           |           |           |   |
|         | Menurunnya Rasio nilai temuan keuangan dari pengawasan pihak eksternal (BPK-RI) terhadap total APBD | N/A             | N/A   | 100       | 100       | 41,30     | =   |
|         | Persentase SKPD yang tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP-nya berada pada Level 3                | N/A             | N/A   | 108       | 100       | 85,71     | =   |
|         | Persentase SKPD yang nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)-nya sangat baik (BB)             | N/A             | N/A   | 117,64    | 117,63    | 133,33    | =   |
|         | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat                                  | N/A             | N/A   | 119,99    | 166,67    | 119,99    | =   |
|         | Persentase SKPD yang berpredikat ZI/WBK/WBBM  | N/A             | N/A   | 0         | 100       | 40,00     | =   |
| 2.3.4.5 | Pemerintahan Umum   |                 |       |           |           |           |   |
|         | Jumlah Kejadian Konflik   | N/A             | N/A   | 1         | 1         | 0         | <   |
|         | Peningkatan jumlah masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa                 | 440             | 300   | 150       | 0         | 280       | =   |



| No      | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah  | Capaian Kinerja        |                          |                          |                          |                          | Interpretasi<br>Belum<br>tercapai (<)<br>Sesuai (=)<br>Melampaui<br>(>) |
|---------|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
|         |   | 2016                   | 2017                     | 2018                     | 2019                     | 2020                     |   |
|         | Peningkatan cakupan kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan   | 225                    | 238                      | 75                       | 238                      | 190                      | <   |
| 2.3.4.6 | Sekretariat Daerah  |                        |                          |                          |                          |                          |   |
|         | Indeks Reformasi Birokrasi  | N/A                    | N/A                      | N/A                      | CC (51,60)               | CC (52,06)               | =   |
|         | Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah   | 90%                    | 88%                      | 98%                      | 166,67                   | 166,67                   | =   |
| 2.3.4.7 | Sekretariat Dewan   |                        |                          |                          |                          |                          |   |
|         | Persentase Kenaikan Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan | N/A                    | N/A                      | 67,40                    | 81,38                    | 83,54                    | =   |
| 2.3.4.1 | Penanggulangan Bencana  |                        |                          |                          |                          |                          |   |
|         | Persentase desa/kelura-han/kampung rawan bencana yang mendapat/ memperoleh informasi peringatan dini bencana  | 69,3                   | 71,2                     | 69                       | 68,8                     | 68,8                     | =   |
|         | Persentase desa/kelura-han tangguh bencana  | 17                     | 20                       | 24                       | 27                       | 29                       | =   |
| 2.4     | DAYA SAING DAERAH   |                        |                          |                          |                          |                          |   |
| 2.4.1   | Realisasi Pendapatan  | 928,041,3<br>99,889.00 | 1,264,692,8<br>35,455.00 | 1,137,227,0<br>65,389.50 | 1,474,724,16<br>9,544.00 | 1,572,138,480,<br>714.00 | =   |
|         | Realisasi Belanja   | 979,407,0<br>58,413.50 | 1,307,759,9<br>32,586.36 | 1,161,646,5<br>78,170.45 | 1,461,491,51<br>9,435.00 | 1,565,838,472,<br>278.00 | =   |
|         | SILPA   | 72,021,20<br>7,849.50  | 28,954,110,<br>718.14    | 3,734,597,9<br>37.00     | 16,043,940<br>,289.05    | 22,308,402,2<br>66.05    | =   |
| 2.4.2   | Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur   |                        |                          |                          |                          |                          |   |
|         | Panjang Jalan   | 504,31                 | 504,31                   | 504,31                   | 504,31                   | 504,31                   | =   |
|         | Jumlah arus penumpang angkutan umum   | N/A                    | 44.238                   | 58.070                   | 65.311                   | 48.150                   | =   |
|         | Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan   | N/A                    | 10                       | 10                       | 24                       | 12                       | >   |
| 2.4.3   | Fokus Iklim Investasi   |                        |                          |                          |                          |                          |   |
|         | Jumlah Investor PMDN  | 523                    | 789                      | 429                      | 131                      | 2124                     | >   |
|         | Jumlah Investor PMA   | N/A                    | N/A                      | 1                        | N/A                      | N/A                      | <   |
|         | PMA   | -                      | 3,376,000,0<br>00        | 17,750,000,<br>000       | -                        | -                        | <   |
|         | PMDN  | 269,331,3<br>93,391    | 539,813,36<br>4,250      | 187,541,216<br>,995      | 475,010,35<br>7,987      | 349,898,121,<br>679      | =   |
| 2.4.4   | Fokus Sumber Daya Manusia   |                        |                          |                          |                          |                          |   |
|         | Lulusan S1  | 509                    | 524                      | 554                      | 582                      | 224                      | <   |
|         | Lulusan S2  | 53                     | 55                       | 58                       | 61                       | N/A                      | <   |
| 2.4.5   | Fokus Daya Saing Pariwisata   |                        |                          |                          |                          |                          |   |
|         | Jumlah Kunjungan Wisatawan se-Kabupaten (yang dikelola pemda)   | 1.994.044              | 2.954.559                | 4.045.704                | 3.775.273                | 2.261.981                | =   |
|         | Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan se-Kabupaten  | 1.958.875              | 3.440.076                | 5.065.693                | 5.614.481                | 2.842.022                | =   |
|         | PAD sektor pariwisata   | 5.732.038.<br>150      | 14.598.742.<br>005       | 19.813.647.<br>250       | 18.472.858<br>.000       | 13.786.568.2<br>50       | =   |

(Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran 2021)



## 2.6 Capaian Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Pangandaran

### Periode Tahun 2016-2021

Periode RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021. Namun dalam perjalannya, terdapat perubahan yang diakibatkan :

1. Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekwensi adanya peralihan beberapa urusan pemerintahan di daerah menjadi urusan pemerintahan di provinsi, antara lain pengelolaan pendidikan menengah dan urusan kehutanan.
2. Adanya perubahan kebijakan di tingkat nasional dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan pemerintah tersebut memberikan konsekuensi terhadap harus dilakukannya perubahan kelembagaan perangkat daerah di semua daerah.

Dengan adanya perubahan tersebut maka RPJMD Kabupaten Pangandaran diubah dengan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas tentang Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021. Dalam perubahan tersebut terdapat beberapa indikator yang disesuaikan. Adapun hasil capaian indikator kinerja RPJMD periode sebelumnya tersaji dalam tabel di bawah ini.



**Tabel 2.74 Capaian Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021**

| No.   | Sasaran   | Indikator Kinerja   | Capaian Kinerja |       |       |         |        |
|---|---|---|-----------------|-------|-------|---------|--------|
|   |   |   | 2016            | 2017  | 2018  | 2019    | 2020   |
| <b>Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani</b>                               |   |   |                 |       |       |         |        |
| 1   | Birokrasi yang bersih dan akuntabel                                     | 1 Opini BPK terhadap LKPD   | WTP             | WTP   | WTP   | WTP     | WTP    |
|   |   | 2 Tingkat Kapabilitas APIP ( 1 s/d 5)                               | n/a             | n/a   | 2     | 2       | 2      |
|   |   | 3 Tingkat Kematangan implementasi SPIP (1 s/d 5)                    | n/a             | n/a   | 3     | 3       | 3      |
|   |   | 4 Nilai AKIP  | n/a             | n/a   | B     | B       | B      |
|   |   | 5 Persentase Penggunaan E-Procurement thd Belanja Pengadaan         | n/a             | n/a   | 85,73 | 94,15   | 97,30  |
| 2   | Birokrasi yang efektif dan efisien                                      | 1 Indeks Profesionalitas ASN (1 s/d 100)                            | n/a             | n/a   | 58,65 | 58,18   | 38,92  |
|   |   | 2 Tingkat Kematangan E-Goverment (0 s/d 5)                          | n/a             | n/a   | 0,85  | 2,32    | 3,02   |
|   |   | 3 Indeks Reformasi Birokrasi  | n/a             | n/a   | 41,56 | 51,60   | 52,06  |
| 3   | Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas               | 1 Persentase Zona Integritas Daerah ( 0 s/d 10)                     | n/a             | n/a   | n/a   | 7,4     | 8,57%  |
|   |   | 2 Survey Kepuasan Masyarakat  | n/a             | 76.00 | 78.62 | (81,18) | 84,49  |
| <b>Misi 2 : Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan</b> |   |   |                 |       |       |         |        |
| 1   | Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah | 1 Ketaatan terhadap RTRW  | n/a             | n/a   | 17,6  | 20,72   | 35     |
| 2   | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                  | 2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                  | n/a             | n/a   | 60,54 | 61,61   | 65,22  |
| <b>Misi 3 : Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas</b>  |   |   |                 |       |       |         |        |
| 1   | Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas                | 1 Persentase jalan dalam kondisi mantap                             | n/a             | n/a   | 60    | 83,38   | 85     |
|   |   | 2 Tingkat kecelakaan lalu lintas                                    | n/a             | n/a   | 0,005 | 0,003   | 0,002  |
|   |   | 3 Rasio jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik                  | n/a             | n/a   | 56%   | 0       | 68     |
|   |   | 4 Persentase Rumah Tangga Dengan Akses air minum                    | n/a             | n/a   | 62%   | 63,67%  | 66     |
|   |   | 5 Indeks Resiko Sanitasi  | n/a             | n/a   | 40%   | 38,27%  | 32     |
| 2   | Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana                       | 1 Indeks Risiko Bencana   | n/a             | n/a   | 130,8 | 146,13  | 145,44 |
| 3   | Mewujudkan pemenuhan bangunan pusat pemerintahan                        | 1 Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi | n/a             | n/a   | 8,57% | 0%      | 11%    |



| No.  | Sasaran   | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja  |       |       |           |           |
|--|---|-------------------|--|-------|-------|-----------|-----------|
|  |   |                   | 2016   | 2017  | 2018  | 2019      | 2020      |
| <b>Misi 4 : Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal</b>                          |   |                   |  |       |       |           |           |
| 1  | Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan | 1                 | Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal   | n/a   | n/a   | 50%       | 50%       |
|  |   | 2                 | Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik                                    | n/a   | n/a   | 82%       | 83%       |
| 2  | Meningkatnya Kesatuan Bangsa  | 1                 | Angka Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan  | n/a   | n/a   | 1         | 1         |
| 3  | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi    | 1                 | Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu   | n/a   | n/a   | 79,04%    | 82,10%    |
| <b>Misi 5: Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing</b>  |   |                   |  |       |       |           |           |
| 1  | Meningkatnya layanan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat       | 1                 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)   | 65,79 | 66,6  | 67,44     | 68,21     |
| 2  | Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk                                   | 1                 | Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)   | 0,598 | 0,581 | 0,529     | 0,528     |
| 3  | Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender                           | 1                 | Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)   | n/a   | n/a   | 65,45     | 69,20     |
| 4  | Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga                                 | 1                 | Indeks Pembangunan Kepemudaan  | n/a   | n/a   | 0,509     | 0,539     |
|  |   | 2                 | Indeks Pembangunan Keolahragaan  | n/a   | n/a   | 0,674     | 0,75      |
| 5  | Menurunnya angka kemiskinan   | 1                 | Persentase penurunan angka kemiskinan  | n/a   | n/a   | 1,88      | 0,41      |
| <b>Misi 6 : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan</b> |   |                   |  |       |       |           |           |
| 1  | Menurunnya kesenjangan antar wilayah                                      | 1                 | Indek Gini   | 0,33  | 0,35  | 0,34      | 0,31      |
| 2  | Menurunnya tingkat pengangguran   | 1                 | Persentase Tingkat pengangguran terbuka  | 4,2   | 3,34  | 3,58      | 4,48      |
| 3  | Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan                     | 1                 | Persentase pertumbuhan PDRB  | 5,29  | 5,10  | 5,41      | 5,96      |
|  |   | 2                 | Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM   | n/a   | n/a   | 95,30%    | 96%       |
|  |   | 3                 | Jumlah Koperasi yang sehat   | n/a   | n/a   | 1         | 1         |
|  |   | 4                 | Pola Pangan Harapan  | n/a   | n/a   | 89,6      | 93,20     |
|  |   | 5                 | Jumlah kunjungan wisata  | n/a   | n/a   | 4.044.204 | 4.119.987 |
|  |   | 6                 | Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari Global Sustainable Tourist Council (GSTC) | n/a   | n/a   | -         | -         |

Sumber : Diolah Penyusun, 2021



Meskipun secara umum capaian indikator kinerja RPJMD Kabupaten Pangandaran periode Tahun 2016-2021 berada pada kategori Baik, namun masih terdapat beberapa catatan terhadap indikator sasaran yang perlu ditingkatkan, antara lain :

1. Indeks Profesionalisme ASN

Perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan Profesionalisme ASN

2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Perlu upaya keras untuk penyadaran terhadap masyarakat agar tidak membuang sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga langsung ke sungai sehingga menurunkan kualitas air

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Menciptakan lapangan kerja untuk angkatan kerja agar angka pengangguran terbuka dapat ditekan atau diturunkan

4. Jumlah kunjungan wisata

Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata dengan cara menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan, serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata. Pembangunan destinasi wisata berupa pengembangan daya tarik wisata/atraksi, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, pembangunan fasilitas pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat

5. Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari *Global Sustainable Tourist Council (GSTC)*

Diperlukan dukungan dari semua pihak, berupa pelibatan seluruh OPD maupun masyarakat. Dengan adanya perubahan penilaian indikator GSTC, maka pemerintah daerah perlu berupaya memenuhi semua indikator yang menjadi persyaratan.

# *RPJMD*

RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

---

2021 - 2026

# BAB III

---

GAMBARAN  
KEUANGAN DAERAH



### **BAB III**

#### **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang terintegrasi atau tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan keuangan Negara, sehingga prinsip yang terkandung di dalam pengelolaan keuangan daerah masih terintegrasi dengan keberadaan Undang-undang di bidang keuangan Negara, salah satunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara serta undang-undang lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut merupakan pengaturan komprehensif yang mampu mengakomodir serta menyinkronkan seluruh pengaturan mengenai aspek pengelolaan keuangan daerah yang telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya merupakan upaya pemerintah daerah untuk menganalisis capaian serta memperoleh proyeksi yang tepat dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Gambaran pengelolaan keuangan membahas mengenai analisis realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Selain itu, gambaran pengelolaan keuangan juga menganalisis perkembangan neraca daerah yang meliputi aset dan utang daerah serta ekuitas dana. Kapasitas keuangan daerah perlu diketahui sebagai dasar mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan, sehingga belanja pembangunan dapat dilakukan secara optimal, efektif dan efisien.



### **3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Salah satu hal yang menjadi aspek penting dalam pemerintahan daerah adalah perihal keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan suatu realisasi kebijakan anggaran yang menjamin adanya efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi kepada masyarakat. Dalam melakukan pengelolaan keuangan mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD**

Pada pembahasan ini akan menguraikan aspek-aspek dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi aspek pendapatan dan aspek belanja, serta aspek pembiayaan. Aspek pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Aspek Belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:



1. Pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang/badan dan benda bergerak/tidak bergerak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dan beberapa potensi pajak lain yang bisa dipungut.
2. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata, seperti retribusi Pelayanan Kesehatan, retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair, dan hasil retribusi daerah lainnya.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain PAD yang sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan terkait belanja daerah yang merupakan pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada peraturan perundang-undangan yang lain yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang



diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintah di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan SKPD.

Perkembangan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut :



**Tabel 3. 1. Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016-2020 Kabupaten Pangandaran**

| No      | Uraian Anggaran   | Tahun                |                        |                        |                        |                        | Rata-Rata Pertumbuhan 2016-2020 |
|---------|---|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
|         |   | 2016                 | 2017                   | 2018                   | 2019                   | 2020                   |                                 |
| 1       | Pendapatan Daerah                                       | Rp928,041,399,889.00 | Rp1,264,692,835,455.00 | Rp1,137,227,065,389.50 | Rp1,474,724,169,544.00 | Rp1,572,138,480,714.00 | 15.62%                          |
| 1.1     | Pendapatan Asli Daerah                                  | Rp66,385,348,153.00  | Rp83,591,302,088.00    | Rp111,217,120,145.00   | Rp114,813,035,209.00   | Rp105,276,341,355.00   | 13.47%                          |
| 1.1.1   | Pajak Daerah  | Rp29,249,250,499.00  | Rp36,829,508,887.00    | Rp52,932,788,971.00    | Rp53,923,967,341.00    | Rp47,132,600,965.00    | 14.73%                          |
| 1.1.2   | Retribusi Daerah  | Rp10,034,701,782.00  | Rp28,546,301,743.00    | Rp36,875,710,049.00    | Rp35,887,478,953.00    | Rp30,360,808,289.00    | 48.89%                          |
| 1.1.3   | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan       | Rp0.00               | Rp0.00                 | Rp0.00                 | Rp0.00                 | Rp103,864,446.00       | 0.00%                           |
| 1.1.4   | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah                    | Rp27,101,395,872.00  | Rp18,215,491,458.00    | Rp21,408,621,125.00    | Rp25,001,588,915.00    | Rp27,679,067,65 5.00   | 3.06%                           |
| 1.1.4.1 | Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan               | Rp0.00               | Rp132,909,510.00       | Rp92,180,810.00        | Rp1,215,000.00         | Rp24,411,200.00        | 0.00%                           |
| 1.1.4.2 | Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan             | Rp0.00               | Rp0.00                 | Rp0.00                 | Rp0.00                 | Rp0.00                 | 0.00%                           |
| 1.1.4.3 | Hasil kerja sama daerah                                 | Rp0.00               | Rp0.00                 | Rp0.00                 | Rp0.00                 | Rp0.00                 | 0.00%                           |
| 1.1.4.4 | Jasa Giro   | Rp7,388,552,301.00   | Rp4,373,972,017.00     | Rp2,979,059,191.00     | Rp3,274,626,542.00     | Rp3,338,535,615.00     | -15.20%                         |
| 1.1.4.5 | Hasil Pengelolaan Dana Bergulir                         | Rp0.00               | Rp0.00                 | Rp0.00                 | Rp0.00                 |                        | 0.00%                           |
| 1.1.4.6 | Pendapatan Bunga  | Rp0.00               | Rp0.00                 | Rp0.00                 | Rp2,079,745,772.00     | Rp70,923,121.00        | 3,4%                            |
| 1.1.4.7 | Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah | Rp0.00               | Rp21,350,000.00        | Rp48,905,250.00        | Rp58,875,000.00        | Rp135,194,950.00       | 1,93%                           |



| No       | Uraian Anggaran   | Tahun                |                        |                      |                        |                        | Rata-Rata Pertumbuhan 2016-2020 |
|----------|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
|          |   | 2016                 | 2017                   | 2018                 | 2019                   | 2020                   |                                 |
| 1.1.4.8  | Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/ pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan, barang daerah atau kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah | Rp0.00               | Rp0.00                 | Rp0.00               | Rp0.00                 | Rp0.00                 | 0.00%                           |
| 1.1.4.9  | Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing  | Rp0.00               | Rp0.00                 | Rp0.00               | Rp0.00                 | Rp0.00                 | 0.00%                           |
| 1.1.4.10 | Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan   | Rp1,209,814,329.00   | Rp230,240,688.00       | Rp56,884,194.00      | Rp1,528,384.00         | Rp16,441,425.00        | 180.54%                         |
| 1.1.4.11 | Pendapatan denda pajak daerah   | Rp27,373,825.00      | Rp74,254,669.00        | Rp188,307,079.00     | Rp229,551,156.00       | Rp108,277,515.00       | 73.48%                          |
| 1.1.4.12 | Pendapatan denda retribusi daerah   | Rp2,997,274.00       | Rp1,708,190.00         | Rp50,000,000.00      | Rp0.00                 | Rp1,308,807.00         | 894.69%                         |
| 1.1.4.13 | Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan  | Rp0.00               | Rp0.00                 | Rp0.00               | Rp0.00                 | Rp0.00                 | 0.00%                           |
| 1.1.4.14 | Pendapatan dari pengembalian  | Rp4,212,591,643.00   | Rp1,128,014,173.00     | Rp3,032,693,522.00   | Rp3,248,816,183.00     | Rp6,500,542,402.00     | 50.71%                          |
| 1.1.4.15 | Pendapatan dari BLUD  | Rp0.00               | Rp0.00                 | Rp0.00               | Rp0.00                 | Rp0.00                 | 0.00%                           |
| 1.1.4.16 | Pendapatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan   | Rp14,260,066,500.00  | Rp12,253,042,211.00    | Rp14,960,591,079.00  | Rp16,107,230,878.00    | Rp17,483,432,620.00    | 6.06%                           |
| 1.2      | Pendapatan Transfer   | Rp861,656,051,736.00 | Rp1,142,677,253,367.00 | Rp987,734,399,074.00 | Rp1,317,169,089,241.00 | Rp1,422,014,919,359.00 | 15.09%                          |
| 1.2.1    | Transfer Pemerintah Pusat   | Rp759,967,076,495.00 | Rp889,838,406,687.00   | Rp881,425,098,727.00 | Rp988,109,610,345.00   | Rp909,749,204,315.00   | 5.08%                           |
| 1.2.1.1  | Dana Perimbangan  | Rp698,289,665,495.00 | Rp811,595,965,687.00   | Rp787,754,579,727.00 | Rp864,020,472,345.00   | Rp749,516,240,315.00   | 2.43%                           |
| 1.2.1.1. | Dana Transfer Umum  | Rp601,379,967,495.00 | Rp604,132,006,704.00   | Rp597,636,923,032.00 | Rp619,806,097,581.00   | Rp581,543,756,992.00   | -0.77%                          |



| No             | Uraian Anggaran   | Tahun               |                     |                     |                     |                     | Rata-Rata Pertumbuhan 2016-2020 |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
|                |   | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                |                                 |
| 1              |   |                     |                     |                     |                     |                     |                                 |
| 1.2.1.1. 1.1   | Dana Bagi Hasil   | Rp54,648,842,495.00 | Rp65,249,813,704.00 | Rp59,285,031,032.00 | Rp51,784,034,581.00 | Rp72,664,612,992.00 | 9.48%                           |
| 1.2.1.1. 1.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak   | Rp34,765,506,278.00 | Rp38,392,872,595.00 | Rp35,057,851,504.00 | Rp27,446,832,673.00 | Rp34,791,524,774.00 | 1.70%                           |
|                | Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Perhutanan   | Rp7,980,479,283.00  | Rp6,521,628,806.00  | Rp6,835,610,954.00  | Rp5,936,360,248.00  | Rp4,018,358,925.00  | -14.73%                         |
|                | Pajak Penghasilan pasal 25 dan pasal 29 Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21   | Rp22,767,136,120.00 | Rp27,718,196,142.00 | Rp23,694,305,550.00 | Rp16,632,992,103.00 | Rp26,302,893,195.00 | 8.89%                           |
|                | Cukai Hasil Tembakau  | Rp4,017,890,875.00  | Rp4,153,047,647.00  | Rp4,527,935,000.00  | Rp4,877,480,322.00  | Rp4,470,272,654.00  | 2.94%                           |
| 1.2.1.1. 1.1.2 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam  | Rp19,883,336,217.00 | Rp26,856,941,109.00 | Rp24,227,179,528.00 | Rp24,337,201,908.00 | Rp37,873,088,218.00 | 20.34%                          |
|                | Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provinsi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan                   | Rp25,268,700.00     | Rp203,215,884.00    | Rp332,319,343.00    | Rp242,734,800.00    | Rp230,730,062.00    | 183.96%                         |
|                | Penerimaan pertambangan mineral dan batu bara yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksplorasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan | Rp414,121,543.00    | Rp432,113,032.00    | Rp374,383,161.00    | Rp280,995,400.00    | Rp471,143,798.00    | 8.43%                           |
|                | penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan  | Rp1,986,277,429.00  | Rp5,443,849,282.00  | Rp4,944,070,438.00  | Rp4,797,020,800.00  | Rp4,440,481,584.00  | 38.62%                          |
|                | penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah   | Rp8,272,774,839.00  | Rp6,833,983,974.00  | Rp5,908,065,237.00  | Rp6,116,790,610.00  | Rp4,779,508,956.00  | -12.32%                         |



| No               | Uraian Anggaran  | Tahun                |                      |                       |                      |                      | Rata-Rata Pertumbuhan 2016-2020 |
|------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
|                  |  | 2016                 | 2017                 | 2018                  | 2019                 | 2020                 |                                 |
|                  | yang bersangkutan  |                      |                      |                       |                      |                      |                                 |
|                  | penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian pemerintah pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan | Rp8,713,812,287.00   | Rp13,418,206,810.00  | Rp11,967,106,758.00   | Rp12,309,504,498.00  | Rp27,216,795,079.00  | 41.78%                          |
|                  | Penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan yang dihasilkan dari wilayah yang bersangkutan                                | Rp471,081,419.00     | Rp525,572,127.00     | Rp701,234,591.00      | Rp590,155,800.00     | Rp734,428,739.00     | 13.40%                          |
| 1.2.1.1.<br>1.2  | Dana Alokasi Umum  | Rp546,731,125,000.00 | Rp538,882,193,000.00 | Rp538,351,892,000.00  | Rp568,022,063,000.00 | Rp508,879,144,000.00 | -1.61%                          |
| 1.2.1.1.<br>2    | Dana Transfer Khusus   | Rp96,909,698,000.00  | Rp207,463,958,983.00 | Rp190,117,656,695.00  | Rp244,214,374,764.00 | Rp167,972,483,323.00 | 25.74%                          |
| 1.2.1.1.<br>2.1  | Dana Alokasi Khusus Fisik  | Rp58,049,848,000.00  | Rp102,339,369,340.00 | Rp72,613,565,472.00   | Rp130,734,050,655.00 | Rp57,409,276,738.00  | 17.80%                          |
| 1.2.1.1.<br>2.2. | Dana Alokasi Umum Non Fisik  | Rp38,859,850,000.00  | Rp105,124,589,643.00 | Rp 117,504,091,223.00 | Rp113,480,324,109.00 | Rp110,563,206,585.00 | 44.08%                          |
| 1.2.1.2          | Dana Insentif Daerah   | Rp0.00               | Rp0.00               | Rp17,000,000,000.00   | Rp34,730,579,000.00  | Rp71,879,456,000.00  | 0.00%                           |
| 1.2.1.3          | Dana Otonomi Khusus  |                      |                      |                       |                      |                      | 0.00%                           |
| 1.2.1.4          | Dana Keistimewaan  |                      |                      |                       |                      |                      | 0.00%                           |
| 1.2.1.5          | Dana Desa  | Rp61,677,411,000.00  | Rp78,242,441,000.00  | Rp76,670,519,000.00   | Rp89,358,559,000.00  | Rp88,353,508,000.00  | 10.07%                          |
| 1.2.2            | Transfer Antar Daerah  | Rp101,688,975,241.00 | Rp252,838,846,680.00 | Rp106,309,300,347.00  | Rp329,059,478,896.00 | Rp512,265,715,044.00 | 88.97%                          |
| 1.2.2.1          | Pendapatan Bagi Hasil  | Rp36,815,590,316.00  | Rp38,119,854,495.00  | Rp41,857,708,966.00   | Rp44,720,429,740.00  | Rp44,930,090,452.00  | 5.16%                           |
| 1.2.2.2          | Bantuan Keuangan   | Rp64,873,384,925.00  | Rp214,718,992,185.00 | Rp64,451,591,381.00   | Rp284,339,049,156.00 | Rp467,335,624,592.00 | 141.63%                         |
| 1.2.2.2.<br>1    | Bantuan Keuangan dari Daerah Provinsi  | Rp64,873,384,925.00  | Rp214,718,992,185.00 | Rp64,451,591,381.00   | Rp284,339,049,156.00 | Rp467,335,624,592.00 | 141.63%                         |
| 1.2.2.2.<br>2    | Bantuan Keuangan dari Daerah Kabupaten/ Kota   | Rp0.00               | Rp0.00               | Rp0.00                | Rp0.00               | Rp0.00               | 0.00%                           |
| 1.3              | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah   | Rp0.00               | Rp38,424,280,000.00  | Rp38,275,546,170.50   | Rp42,742,045,094.00  | Rp44,847,220,000.00  | 5.40%                           |



| No    | Uraian Anggaran   | Tahun                |                        |                        |                        |                        | Rata-Rata Pertumbuhan 2016-2020 |
|-------|---|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
|       |   | 2016                 | 2017                   | 2018                   | 2019                   | 2020                   |                                 |
| 1.3.1 | Hibah   | Rp0.00               | Rp0.00                 | Rp0.00                 | Rp0.00                 | Rp0.00                 | 0.00%                           |
| 1.3.2 | Dana Darurat  |                      | Rp0.00                 | Rp0.00                 |                        | Rp0.00                 | 0.00%                           |
| 1.3.3 | Lain-Lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Rp0.00               | Rp38,424,280,000.00    | Rp38,275,546,170.50    | Rp42,742,045,094.00    | Rp44,847,220,000.00    | 5.40%                           |
| 2     | Belanja Daerah  | Rp979,407,058,413.50 | Rp1,307,759,932,586.36 | Rp1,161,646,578,170.45 | Rp1,461,491,519,435.00 | Rp1,565,838,472,278.00 | 13.83%                          |
| 2.1   | Belanja Operasi   | Rp616,829,939,860.00 | Rp688,971,278,433.00   | Rp690,529,241,492.80   | Rp759,298,714,386.00   | Rp923,798,838,777.00   | 10.89%                          |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai   | Rp400,239,300,514.00 | Rp400,566,063,652.00   | Rp398,403,632,832.00   | Rp419,091,076,759.00   | Rp397,230,404,286.00   | -0.12%                          |
| 2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa   | Rp194,854,010,921.00 | Rp254,917,853,725.00   | Rp258,763,357,660.80   | Rp298,453,074,925.00   | Rp445,484,380,765.00   | 24.23%                          |
| 2.1.3 | Belanja Bunga   | Rp0.00               | Rp0.00                 | Rp0.00                 | Rp0.00                 | Rp8,332,500,000.00     | 0.00%                           |
| 2.1.4 | Belanja Subsidi   | Rp8,096,832,000.00   | Rp8,517,600,000.00     | Rp0.00                 | Rp0.00                 | Rp670,953,726.00       | 0.00%                           |
| 2.1.5 | Belanja Hibah   | Rp12,339,796,425.00  | Rp22,386,069,056.00    | Rp29,862,251,000.00    | Rp37,806,387,702.00    | Rp53,512,600,000.00    | 45.74%                          |
| 2.1.6 | Belanja Bantuan Sosial  | Rp1,300,000,000.00   | Rp2,583,692,000.00     | Rp3,500,000,000.00     | Rp3,948,175,000.00     | Rp18,568,000,000.00    | 129.33%                         |
| 2.2   | Belanja Modal   | Rp221,197,379,824.50 | Rp426,921,890,626.36   | Rp284,898,372,939.65   | Rp499,054,520,067.00   | Rp464,677,932,690.00   | 32.00%                          |
| 2.2.1 | Belanja Tanah   | Rp4,938,165,639.00   | Rp570,983,680.00       | Rp1,856,056,945.00     | Rp880,797,780.00       | Rp6,913,080,498.00     | 192.24%                         |
| 2.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin                                     | Rp29,490,166,038.50  | Rp31,173,497,529.36    | Rp28,148,945,108.65    | Rp108,836,559,954.00   | Rp227,513,094,027.00   | 97.92%                          |
| 2.2.3 | Belanja Bangunan dan Gedung                                     | Rp20,428,960,651.00  | Rp144,380,637,003.00   | Rp98,526,769,541.00    | Rp227,425,443,413.00   | Rp94,648,749,304.00    | 161.86%                         |
| 2.2.4 | Belanja Jalan   | Rp163,381,468,796.00 | Rp236,609,144,678.00   | Rp150,476,040,776.00   | Rp156,590,483,544.00   | Rp132,105,705,122.00   | -0.79%                          |
| 2.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya                                      | Rp2,958,618,700.00   | Rp14,187,627,736.00    | Rp5,890,560,569.00     | Rp5,321,235,376.00     | Rp3,497,303,739.00     | 69.28%                          |
| 2.2.6 | Belanja Aset Lainnya  | Rp0.00               | Rp0.00                 | Rp0.00                 | Rp0.00                 | Rp0.00                 | 0.00%                           |
| 2.3   | Belanja Tidak Terduga   | Rp0.00               | Rp0.00                 | Rp0.00                 | Rp0.00                 | Rp5,455,618,000.00     | 0.00%                           |
| 2.4   | Belanja Transfer  | Rp141,379,738,729.00 | Rp191,866,763,527.00   | Rp186,218,963,738.00   | Rp203,138,284,982.00   | Rp171,906,082,811.00   | 6.62%                           |
| 2.4.1 | Belanja Bagi Hasil  | Rp6,936,259,453.00   | Rp6,695,361,227.00     | Rp10,459,269,138.00    | Rp5,900,827,382.00     | Rp2,055,120,180.00     | -14.00%                         |
| 2.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan  | Rp134,443,479,276.00 | Rp185,171,402,300.00   | Rp175,759,694,600.00   | Rp197,237,457,600.00   | Rp169,850,962,631.00   | 7.75%                           |
| 3     | Pembiayaan Daerah   | Rp123,386,866,374.00 | Rp72,021,207,849.50    | Rp28,954,110,718.14    | Rp2,811,290,180.05     | Rp16,008,393,830.05    | 69.43%                          |



| No    | Uraian Anggaran  | Tahun                |                     |                     |                    |                      | Rata-Rata Pertumbuhan 2016-2020 |
|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|
|       |  | 2016                 | 2017                | 2018                | 2019               | 2020                 |                                 |
| 3.1   | Penerimaan Pembiayaan  | Rp123,386,866,374.00 | Rp72,021,207,849.50 | Rp28,954,110,718.14 | Rp3,811,288,680.05 | Rp116,008,393,830.05 | 688.89%                         |
| 3.1.1 | SiLPA  | Rp123,386,866,374.00 | Rp72,021,207,849.50 | Rp28,954,110,718.14 | Rp3,811,288,680.05 | Rp16,008,393,830.05  | 32.94%                          |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan  | Rp0.00               | Rp0.00              | Rp0.00              | Rp0.00             | Rp0.00               | 0.00%                           |
| 3.1.3 | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan                                      | Rp0.00               | Rp0.00              | Rp0.00              | Rp0.00             | Rp0.00               | 0.00%                           |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah   | Rp0.00               | Rp0.00              | Rp0.00              | Rp0.00             | Rp100,000,000,000.00 | 0.00%                           |
| 3.1.5 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah   | Rp0.00               | Rp0.00              | Rp0.00              | Rp0.00             | Rp0.00               | 0.00%                           |
| 3.1.6 | Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan             | Rp0.00               | Rp0.00              | Rp0.00              | Rp0.00             | Rp0.00               | 0.00%                           |
| 3.2   | Pengeluaran Pembiayaan   | Rp0.00               | Rp0.00              | Rp0.00              | Rp999,998,500.00   | Rp100,000,000,000.00 | 100.02%                         |
| 3.2.1 | Pembayaran Cicilan pokok utang yang jatuh tempo                                      | Rp0.00               | Rp0.00              | Rp0.00              | Rp0.00             | Rp100,000,000,000.00 | 0.00%                           |
| 3.2.2 | Penyertaan modal daerah  | Rp0.00               | Rp0.00              | Rp0.00              | Rp999,998,500.00   | Rp0.00               | 0.00%                           |
| 3.2.3 | Pembentukan Dana Cadangan  | Rp0.00               | Rp0.00              | Rp0.00              | Rp0.00             | Rp0.00               | 0.00%                           |
| 3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah  | Rp0.00               | Rp0.00              | Rp0.00              | Rp0.00             | Rp0.00               | 0.00%                           |
| 3.2.5 | Pengeluaran Pembiayaan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Rp0.00               | Rp0.00              | Rp0.00              | Rp0.00             | Rp0.00               | 0.00%                           |

(Sumber: BPKD Kabupaten Pangandaran, 2021)



Berdasarkan tabel di atas menjelaskan terkait kondisi pengelolaan keuangan daerah dari Kabupaten Pangandaran pada tahun 2016-2020. Pada pos pendapatan, pada pos pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah mengalami kenaikan yang cukup signifikan berkisar antara 5% hingga 15% meskipun pada pertumbuhan per tahun mengalami penurunan yang drastis tepatnya pada tahun 2019 ke tahun 2020 yang disebabkan karena Pandemi Covid-19 yang masuk Indonesia pada Maret 2020. Selain itu besaran pendapatan transfer dibandingkan pendapatan asli daerah menandakan masih belum optimalnya pemanfaatan potensi keuangan daerah.

Hal yang sama juga terjadi pada pos belanja. Pada pos belanja operasi peningkatan terjadi pada angka 10,89% dan pos belanja modal pada angka 32%. Namun dapat dilihat bahwa besaran belanja modal masih jauh lebih sedikit dibandingkan belanja operasi yang menandakan bahwa belanja Kabupaten Pangandaran masih berfokus kepada belanja operasional pemerintahan. Pada pos pembiayaan, SiLPA di tahun 2020 masih besar. Hal ini dikarenakan adanya *refocusing* anggaran karena Pandemi Covid-19.

### **3.1.2 Neraca Daerah**

Neraca daerah merupakan penjelasan terkait posisi keuangan daerah terhadap pendapatan dan pengeluaran dibandingkan tahun sebelumnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa neraca akan menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa penyusunan neraca dibuat berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap disesuaikan dengan kondisi atau keadaan di masing-masing pemerintah daerah.

Nantinya neraca daerah akan memberikan informasi tentang posisi keuangan pada saat tertentu. Penjelasan dari posisi keuangan ini adalah posisi atas aset, utang, dan ekuitas. Aset



daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3. 2 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Pangandaran**

| No       | Uraian                             | Rata-Rata Pertumbuhan |
|----------|------------------------------------|-----------------------|
| 1        | ASET                               |                       |
| 01.01    | ASET LANCAR                        | 433%                  |
| 01.01.01 | Kas                                | -                     |
| 01.01.02 | Piutang                            | -266%                 |
| 01.01.03 | Persediaan                         | 202%                  |
| 01.02    | ASET TETAP                         | 78%                   |
| 01.02.01 | Tanah                              | 131%                  |
| 01.02.02 | Peralatan dan Mesin                | 220%                  |
| 01.02.03 | Gedung dan Bangunan                | 303%                  |
| 01.02.04 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan       | 95%                   |
| 01.02.05 | Aset Tetap Lainnya                 | 127%                  |
| 01.02.06 | Konstruksi dalam Penggerjaan       | -1604%                |
| 01.02.07 | Akumulasi Penyusutan               | 352%                  |
| 01.03    | ASET LAINNYA                       | 2570%                 |
| 01.03.01 | Tagihan Jangka Panjang             | -828%                 |
| 01.03.02 | Kemitraan dengan Pihak Ketiga      | -                     |
| 01.03.03 | Aset Tak Berwujud                  | -305%                 |
| 01.03.04 | Aset Lain-Lain                     | -835%                 |
| 01.03.05 | Amortisasi                         | 26%                   |
|          | JUMLAH ASET DAERAH                 | 95%                   |
| 2        | KEWAJIBAN                          | N/A                   |
| 02.01    | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK            | -74054%               |
| 02.01.01 | Utang perhitungan pihak ketiga     | N/A                   |
| 02.01.02 | Utang Bunga                        | N/A                   |
| 02.01.03 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | N/A                   |
| 02.01.04 | Pendapatan Diterima Dimuka         | N/A                   |
| 02.01.05 | Utang Beban                        | 4267%                 |
| 02.01.06 | Utang Jangka Pendek Lainnya        | N/A                   |
| 3        | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG           | N/A                   |
| 4        | EKUITAS DANA                       | 65%                   |
|          | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA  | 95%                   |

(Sumber: BPKD Diolah, 2021)



Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa besaran Neraca pada Kabupaten Pangandaran cukup fluktuatif di beberapa pos aset daerah. Dapat terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan aset tetap mencapai 78%. Namun beberapa data yang ada masih belum tercatat dengan baik sehingga menjadi dasar perbaikan untuk administrasi pencatatan aset daerah di Kabupaten Pangandaran periode RPJMD selanjutnya.

### **3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Sistem pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara rapi dan terintegrasi dengan baik melalui siklus rangkaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelaksanaan dari APBD ini mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan, hingga pada tahapan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD sesuai peraturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Beberapa fungsi APBD yang ada pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dijabarkan sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi, yang memiliki maksud anggaran daerah menjadi patokan untuk melakukan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan, yang memiliki maksud bahwa anggaran daerah akan menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan, yang memiliki maksud anggaran daerah akan menjadi pedoman dalam kesesuaian pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi, yang memiliki maksud anggaran daerah yang sudah disusun harus diarahkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seperti mengurangi pengangguran, meningkatkan perekonomian, dan hal lain sesuai prioritas pembangunan daerah pada tahun berjalan.



5. Fungsi Distribusi, yang memiliki maksud penyusunan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi Stabilisasi, yang memiliki maksud bahwa anggaran daerah yang telah disusun harus menjadi alat untuk menciptakan dan memelihara keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Ada beberapa prinsip disiplin anggaran dalam penyusunan anggaran daerah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Idealnya, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK).

### **3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran**

Sub bab proporsi penggunaan anggaran akan menjelaskan mengenai proporsi dari belanja untuk memenuhi kebutuhan dari program dan kegiatan yang sudah disusun sebelumnya. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 3.3 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Pangandaran**

| No | Uraian                    | Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp) | Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) | Percentase<br>(a)/(b)x100% |
|----|---------------------------|---|---|----------------------------|
|    |                           | (a)   | (b)   |                            |
| 1  | Tahun Anggaran n-3 (2018) | 400,239,300,514.00                                    | 1,161,646,578,170.45                                      | 34                         |
| 2  | Tahun Anggaran n-2 (2019) | 400,566,063,652.00                                    | 1,461,491,519,435.00                                      | 27                         |
| 3  | Tahun Anggaran n-1 (2020) | 398,403,632,832.00                                    | 1,665,838,472,278.00                                      | 24                         |

(Sumber: BPKD diolah, 2021)

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa besaran persentase belanja aparatur terhadap total pengeluaran belanja pada APBD Kabupaten Pangandaran cukup bervariatif namun cenderung menurun. Pada tahun 2020 persentasenya hanya 24% yang menandakan belanja yang ada sudah berfokus ke pos belanja yang lebih produktif dan tidak berpaku kepada belanja operasi.

### 3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan sebuah kegiatan transaksi keuangan untuk memenuhi kekurangan biaya yang ada diantara pendapatan dan belanja daerah. Adapun pembiayaan ini memiliki sumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya atau biasa disebut SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.



Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Pembiayaan daerah, digunakan untuk menutup adanya defisit anggaran.

Perkembangan defisit anggaran pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam kurun tahun dapat digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.4 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pangandaran**

| No | Uraian                        | 2018 (Rp)            | 2019 (Rp)            | 2020 (Rp)            |
|----|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | Realisasi Pendapatan Daerah   | 1,137,227,065,389.50 | 1,474,724,169,544.00 | 1,572,138,480,714.00 |
| 2  | Belanja Daerah                | 1,161,646,578,170.45 | 1,461,491,519,435.00 | 1,565,838,472,278.00 |
| 3  | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 0.00                 | 999,998,500.00       | 100,000,000,000.00   |
|    | Defisit Riil                  | 24,419,512,780.95    | 12,232,651,609.00    | 93,699,991,564.00    |

(Sumber: BPKD diolah, 2021)

Penjelasan mengenai defisit riil Kabupaten Pangandaran tahun 2018-2020 terlihat pada tabel diatas. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi defisit pada APBD Kabupaten Pangandaran pada tahun 2018 dan tahun 2020. Besaran defisit di tahun 2018 diakibatkan besarnya belanja daerah dibandingkan realisasi pendapatan daerah. Sedangkan pada tahun 2020 defisit terjadi dikarenakan adanya pengeluaran pembiayaan yang cukup besar yang mengakibatkan beban yang berat pada APBD Kabupaten Pangandaran tahun 2020.



**Tabel 3.5 Komposisi Penutup Riil Defisit Anggaran Kabupaten Pangandaran**

| No | Uraian  | Proporsi dari Total Defisit Riil |                  |                    |
|----|---|----------------------------------|------------------|--------------------|
|    |   | 2018 (Rp)                        | 2019 (Rp)        | 2020 (Rp)          |
| 1  | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya | 28,954,110,718.14                | 3,811,288,680.05 | 16,008,393,830.05  |
| 2  | Pencairan Dana Cadangan   | 0.00                             | 0.00             | 0.00               |
| 3  | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan                  | 0.00                             | 0.00             | 0.00               |
| 4  | Penerimaan Pinjaman Daerah  | 0.00                             | 0.00             | 100,000,000,000.00 |
| 5  | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah                      | 0.00                             | 0.00             | 0.00               |
| 6  | Penerimaan Piutang Daerah   | 0.00                             | 0.00             | 0.00               |

(Sumber: BPKD diolah, 2021)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pos penerimaan pinjaman menyumbang jumlah yang cukup besar pada tahun 2020. Sedangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dari 2018 sampai dengan 2020 masih menunjukkan nilai yang fluktuatif.

**Tabel 3.6 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Pangandaran**

| No | Uraian  | 2018           |               | 2019             |              | 2020              |              |
|----|---|----------------|---------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|
|    |   | Rp             | % dari SiLP A | Rp               | % dari SiLPA | Rp                | % dari SiLPA |
| 1  | Jumlah SiLPA  | 28,954,110,718 | 100           | 3,811,288,680.05 | 100          | 16,008,393,830.05 | 100          |
| 2  | Pelampauan penerimaan PAD   | 0              |               | 0                |              | 0                 |              |
| 3  | Pelampauan penerimaan dana perimbangan                                      | 0              |               | 0                |              | 0                 |              |
| 4  | Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah                  | 0              |               | 0                |              | 0                 |              |
| 5  | Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya                                | 0              |               | 0                |              | 0                 |              |
| 6  | Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan | 0              |               | 0                |              | 0                 |              |
| 7  | Kegiatan lanjutan   | 0              |               | 0                |              | 0                 |              |

(Sumber: BPKD diolah, 2021)



Defisit anggaran memang menjadi beban dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan pos belanja lain untuk memenuhi defisit anggaran yang terjadi. Dari tabel diatas dapat diperlihatkan bahwa SiLPA menjadi pos pendapatan untuk memenuhi defisit anggaran yang terjadi pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Hal ini menjadikan SiLPA masuk ke dalam pos pengeluaran pembiayaan Kabupaten Pangandaran.

### **3.3 Kerangka Pendanaan**

Fungsi dari kerangka pendanaan adalah untuk menghitung kapasitas total dari keuangan daerah. Selain itu kerangka pendanaan juga berguna untuk mengetahui besaran anggaran untuk diatur mendanai belanja atau pengeluaran rutin wajib dan mengikat serta program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun ke depan. Tahapan pertama yang harus dilakukan adalah mengkalkulasi seluruh penerimaan daerah. Suatu kapasitas daerah bisa diketahui setelah perhitungan besaran sisa lebih anggaran yang dibuat.

#### **3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja**

Secara keseluruhan proyeksi anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:



**Tabel 3.7 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022-2026**

| No      | Uraian  | Pertumbuhan | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 |
|---------|---|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|         |   | %           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1       | Pendapatan Daerah                                       | 2,92%       | 1.678.245.953.162,01 | 1.810.843.084.897,53 | 1.828.306.972.551,09 | 1.896.035.745.182,08 | 1.985.593.580.951,30 |
| 1.1     | Pendapatan Asli Daerah                                  | 3,60%       | 240.385.953.162,00   | 246.896.272.487,85   | 255.798.304.028,81   | 276.658.451.426,14   | 322.603.135.122,10   |
| 1.1.1   | Pajak Daerah  | 3,59%       | 83.095.953.162,00    | 85.272.410.050,82    | 88.455.534.094,74    | 95.622.681.700,95    | 115.055.554.800,87   |
| 1.1.2   | Retribusi Daerah  | 6,63%       | 126.840.000.000,00   | 130.334.863.700,89   | 134.946.639.573,00   | 145.569.565.973,32   | 162.239.971.313,78   |
| 1.1.3   | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan       | 0,00%       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.4   | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah                    | 2,16%       | 30.450.000.000,00    | 31.288.998.736,14    | 32.396.130.361,07    | 35.466.203.751,87    | 45.307.609.007,45    |
| 1.1.4.1 | Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan               | 0,00%       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.4.2 | Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan             | 0,00%       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.4.3 | Hasil kerja sama daerah                                 | 0,00%       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.4.4 | Jasa Giro   | 0,00%       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.4.5 | Hasil Pengelolaan Dana Bergulir                         | 0,00%       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.4.6 | Pendapatan Bunga  | 0,00%       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.4.7 | Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah | 0,00%       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



| No       | Uraian  | Pertumbuhan | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 |
|----------|---|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |   | %           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.1.4.8  | Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/ pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan, barang daerah atau kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah | 0,00%       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.4.9  | Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing  | 0,00%       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.4.10 | Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan   | 0,00%       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.4.11 | Pendapatan denda pajak daerah   | 0,00%       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.4.12 | Pendapatan denda retribusi daerah   | 0,00%       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.4.13 | Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan  | 0,00%       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.4.14 | Pendapatan dari pengembalian  | 0,00%       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.4.15 | Pendapatan dari BLUD  | 0,00%       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.4.16 | Pendapatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan   | 0,00%       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2      | Pendapatan Transfer   | 3,52%       | 1.437.860.000.000,01 | 1.563.946.812.409,68 | 1.572.508.668.522,28 | 1.619.377.293.755,94 | 1.662.990.445.829,20 |



| No            | Uraian  | Pertumbuhan | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 |
|---------------|---|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |   | %           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.2.1         | Transfer Pemerintah Pusat   | 4,51%       | 1.143.269.881.482,20 | 1.174.770.767.709,84 | 1.216.338.920.143,82 | 1.294.061.500.116,47 | 1.363.198.549.978,55 |
| 1.2.1.1       | Dana Perimbangan  | 4,51%       | 1.000.935.087.035,00 | 1.028.514.176.459,68 | 1.064.907.177.752,12 | 1.132.953.453.272,52 | 1.193.483.079.865,43 |
| 1.2.1.1.1     | Dana Transfer Umum  | 4,51%       | 608.166.975.769,00   | 624.923.997.904,72   | 647.036.342.473,18   | 688.381.179.048,12   | 725.158.908.619,47   |
| 1.2.1.1.1.1   | Dana Bagi Hasil   | 6,24%       | 56.149.108.400,00    | 57.696.203.013,56    | 59.737.728.584,04    | 63.554.896.899,85    | 66.950.406.367,95    |
| 1.2.1.1.1.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak   | 0,00%       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|               | Pajak Bumi dan Bangunan<br>Sektor Perkebunan,<br>Pertambangan, dan<br>Perhutanan  | 0,00%       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|               | Pajak Penghasilan pasal 25<br>dan pasal 29 Pajak Orang<br>Pribadi Dalam Negeri dan<br>Pajak Penghasilan Pasal 21  | 0,00%       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|               | Cukai Hasil Tembakau  | 0,00%       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1.1.1.2   | Dana Bagi Hasil Sumber Daya<br>Alam   | 0,00%       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|               | Penerimaan kehutanan yang<br>berasal dari hutan izin usaha<br>pemanfaatan hutan, provinsi<br>sumber daya hutan, dan dana<br>reboisasi yang dihasilkan dari<br>wilayah daerah yang<br>bersangkutan     | 0,00%       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|               | Penerimaan pertambangan<br>mineral dan batubara yang<br>berasal dari penerimaan iuran<br>tetap dan penerimaan iuran<br>eksplorasi dan iuran<br>eksplorasi yang dihasilkan<br>dari wilayah daerah yang | 0,00%       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



| No           | Uraian   | Pertumbuhan | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               |
|--------------|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|              |  | %           |                    |                    |                    |                    |                    |
|              | bersangkutan   |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|              | Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan   | 0,00%       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|              | Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan  | 0,00%       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|              | Penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian pemerintah pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan | 0,00%       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|              | Penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan yang dihasilkan dari wilayah yang bersangkutan                                | 0,00%       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1.2.1.1.1.3  | Dana Alokasi Umum  | 6,48%       | 552.017.867.369,00 | 567.227.794.891,16 | 587.298.613.889,14 | 624.826.282.148,27 | 658.208.502.251,52 |
| 1.2.1.1.2    | Dana Transfer Khusus   | 4,51%       | 348.670.361.266,00 | 358.277.388.932,08 | 370.954.695.455,30 | 394.658.250.037,23 | 415.743.420.339,29 |
| 1.2.1.1.2.1  | Dana Alokasi Khusus Fisik  | 6,52%       | 246.515.839.866,00 | 253.308.170.837,64 | 262.271.240.865,91 | 279.030.054.676,06 | 293.937.626.535,21 |
| 1.2.1.1.2.2. | Dana Alokasi Khusus Non Fisik  | 6,43%       | 102.154.521.400,00 | 104.969.218.094,44 | 108.683.454.589,39 | 115.628.195.361,17 | 121.805.793.804,08 |
| 1.2.1.1.3    | Dana Bos   | 6,39%       | 44.097.750.000,00  | 45.312.789.622,88  | 46.916.139.823,64  | 49.914.024.187,17  | 52.580.750.906,67  |



| No        | Uraian  | Pertumbuhan | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 |
|-----------|---|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           |   | %           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.2.1.2   | Dana Insentif Daerah  | 6,51%       | 46.295.015.547,20    | 47.570.597.141,08    | 49.253.837.725,28    | 52.401.098.146,01    | 55.200.700.278,54    |
| 1.2.1.3   | Dana Otonomi Khusus   | 0,00%       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1.4   | Dana Keistimewaan   | 0,00%       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1.5   | Dana Desa   | 6,44%       | 96.039.778.900,00    | 98.685.994.109,08    | 102.177.904.666,42   | 108.706.948.697,94   | 114.514.769.834,58   |
| 1.2.2     | Transfer Antar Daerah   | 0,63%       | 294.590.118.517,81   | 389.176.044.699,84   | 356.169.748.378,46   | 325.315.793.639,47   | 299.791.895.850,65   |
| 1.2.2.1   | Pendapatan Bagi Hasil   | 6,53%       | 51.186.826.719,22    | 52.597.193.974,54    | 54.458.295.933,17    | 57.938.114.913,51    | 61.033.539.929,50    |
| 1.2.2.2   | Bantuan Keuangan  | 6,53%       | 243.403.291.798,59   | 336.578.850.725,30   | 301.711.452.445,29   | 267.377.678.725,96   | 238.758.355.921,15   |
| 1.2.2.2.1 | Bantuan Keuangan dari Daerah Provinsi                           | 6,53%       | 243.403.291.798,59   | 336.578.850.725,30   | 301.711.452.445,29   | 267.377.678.725,96   | 238.758.355.921,15   |
| 1.2.2.2.2 | Bantuan Keuangan dari Daerah Kabupaten/ Kota                    | 0,00%       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3       | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah                            | 0,00%       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.1     | Hibah   | 0,00%       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.2     | Dana Darurat  | 0,00%       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.3     | Lain-Lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan | 0,00%       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2         | Belanja Daerah  | 1,55%       | 1.511.345.161.785,54 | 1.754.312.446.883,69 | 1.811.936.384.876,45 | 1.913.928.921.795,04 | 2.005.452.715.839,99 |
| 2.1       | Belanja Operasi   | 0,87%       | 726.445.161.785,54   | 976.510.359.774,69   | 1.030.049.178.972,78 | 1.085.163.622.032,03 | 1.149.537.994.746,72 |
| 2.1.1     | Belanja Pegawai   | 6,44%       | 407.943.945.273,72   | 432.461.376.384,33   | 458.582.043.517,94   | 489.307.040.433,64   | 523.558.533.264,00   |
| 2.1.2     | Belanja Barang dan Jasa   | 6,41%       | 270.501.216.511,82   | 443.163.883.390,36   | 517.493.946.004,84   | 538.267.188.455,24   | 564.416.400.212,70   |
| 2.1.3     | Belanja Bunga   | 6,31%       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.4     | Belanja Subsidi   | 0,00%       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.5     | Belanja Hibah   | 6,42%       | 45.000.000.000,00    | 97.704.500.000,00    | 50.600.163.150,00    | 53.990.374.081,05    | 57.715.709.892,64    |



| No    | Uraian   | Pertumbuhan | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               |
|-------|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|       |  | %           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.1.6 | Belanja Bantuan Sosial   | 6,42%       | 3.000.000.000,00   | 3.180.600.000,00   | 3.373.026.300,00   | 3.599.019.062,10   | 3.847.351.377,38   |
| 2.2.  | Belanja Modal  | 0,70%       | 581.900.000.000,00 | 562.692.087.109,00 | 553.901.209.903,67 | 586.097.978.343,01 | 596.828.007.115,31 |
| 2.2.1 | Belanja Tanah  | 6,43%       | 5.000.000.000,00   | 5.300.000.000,00   | 5.620.650.000,00   | 5.997.233.550,00   | 6.415.840.451,79   |
| 2.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin                                      | 6,38%       | 150.000.000.000,00 | 159.000.000.000,00 | 168.555.900.000,00 | 179.680.589.400,00 | 192.078.550.068,60 |
| 2.2.3 | Belanja Bangunan dan Gedung                                      | 6,43%       | 276.400.000.000,00 | 238.862.087.109,00 | 210.590.900.903,67 | 220.123.006.340,01 | 135.531.616.783,81 |
| 2.2.4 | Belanja Jalan  | 6,36%       | 150.000.000.000,00 | 159.000.000.000,00 | 168.571.800.000,00 | 179.697.538.800,00 | 262.160.416.840,40 |
| 2.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya                                       | 6,43%       | 500.000.000,00     | 530.000.000,00     | 561.959.000,00     | 599.610.253,00     | 641.582.970,71     |
| 2.2.6 | Belanja Aset Lainnya   | 0,00%       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2.3   | Belanja Tidak Terduga  | 5,25%       | 7.000.000.000,00   | 7.350.000.000,00   | 7.732.200.000,00   | 8.142.006.600,00   | 8.589.816.963,00   |
| 2.4   | Belanja Transfer   | 6,33%       | 196.000.000.000,00 | 207.760.000.000,00 | 220.253.796.000,00 | 234.525.314.820,00 | 250.496.897.014,96 |
| 2.4.1 | Belanja Bagi Hasil   | 6,30%       | 10.000.000.000,00  | 10.600.000.000,00  | 11.244.480.000,00  | 11.930.393.280,00  | 12.765.520.810,24  |
| 2.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan   | 6,33%       | 186.000.000.000,00 | 197.160.000.000,00 | 209.009.316.000,00 | 222.594.921.540,00 | 237.731.376.204,72 |
| 3     | Pembiayaan Daerah  | -18,28%     | 60.000.000.000,00  | 55.068.000.000,00  | 20.180.380.800,00  | 20.029.027.944,00  | 19.868.795.720,45  |
| 3.1   | Penerimaan Pembiayaan  | -0,16%      | 20.000.000.000,00  | 20.068.000.000,00  | 20.180.380.800,00  | 20.029.027.944,00  | 19.868.795.720,45  |
| 3.1.1 | SiLPA  | 0,61%       | 20.000.000.000,00  | 20.068.000.000,00  | 20.180.380.800,00  | 20.029.027.944,00  | 19.868.795.720,45  |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan  | 0,00%       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3.1.3 | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan                  | 0,00%       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah                                       | 5,04%       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3.1.5 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah                     | 0,00%       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3.1.6 | Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang- | 0,00%       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |



| No    | Uraian   | Pertumbuhan | 2022              | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------|--|-------------|-------------------|-------------------|------|------|------|
|       |  | %           |                   |                   |      |      |      |
|       | undangan   |             |                   |                   |      |      |      |
| 3.2   | Pengeluaran Pembiayaan   | 0           | 40.000.000.000,00 | 35.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | Pembayaran Cicilan pokok utang yang jatuh tempo                                      | 3,90%       | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Penyertaan modal daerah  | 2,83%       | 15.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Pembentukan Dana Cadangan  | 0,00%       | 25.000.000.000,00 | 25.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah  | 0,00%       | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5 | Pengeluaran pembiayaan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 0,00%       | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(Sumber: BPKD Diolah, 2021)



Tabel di atas menunjukkan potensi dan proyeksi keuangan untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022-2026. Pemerintah Kabupaten Pangandaran menargetkan hanya 3,65% untuk pendapatan adalah karena pemulihan ekonomi masih belum maksimal dikarenakan Pandemi Covid-19. Selain itu kebijakan pemerintah dalam hal pembatasan kerumunan dan kegiatan sangat berdampak kepada banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Pangandaran. Bahkan pos pendapatan asli daerah hanya menargetkan peningkatan per tahun sekitar 4,51%.

### **3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Makna SiLPA dalam hal ini bisa memiliki makna ganda yaitu antara positif atau negatif. Bermakna positif Jika SiLPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD sehingga terjadi *over target* dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Sedangkan SiLPA bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah.



**Tabel 3. 8 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran**

| No | Uraian                                 | Proyeksi             |                      |                      |                      |                      |
|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    |  | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 |
| 1  | Pendapatan                             | 1.678.245.953.162,01 | 1.810.843.084.897,53 | 1.828.306.972.551,09 | 1.896.035.745.182,08 | 1.985.593.580.951,30 |
| 2  | Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3  | Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran   | 20.000.000.000,00    | 20.068.000.000,00    | 20.180.380.800,00    | 20.029.027.944,00    | 19.868.795.720,45    |
|    | Total penerimaan                       | 1.698.245.953.162,01 | 1.830.911.084.897,53 | 1.848.487.353.351,09 | 1.916.064.773.126,08 | 2.005.462.376.671,75 |
|    | Dikurangi:                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4  | Belanja Operasi/Pegawai                | 407.943.945.273,72   | 432.461.376.384,33   | 458.582.043.517,94   | 489.307.040.433,64   | 523.558.533.264,00   |
| 5  | Pengeluaran Pembiayaan                 | 40.000.000.000,00    | 35.000.000.000,00    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|    | Kapasitas riil kemampuan keuangan      | 1.250.302.007.888,29 | 1.363.449.708.513,20 | 1.389.905.309.833,15 | 1.426.757.732.692,44 | 1.481.903.843.407,75 |

(Sumber: BPKD Diolah, 2021)



Kapasitas riil keuangan daerah merupakan acuan dasar bagi pemerintah daerah untuk memperlihatkan anggaran yang ada yang bisa dimanfaatkan dalam belanja daerah setelah dikurangi dengan kewajiban. Perhitungan kapasitas riil adalah menjumlah pendapatan daerah, SiLPA, dan pencairan dana cadangan yang selanjutnya dikurangi pos pengeluaran yang terdiri dari belanja operasi dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa kapasitas riil Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 mengalami peningkatan yang cukup konstan. Semakin besar kapasitas riil keuangan suatu daerah menunjukkan semakin besar pula kemampuan daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Kapasitas riil digunakan untuk pendanaan prioritas pembangunan. Prioritas tersebut akan mendukung dan mewujudkan visi, misi, dan janji politik bupati terpilih. Sehingga perwujudan visi dan keadaan ideal daerah dapat terwujud di akhir periode RPJMD Kabupaten Pangandaran yang akan berakhir pada tahun 2026.



**Tabel 3.9 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**

| No | Uraian                            | Proyeksi             |                      |                      |                      |                      |
|----|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    |                                   | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 |
| 1  | Kapasitas riil kemampuan keuangan | 1.250.302.007.888,29 | 1.363.449.708.513,20 | 1.389.905.309.833,15 | 1.426.757.732.692,44 | 1.481.903.843.407,75 |
|    | Prioritas I (60%)                 | 750.181.204.732,97   | 818.069.825.107,92   | 833.943.185.899,89   | 856.054.639.615,46   | 889.142.306.044,65   |
|    | Prioritas II (40%)                | 500.120.803.155,32   | 545.379.883.405,28   | 555.962.123.933,26   | 570.703.093.076,98   | 592.761.537.363,10   |

(Sumber: BPKD diolah, 2021)

Kapasitas riil Kabupaten Pangandaran selama 5 tahun yang akan datang, dipergunakan untuk membiayai 2 kelompok prioritas sebagai berikut:

1. Prioritas Pertama Untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur di dalam peraturan Perundang-undangan, antara lain:
  - a. Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% dari APBD berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Belanja Fungsi Kesehatan, bahwa anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari APBD sesuai Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - c. Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah minimal 25%, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI;
  - d. Belanja Moda Transportasi, besarannya 10% dari Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;



e. Belanja Yang Bersumber Dari Pajak Rokok, 70 % untuk BBH Kab/ Kota, 30% hak provinsi dengan komposisi : 50% specific grant dan 50% block grant, dari yang 50% specific grant, 75 % untuk iuran JKN. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Sedangkan Belanja Mengikat atau (*Mandatory Expenditure*), digunakan untuk sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai yang digunakan untuk Belanja Pegawai BLUD dan Belanja Pegawai BOS, Honor Pengelola Keuangan, Barang Daerah dan Sistem Informasi;

2) Belanja JKN, yang bersumber dari Pajak Rokok;

3) Belanja DAK BOS;

4) Belanja Operasional Kantor; dan

5) Belanja Fungsional (RS dan UPT OPD yang melaksanakan PPK BLUD).

Juga untuk memenuhi belanja yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Moda Transportasi, Belanja Infrastruktur, Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Bagi Hasil Pajak, Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga.

2. Prioritas Kedua

Selain untuk memenuhi prioritas pertama, kapasitas riil juga digunakan untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021-2026.

*RPJMD*

**RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN**

2021 - 2026

# BAB IV

**PERMASALAHAN  
DAN ISU-ISU STRATEGIS**



## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

Pembahasan yang akan dibahas pada bab 4 (empat) ini adalah akan menguraikan secara terperinci permasalahan pembangunan Kabupaten Pangandaran di masa lalu dan isu strategis yang bisa ditindaklanjuti untuk mewujudkan Kabupaten Pangandaran sesuai visi dan misi bupati terpilih. Telaah permasalahan dan isu strategis ini akan berdasarkan kepada: isu strategis sebelumnya; telaah terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021; RPJMD Kabupaten Jawa Barat Tahun; RPJM Nasional Tahun; telaah terhadap isu Internasional; telaah terhadap *Platform* Bupati Terpilih; telaah terhadap dokumen Kualitas Lingkungan Hidup; analisis yang berasal dari dunia akademik, usaha/bisnis, sosial budaya, dan lain sebagainya yang dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan dalam bentuk sistematik disajikan di bawah ini:

#### **4.1 Permasalahan Pembangunan**

Permasalahan pembangunan terjadi akibat adanya perbedaan antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan rencana pembangunan yang ditargetkan. Perbedaan tersebut diperoleh berdasarkan perbandingan capaian setiap indikator kinerja pembangunan dengan standar (SPM/SDGs/Standar Nasional/Target tahunan di dalam RPJMD/Capaian tahun sebelumnya atau tren), sebagaimana telah dibahas pada bagian Analisis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (BAB II).

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Pangandaran dijabarkan melalui indikator di setiap bidang/urusan yang belum mencapai hasil yang ditetapkan berdasarkan perbandingan dengan standar internasional, nasional ataupun regional.



#### **4.1.1 Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah**

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### **1. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut

ini:



**Tabel 4.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

| No | Masalah Pokok                    | Permasalahan  | Akar Masalah  |
|----|----------------------------------|---|---|
| 1  | Masih rendahnya pertumbuhan PDRB | <ol style="list-style-type: none"><li>Rendahnya pendapatan masyarakat, menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, sehingga keinginan untuk melakukan konsumsi menurun</li><li>Rendahnya permintaan barang dan jasa dari Kabupaten Pangandaran</li><li>Jumlah Investasi belum maksimal pada tahun 2019 baru mencapai Rp 475.010.357.987 tahun 2019</li><li>Beberapa jenis retribusi belum terbentuk Perdanya</li><li>UMKM masih memiliki permasalahan pada permodalan</li><li>UMKM masih memiliki permasalahan pada pemasaran</li><li>Masih rendahnya produktivitas pendapatan masyarakat</li><li>Masyarakat yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan belum maksimal</li><li>Belum adanya BLK</li><li>Kontribusi sektor pertanian sebagai sektor yang menyumbang kontribusi tertinggi terhadap PDRB <i>trend</i> pertumbuhannya cenderung menurun tiap tahunnya</li><li>Komposisi PDRB untuk sektor penyedia akomodasi dan makan minum belum menyumbang kontribusi tinggi padahal sektor ini yang didalam nya ada kegiatan pariwisata merupakan sektor unggulan Kabupaten Pangandaran</li><li>Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pangandaran tiap Tahun cenderung meningkat tetapi pertumbuhan rata- rata masih di bawah pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</li><li>Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH)</li><li>Penanaman Modal Asing (PMA) masih rendah baru mencapai Rp 17.750.000.000 tahun 2018</li><li>Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih rendah yang baru mencapai Rp 475.010.357.987 tahun 2019</li><li>Keterampilan tenaga kerja belum optimal</li><li>Belum ada industri besar yang dapat menyerap tenaga kerja dengan maksimal</li><li>Pemilik hotel dan restoran didominasi oleh penduduk yang berasal dari luar Kabupaten Pangandaran</li><li>Belum optimalnya pengolahan hasil bumi yakni pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan</li><li>Industri pengolahan yang berada di Kabupaten Pangandaran belum memberikan nilai tambah yang tinggi</li><li>Penurunan luas panen padi</li><li>Penurunan luas tanam tanaman palawijaya</li><li>Penurunan produksi ternak seperti kambing dan domba</li><li>Penurunan produksi unggas daging ayam petelor dan berkurang nya produksi telur ayam dan telur</li><li>Penurunan produksi ikan budidaya air laut</li><li>Belum optimalnya promosi sektor pendukung pariwisata</li><li>Belum optimalnya pengembangan potensi wisata</li><li>Belum optimalnya penggunaan produk lokal untuk kegiatan perekonomian di Kabupaten Pangandaran</li><li>Aktivitas perekonomian di Kabupaten Pangandaran masih rendah</li><li>Belum optimalnya infrastruktur pendukung perekonomian seperti jalan usaha tani, dan infrastruktur menuju destinasi wisata</li><li>Belum optimalnya aksesibilitas menuju Pangandaran</li></ol> |



| No | Masalah Pokok  | Permasalahan   | Akar Masalah  |
|----|--|--|---|
| 2  | Masih rendahnya PDRB per kapita  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendapatan masyarakat yang masih rendah</li><li>2. Masih rendahnya produksi dalam daerah</li><li>3. Kurangnya produk daerah untuk ekspor</li><li>4. Kabupaten Pangandaran belum memiliki rumah kemasan (Sentra UMKM)</li><li>5. PDRB Perkapita Kabupaten Pangandaran masih rendah jika dibandingkan PDRB Provinsi Jawa Barat</li></ol>                  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar hidup dari sebagian besar penduduknya cenderung sangat rendah</li><li>2. Tingkat kemiskinan penduduk yang tinggi</li><li>3. Tingkat pendapatan yang rendah</li><li>4. Kurang optimalnya peningkatan produktivitas sektor yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan</li><li>5. Aktivitas perekonomian di Kabupaten Pangandaran masih rendah</li></ol>  |
| 3  | Masih adanya prevalensi balita gizi kurang   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat</li><li>2. Masih rendahnya program-program Promotif dan preventif mengenai perilaku sehat</li></ol>   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurangnya pengetahuan masyarakat</li><li>2. Kurangnya SDM kesehatan</li></ol>  |
| 4  | Persentase PAD terhadap pendapatan   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum optimalnya pengelolaan potensi PAD,</li><li>2. Masih rendahnya kompetensi SDM di bidang pariwisata,</li><li>3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah belum optimal</li><li>4. Beberapa sumber pajak dan retribusi belum memiliki Perda</li></ol>  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah.</li><li>2. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah.</li><li>3. Lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah.</li><li>4. Masih rendahnya kualitas SDM aparatur.</li></ol>   |
| 5  | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB masih rendah jika dibandingkan dengan provinsi Jawa Barat / Kabupaten sekitar, seperti Kabupaten Ciamis | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Karena pertumbuhan disektor non pertanian yang relatif lebih cepat dari pertumbuhan sektor pertanian,</li><li>2. Terjadi proses transformasi perekonomian nasional, yang tadinya lebih didominasi oleh nilai komoditas primer hasil produksi sektor pertanian dalam arti sempit, bergeser ke arah dominasi sektor dan atau subsektor lainnya.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia, terdapat indikasi bahwa sektor pertanian saat ini masih banyak dibiayai oleh lembaga non bank maupun dibiayai secara mandiri (<i>self financing</i>). Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa pembiayaan di sektor pertanian yang melalui bank hanya sebesar 12%, masih di bawah pembiayaan melalui sektor informal yang mencapai 13 persen. Salah satu penyebab utama mengapa perbankan enggan membiayai sektor ini adalah karakteristik komoditas pertanian yang produksinya dianggap berisiko tinggi karena sangat tergantung dengan alam.</li><li>2. Sektor pertanian juga memiliki produktifitas yang lebih rendah dibandingkan dengan sektor lain. Produktifitas ini dihitung berdasarkan rasio antara PDB dengan jumlah tenaga kerja.</li><li>3. Sulitnya sektor pertanian akses kredit ke perbankan, juga</li></ol> |



| No | Masalah Pokok   | Permasalahan   | Akar Masalah   |
|----|---|--|--|
|    |   |  | akses ke pasar, dan beberapa masalah internal di sektor pertanian itu sendiri seperti rendahnya kualitas SDM dan teknologi.  |
| 6  | RLS masih rendah  | 1. RLS masih rendah  | 1. Belum ada intervensi pemerintah daerah untuk program kesetaraan pendidikan untuk penduduk diatas usia 25 tahun  |
| 7  | Nilai Tukar Petani  | 1. Belum ada Nilai Tukar Petani sebagai tolok ukur kesejahteraan Petani<br>2. Masih rendahnya pendapatan petani dan belum adanya fasilitas/pusat pemasaran produk pertanian yang representatif serta perlu adanya peningkatan <i>life skills</i> terhadap pelaku usaha dan UMKM  | 1. Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan petani   |
| 8  | Masih rendahnya Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV                              | 1. 1. Masih rendahnya jumlah guru yang memiliki ijazah S1/D-IV baru mencapai 87,5% tahun 2020, sedangkan pada UU No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mengamanatkan setiap guru wajib memenuhi kualifikasi S1/D-IV  | 1. Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga pengajar untuk sekolah pendidikan dasar dan menengah belum optimal<br>2. Di Kabupaten Pangandaran Tidak ada Perguruan Tinggi yang menyediakan Program Pendidikan  |
| 9  | Masih Adanya Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup                     | 1. Jumlah SDM tenaga kesehatan tidak sesuai rasio<br>2. Masih ada penyandang Gizi buruk yang berpotensi menjadi penyebab kematian pada bayi saat lahir.<br>3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang Pola hidup sehat<br>4. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup menunjukan nilai lebih tinggi dari Provinsi Jawa Barat  | 1. Kurangnya pengetahuan masyarakat<br>2. Kurangnya SDM kesehatan<br>3. Masih kurangnya program- program Promotif dan preventif mengenai perilaku sehat<br>4. Aksesibilitas menuju fasilitas kesehatan di beberapa daerah masih sangat sulit dijangkau |
| 10 | Masih adanya Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (82,03) pada tahun 2020 | 1. Jumlah SDM tenaga kesehatan tidak sesuai rasio terutama untuk tenaga dokter spesialis dan dokter umum dimana pada tahun 2020 untuk Kabupaten Pangandaran rasio dokter spesialis 2,8 per 100.000 penduduk dan rasio dokter umum 13,1 per 100.000 penduduk. Sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk | 1. Kurangnya pengetahuan masyarakat<br>2. Kurangnya SDM kesehatan<br>3. Masih kurangnya program-program promotif dan preventif mengenai perilaku sehat<br>4. Aksesibilitas menuju fasilitas kesehatan di beberapa daerah masih sangat sulit dijangkau  |



| No | Masalah Pokok  | Permasalahan  | Akar Masalah  |
|----|--|---|---|
|    |  | 2. Masih ada penyandang Gizi buruk yang berpotensi mengalami komplikasi ketika proses melahirkan<br>3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang Pola hidup sehat<br>4. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Pangandaran mencapai angka 49,39 pada tahun 2019  |   |
| 11 | Masih rendahnya Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk   | 1. Rasio rumah sakit di Kabupaten Pangandaran masih kurang jika dibandingkan dengan rasio rumah sakit di Jawa Barat , dimana di Kabupaten Pangandaran hanya tersedia 1:426.483, sedangkan di Jawa Barat 1:170.647   | 1. Ketersediaan sarana untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat belum optimal<br>2. Minimnya lahan   |
| 12 | Masih rendahnya Rasio dokter per seratus ribu penduduk   | 1. Kurangnya dokter untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, dimana untuk Kab Pangandaran rasio dokter spesialis 2,8 per 100.000 penduduk dan rasio dokter umum 13,1 per 100.000 penduduk. sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk  | 1. Belum optimalnya pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga dokter  |
| 13 | Masih adanya kasus balita pneumonia baru mencapai 21,7% pada tahun 2020, sedangkan di Jawa Barat sebesar 58,80% dan Nasional sebesar 56,61%. | 1. Kurangnya dokter untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, dimana untuk Kab. Pangandaran rasio dokter spesialis 2,8 per 100.000 penduduk dan rasio dokter umum 13,1 per 100.000 penduduk. sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk<br>2. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat | 1. Kurangnya pengetahuan masyarakat<br>2. Kurangnya SDM kesehatan<br>3. Belum optimalnya pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga dokter<br>4. Masih kurangnya program- program Promotif dan preventif mengenai pneumonia    |
| 14 | Masih adanya penderita penyakit Tuberkulosis BTA dengan cakupan penemuan yaitu 35,72% pada Tahun 2020, sedangkan target pada                 | 1. kurangnya tenaga dokter serta minim edukasi untuk mengakomodir penanganan penderita Tuberkulosis BTA dimana untuk Kab Pangandaran rasio dokter spesialis 2,8 per 100.000 penduduk dan rasio dokter umum 13,1 per 100.000 penduduk. sedangkan standar yang  | 1. Kurangnya pengetahuan masyarakat<br>2. Kurangnya SDM kesehatan<br>3. Belum optimalnya pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga dokter<br>4. Masih kurangnya program- program Promotif dan preventif mengenai Tuberkulosis |



| No | Masalah Pokok  | Permasalahan  | Akar Masalah  |
|----|--|---|---|
|    | SPM kesehatan harus mencapai 100% dan target penanggulangan TBC nasional sampai dengan 2035 95%  | harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk<br>2. Masih Rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  |   |
| 15 | Masih tingginya tingkat prevalensi Tuberkulosis (per100.000 penduduk) (84 pada tahun 2020) target prevalensi TBC Nasional pada tahun 2020 338 per 100.000 penduduk | 1. kurangnya tenaga dokter serta minim edukasi untuk mengakomodir penanganan penderita prevalensi Tuberkulosis dimana untuk Kab Pangandaran rasio dokter spesialis 2,8 per 100.000 penduduk dan rasio dokter umum 13,1 per 100.000 penduduk. sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk<br>2. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat<br>3. Kabupaten Pangandaran masih menjadi salah satu kabupaten penyumbang angka prevalensi TB Nasional, sedangkan penanggulangan TB menjadi salah satu program strategis nasional yang perlu di dukung oleh pemerintah tingkat daerah. | 1. Kurangnya pengetahuan masyarakat<br>2. Kurangnya SDM kesehatan<br>3. Belum optimalnya pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga dokter<br>4. Masih kurangnya program- program Promotif dan preventif mengenai Tuberkulosis   |
| 16 | Masih rendahnya Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (35,72% pada tahun 2020) minimal Capaian nasional 85%  | 1. Kurangnya jumlah tenaga kesehatan masih belum sesuai rasio dimana untuk Kab Pangandaran rasio dokter spesialis 2,8 per 100.000 penduduk dan rasio dokter umum 13,1 per 100.000 penduduk. sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk<br>2. Masih ada penyandang Gizi buruk yang berpotensi tinggi tertular virus TB<br>3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang Pola hidup sehat<br>4. Kurangnya Fasilitas kesehatan yang khusus untuk Tuberkulosis<br>5. Kurangnya sosialisasi tentang penyakit yang berbahaya   | 1. Kurangnya pengetahuan masyarakat<br>2. Kurangnya SDM kesehatan<br>3. Belum optimalnya pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga dokter<br>4. Masih kurangnya program- program Promotif dan preventif mengenai Tuberkulosis<br>5. Kurangnya sarana dan prasarana khusus untuk penanganan Tuberkulosis |



| No | Masalah Pokok   | Permasalahan  | Akar Masalah   |
|----|---|---|--|
| 17 | Masih rendahnya proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (42,90% pada tahun 2020, capaian nasional 87%) | <ol style="list-style-type: none"><li>Kurangnya tenaga dokter untuk mengobati Tuberkulosis dalam program DOTS dimana untuk Kab Pangandaran rasio dokter spesialis 2,8 per 100.000 penduduk dan rasio dokter umum 13,1 per 100.000 penduduk. sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk</li><li>Masih ada penyandang gizi buruk yang berpotensi tinggi tertular virus TB</li></ol>  | <ol style="list-style-type: none"><li>Kurangnya Tenaga Kesehatan</li><li>Kurangnya sarana dan prasarana khusus untuk penanganan Tuberkulosis</li></ol>   |
| 18 | Masih tingginya kasus diare (pada tahun 2020 angka kesakitan diare sebesar 15,63 per 1000 penduduk)                                   | <ol style="list-style-type: none"><li>Kurangnya tenaga serta sarana penunjang untuk dokter dalam menangani diare dimana untuk Kab Pangandaran rasio dokter spesialis 2,8 per 100.000 penduduk dan rasio dokter umum 13,1 per 100.000 penduduk. sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk</li><li>Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat</li></ol>  | <ol style="list-style-type: none"><li>Kurangnya pengetahuan masyarakat</li><li>Kurangnya SDM kesehatan</li><li>Masih kurangnya program- program Promotif dan preventif mengenai perilaku sehat</li></ol> |
| 19 | Masih adanya prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (0,08% pada tahun 2020)   | <ol style="list-style-type: none"><li>Masyarakat belum memahami tentang prevalensi HIV/ AIDS dimana untuk Kabupaten Pangandaran rasio dokter spesialis 2,8 per 100.000 penduduk dan rasio dokter umum 13,1 per 100.000 penduduk. sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk</li><li>Sosialisasi mengenai prevalensi HIV/ AIDS kurang optimal</li><li>Edukasi tidak optimal dilakukan oleh institusi terkait</li><li>Walaupun hanya sebesar 0,08% Jawa Barat menjadi lima provinsi dengan jumlah kasus HIV tertinggi, sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Barat , Kabupaten Pangandaran perlu melakukan penanggulangan guna mendorong capaian HIV / AIDS di tingkat Provinsi maupun Nasional</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>Kurangnya pengetahuan masyarakat</li><li>Kurangnya SDM kesehatan</li><li>Masih kurangnya program- program Promotif dan preventif mengenai HIV/AIDS</li></ol>       |



| No | Masalah Pokok  | Permasalahan  | Akar Masalah  |
|----|--|---|---|
| 20 | Masih rendahnya cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (68,80% pada tahun 2020) | <ol style="list-style-type: none"><li>Kurangnya tenaga kesehatan serta sarana penunjang untuk dokter dalam menangani kasus neonatus dengan komplikasi dimana untuk Kab Pangandaran rasio dokter spesialis 2,8 per 100.000 penduduk dan rasio dokter umum 13,1 per 100.000 penduduk. sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk</li><li>Rendahnya cakupan <i>neonatus</i> dengan komplikasi yang ditangani akan berpengaruh pada angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>Kurangnya pengetahuan masyarakat</li><li>Kurangnya SDM kesehatan</li></ol>  |
| 21 | Angka Kejadian Malaria (0,01 per 1000 penduduk pada tahun 2020)                            | <ol style="list-style-type: none"><li>Walaupun persentasenya tidak besar tetapi menunjukkan masih terjadinya kasus malaria yang merupakan salah satu penyakit menular</li></ol>   | <ol style="list-style-type: none"><li>Jumlah tenaga kesehatan yang menangani kasus malaria masih belum memadai</li><li>Upaya promotif program bebas malaria belum optimal</li><li>Upaya preventif penyebaran malaria masih kurang</li><li>Kasus malaria yang terjadi di Pangandaran mayoritas dibawa oleh warga yang tidak tinggal di Pangandaran</li></ol> |
| 22 | SPM Kesehatan  | <ol style="list-style-type: none"><li>Konsistensi pencapaian perlu tetap dipertahankan</li></ol>  | <ol style="list-style-type: none"><li>Konsistensi pencapaian target 12 indikator SPM kesehatan</li></ol>  |
| 23 | Persentase rumah tinggal bersanitasi belum optimal   | <ol style="list-style-type: none"><li>Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pola hidup sehat</li><li>Kurangnya instalasi pengolah air limbah</li><li>Masih terdapat wilayah yang belum terlayani jaringan air minum</li><li>Masih rendahnya cakupan layanan persampahan</li><li>Masih rendahnya penanganan genangan air di wilayah permukiman</li></ol>  | <ol style="list-style-type: none"><li>Kurangnya sosialisasi pola hidup bersih</li><li>Belum optimalnya penataan kawasan permukiman</li></ol>  |
| 24 | Masih terjadinya genangan >2 kali dalam 1 tahun  | <ol style="list-style-type: none"><li>Tidak tersedia drainase yang cukup untuk menampung air hujan</li><li>Tingkat Kesadaran Masyarakat masih rendah sering membuang sampah, dan terjadi pengendapan</li></ol>  | <ol style="list-style-type: none"><li>Sistem drainase yang kurang baik</li><li>Minimnya sosialisasi ramah lingkungan</li></ol>  |



| No | Masalah Pokok  | Permasalahan   | Akar Masalah   |
|----|--|--|--|
| 25 | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik belum optimal (67,57% pada tahun 2020)   | 1. Masih rendahnya persentase irigasi kabupaten yang dalam kondisi baik  | 1. Sistem operasi dan pemeliharaan irigasi yang kurang baik  |
| 26 | Persentase penduduk berakses air minum belum optimal (65,70% pada tahun 2020)  | 1. Pelayanan jaringan air minum belum mencapai seluruh wilayah   | 1. Belum optimalnya layanan PDAM untuk cakupan wilayah perkotaan<br>2. Belum optimalnya pemanfaatan sumber air non perpipaan untuk wilayah pedesaan  |
| 27 | Ketaatan terhadap RTRW belum optimal, berdasarkan realisasi pada tahun 2020 sebesar 35,04%                                     | 1. Tingkat sosialisasi belum maksimal kepada masyarakat<br>2. Tingkat penindakan hukum/sanksi yang kurang tegas dalam implementasi kebijakan, bagi para pelanggar  | 1. Koordinasi antar SKPD masih rendah<br>2. Belum optimalnya pengendalian pembangunan yang sesuai dengan RTRW  |
| 28 | Persentase penyandang disabilitas serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (87,55 pada tahun 2020) | 1. Kurangnya perhatian dan pembinaan pemerintah kabupaten terhadap penyandang disabilitas fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial<br>2. Belum tersedianya data yang akurat terkait dengan data penyandang disabilitas fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | 1. Minimnya sarana penunjang pembinaan<br>2. Minimnya sarana penunjang pembinaan<br>3. Belum optimalnya sarana prasarana yang ramah disabilitas  |
| 29 | Belum adanya panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial                                     | 1. Masih diperlukannya pelaksanaan program-program terkait Panti Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial agar pencapaian pada tahun-tahun berikutnya tetap tercapai  | 1. Belum terdapat panti sosial di Kabupaten Pangandaran yang menyediakan sarana prasarana pelayanan Kesehatan sosial   |
| 30 | Masih rendahnya Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan ( pada 18,13% tahun 2020)                        | 1. Masih kurangnya pelatihan kewirausahaan,<br>2. Pemerintah Daerah belum memiliki Balai Latihan Kerja.  | 1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelatihan kewirausahaan<br>2. Masih rendahnya tingkat keterampilan tenaga kerja<br>3. Pembangunan Balai Latihan Kerja belum terealisasi                |
| 31 | Masih rendahnya rasio lulusan S1/S2/S3 (17,28% pada tahun 2020)  | 1. Tingginya biaya pendidikan tinggi<br>2. Masih sedikitnya jumlah lembaga pendidikan tinggi di Kabupaten Pangandaran<br>3. Mayoritas masyarakat lebih memilih bekerja   | 1. Sosialisasi mengenai Pendidikan Tinggi belum optimal<br>2. Tingginya biaya hidup untuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar Kabupaten Pangandaran<br>3. Upaya untuk meningkatkan motivasi belajar masyarakat |



| No | Masalah Pokok   | Permasalahan  | Akar Masalah  |
|----|---|---|---|
|    |   | setelah lulus SMA/SMK sederajat   | belum optimal   |
| 32 | Masih rendahnya Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR   | 1. Masih rendahnya tingkat kesetaraan gender anggota DPRD Kabupaten Pangandaran   | 1. Rendahnya partisipasi calon wanita<br>2. Pemilih cenderung memilih calon dengan gender pria  |
| 33 | Masih rendahnya Ketersediaan energi dan protein perkapita (energi 55.25 dan protein 3.51 pada tahun 2020) | 1. Tingkat daya beli masyarakat rendah<br>2. Target ketersediaan energi dan protein masih belum tercapai  | 1. Terbatasnya sumber daya daerah<br>2. Konsumsi masyarakat atas bahan pokok pengganti nasi masih belum beragam   |
| 34 | Masih rendahnya Persentase luas lahan bersertifikat   | 1. Tingkat sosialisasi yang rendah/tidak maksimal mengenai pertanahan<br>2. Masyarakat masih belum Memiliki kelengkapan administrasi pertanahan   | 1. Masih rendahnya sosialisasi mengenai pertanahan dari pemerintah  |
| 35 | Belum lengkapnya RPPLH Kabupaten/Kota   | 1. Perhatian dinas teknis terhadap penyediaan data untuk dokumen KLHS belum optimal   | 1. Terbatasnya SDM<br>2. Penyediaan data untuk dokumen KLHS belum optimal   |
| 36 | Penyelenggaraan KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten belum optimal                                   | 1. Jumlah SDM di bidang lingkungan hidup masih kurang<br>2. KLHS RDTR dan dokumen yang berkaitan dengan tata ruang kurang maksimal dalam prosesnya  | 1. Terbatasnya SDM<br>2. Proses penyusunan KLHS RDTR dan dokumen yang berkaitan dengan tata ruang belum optimal   |
| 37 | Masih Rendahnya Indeks kualitas Air   | 1. Kawasan yang sangat potensial sebagai tempat cadangan penyimpanan air kurang mendapat perhatian<br>2. Pengelolaan limbah masih rendah<br>3. Belum tersedianya sarana laboratorium lingkungan | 1. Belum adanya Pengelolaan Kawasan<br>2. Sosialisasi ramah lingkungan masih rendah<br>3. Belum tersedianya sarana dan prasarana IPLT dan IPAL<br>4. Belum tersedianya alat/sarana dan prasarana    |
| 37 | Masih kecilnya Indeks kualitas Tutupan Lahan  | 1. Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas tutupan lahan  | 1. Belum adanya surat keputusan tentang ruang terbuka hijau<br>2. Pengelolaan sempadan sungai dan pantai belum optimal<br>3. Belum adanya taman keanekaragaman hayati<br>4. Belum adanya hutan kota |
| 38 | Masih minim pemberian penghargaan lingkungan hidup oleh pemerintah daerah                                 | 1. Masih rendahnya pelaksanaan wiyatamandala  | 1. Belum ada peraturan mengenai pelaksanaan wiyatamandala<br>2. Belum optimalnya penerapan wiyatamandala di lingkungan pemerintah daerah  |



| No | Masalah Pokok   | Permasalahan   | Akar Masalah  |
|----|---|--|---|
| 39 | Masih rendahnya persentase jumlah sampah yang tertangani (18,65% pada tahun 2020) | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih rendahnya tingkat penanganan sampah</li><li>2. Belum optimalnya tingkat pengurangan sampah</li></ol>  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan sampah serta terbatasnya SDM</li></ol>   |
| 40 | Sulitnya melaksanakan Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/ kota            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum tersedianya TPA/TPST/SPA</li></ol>  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Terbatasnya lahan</li><li>2. Terbatasnya sarana dan prasarana</li><li>3. Terbatasnya SDM</li></ol>   |
| 41 | Masih rendahnya penduduk berKTP (rasio sebesar 0,97 pada tahun 2020)              | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk perekaman e-KTP masih terbatas</li><li>2. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan</li></ol>   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih terbatasnya SDM untuk sosialisasi mengenai pentingnya KTP</li><li>2. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan mobile masih terbatas</li></ol>                    |
| 42 | Masih rendahnya bayi berakte kelahiran (rasio sebesar 0,45 pada tahun 2020)       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pembuatan akte kelahiran</li><li>2. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan</li><li>3. Pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya akte kelahiran masih perlu ditingkatkan</li></ol>                                      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih terbatasnya SDM untuk sosialisasi mengenai pentingnya akte kelahiran</li><li>2. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan mobile masih terbatas</li></ol>         |
| 43 | Masih kurangnya pasangan berakte nikah (rasio sebesar 0,60 pada tahun 2020)       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurang optimal nya dinas terkait dalam sosialisasi teknis karena adanya permasalahan dari faktor eksternal</li><li>2. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi masih perlu ditingkatkan</li><li>3. Pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya akte nikah/buku nikah masih perlu ditingkatkan</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih terbatasnya SDM untuk sosialisasi mengenai pentingnya akte nikah/buku nikah.</li><li>2. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan mobile masih terbatas</li></ol> |
| 44 | Rendahnya penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (96,95% pada tahun 2020)          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rendahnya perhatian dinas teknis terhadap <i>database</i> kependudukan</li><li>2. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi <i>database</i></li><li>3. Terbatasnya SDM</li><li>4. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan</li></ol>                         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih terbatasnya SDM untuk sosialisasi mengenai pentingnya KTP</li><li>2. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan mobile masih terbatas</li></ol>                    |
| 45 | Rendahnya penerbitan akta kelahiran (74,61%)                                      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rendahnya perhatian dinas teknis terhadap <i>database</i> kependudukan</li></ol>  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih terbatasnya SDM untuk sosialisasi mengenai pentingnya akte kelahiran.</li></ol>  |



| No | Masalah Pokok  | Permasalahan   | Akar Masalah  |
|----|--|--|---|
|    | pada tahun 2020)   | <ol style="list-style-type: none"><li>2. Terbatasnya sarana penunjang perasionalisasi <i>database</i></li><li>3. Terbatasnya SDM</li><li>4. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan</li><li>5. Pemahaman dan keterampilan petugas pelayanan terhadap penerapan Peraturan Mendagri Nomor 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran belum optimal</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>2. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan mobile masih terbatas</li></ol>   |
| 46 | Kurangnya kelompok binaan PKK  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih rendahnya jumlah kelompok binaan PKK</li></ol>  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rendahnya sosialisasi dari pemerintah</li><li>2. <u>Rendahnya partisipasi masyarakat</u></li></ol>   |
| 47 | Masih rendahnya Ratio Akseptor KB (15,2% pada tahun 2020)  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perhatian dinas teknis terhadap KB belum optimal</li><li>2. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi <i>database</i></li><li>3. Terbatasnya SDM</li><li>4. Pengetahuan masyarakat mengenai KB masih perlu ditingkatkan</li></ol>   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sosialisasi mengenai program Keluarga Berencana kepada masyarakat belum optimal</li><li>2. Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program KB</li><li>3. Program Konseling mengenai KB belum optimal</li><li>4. Pendekatan secara persuasif kepada masyarakat untuk mengikuti program KB belum optimal</li></ol> |
| 48 | Masih rendahnya cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> ) (15,04% pada tahun 2020) | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi <i>database</i> PUS</li><li>2. Terbatasnya SDM</li><li>3. Rendahnya keinginan masyarakat untuk menggunakan alat Kontrasepsi</li><li>4. Pengetahuan masyarakat mengenai KB masih perlu ditingkatkan</li></ol>  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sosialisasi mengenai program Keluarga Berencana kepada masyarakat belum optimal</li><li>2. Program Konseling mengenai KB belum optimal</li><li>3. Pendekatan secara persuasif kepada masyarakat untuk mengikuti program KB belum optimal</li></ol>   |
| 49 | Masih kurangnya persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (75,78% pada tahun 2020)             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rendahnya perhatian dinas teknis terhadap KB</li><li>2. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi <i>database</i></li><li>3. Terbatasnya SDM</li><li>4. Pengetahuan masyarakat mengenai KB masih perlu ditingkatkan</li></ol>   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rendahnya sosialisasi pihak terkait kepada masyarakat</li><li>2. Program Konseling mengenai MKPJ belum optimal</li><li>3. Pendekatan secara persuasif kepada masyarakat untuk mengikuti program KB belum optimal</li></ol>   |



| No | Masalah Pokok  | Permasalahan   | Akar Masalah   |
|----|--|--|--|
| 50 | Masih kurangnya cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (54,95% pada tahun 2020)                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya perhatian dinas teknis terhadap KB</li> <li>2. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi <i>database</i></li> <li>3. Terbatasnya SDM</li> <li>4. Pengetahuan masyarakat mengenai KB masih perlu ditingkatkan</li> </ol>                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi mengenai program Keluarga Berencana kepada masyarakat belum optimal</li> <li>2. Program Konseling mengenai BKB ber KB belum optimal</li> <li>3. Pendekatan secara persuasif kepada masyarakat untuk mengikuti program KB belum optimal</li> </ol>  |
| 51 | Masih kurangnya cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (40% pada tahun 2020)                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya perhatian dinas teknis terhadap KB</li> <li>2. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi <i>database</i></li> <li>3. Terbatasnya SDM</li> <li>4. Pengetahuan masyarakat mengenai KB masih perlu ditingkatkan</li> </ol>                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi mengenai program Keluarga Berencana kepada masyarakat belum optimal</li> <li>2. Program Konseling mengenai BKR ber KB belum optimal</li> <li>3. Pendekatan secara persuasif kepada masyarakat untuk mengikuti program KB belum optimal</li> </ol>  |
| 53 | Masih kurangnya cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (21% pada tahun 2020)                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya perhatian dinas teknis terhadap KB</li> <li>2. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi <i>database</i></li> <li>3. Terbatasnya SDM</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi mengenai program Keluarga Berencana kepada masyarakat belum optimal</li> <li>2. Program Konseling mengenai BKL ber KB belum optimal</li> <li>3. Pendekatan secara persuasif kepada masyarakat untuk mengikuti program KB belum optimal</li> </ol>  |
| 53 | Masih rendahnya Ratio Akseptor KB (15,2% pada tahun 2020)  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perhatian dinas teknis terhadap KB belum optimal</li> <li>2. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi <i>database</i></li> <li>3. Terbatasnya SDM</li> <li>4. Pengetahuan masyarakat mengenai KB masih perlu ditingkatkan</li> </ol>                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi mengenai program Keluarga Berencana kepada masyarakat belum optimal</li> <li>2. Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program KB</li> <li>3. Program Konseling mengenai KB belum optimal</li> <li>4. Pendekatan secara persuasif kepada masyarakat untuk mengikuti program KB belum optimal</li> </ol> |
| 54 | Masih rendahnya cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> ) (15,04% pada tahun 2020) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi <i>database</i> PUS</li> <li>2. Terbatasnya SDM</li> <li>3. Rendahnya keinginan masyarakat untuk menggunakan alat Kontrasepsi</li> <li>4. Pengetahuan masyarakat mengenai KB masih perlu ditingkatkan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi mengenai program Keluarga Berencana kepada masyarakat belum optimal</li> <li>2. Program Konseling mengenai KB belum optimal</li> <li>3. Pendekatan secara persuasif kepada masyarakat untuk mengikuti program KB belum Optimal</li> </ol>  |
| 55 | Rendahnya Jumlah uji kir angkutan umum   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya pengujian KIR</li> <li>2. Belum tersedianya sarana dan prasarana uji kendaraan</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya gedung uji KIR</li> </ol>   |
| 56 | Minimnya kualitas Pelabuhan Laut/Udara/Termina 1 Bis (3 jumlah)  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum beroperasinya Pelabuhan</li> <li>2. Belum optimalnya fungsi bandara</li> <li>3. Belum optimalnya fungsi terminal eksisting</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum dipenuhinya persyaratan penerbitan izin operasi Pelabuhan</li> <li>2. Belum adanya kajian potensi penumpang</li> </ol>   |



| No | Masalah Pokok  | Permasalahan  | Akar Masalah  |
|----|--|---|---|
|    | terminal, 1 jumlah pelabuhan, 1 jumlah bandara)  | berkaitan dengan lahan yang terbatas dan lokasi terminal  | 3. Perlu dilakukan pemindahan terminal Pangandaran ke Cijulang  |
| 57 | Kurangnya persentase layanan angkutan darat  | 1. Terbatasnya trayek angkutan umum<br>2. Perlu adanya kajian transportasi  | 1. Dominasi kendaraan pribadi<br>2. Jumlah trayek yang terbatas<br>3. Ruas jalan Kabupaten yang sebagian besar masih kecil  |
| 58 | Kurangnya pemasangan Rambu-rambu   | 1. Masih kurangnya rambu-rambu lalu lintas  | 1. Pemasangan rambu lalu lintas, papan informasi, rambu evakuasi, serta alat-alat sistem informasi peringatan dini belum optimal  |
| 59 | Kurangnya cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | 1. Masih rendahnya pelatihan penggunaan teknologi dan informasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan<br>2. Penyebarluasan informasi publik belum optimal  | 1. Rendahnya sosialisasi kepada masyarakat<br>2. Rendahnya minat masyarakat<br>3. Sarana prasarana belum memadai  |
| 60 | Cakupan Layanan Telekomunikasi belum merata pada setiap wilayah                                    | 1. Layanan jaringan telekomunikasi belum mencapai seluruh wilayah Kabupaten   | 1. Masih terdapat <i>blank spot</i> akibat kurangnya BTS ( <i>Base Transceiver Station</i> )<br>2. Jaringan telepon belum melayani seluruh wilayah kabupaten  |
| 61 | Rendahnya persentase koperasi aktif (86,74% pada tahun 2020)                                       | 1. Masih rendahnya kaderisasi generasi muda sebagai pengurus koperasi,<br>2. Masih rendahnya koperasi yang bergerak di sektor riil<br>3. Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif  | 1. Optimalisasi sosialisasi<br>2. Belum optimalnya penguatan kapasitas dan kelembagaan koperasi   |
| 62 | Masih perlu peningkatan usaha mikro kecil (96,02% pada tahun 2020)                                 | 1. Potensi UMKM sebagai muatan lokal belum terpetakan<br>2. Minimnya UMKM yang memiliki hak izin dan edar<br>3. Terhambatnya promosi produk UMKM<br>4. Belum ada formulasi untuk menghitung jumlah peningkatan presentasi kewirausahaan mikro dibagi jumlah penduduk<br>5. Belum tersedianya display/ruang promosi untuk ajang promosi UMKM bagi wisatawan<br>6. Masih rendahnya pemberdayaan SDM UMKM<br>7. Belum optimalnya pemasaran produk UMKM | 1. Kajian pemetaan UMKM belum tersedia<br>2. Belum adanya sarana prasarana untuk rumah kemasan<br>3. Belum ada unit kerja khusus untuk memfasilitasi UMKM mendapatkan HAKI<br>4. Belum tersedia alat uji laboratorium bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan izin edar di Kabupaten Pangandaran<br>5. Belum ada produk hukum yang memfasilitasi UMKM untuk memasarkan produknya |
| 63 | Minimnya jumlah investor berskala  | 1. Masih rendahnya jumlah investor<br>2. Belum adanya RUPM dan kajian investasi   | 1. Daya tarik Kabupaten Pangandaran sebagai lokasi investasi belum dikembangkan secara optimal  |



| No | Masalah Pokok  | Permasalahan   | Akar Masalah  |
|----|--|--|---|
|    | nasional (PMDN/ PMA)<br>(131 investor pada tahun 2019)   | untuk setiap sektor  | 2. Sosialisasi potensi investasi yang belum optimal<br>Belum ditetapkannya RDTR   |
| 64 | Minimnya Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)( 475.010.357.987 tahun 2019)                          | 1. Masih rendah nya nilai investasi<br>2. Belum adanya RUPM dan kajian investasi untuk setiap sektor   | 1. Masih terbatasnya investor<br>2. Upaya promosi dan peningkatan nilai investasi belum optimal<br>3. Belum ditetapkannya RDTR  |
| 65 | Data dalam buku kabupaten dalam angka tidak lengkap  | 1. Belum optimalnya penerapan kebijakan satu data  | 1. Belum optimalnya penerapan kebijakan satu data   |
| 66 | Belum maksimalnya intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya (8 festival seni dan budaya pada tahun 2020) | 1. Belum optimalnya upaya dalam menarik penyelenggara kegiatan festival<br>2. Kurangnya inovasi dalam penyelenggaraan festival seni dan budaya   | 1. Belum optimalnya promosi kabupaten pangandaran sebagai lokasi penyelenggaraan berbagai festival<br>2. Perlunya memberikan kemudahan bagi penyelenggara festival dalam menyelenggarakan event   |
| 67 | Belum optimalnya benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (30 pada tahun 2020)                      | 1. Belum ditetapkannya situs dan kawasan cagar budaya di kabupaten Pangandaran   | 1. Kajian tentang penetapan cagar budaya belum disusun  |
| 68 | Belum optimalnya jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (30 pada tahun 2020)                             | 1. Belum optimalnya perhatian dinas teknis terhadap cagar budaya<br>2. Terbatasnya SDM   | 1. Terbatasnya SDM  |
| 69 | Rendahnya jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun (5.978 pada tahun 2020)                                   | 1. Koleksi buku di perpustakaan yang tidak up-to-date diperbarui secara berkala<br>2. Terbatasnya sarana penunjang perpustakaan<br>3. Terbatasnya event yang berkaitan dengan perpustakaan<br>4. Rendahnya minat baca masyarakat<br>5. Kurangnya jumlah SDM (Pustakawan)<br>6. Belum adanya peraturan terkait perpustakaan | 1. Kurangnya sosialisasi untuk membaca di perpustakaan baik itu kepada pelajar atau masyarakat umum<br>2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan minat pengunjung ke perpustakaan<br>3. Belum adanya pembinaan terkait bidang perpustakaan<br>4. Belum adanya payung hukum dari pimpinan daerah yang menangani urusan perpustakaan |



| No | Masalah Pokok  | Permasalahan  | Akar Masalah  |
|----|--|---|---|
| 70 | Rendahnya persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (20% pada tahun 2020) | <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum Maksimalnya pengelolaan arsip</li> <li>Setiap SKPD belum memiliki SDM yang khusus mengelola kearsipan</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan arsip belum berorientasi pada arsip digital</li> <li>Kurangnya peningkatan SDM pengelola kearsipan</li> <li>Belum optimalnya sosialisasi SOP pengarsipan</li> </ol>  |
| 71 | Kurangnya peningkatan SDM pengelola kearsipan (2 kegiatan pada tahun 2020)                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya perhatian dinas teknis</li> <li>Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi <i>database</i></li> <li>Kurangnya keahlian SDM dalam mengelola arsip</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya SDM</li> <li>Belum adanya tenaga arsiparis yang berstatus sebagai ASN sehingga pengelolaan arsip masih dikelola oleh tenaga non ASN</li> </ol>   |
| 72 | Sarana dan Prasarana penyimpanan arsip pada setiap SKPD belum optimal                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengamanan arsip pada perangkat daerah yang belum optimal</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan arsip belum berorientasi pada arsip digital</li> <li>Pengelolaan gudang arsip terpusat dan gudang arsip pada setiap SKPD belum optimal</li> </ol>  |
| 73 | Menurunnya kunjungan wisata (2.842.022 pada tahun 2020 sedangkan tahun sebelumnya 3.775.273) | <ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya event pariwisata yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung</li> <li>Belum optimalnya pengembangan kearifan lokal sebagai daya tarik, baik dari arsitektur maupun budaya lokal</li> <li>Pengembangan destinasi wisata perlu diimbangi dengan infrastruktur jalan yang memadai</li> <li>Belum di Bentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah</li> <li>Belum optimalnya promosi daya tarik wisata</li> <li>Perlunya Pengembangan daya tarik wisata alternatif selain wisata bahari</li> <li>Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif sebagai pendukung daya tarik wisata dan pengelolaan daya tarik dan usaha pariwisata lainnya belum lengkap</li> <li>Kabupaten Pangandaran berada di kawasan rawan bencana</li> <li>Adanya pandemi yang menurunkan kunjungan wisatawan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum diterapkannya bidang Pariwisata sebagai tematik pembangunan daerah</li> <li>Terbatasnya SDM Pariwisata</li> <li>Masih terbatasnya media promosi yang digunakan</li> <li>Belum tersedianya Creative Center</li> <li>Belum optimalnya sarana dan prasarana di objek wisata, seperti lahan parkir, drainase, IPAL, dsb</li> <li>Belum optimalnya upaya mitigasi bencana di kawasan wisata</li> <li>Belum optimalnya standardisasi penerapan protokol kesehatan pada fasilitas penunjang pariwisata seperti hotel, restaurant, dsb.</li> </ol> |
| 74 | Rendahnya PAD sektor pariwisata (13.786.568.250 pada tahun 2020)                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya pengelolaan daya tarik wisata yang kewenangannya dibawah PEMDA</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya peran pemerintah dalam merintis pembangunan pariwisata potensial</li> </ol>   |



| No | Masalah Pokok  | Permasalahan   | Akar Masalah  |
|----|--|--|---|
|    |  | 2. Pengembangan daya tarik wisata potensial belum optimal<br>3. Pemantauan dan pelaporan retribusi wisata di daya tarik wisata yang belum optimal<br>4. Masih ada beberapa kriteria GSTC-D yang belum masuk kategori hijau | 2. Belum optimalnya koordinasi antara pemerintah kabupaten, desa, dan kelompok penggerak pariwisata dalam membangun daya tarik wisata<br>3. Terbatasnya SDM Pariwisata<br>4. Pemenuhan kriteria GSTC-D belum optimal<br>5. Belum adanya inovasi dalam upaya peningkatan PAD sektor Pariwisata |
| 75 | Pengembangan Komoditi lokal belum optimal                      | 1. Kurangnya intervensi terhadap pengembangan komoditi lokal   | 1. Belum optimalnya pengembangan komoditi lokal dari hulu ke hilir, mulai dari bibit, pupuk, pengelolaan tanah, pasca panen, dsb<br>2. Belum optimalnya penciptaan pasar hasil komoditi lokal   |
| 76 | Komoditi pertanian sebagai penunjang sektor UMKM belum optimal | 1. Belum optimalnya penerapan teknologi hasil pertanian<br>2. Pemasaran produk pertanian belum optimal   | 1. Belum adanya regulasi mengenai dukungan penggunaan produk pertanian lokal pada sektor lain (pariwisata, perdagangan, dsb)  |
| 77 | Penggunaan teknologi di sektor pertanian belum optimal         | 1. Masih rendahnya pembinaan teknologi di sektor pertanian   | 1. Belum adanya balai pelatihan pertanian   |
| 78 | Sertifikasi Pohon Induk Pilihan belum optimal                  | 1. Belum terselenggaranya pelaksanaan balai benih pertanian<br>2. Belum ada tenaga ahli dalam pembibitan   | 1. Kurangnya sumber daya tenaga ahli pembibitan<br>2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung benih pertanian  |
| 79 | Pengembangan Agrowisata belum optimal                          | 1. Masih rendahnya koordinasi antara pihak Desa, Dinas Pariwisata dengan Dinas Pertanian   | 1. Tingginya ego sektoral   |
| 80 | Peningkatan sektor ternak belum optimal                        | 1. Belum tersedianya pasar ternak<br>2. Belum tersedianya porkeswa   | 1. Belum adanya pola pasar tradisional  |
| 81 | Peningkatan kelompok tani muda belum optimal                   | 1. Masih rendahnya minat pemuda dalam sektor pertanian   | 1. Kurang menariknya sektor pertanian bagi pemuda   |
| 82 | Cakupan bina kelompok nelayan masih rendah                     | 1. Masih rendahnya jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan PEMDA<br>2. Masih rendahnya SDM nelayan   | 1. Kurangnya SDM<br>2. Kurangnya sarana penunjang<br>3. Terbatasnya modal yang dimiliki oleh nelayan untuk bisa   |



| No | Masalah Pokok  | Permasalahan  | Akar Masalah   |
|----|--|---|--|
|    |  | <ol style="list-style-type: none"><li>3. Masih Rendahnya Armada Nelayan</li><li>4. Belum Optimalnya Sosialisasi alat tangkap ramah lingkungan</li><li>5. Belum optimalnya pemanfaatan Potensi laut/ perikanan yang tinggi</li><li>6. Perkembangan teknologi pengolahan ikan belum dapat digunakan secara maksimal oleh kelompok nelayan</li></ol>   | <p>memiliki dan menggunakan teknologi terbaru di bidang pengolahan ikan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Kapabilitas nelayan masih minim sehingga sulit untuk menggunakan teknologi pengolahan ikan</li></ol>  |
| 83 | Nilai tukar nelayan  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum adanya Nilai Tukar Nelayan sebagai tolok ukur kesejahteraan nelayan</li><li>2. Masih rendahnya pendapatan nelayan/ pembudidaya ikan dan</li><li>3. Belum adanya fasilitas/pusat pemasaran produk perikanan/kelautan yang representatif</li><li>4. Perlu adanya peningkatan <i>life skills</i> terhadap pelaku usaha dan UMKM</li></ol>   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum optimal perhatian pemerintah dalam meningkatkan pembudidayaan ikan kecil dan menurunkan biaya produksi</li><li>2. Daya beli masyarakat masih rendah</li><li>3. Belum ada teknologi pengolahan ikan karena dengan adanya pengolahan ikan, nilai jual ikan akan meningkat</li><li>4. Belum adanya standar jual untuk setiap jenis ikan dimana dengan adanya standar jual, hal tersebut dapat mencegah fluktuasi harga jual ikan</li></ol> |
| 84 | Kecilnya persentase bagi hasil kabupaten/kota dan desa (0,21% pada tahun 2020)                   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nilai bagi hasil kabupaten masih rendah, berdasarkan peraturan gubernur minimal 10%</li><li>2. Proses pencairan masih belum terlaksana</li></ol>   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih rendahnya pendapatan daerah Kabupaten Pangandaran</li><li>2. Proses pencairan masih mempertimbangkan skala prioritas</li></ol>  |
| 85 | Rendahnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (42,70% pada tahun 2020) | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih rendahnya jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal</li><li>2. Penyelenggaraan diklat aparatur dan diklat fungsional masih minim</li><li>3. Belum optimalnya Penguatan Sumber Daya Manusia pada dunia pariwisata agar bisa lebih bersinergi dalam pengembangan berfikir pariwisata</li><li>4. Pendidikan struktural masih belum menjadi prioritas</li><li>5. Kemampuan ASN untuk menunjang pariwisata seperti kemampuan berkomunikasi dengan bahasa asing belum menjadi kemampuan komunikasi tambahan yang perlu dimiliki oleh ASN</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Terbatasnya sarana penunjang</li><li>2. Rendahnya motivasi</li><li>3. Pelaksanaan Diklat masih terbatas</li></ol>   |



| No | Masalah Pokok  | Permasalahan  | Akar Masalah  |
|----|--|---|---|
| 86 | Rendahnya persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (13,02% pada tahun 2020) | 1. Masih rendahnya jumlah Pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, maupun fungsional   | 1. Terbatasnya sarana penunjang<br>2. Rendahnya motivasi<br>3. Pelaksanaan Diklat masih terbatas  |
| 87 | Masih rendahnya jumlah pegawai   | 1. Jumlah pegawai yang ada belum memenuhi kebutuhan yang ada  | 1. Kuota pegawai ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga jumlah pegawai yang ada belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan  |
| 88 | Belum Optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangam.  | 1. Penelitian dan pengembangan pada bidang-bidang potensial belum dilakukan secara optimal<br>2. Belum tersusunya dokumen pendukung rencana Kelitbangam, diantaranya RIK dan Road Map                   | 3. Kewenangan maupun fungsi Kelitbangam belum optimal dan baru dilaksanakan pada tahun 2019<br>4. Terbatasnya jumlah SDM pendukung pada bidang Kelitbangam<br>5. Pelaksanaan kegiatan belum berbasis pada hasil kajian.   |
| 89 | Rendahnya persentase tindak lanjut temuan  | 1. Masih rendahnya jumlah temuan yang ditindaklanjuti   | 1. Kurangnya sikap kooperatif dari pihak auditor terkait tindak lanjut atas suatu temuan<br>2. Sikap kooperatif antar auditor sulit untuk dibangun dikarenakan adanya mutase pegawai secara cepat   |
| 90 | Masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai PEMDA   | 1. Perlunya penegakkan disiplin pegawai pemda<br>2. Masih rendahnya tingkat profesionalisme ASN atau masih sedikit jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional maupun strukturnya                       | 1. Belum optimalnya penerapan reward and punishment atas tingkat kedisiplinan pegawai pemda   |
| 91 | Terjadi temuan berulang di bidang fisik dan non fisik sarana prasarana   | 1. Penyedia tidak mematuhi Aturan yang berlaku<br>2. PPK, PPTK dan PHO kurang cermat dalam menjalankan tugas dan fungsinya<br>3. Konsultan Pengawas kurang cermat dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya | 1. Peraturan yang berlaku tidak dipatuhi  |
| 92 | Evaluasi implementasi SPIP belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan                                  | 1. Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas SDM Inspektorat<br>2. Ketidakfahaman SKPD terkait dengan Implementasi SPIP  | 1. Kurangnya ketersediaan waktu dan anggaran untuk melakukan Evaluasi<br>2. Kurangnya peningkatan kompetensi SDM Inspektorat<br>3. Kurangnya sosialisasi dan Bimtek bagi SKPD   |
| 93 | SKPD belum seluruhnya memahami terkait AKIP  | 1. SKPD belum bisa mengimplementasi dan Pemenuhan Administrasi AKIP   | <b>Perencanaan</b><br>- Pernyataan kinerja OPD tidak ditunjang dengan bukti dukung berupa dokumen<br>- Kurangnya konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan OPD<br>- Indikator sebagian OPD belum SMART-C<br>- Belum adanya aplikasi terintegrasi antara perencanaan |



| No | Masalah Pokok  | Permasalahan   | Akar Masalah  |
|----|--|--|---|
|    |  |  | <p> sampai dengan pelaporan.</p> <p><b>Pengukuran</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pernyataan kinerja OPD tidak ditunjang dengan bukti dukung berupa dokumen</li> <li>- Kurangnya konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan OPD</li> <li>- Sebagian besar data OPD masih bergantung pada data BPS (OPD tidak bisa menghitung sendiri baik untuk data makro maupun data sektoral)</li> </ul> <p><b>Pelaporan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pernyataan kinerja OPD tidak ditunjang dengan bukti dukung berupa dokumen</li> <li>- Kurangnya konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan OPD</li> <li>- Keterlambatan pengumpulan pelaporan</li> <li>- Hasil evaluasi SAKIP belum seluruhnya ditindaklanjuti oleh OPD</li> </ul> |
| 94 | Belum Optimalnya komitmen dan integritas SDM dalam meningkatkan Nilai SAKIP          | 1. SDM yang diberi tanggung jawab belum mematuhi tugas pokok dan fungsinya         | 1. Kemampuan SDM yang masih belum Optimal   |
| 95 | Belum adanya komitmen dari tiap OPD terkait PMPRB Online                             | 1. Kurangnya pemahaman OPD terkait dengan PMPRB Online                             | 1. Kurang optimalnya sosialisasi terkait PMPRB Online kepada OPD  |
| 96 | Belum adanya komitmen dari tiap OPD terkait Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM | 1. Kurangnya pemahaman OPD terkait dengan Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM | 1. Kurang optimalnya sosialisasi terkait Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM   |

(Sumber

:

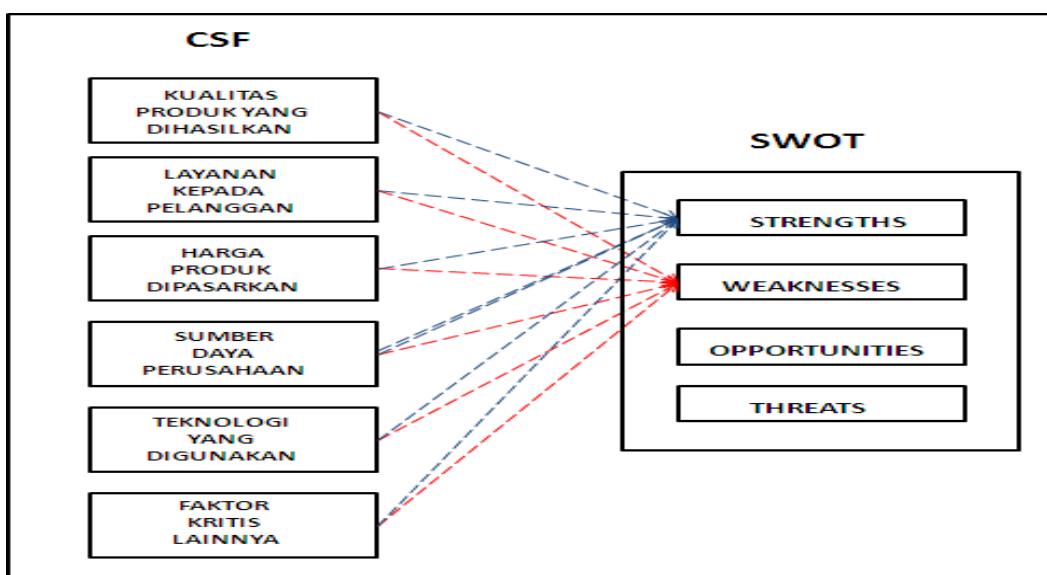
Diolah

Penyusun,

2021)



Untuk menentukan Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan, digunakan *Assessment of Critical Success Factors*” (CSF) adalah hal-hal yang harus berjalan dengan baik untuk memastikan keberhasilan suatu organisasi. CSF mewakili area manajerial yang harus mendapat perhatian khusus dan terus menerus agar menghasilkan kinerja yang tinggi. CSF mencakup isu-isu yang penting bagi aktivitas operasi organisasi saat ini dan kesuksesan masa depannya. Dari pengertian ini dapat difahami bahwa CSF adalah faktor-faktor yang harus berjalan dengan baik untuk menjamin berbagai manajemen. Manajemen harus memberikan perhatian khusus agar organisasi mempunyai kinerja yang tinggi.



(Sumber: Diolah Penyusun, 2021)

**Gambar 4.1 Korelasi CSF dengan SWOT**

Jadi CSF mencakup isu-isu utama dari kegiatan perusahaan baik saat ini maupun diwaktu mendatang. Untuk mengidentifikasi semua jenis kemungkinan CSF dapat dilakukan pendekatan dengan memperhatikan apakah berkaitan dengan aspek industry (faktor apa yang harus dilakukan supaya tetap kompetitif), lingkungan (faktor lingkungan apa yang mempengaruhi organisasi), strategi (faktor strategi apa yang dipilih organisasi kompetitif), dan waktu (faktor internal organisasi) saat ini yang perlu diperhatikan). Beberapa penulis lainnya juga mengatakan bahwa CSF adalah sesuatu yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan atau merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan.



**Tabel 4. 2 Identifikasi Permasala-han untuk Penentuan Program Prioritas Kabupaten Pangandaran**

| No | Masalah Pokok                    | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan   | Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan  |
|----|----------------------------------|--|--|---|
| 1  | Masih rendahnya pertumbuhan PDRB | Belum Tercapai (<)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya Pendapatan masyarakat, menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, sehingga kemampuan untuk melakukan konsumsi menurun,</li> <li>2. Rendahnya produksi barang dan jasa di kabupaten Pangandaran,</li> <li>3. Jumlah Investasi belum maksimal pada tahun 2019 baru mencapai Rp 475.010.357.987 tahun 2019</li> <li>4. UMKM masih memiliki permasalahan pada permodalan dan pemasaran,</li> <li>5. Masih rendahnya pendapatan masyarakat,</li> <li>6. Kontribusi sektor pertanian sebagai sektor yang menyumbang kontribusi tertinggi terhadap PDRB <i>trend</i> pertumbuhannya cenderung menurun tiap tahunnya</li> <li>7. Komposisi PDRB untuk sektor penyedia akomodasi dan makan minum belum menyumbang kontribusi tinggi padahal sektor ini yang didalam nya ada kegiatan pariwisata merupakan sektor unggulan Kabupaten Pangandaran</li> <li>8. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pangandaran tiap Tahun cenderung meningkat tetapi pertumbuhan rata-rata masih di bawah pertumbuhan PDRB Provinsi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi investasi yang mengatur mengenai izin perusahaan sehingga produksi barang dan jasa perusahaan masuk kedalam perhitungan PDRB Kabupaten</li> <li>2. Penegakan regulasi izin usaha</li> <li>3. Keterlibatan masyarakat dalam UMKM dan ekonomi kreatif</li> <li>4. Inovasi di bidang pertanian dan peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian</li> </ul> |
| 2  | Masih adanya laju Inflasi        | Belum Tercapai (<)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Karena kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi,</li> <li>2. Munculnya keinginan berlebihan dari suatu kelompok masyarakat yang ingin, memanfaatkan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia di pasaran,</li> <li>3. Uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Stabilitas harga kebutuhan pokok</li> <li>2. Optimalisasi tim pengendali inflasi daerah</li> </ul>  |



| No | Masalah Pokok   | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)  | Permasalahan   | Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan  |
|----|---|---|--|---|
| 3  | Masih rendahnya PDRB per kapita                             | Belum Tercapai (<)  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan masyarakat yang masih rendah.</li> <li>2. Masih rendahnya produksi dalam daerah</li> <li>3. Kurangnya produk daerah untuk ekspor</li> <li>4. Kabupaten Pangandaran belum memiliki rumah kemasan (Sentra UMKM)</li> <li>5. PDRB Perkapita Kabupaten Pangandaran masih rendah jika dibandingkan PDRB Provinsi Jawa Barat</li> </ol> |   |
| 4  | Indeks Gini   | Sudah baik karena menunjukkan angka ketimpangan rendah [(>) Melampaui]                          |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Share output perekonomian</li> <li>2. Upah pegawai</li> </ol>   |
| 5  | Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) | Sudah baik karena IW<0,3 yang berarti ketimpangan ekonomi wilayah rendah[(>) Melampaui]         |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>2. Pertumbuhan Investasi</li> <li>3. Jumlah penduduk yang bekerja</li> </ol>                               |
| 6  | Persentase penduduk di atas garis kemiskinan                | Sudah Baik karena persentase penduduk diatas garis kemiskinan sudah di atas 90% [(>) Melampaui] |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>5. Ketersediaan Lapangan Kerja</li> </ol>  |
| 7  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                            | Masuk dalam kategori sedang (68,21) berdasarkan data provinsi (72,03) [=] Sesuai]               |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat pendidikan yang baik</li> <li>2. Ekonomi yang merata dan kesejahteraan social</li> <li>3. Pemerataan akses kesehatan</li> </ol> |
| 8  | Masih rendahnya Angka rata-rata lama sekolah                | Belum Tercapai (<)  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya keinginan belajar dari masyarakat,</li> <li>2. minimnya penyelenggaraan pendidikan kesetaraan</li> <li>3. Kurangnya sosialisasi pentingnya melanjutkan pendidikan</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan kesetaraan</li> </ol>  |
| 9  | Angka usia harapan hidup                                    | 71,12 tahun mendekati angka harapan hidup provinsi Jawa Barat 72,85 tahun [=]Sesuai]            |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan perkapita yang layak</li> <li>2. Pendidikan yang merata</li> <li>3. Pengangguran yang terkendali</li> </ol>                  |



| No | Masalah Pokok                              | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)                            | Permasalahan   | Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan   |
|----|--|---|--|--|
| 10 | Masih adanya kasus balita gizi buruk       | [ (=) Sesuai]   | 1. Masih berfluktuasinya angka kecukupan protein<br>2. Kurangnya diversifikasi pangan  | 1. Kecukupan sumber pangan ibu dan anak  |
| 11 | Masih adanya prevalensi balita gizi kurang | Melampaui (>) Target RPJMN  | 1. Cakupan pelayanan anak balita masih fluktuatif<br>2. Kurangnya sumber makanan bergizi Ibu   | 1. Kecukupan sumber pangan dan keragaman pangan<br>2. Pelayanan kesehatan balita yang memadai  |
| 12 | Cakupan Desa Siaga Aktif                   | Sudah Baik [ (=) Sesuai]  |  | 1. Pemberdayaan dan pembinaan desa yang merata dan berkelanjutan<br>2. Pendampingan pengelolaan administrasi desa yang mencapai target |
| 13 | Tingkat partisipasi angkatan kerja         | Sudah di atas TPAK Provinsi (65.07)<br>[(>) Melampaui]                              |  | 1. Jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia   |
| 14 | Tingkat pengangguran terbuka               | Sudah baik jika dibandingkan dengan provinsi di angka lebih dari 7% [(>) Melampaui] |  | 1. Jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia<br>2. Angkatan kerja yang ditempatkan<br>3. Indeks Pembangunan Manusia                      |
| 15 | Rasio penduduk yang bekerja                | Sudah baik [ (=) Sesuai]  | 1. Kesempatan kerja masih belum memadai<br>2. Rasio penduduk yang bekerja masih fluktuatif dari tahun ke tahun<br>3. Belum optimalnya keahlian tenaga kerja dan penempatan kerja   | 1. Jumlah lapangan Pekerjaan<br>2. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan  |
| 16 | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja      | Berada pada level sedang [ (=) Sesuai]  |  | 1. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat<br>2. Ketersediaan Lapangan Pekerjaan  |
| 17 | Persentase PAD terhadap pendapatan         | Belum Tercapai (<)  | 1. Belum optimalnya pengelolaan potensi PAD,<br>2. Masih rendahnya kompetensi SDM di bidang pariwisata,<br>3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah belum optimal<br>4. Beberapa sumber pajak dan retribusi belum memiliki perda | 1. Regulasi terkait optimalisasi PAD<br>2. Penegakan regulasi terkait optimalisasi PAD   |
| 18 | Opini BPK                                  | Sudah baik [ (=) Sesuai]  |  | 1. Kesesuaian laporan dengan SAP<br>2. Kecukupan pengungkapan  |



| No | Masalah Pokok  | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)                               | Permasalahan   | Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan   |
|----|--|--|--|--|
|    |  |  |  | 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan<br>4. Efektivitas pengendalian intern |
| 19 | Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)                    | Sudah di atas Provinsi Jawa Barat 85% [>] Melampaui]                                   | 1. Keragaman dan keseimbangan konsumsi masih dapat dioptimalkan  | 1. Keragaman dan keseimbangan konsumsi   |
| 20 | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB menurun | Belum Tercapai (<)   | 1. Kontribusi sektor pertanian sebagai sektor yang menyumbang kontribusi tertinggi terhadap PDRB trend pertumbuhannya cenderung menurun tiap tahunnya<br>2. Karena pertumbuhan sektor non pertanian yang relatif lebih cepat dari pertumbuhan sektor pertanian,<br>3. Terjadi proses transformasi perekonomian nasional, yang tadinya lebih didominasi oleh nilai komoditas primer hasil produksi sektor pertanian dalam arti sempit, bergeser ke arah dominasi sektor dan atau subsektor lainnya. | 1. Inovasi bidang pertanian  |
| 21 | Pengeluaran konsumsi rumah tangga                            | [=] Sesuai] Pengeluaran konsumsi rumah tangga berbanding lurus dengan peningkatan PDRB |  | 1. Pendapatan Perkapita yang sesuai<br>2. Stabilitas harga yang terkendali               |
| 22 | Nilai Tukar Petani   | Belum Tercapai (<)   | 1. Belum ada Nilai Tukar Petani sebagai tolok ukur kesejahteraan Petani<br>2. Masih rendahnya pendapatan petani dan belum adanya fasilitas/pusat pemasaran produk pertanian yang representatif serta perlu adanya peningkatan <i>life skills</i><br>3. terhadap pelaku usaha dan UMKM  | 1. Ketersediaan Nilai Tukar Petani sebagai tolok ukur kesejahteraan Petani               |
| 23 | Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita         | Sudah Baik [(Sesuai)]  |  | 1. Pertumbuhan ekonomi<br>2. Pendapatan perkapita  |
| 24 | Rasio ketergantungan   | Nilai rasio tidak jauh berbeda dengan Jawa Barat [=] Sesuai]                           |  | 1. <i>Total Fertility rate</i><br>2. Angka Kematian bayi yang rendah                     |



| No | Masalah Pokok                                      | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan  | Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan   |
|----|--|--|---|--|
| 25 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                   | Sudah jauh di atas Jawa Barat (11%) [(>) Melampaui]      |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan rumah tangga</li> <li>2. Ketersediaan jumlah gedung sekolah</li> <li>3. Jumlah guru</li> <li>4. Motivasi sekolah</li> </ol> |
| 26 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ Paket A       | Mendekati standar provinsi [(=) Sesuai]                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio sekolah tingkat SD/MI/SMP/MTS belum mengalami peningkatan secara signifikan</li> <li>2. Motivasi sekolah rendah</li> </ol>                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan rumah tangga</li> <li>2. Ketersediaan jumlah gedung sekolah</li> <li>3. Jumlah guru</li> <li>4. Motivasi sekolah</li> </ol> |
| 27 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/Paket B     | Mendekati standar provinsi [(=) Sesuai]                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio sekolah tingkat SD/MI/SMP/MTS belum mengalami peningkatan secara signifikan</li> <li>2. Motivasi sekolah rendah</li> </ol>                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan rumah tangga</li> <li>2. Ketersediaan jumlah gedung sekolah</li> <li>3. Jumlah guru</li> <li>4. Motivasi sekolah</li> </ol> |
| 28 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/Paket C | Kewenangan di provinsi                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah guru yang menurun pertahunnya</li> <li>2. Biaya lanjut sekolah yang dirasa masih mahal</li> <li>3. Motivasi sekolah kurang</li> </ol>              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah guru</li> <li>2. Biaya sekolah</li> <li>3. Motivasi sekolah</li> </ol>  |
| 29 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A       | Mendekati standar provinsi [(=) Sesuai]                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah sekolah yang cenderung menurun dan stagnan</li> <li>2. Biaya lanjut sekolah yang dirasa masih mahal</li> <li>3. Motivasi sekolah kurang</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan Sekolah</li> <li>2. Motivasi sekolah</li> <li>3. Ekonomi</li> </ol>   |
| 30 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/Paket B     | Mendekati standar provinsi [(=) Sesuai]                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah sekolah yang cenderung menurun dan stagnan</li> <li>2. Biaya lanjut sekolah yang dirasa masih mahal</li> <li>3. Motivasi sekolah kurang</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan Sekolah</li> <li>2. Motivasi sekolah</li> <li>3. Ekonomi</li> </ol>   |
| 31 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ SMK/ MA/Paket C | Kewenangan di provinsi                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah sekolah yang cenderung menurun dan stagnan</li> <li>2. Biaya lanjut sekolah yang dirasa masih mahal</li> <li>3. Motivasi sekolah kurang</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan Sekolah</li> <li>2. Motivasi sekolah</li> <li>3. Ekonomi</li> </ol>   |
| 32 | Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A      | Mendekati standar provinsi [(=) Sesuai]                  |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan rumah tangga</li> <li>2. Ketersediaan jumlah gedung sekolah</li> <li>3. Jumlah guru</li> <li>4. Motivasi sekolah</li> </ol> |
| 33 | Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B    | Mendekati standar provinsi [(=) Sesuai]                  |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan rumah tangga</li> <li>2. Ketersediaan jumlah gedung sekolah</li> <li>3. Jumlah guru</li> <li>4. Motivasi sekolah</li> </ol> |



| No | Masalah Pokok  | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)        | Permasalahan | Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan   |
|----|--|---|--------------|--|
| 34 | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI                                  | Sangat rendah jika dibandingkan dengan provinsi [(>) Melampaui] |              | 1. Pendapatan rumah tangga<br>2. Ketersediaan jumlah gedung sekolah<br>3. Jumlah guru<br>4. Motivasi sekolah |
| 35 | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs                               | Sangat rendah jika dibandingkan dengan provinsi [(>) Melampaui] |              | 1. Jumlah guru<br>2. Biaya sekolah<br>3. Motivasi sekolah  |
| 36 | Angka Putus Sekolah (APS) SMA/ SMK/MA                            | Kewenangan di provinsi  |              | 1. Ketersediaan Sekolah<br>2. Motivasi sekolah<br>3. Ekonomi   |
| 37 | Angka Kelulusan (AL) SD/MI                                       | Sudah baik [(=) Sesuai]   |              | 1. Ketersediaan Sekolah<br>2. Jumlah guru<br>3. Ekonomi  |
| 38 | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs                                     | Sudah baik [(=) Sesuai]   |              | 1. Ketersediaan Sekolah<br>2. Jumlah Guru<br>3. Ekonomi  |
| 39 | Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA                                  | Kewenangan di provinsi  |              | 1. Ketersediaan Sekolah<br>2. Jumlah guru<br>3. Ekonomi  |
| 40 | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs                     | Sudah baik [(=) Sesuai]   |              | 1. Jumlah guru<br>2. Biaya sekolah<br>3. Motivasi sekolah  |
| 41 | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA                | Sudah baik [(=) Sesuai]]  |              | 1. Jumlah guru<br>2. Biaya sekolah<br>3. Motivasi sekolah  |
| 42 | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik                   | Sudah baik [(=) Sesuai]]  |              | 1. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan  |
| 43 | Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/ SMK/MA kondisi bangunan baik | Sudah baik [(=) Sesuai]   |              | 1. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan  |



| No | Masalah Pokok   | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)  | Permasalahan  | Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan |
|----|---|---|---|--------------------------------------|
| 44 | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidi-kan dasar            | Sudah baik [(=) Sesuai]   | 1. Jumlah sekolah mengalami penurunan                                     | 1. Jumlah ketersediaan sekolah       |
| 45 | Rasio ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah | Kewenangan Provinsi   |   | 1. Jumlah ketersediaan sekolah       |
| 46 | Masih rendahnya rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar                     | Sudah melampaui (>) rasio murid/guru yang mengajar pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs, sedangkan standar berdasarkan PP No.74 Tahun 2008 tentang guru untuk TK sederajat 15:1, SD sederajat: 21:1, MI sederajat 15:1, SMP sederajat 20:1, MTS sederajat 1:1 | 1. Jumlah guru yang belum memadai<br>2. Persebaran guru yang belum merata | 1. Jumlah guru<br>2. Pemerataan guru |
| 47 | Masih rendahnya Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah                 | Kewenangan Provinsi   | 1. Jumlah guru yang belum memadai<br>2. Persebaran guru yang belum merata | 1. Jumlah guru<br>2. Pemerataan guru |
| 48 | Masih rendahnya rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar            | Sudah melampaui (>) Rasio murid/guru yang mengajar pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs, Sedangkan standar berdasarkan PP No.74 Tahun 2008 tentang guru untuk TK sederajat 15:1, SD sederajat: 21:1, MI sederajat 15:1, SMP                                   |   | 1. Jumlah Guru<br>2. Kompetensi guru |



| No | Masalah Pokok  | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)                         | Permasalahan  | Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan   |
|----|--|--|---|--|
|    |  | sederajat 20:1, MTS sederajat 1:1  |   |  |
| 49 | Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata sekolah menengah        | Kewenangan Provinsi  |   | 1. Jumlah Guru<br>2. Kompetensi guru   |
| 50 | Masih rendahnya guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV                 | Sesuai (=)   | 1. Motivasi melanjutkan sekolah masih kurang<br>2. Beasiswa guru masih belum merata | 1. Motivasi melanjutkan sekolah yang tinggi<br>2. beasiswa guru yang merata      |
| 51 | Capaian Pangandaran Hebat Jenjang Pendidikan SD/MI Negeri & Swasta     | Tidak bisa dianalisis karena tidak tersedia rumus dan acuan standarnya tidak ada | Tidak bisa dianalisis karena tidak tersedia rumus dan acuan standarnya tidak ada    | Tidak bisa dianalisis karena tidak tersedia rumus dan acuan standarnya tidak ada |
| 53 | Capaian Pangandaran Hebat Jenjang Pendidikan SMP/MTs Negeri Swasta     | Tidak bisa dianalisis karena tidak tersedia rumus dan acuan standarnya tidak ada | Tidak bisa dianalisis karena tidak tersedia rumus dan acuan standarnya tidak ada    | Tidak bisa dianalisis karena tidak tersedia rumus dan acuan standarnya tidak ada |
| 54 | Capaian Pangandaran Hebat Jenjang Pendi-dikan SMA/SMK/MA Negeri Swasta | Tidak bisa dianalisis karena tidak tersedia rumus dan acuan standarnya tidak ada | Tidak bisa dianalisis karena tidak tersedia rumus dan acuan standarnya tidak ada    | Tidak bisa dianalisis karena tidak tersedia rumus dan acuan standarnya tidak ada |
| 55 | Ajengan Masuk Sekolah Jenjang SD                                       | tidak bisa dianalisis karena tidak tersedia rumus dan acuan standarnya tidak ada | Tidak bisa dianalisis karena tidak tersedia rumus dan acuan standarnya tidak ada    | Tidak bisa dianalisis karena tidak tersedia rumus dan acuan standarnya tidak ada |
| 56 | Ajengan Masuk Sekolah Jenjang SMP                                      | tidak bisa dianalisis karena tidak tersedia rumus dan acuan standarnya tidak ada | Tidak bisa dianalisis karena tidak tersedia rumus dan acuan standarnya tidak ada    | Tidak bisa dianalisis karena tidak tersedia rumus dan acuan standarnya tidak ada |



| No | Masalah Pokok   | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)   | Permasalahan | Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan  |
|----|---|--|--------------|---|
| 57 | Masih Adanya Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | Melampaui (><br>Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Pangandaran telah melebihi target SDGs yakni 12 kematian per 1000 kelahiran hidup         |              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah SDM tenaga kesehatan sesuai rasio yakni 24 dokter spesialis, 96 dokter umum dan 11 dokter per 100.000 penduduk</li> <li>2. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat</li> <li>3. Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup</li> </ol> |
| 58 | Masih adanya Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup     | Melampaui (><br>Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup kabupaten Pangandaran telah melampaui target SDGs yakni sebesar 70 kematian per 100.000 kelahiran |              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah SDM tenaga kesehatan sesuai rasio yakni 24 dokter spesialis, 96 dokter umum dan 11 dokter per 100.000 penduduk</li> <li>2. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat</li> <li>3. Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup</li> </ol> |
| 59 | Masih adanya Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup     | Melampaui (><br>Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Pangandaran telah melampaui target SDGs yakni sebesar 25 kematian per 1000 kelahiran    |              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah SDM tenaga kesehatan sesuai rasio yakni 24 dokter spesialis, 96 dokter umum dan 11 dokter per 100.000 penduduk</li> <li>2. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat</li> <li>3. Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup</li> </ol> |
| 60 | Masih rendahnya rasio posyandu per seratus balita               | Melampaui rasio Jawa Barat (>)   |              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah posyandu memadai</li> <li>2. Jumlah SDM kesehatan per seratus balita</li> </ol>  |
| 61 | Masih rendahnya rasio puskesmas per satuan penduduk             | Melampaui rasio Jawa Barat (>)   |              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah puskesmas memadai</li> <li>2. Jumlah SDM kesehatan per satuan penduduk</li> </ol>  |



| No | Masalah Pokok   | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)          | Permasalahan  | Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan  |
|----|---|---|---|---|
| 62 | Masih rendahnya rasio puskesmas pembantu per satuan penduduk                            | Melampaui rasio Jawa Barat (>)                                    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah puskesmas pembantu yang memadai</li> <li>2. Jumlah SDM kesehatan per satuan penduduk</li> </ul>                                  |
| 63 | Masih rendahnya rasio poliklinik per satuan penduduk                                    | Melampaui rasio Jawa Barat (>)                                    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah poliklinik memadai</li> <li>2. Jumlah SDM kesehatan per satuan penduduk</li> </ul>   |
| 64 | Masih rendahnya rasio Rumah Sakit per satuan penduduk                                   | Belum Tercapai (<)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio rumah sakit di Kabupaten Pangandaran masih kurang jika dibandingkan dengan standar penyediaan rumah sakit yakni 1 rumah sakit untuk 100.000 penduduk.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan rumah sakit sesuai dengan standar yakni 4 rumah sakit baru</li> </ul>  |
| 65 | Masih rendahnya rasio dokter per seratus ribu penduduk                                  | Belum Tercapai (<)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya dokter untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, dimana rasio dokter Kab Pangandaran 10,78 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokter sesuai dengan standar baik itu dokter umum maupun dokter spesialis</li> </ul>                                       |
| 66 | Rasio bidan per seratus   | Sudah diatas Provinsi berdasarkan data kemenkes [>]<br>Melampaui] |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan bidan</li> <li>2. Pemerataan bidan pada wilayah-wilayah tertentu</li> </ul>  |
| 67 | Rasio perawat per seratus ribu penduduk   | Sudah diatas Provinsi berdasarkan data kemenkes [>] Melampaui]    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan perawat</li> <li>2. Pemerataan jumlah perawat</li> </ul>   |
| 68 | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani   | Sudah baik [=] Sesuai]  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan</li> <li>2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk</li> </ul> |
| 69 | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | Sudah baik [=] Sesuai]  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan</li> <li>2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk</li> </ul> |



| No | Masalah Pokok   | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan   | Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan  |
|----|---|--|--|---|
| 70 | Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)  | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan</li> <li>2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk</li> </ul> |
| 71 | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan  | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan</li> <li>2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk</li> </ul> |
| 72 | Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak  | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan</li> <li>2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk</li> </ul> |
| 73 | Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk   | Tidak ada kasus/Sudah Baik [(=) Sesuai]                  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan</li> <li>2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk</li> </ul> |
| 74 | Masih adanya kasus cakupan balita pneumonia yang ditangani baru mencapai 34,39% pada tahun 2018, sedangkan di Jawa Barat sebesar 58,80% dan Nasional sebesar 56,61%.                                    | Belum Tercapai (<)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya tenaga dokter untuk mengakomodir balita pneumonia, dimana rasio dokter Kab Pangandaran 10,78 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk</li> <li>2. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokter</li> </ul>  |
| 75 | Masih adanya cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Tuberkulosis BTA, sedangkan target pada SPM kesehatan harus mencapai 100% dan target penanggulangan TBC nasional sampai dengan 2035 95% | Belum Tercapai (<)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. kurangnya tenaga dokter serta minim edukasi untuk mengakomodir penanganan penderita Tuberkulosis BTA dimana rasio dokter Kab Pangandaran 10,78 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk</li> <li>2. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokter</li> <li>2. Edukasi mengenai penanganan Tuberkulosis</li> </ul>   |



| No | Masalah Pokok   | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan   | Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan  |
|----|---|--|--|---|
| 76 | Masih tingginya tingkat prevalensi Tuberkulosis   | Belum Tercapai (<)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. kurangnya tenaga dokter serta minim edukasi untuk mengakomodir penanganan penderita prevalensi Tuberkulosis dimana rasio dokter Kab Pangandaran 10,78 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk</li> <li>2. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat</li> <li>3. Kabupaten Pangandaran masih menjadi salah satu kabupaten penyumbang angka prevalensi TB Nasional, sedangkan penanggulangan TB menjadi salah satu program strategis nasional yang perlu di dukung oleh pemerintah tingkat daerah.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokter</li> <li>2. Edukasi mengenai penanganan Tuberkulosis</li> </ul>   |
| 77 | Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)                                   | Sudah baik karena tergolong rendah [=] Sesuai]           |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokter</li> <li>2. Edukasi mengenai penanganan Tuberkulosis</li> </ul>   |
| 78 | Masih rendahnya Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS, minimal capaian nasional 85% | Belum Tercapai (<)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya Jumlah tenaga kesehatan masih belum sesuai rasio dimana rasio dokter Kab Pangandaran 10,78 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk</li> <li>2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang Pola hidup sehat</li> <li>3. Kurangnya Fasilitas kesehatan yang khusus untuk Tuberkulosis</li> <li>4. Kurangnya sosialisasi tentang penyakit yang berbahaya</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokter</li> <li>2. Edukasi mengenai penanganan Tuberkulosis</li> </ul>   |
| 79 | Masih rendahnya Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS        | Belum Tercapai (<)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya tenaga dokter untuk mengobati Tuberkulosis dalam program DOTS dimana rasio dokter Kab Pangandaran 10,78 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk</li> <li>2. Perlu adanya obat-obatan yang memadai untuk penanganan tuberculosis hingga sembuh</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokter</li> <li>2. Edukasi mengenai penanganan Tuberkulosis</li> <li>3. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penanganan tuberkulosis</li> </ul> |



| No | Masalah Pokok  | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan   | Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan   |
|----|--|--|--|--|
| 80 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD                             | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |  | 1. Ketersediaan dokter<br>2. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat                                       |
| 81 | Masih tingginya kasus diare  | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Kurangnya tenaga serta sarana penunjang untuk dokter dalam menangani diare dimana rasio dokter Kab Pangandaran 10,78 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk<br>2. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat   | 1. Ketersediaan dokter<br>2. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat                                       |
| 82 | Angka kejadian Malaria   | Tergolong rendah [(=) Sesuai]                            |  | 1. Ketersediaan dokter<br>2. Penerapan lingkungan bersih dan sehat<br>3. Edukasi mengenai penanganan Malaria |
| 83 | Tingkat kematian akibat malaria  | Tergolong rendah [(=) Sesuai]                            |  | 1. Ketersediaan dokter<br>2. Penerapan lingkungan bersih dan sehat<br>3. Edukasi mengenai penanganan Malaria |
| 84 | Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida                      | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |  |  |
| 85 | Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |  | 1. Ketersediaan dokter<br>2. Penerapan lingkungan bersih dan sehat<br>3. Edukasi mengenai penanganan Malaria |
| 86 | Masih adanya prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi                      | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Masyarakat belum memahami tentang prevalensi HIV/ AIDS<br>2. Sosialisasi mengenai prevalensi HIV/ AIDS kurang optimal, walaupun hanya sebesar 0,27% Jawa Barat menjadi lima provinsi dengan jumlah kasus HIV tertinggi, sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Barat , Kabupaten Pangandaran perlu melakukan penanggulangan guna mendorong capaian HIV / AIDS di tingkat Provinsi maupun Nasional | 1. Pendidikan dan sosialisasi mengenai bahaya HIV/AIDS   |



| No | Masalah Pokok  | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan  | Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan  |
|----|--|--|---|---|
| 87 | Cakupan kunjungan bayi   | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan</li> <li>2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk</li> </ul> |
| 88 | Cakupan kunjungan Ibu hamil K4   | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan</li> <li>2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk</li> </ul> |
| 89 | Cakupan pelayanan nifas  | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan</li> <li>2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk</li> </ul> |
| 90 | Masih rendahnya cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani                      | Belum Tercapai (<)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani akan berpengaruh pada angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran untuk segera membawa bayi ke fasilitas kesehatan</li> </ul>   |
| 91 | Cakupan pelayanan anak balita  | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan</li> <li>2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk</li> </ul> |
| 92 | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin   | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran untuk langsung melakukan pendataan ke fasilitas kesehatan</li> </ul>  |
| 93 | Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat                                   | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerataan SDM Kesehatan</li> </ul>   |
| 94 | Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan</li> <li>2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk</li> </ul> |
| 95 | Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk   | Belum ada data karena rumah sakit baru dibangun          |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan</li> </ul>  |



| No  | Masalah Pokok   | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan  |
|-----|---|--|--------------|---|
| 96  | Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang terakreditasi                            | Belum ada data karena rumah sakit baru dibangun          |              | 1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan  |
| 97  | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil                              | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |              | 1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan<br>2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk |
| 98  | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan                                    | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |              | 1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan<br>2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk |
| 99  | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir                  | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |              | 1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan<br>2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk |
| 100 | Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar  | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |              | 1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan<br>2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk |
| 101 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |              | 1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan<br>2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk |
| 102 | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar             | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |              | 1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan<br>2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk |
| 103 | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |              | 1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan<br>2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk |



| No  | Masalah Pokok   | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan  |
|-----|---|--|--------------|---|
| 104 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                 | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan</li> <li>2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk</li> </ol> |
| 105 | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                         | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan</li> <li>2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk</li> </ol> |
| 106 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar                      | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan</li> <li>2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk</li> </ol> |
| 107 | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar                               | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan</li> <li>2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk</li> </ol> |
| 108 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan</li> <li>2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk</li> </ol> |
| 109 | Presentase Balita Gizi Buruk/Stunting yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan                  | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan</li> <li>2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk</li> </ol> |
| 111 | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik  | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaringan irigasi yang baik</li> <li>2. Pemerataan akses jalan dalam kondisi baik</li> </ol>   |
| 112 | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk  | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik</li> </ol>   |



| No  | Masalah Pokok  | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)                                  | Permasalahan   | Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan  |
|-----|--|---|--|---|
| 113 | Persentase rumah tinggal bersanitasi belum optimal                       | Tidak dapat dianalisis, data tidak tersedia   |  | 1. Rumah tinggal bersanitasi<br>2. Warga yang sadar hunian sehat dengan sanitasi layak              |
| 114 | Masih terjadinya genangan >2 kali dalam 1 tahun                          | Belum Tercapai (<) Terdapat 19,11% daerah yang tergenang dari total daerah rawan genangan | 1. Tidak tersedia gorong-gorong yang cukup untuk menampung air hujan pada beberapa titik                         | 1. Ketersediaan drainase  |
| 115 | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik belum optimal            | Belum Tercapai (<)  | 1. Masih rendahnya persentase irigasi kabupaten yang dalam kondisi baik  | 1. Jaringan irigasi yang baik   |
| 116 | Rasio Jaringan Irigasi belum optimal                                     | Tidak dapat dianalisis, data tidak tersedia   |  | 1. Jaringan irigasi yang baik   |
| 117 | Persentase penduduk berakses air minum belum optimal                     | Belum Tercapai (<)  | 1. Masih rendahnya jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan air minum<br>2. Tidak adanya data awal perhitungan | 1. Ketersediaan SPAM perkotaan dan pedesaan   |
| 118 | Rasio tempat ibadah per satuan penduduk                                  | Sudah baik [(=) Sesuai]   |  | 1. Jumlah tempat ibadah yang memadai bagi setiap penduduk   |
| 119 | Ketaatan terhadap RTRW   | Sudah baik [(=) Sesuai]   |  | 1. Sosialisasi yang optimal kepada masyarakat<br>2. Penindakan terhadap pelanggaran yang dipertegas |
| 120 | Masih rendahnya cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)         | Sudah baik [(=) Sesuai]   |  | 1. Pemerataan Linmas<br>2. Meningkatnya efektivitas tugas Linmas                                    |
| 121 | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) | Sudah baik [(=) Sesuai]   |  | 1. Optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat   |



| No  | Masalah Pokok  | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan  | Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan   |
|-----|--|--|---|--|
| 122 | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota belum optimal                                       | Belum tercapai (<)                                       | 1. Belum tersedianya UPTD Damkar yang memadai (perlu UPTD untuk membawahi 2 kecamatan)<br>2. Jauhnya jangkauan jarak untuk memenuhi respon time | 1. Ketersediaan UPTD Pemadam Kebakaran<br>2. Ketersediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran |
| 123 | Tingkat waktu tang- gap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | Belum tercapai (<)                                       | 1. Sarana kebutuhan belum terpenuhi   | 1. Ketersediaan UPTD Pemadam Kebakaran<br>2. Ketersediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran |
| 124 | Persentase penegakan PERDA   | Sudah baik [=] Sesuai]                                   |   | 1. Ketegasan penindakan pelanggaran perda<br>2. Sinkronisasi antar lembaga terkait               |
| 125 | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial   | Sudah baik [=] Sesuai]                                   |   | 1. Pendataan yang optimal<br>2. Pemerataan bantuan sosial  |
| 126 | Persentase PMKS yang tertangani  | Sudah baik [=] Sesuai]                                   |   | 1. Pemerataan penanganan PMKS<br>2. Optimalisasi penanganan PMKS                                 |
| 127 | Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar                   | Sudah baik [=] Sesuai]                                   |   | 1. Pendataan yang optimal<br>2. Pemerataan bantuan sosial  |
| 128 | Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial                   | Sudah baik [=] Sesuai]                                   |   | 1. Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial                                  |
| 129 | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat                     | Sudah baik [=] Sesuai]                                   |   | 1. Pendataan yang optimal<br>2. Kesiapsiagaan instansi terkait                                   |
| 130 | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap  | Sudah baik [=] Sesuai]                                   |   | 1. Pendataan yang optimal<br>2. Peningkatan sarana dan prasarana evakuasi bencana                |



| No  | Masalah Pokok  | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan  | Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan   |
|-----|--|--|---|--|
| 131 | Persentase penyandang disabilitas fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Belum tersedianya data yang akurat terkait dengan data penyandang disabilitas fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | 1. Ketersediaan data yang akurat terkait dengan data penyandang disabilitas fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial      |
| 132 | Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial                                 | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | 1. Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial  |
| 133 | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)   | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | 1. Meningkatnya indeks hubungan industrial   |
| 134 | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan  | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | 1. Peningkatan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan<br>2. pendataan pencari tenaga kerja<br>3. Peningkatan jumlah lapangan pekerjaan |
| 135 | Keselamatan dan perlindungan   | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | 1. Pemenuhan sarana-prasarana keselamatan kerja  |
| 136 | Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah  | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | 1. Pengupahan yang layak<br>2. Kebijakan ketenagakerjaan yang jelas<br>3. Perlindungan dan keselamatan buruh                         |
| 137 | Besaran tenaga kerja yang mendapat kan pelatihan berbasis masyarakat   | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | 1. Jumlah pelatihan kerja  |
| 138 | Masih rendahnya Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan  | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Masih kurangnya pelatihan kewirausahaan,<br>2. Pemerintah Daerah belum memiliki Balai Latihan Kerja  | 1. Ketersediaan balai latihan kerja<br>2. Pelatihan kewirausahaan  |
| 139 | Masih rendahnya rasio lulusan S1/S2/S3   | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Jarak yang jauh ke perguruan tinggi<br>2. Besarnya biaya pendidikan di perguruan tinggi  | 1. Mendorong pembukaan perguruan tinggi di Kabupaten Pangandaran<br>2. Beasiswa perguruan tinggi                                     |
| 141 | Masih rendahnya Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah   | Belum Tercapai (<)                                       | 1. 1. Masih rendahnya jumlah tenaga kerja perempuan di bidang pemerintahan (8,45% tahun 2019)   | 1. Masih rendahnya tingkat kesetaraan gender   |



| No  | Masalah Pokok   | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan  | Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan  |
|-----|---|--|---|---|
| 142 | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD belum mencapai minimal partisipasi 30%   | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Kurangnya partisipasi perempuan dalam politik  | 1. Partisipasi perempuan dalam politik  |
| 143 | Partisipasi angkatan kerja perempuan  | Sudah cukup baik [(=) Sesuai]                            |   | 1. Pemberdayaan perempuan<br>2. Pengarusutamaan gender  |
| 144 | Cakupan perempuan dan anak korban Kekerasan yang men-dapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu                                      | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | 1. Optimalisasi pendataan korban<br>2. Perlindungan korban kekerasan<br>3. Kebijakan yang berpihak terhadap perempuan dan anak<br>4. Jumlah petugas terlatih yang memadai |
| 145 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | 1. Optimalisasi pendataan korban<br>2. Perlindungan korban kekerasan<br>3. Kebijakan yang berpihak terhadap perempuan dan anak<br>4. Jumlah petugas terlatih yang memadai |
| 146 | Tidak adanya data cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan Pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak                     | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Pihak terkait tidak continue melaporkan penegakan hukum mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak<br>2. Data dan informasi mengenai penanganan hukum kurang optimal | 1. Ketersediaan data cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak              |
| 147 | Rasio APM perempuan /laki- laki di SD   | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | 1. Motivasi sekolah<br>2. Biaya sekolah   |
| 148 | Rasio APM perempuan /laki- laki di SMP  | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | 1. Motivasi sekolah<br>2. Biaya sekolah   |
| 149 | Rasio APM perempuan /laki- laki di SMA  | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | 1. Motivasi sekolah<br>2. Biaya sekolah   |



| No  | Masalah Pokok  | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan  | Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan  |
|-----|--|--|---|---|
| 150 | Rasio APM perempuan /laki- laki di Perguruan Tinggi            | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | 1. Motivasi sekolah<br>2. Biaya sekolah   |
| 151 | Ketersediaan pangan utama                                      | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | 1. Luas lahan<br>2. Biaya produksi<br>3. Distribusi pangan  |
| 152 | Masih rendahnya Ketersediaan energi dan protein perkapita      | Tidak dapat dianalisis, karena data tidak tersedia       |   | 1. Pendapatan perkapita<br>2. Diversifikasi pangan  |
| 153 | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan                       | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | 1. Jumlah pengawasan dan pembinaan keamanan pangan  |
| 154 | Masih rendahnya Persentase luas lahan bersertifikat            | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Tingkat sosialisasi yang rendah/tidak maksimal mengenai pertanahan<br>2. Masyarakat masih belum memiliki kelengkapan administrasi pertanahan | 1. Sosialisasi mengenai pembuatan sertifikat hal milik lahan  |
| 155 | Penyelesaian izin lokasi                                       | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | 1. Jumlah pengawasan pemenuhan izin lokasi  |
| 156 | Ketersediaan RPPLH Kabupaten/Kota                              | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Belum disusunnya RPPLH   | 1. Ketersediaan RPPLH   |
| 157 | Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Belum disusunnya RPPLH   | 1. Ketersediaan RPPLH   |
| 158 | Penyelenggaraan KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten      | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | 1. Jumlah penyelenggaraan KLHS  |
| 159 | Masih Rendahnya Indeks kualitas Air                            | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Pengelolaan limbah masih rendah<br>2. Belum tersedia sarana laboratorium lingkungan  | 1. Pengelolaan limbah<br>2. Upaya restorasi<br>3. Sumber pencemar air<br>4. Ketersediaan sarana laboratorium lingkungan |
| 160 | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara                         | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | 1. Keadaan iklim<br>2. Arah angina  |



| No  | Masalah Pokok   | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan  | Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan   |
|-----|---|--|---|--|
|     |   |  |   | 3. Sumber pencemar udara<br>4. Keselarasan perencanaan daerah dengan RTRW  |
| 161 | Masih kecilnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan  | Kewenangan Provinsi                                      |   | 1. Pembukaan lahan<br>2. Kebakaran hutan/laahan<br>3. Penebangan liar<br>4. Rehabilitasi hutan   |
| 162 | Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingku-ngan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | 1. Pengawasan dan pembinaaan terhadap komitmen izin pelaku usaha   |
| 163 | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota.                                      | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | 1. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan yang ditindaklanjuti<br>2. Kepatuhan perusahaan atau pelaku usaha terhadap komitmen izin |
| 164 | Masih minimnya timbulan sampah yang ditangani (sampah yang tertangani hingga pemrosesan akhir sebesar 2,5%)   | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Masih rendahnya tingkat penanganan terhadap timbulan sampah  | 1. Ketersediaan TPA, TPS3R dan sarana pengelolaan persampahan  |
| 165 | Masih rendahnya persentase jumlah sampah yang terkura-ngi melalui 3R (sampah yang tertangani mela-lui 3R 0,65%)   | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Terbatasnya sarana penghimpun dan pengolahan sampah setempat | 1. Ketersediaan TPS3R  |



| No  | Masalah Pokok   | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan  | Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan   |
|-----|---|--|---|--|
| 166 | Persentase cakupan area pelayanan                                     | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pelayanan minimal yang terpenuhi</li> <li>2. Pemerataan cakupan pelayanan</li> </ul>   |
| 167 | Sulitnya melaksanakan Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Belum tersedianya TPA/TPST/SPA   | 1. Ketersediaan TPA  |
| 168 | Masih rendahnya penduduk berKTP                                       | Belum Tercapai (<)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ketidakpastian ketersediaan sarana dan prasarana untuk perekaman e-KTP masih terbatas</li> <li>2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk perekaman e-KTP</li> <li>2. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan</li> </ul>  |
| 169 | Masih rendahnya bayi berakta kelahiran                                | Belum Tercapai (<)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ketidakpastian ketersediaan sarana dan prasarana untuk pembuatan akte kelahiran masih terbatas</li> <li>2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan</li> <li>3. Pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya akte kelahiran masih perlu ditingkatkan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk pembuatan akte kelahiran</li> <li>2. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan</li> <li>3. Sosialisasi pentingnya pembuatan akte kelahiran</li> </ul> |
| 170 | Masih kurangnya pasangan berakta nikah                                | Belum Tercapai (<)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi masih perlu ditingkatkan</li> <li>2. Pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya akte nikah/buku nikah masih perlu ditingkatkan</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan</li> <li>2. Sosialisasi pentingnya pembuatan akte nikah</li> </ul>  |
| 171 | Kurangnya sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik    | Sudah Baik (=)   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik</li> <li>2. Pembangunan sarana dan prasarana</li> </ul>   |
| 172 | Kurangnya kelompok binaan PKK   | Sudah Baik (=)   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah petugas pembina PKK</li> <li>2. Pendampingan dan pemberdayaan PKK</li> </ul>  |
| 173 | Persentase PKK aktif  | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | 1. Pendampingan dan pemberdayaan PKK   |
| 174 | Persentase Posyandu aktif   | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah petugas pembina Posyandu</li> <li>2. Pendampingan dan pemberdayaan Posyandu</li> </ul>  |



| No  | Masalah Pokok  | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan   | Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan  |
|-----|--|--|--|---|
| 175 | Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat  | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |  | 1. Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat   |
| 176 | Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat   | Sudah cukup baik [(=) Sesuai]                            |  | 1. Monitoring evaluasi terhadap masyarakat pasca pemberdayaan                             |
| 177 | Laju pertumbuhan penduduk (LPP) yang rendah  | Sudah Baik [(=) Sesuai]                                  |  | 1. Sosialisasi mengenai KB  |
| 178 | Masih rendahnya rata-rata jumlah anak per keluarga   | Sudah Baik [(=) Sesuai]                                  |  | 1. Sosialisasi mengenai KB  |
| 179 | Masih rendahnya Ratio Akseptor KB (15,2% pada tahun 2020)  | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Pengetahuan masyarakat mengenai KB masih perlu ditingkatkan   | 1. Sosialisasi mengenai KB  |
| 180 | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49  | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |  | 1. Sosialisasi mengenai KB  |
| 181 | Masih adanya kelahi-ran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) (18,01% pada tahun 2020) | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Masih adanya remaja perempuan usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan  | 1. Peningkatan akses pendidikan   |
| 182 | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi   | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |  | 1. Sosialisasi mengenai KB  |
| 183 | Jumlah arus penumpang angkutan umum  | Tergolong Tinggi [(=) Sesuai]                            |  | 1. Jumlah angkutan umum   |
| 184 | Rendahnya Jumlah uji KIR angkutan umum   | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Masih rendahnya pengujian KIR terhadap angkutan umum<br>2. Masih minimnya fasilitas uji KIR   | 1. Ketersediaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor                         |
| 185 | Minimnya kualitas Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis (3 jumlah terminal, 1 jumlah   | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Belum adanya izin operasional pelabuhan<br>2. Belum optimalnya operasional bandara<br>3. Minimnya kapasitas terminal angkutan darat | 1. Izin operasional Pelabuhan<br>2. Optimasi bandara<br>3. Peningkatan kapasitas terminal |



| No  | Masalah Pokok  | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan  | Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan   |
|-----|--|--|---|--|
|     | pelabuhan, 1 jumlah bandara)   |  |   | angkutan darat   |
| 186 | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum   | Sudah cukup baik [(=) Sesuai]                            |   | 1. Ketersediaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor  |
| 187 | Kurangnya pemasangan rambu- rambu  | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Masih kurangnya rambu-rambu lalu lintas  | 1. Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas  |
| 188 | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum  | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | 1. Jumlah angkutan umum  |
| 199 | Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun                                      | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | 1. Peningkatan sarana dan prasarana dermaga/ban-dara/terminal<br>2. Peningkatan kapasitas dermaga/bandara/terminal   |
| 200 | Kurangnya cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Masih rendahnya pelatihan penggunaan teknologi dan informasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan<br>2. Penyebarluasan informasi publik belum optimal  | 1. Pelatihan Kelompok Informasi Masyarakat   |
| 201 | Cakupan Layanan Telekomunikasi   | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Masih terdapat blankspot   | 1. Penambahan BTS ( (Base Transceiver Station))  |
| 202 | Rendahnya persentase koperasi aktif  | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Masih rendahnya kaderisasi generasi muda sebagai pengurus koperasi,<br>2. Masih rendahnya koperasi yang bergerak di sektor riil  | 1. Kaderisasi pengurus koperasi<br>2. Peningkatan kapasitas koperasi   |
| 203 | Masih rendahnya kapasitas dan produktivitas Usaha mikro dan kecil                                  | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Potensi usaha mikro dan kecil sebagai muatan lokal belum terpetakan<br>2. Minimnya usaha mikro dan kecil yang memiliki hak izin dan edar<br>3. Terhambatnya promosi produk usaha mikro & kecil<br>4. Belum ada formulasi untuk menghitung jumlah peningkatan presentasi kewirausahaan mikro dibagi jumlah penduduk<br>5. Belum tersedianya display/ruang promosi untuk ajang promosi usaha mikro dan kecil bagi wisatawan<br>6. Masih rendahnya pemberdayaan SDM usaha mikro dan kecil | 1. Peningkatan kapasitas usaha mikro dan kecil<br>2. Promosi produk usaha mikro dan kecil<br>3. Pemasaran produk usaha mikro dan kecil<br>4. Pelatihan kewirausahaan |



| No  | Masalah Pokok  | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan  | Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan   |
|-----|--|--|---|--|
|     |  |  | 7. Belum optimalnya pemasaran produk usaha mikro dan kecil  |  |
| 204 | Percentase UKM non BPR/LKM aktif   | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | 1. Peningkatan kapasitas UMKM non BPR/LKM<br>2. Pendampingan UMKM non BPR/LKM  |
| 205 | Percentase Usaha Mikro dan Kecil   | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | 1. Peningkatan kapasitas usaha mikro dan kecil<br>2. Promosi produk usaha mikro dan kecil<br>3. Pemasaran produk usaha mikro dan kecil<br>4. Pelatihan kewirausahaan |
| 206 | Minimnya jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (2.124 investor pada tahun 2020)       | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Masih rendahnya minat investor<br>2. Belum adanya RUPM dan kajian investasi untuk setiap sektor            | 1. Ketersediaan RUPM<br>2. Regulasi investasi<br>3. Strategi promosi investasi   |
| 207 | Minimnya Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (349.898.121.679,00 tahun 2020) | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Masih rendahnya realisasi nilai investasi<br>2. Belum adanya RUPM dan kajian investasi untuk setiap sektor | 1. Ketersediaan RUPM<br>2. Regulasi investasi<br>3. Strategi promosi investasi   |
| 208 | Minimnya Rasio daya serap tenaga kerja   | Tidak dapat dianalisis, karena data tidak tersedia       |   | 1. Jumlah lapangan pekerjaan<br>2. Penempatan tenaga kerja<br>3. Pembinaan calon tenaga kerja  |
| 209 | Kenaikan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah)  | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | 1. Ketersediaan RUPM<br>2. Regulasi investasi<br>3. Strategi promosi investasi   |
| 210 | Rendahnya tingkat pembangunan terhadap Kepemudaan dan Olah Raga                              | Tidak dapat dianalisis, karena data tidak tersedia       |   | 1. Ketersediaan fasilitas untuk mengembangkan minat bakat pemuda dan olahraga<br>2. Jumlah tenaga pelatih yang tersedia  |
| 211 | Ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi                                     | Tidak ada<br>Belum Tercapai (<)                          | 1. Belum tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi  | 1. Sistem data dan statistik yang terintegrasi   |
| 212 | Data dalam buku kabupaten dalam angka tidak lengkap  | Ada [(=) Sesuai]   |   | 1. Peningkatan kapasitas SDM   |



| No  | Masalah Pokok  | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan  | Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan   |
|-----|--|--|---|--|
| 213 | Data dalam buku "PDRB" tidak lengkap   | Ada [=] Sesuai]  |   | 1. Peningkatan kapasitas SDM   |
| 214 | Belum maksimalnya intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya            | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Belum optimalnya pelaksanaan festival seni dan budaya<br>2. Terbatasnya SDM  | 1. Pelaksanaan festival seni dan budaya secara rutin<br>2. Promosi festival seni dan budaya  |
| 215 | Belum optimalnya benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan         | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Kajian tentang penetapan cagar budaya belum ada/belum disusun  | 1. Kajian tentang penetapan cagar budaya   |
| 216 | Rendahnya jumlah pengunjung perpustakaan per tahun                               | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Rendahnya minat baca masyarakat  | 1. Sosialisasi gemar membaca<br>2. Ketersediaan perpustakaan digital   |
| 217 | Perlunya peningkatan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah           | Perlu peningkatan koleksi [=] Sesuai]                    |   | 1. Ketersediaan jumlah koleksi buku perpustakaan   |
| 218 | Perlunya peningkatan rasio perpustakaan persatuan penduduk                       | Perlu peningkatan koleksi [=] Sesuai]                    |   | 1. Jumlah perpustakaan yang memadai  |
| 219 | Rendahnya jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Kurangnya SDM pustakawan   | 1. Ketersediaan SDM pustakawan   |
| 220 | Rendahnya persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku           | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Belum optimalnya pengelolaan arsip   | 1. Optimalisasi pengelolaan arsip secara baku<br>2. SOP pengelolaan arsip  |
| 221 | Kurangnya peningkatan SDM pengelola kearsipan                                    | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Kurangnya kegiatan peningkatan kapasitas SDM pengelolaan arsip   | 1. Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan arsip   |
| 222 | Menurunnya kunjungan wisata  | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Kurangnya promosi pariwisata<br>2. Kurangnya event pariwisata yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung<br>3. Belum optimalnya pengembangan kearifan lokal sebagai daya tarik, baik dari arsitektur maupun budaya lokal<br>4. Pengembangan destinasi wisata tidak diimbangi dengan infrastruktur jalan dan lokasi yang memadai | 1. Promosi pariwisata<br>2. Event pariwisata<br>3. Pengembangan kearifan lokal<br>4. Infrastruktur pendukung<br>5. Ekonomi kreatif |



| No  | Masalah Pokok   | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan  | Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan  |
|-----|---|--|---|---|
|     |   |  | 5. Belum optimalnya lahan Parkir<br>6. Belum di Bentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah<br>7. Belum optimalnya promosi daya tarik wisata<br>8. Perlunya Pengembangan daya tarik wisata alternatif selain wisata bahari<br>9. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif sebagai pendukung daya tarik wisata  |   |
| 223 | Rendahnya PAD sektor pariwisata                             | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Belum optimalnya pengelolaan daya tarik wisata yang kewenangannya dibawah PEMDA<br>2. Pengembangan dan persediaan daya tarik wisata potensial belum optimal<br>3. Kebijakan/landasan hukum kepariwisataan dalam pengembangan dan pengelolaan daya tarik dan usaha pariwisata lainnya belum lengkap<br>4. Pemantauan dan pelaporan retribusi dan pajak wisata di objek wisata yang belum optimal<br>5. Masih ada beberapa kriteria GSTC-D yang belum masuk kategori hijau | 1. Sistem informasi pajak dan retribusi pariwisata                                |
| 224 | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB        | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | 1. Total produksi sektor pertanian/perkebunan<br>2. Luas lahan                    |
| 225 | Kontribusi sektor pertanian (palawija terhadap PDRB         | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | 1. Total produksi sektor pertanian (palawija)<br>2. Luas lahan                    |
| 226 | Kontribusi sektor perkebunan (tana-man keras) terhadap PDRB | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | 1. Total produksi sektor perkebunan<br>2. Luas lahan                              |
| 227 | Kontribusi Produksi Kelompok petani terhadap PDRB           | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |   | 1. Jumlah kelompok tani yang aktif<br>2. Pemberdayaan dan pembinaan kelompok tani |
| 228 | Cakupan bina kelompok petani masih rendah                   | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Perlunya intervensi pemda dalam peningkatan kapasitas kelompok petani  | 1. peningkatan kapasitas kelompok petani  |



| No  | Masalah Pokok  | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan   | Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan   |
|-----|--|--|--|--|
| 229 | Rendahnya Ekspor Bersih Perdagangan                                      | Belum Tercapai (<)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya produksi produk UMKM yang belum memenuhi kriteria barang ekspor</li> <li>2. Masih rendahnya SDM untuk ikut terlibat dan mengembangkan produk unggulan Kabupaten Pangandaran</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas UMKM</li> </ul>  |
| 230 | Produksi perikanan   | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas SDM Nelayan</li> <li>2. Peningkatan kapasitas perikanan</li> <li>3. Ketersediaan teknologi perikanan</li> </ul>      |
| 231 | Konsumsi ikan  | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan perk capita</li> <li>2. Distribusi ikan</li> </ul>  |
| 232 | Cakupan bina kelompok nelayan masih rendah                               | Belum Tercapai (<)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya SDM nelayan</li> <li>2. Masih Rendahnya Armada Nelayan</li> <li>3. Belum Optimalnya Sosialisasi alat tangkap ramah lingkungan</li> <li>4. Belum optimalnya pemanfaatan Potensi laut/ perikanan yang tinggi</li> <li>5. Perkembangan teknologi pengolahan ikan belum dapat digunakan secara maksimal oleh kelompok nelayan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas SDM Nelayan</li> <li>2. Peningkatan kapasitas armada nelayan</li> <li>3. Ketersediaan teknologi perikanan</li> </ul> |
| 233 | Produksi perikanan kelompok nelayan                                      | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas SDM Nelayan</li> <li>2. Peningkatan kapasitas armada nelayan</li> <li>3. Ketersediaan teknologi perikanan</li> </ul> |
| 234 | Nilai tukar nelayan  | Belum Tercapai (<)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya Nilai Tukar Nelayan sebagai tolok ukur kesejahteraan nelayan</li> <li>2. Masih rendahnya pendapatan nelayan/pembudidaya ikan dan</li> <li>3. belum adanya fasilitas/pusat pemasaran produk perikanan/kelautan yang representatif</li> <li>4. Perlu adanya peningkatan <i>life skills</i> terhadap pelaku usaha dan UMKM</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai tukar nelayan</li> <li>2. Fasilitas pemasaran hasil perikanan</li> <li>3. Peningkatan kapasitas nelayan</li> </ul>                   |
| 235 | Tersedianya dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada [(=) Sesuai]   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas SDM penyusun</li> <li>2. Bimtek penyusunan RPJPD bagi seluruh OPD</li> </ul>   |
| 236 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan     | Ada [(=) Sesuai]   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas SDM penyusun</li> <li>2. Bimtek penyusunan RPJMD bagi seluruh OPD</li> </ul>   |



| No  | Masalah Pokok   | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan   | Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan  |
|-----|---|--|--|---|
|     | PERDA/ PERKADA  |  |  |   |
| 237 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Ada [(=) Sesuai]   |  | 1. Peningkatan kapasitas SDM penyusun<br>2. Bimtek penyusunan RKPd bagi seluruh OPD   |
| 238 | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA                 | Ada [(=) Sesuai]   |  | 1. Peningkatan kapasitas SDM penyusun   |
| 239 | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd                           | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |  | 1. Peningkatan kapasitas SDM penyusun   |
| 240 | Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD                            | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |  | 1. Peningkatan kapasitas SDM penyusun   |
| 241 | Opini BPK terhadap laporan keuangan   | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |  | 1. Kesesuaian dengan SAP<br>2. Pengendalian intern<br>3. Kepatuhan terhadap undang-undang<br>4. Kompetensi sumberdaya manusia<br>5. Perencanaan pembangunan |
| 242 | Persentase SILPA  | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |  | 1. Kesesuaian perencanaan pembangunan   |
| 243 | Persentase SILPA terhadap APBD  | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |  | 1. Kesesuaian perencanaan pembangunan terhadap undang-undang  |
| 244 | Persentase belanja pendidikan (20%)   | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |  | 1. Kesesuaian perencanaan pembangunan terhadap undang-undang  |
| 245 | Persentase belanja kesehatan (10%)  | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |  | 1. Kesesuaian perencanaan pembangunan terhadap undang-undang  |
| 246 | Perbandingan antara Belanja langsung dengan belanja tidak langsung          | Sudah baik [(=) Sesuai]                                  |  | 1. Kesesuaian perencanaan pembangunan terhadap undang-undang  |
| 247 | Kecilnya persentase bagi hasil kabupaten/ kota dan                          | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Nilai bagi hasil kabupaten masih rendah, berdasarkan peraturan gubernur minimal 10% | 1. Tim optimalisasi pendapatan daerah   |



| No  | Masalah Pokok   | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan  | Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan  |
|-----|---|--|---|---|
|     | desa  |  |   |   |
| 248 | Penetapan APBD  | Sudah Baik [(Sesuai)]                                    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian perencanaan pembangunan terhadap undang-undang</li> <li>2. Kesesuaian kapasitas anggaran daerah</li> </ul>           |
| 249 | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan                               | Sudah Baik [(=)Sesuai]                                   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan dan pendidikan terhadap pegawai</li> </ul>  |
| 250 | Rendahnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal                   | Belum Tercapai (<)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal</li> <li>2. Penyelenggaraan diklat aparatur dan diklat fungsional masih minim</li> <li>3. Belum Optimalnya Penguatan Sumber Daya Manusia pada dunia pariwisata agar bisa lebih bersinergi dalam pengembangan berfikir pariwisata</li> <li>4. Pendidikan struktural masih belum menjadi prioritas</li> <li>5. Kemampuan ASN untuk menunjang pariwisata seperti kemampuan berkomunikasi dengan bahasa asing belum menjadi kemampuan komunikasi tambahan yang perlu dimiliki oleh ASN</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan pelatihan ASN baik daring maupun luring</li> </ul>   |
| 251 | Rendahnya persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | Belum Tercapai (<)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya jumlah Pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, maupun fungsional</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan pelatihan ASN baik daring maupun luring</li> </ul>   |
| 252 | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah                                   | Sudah Baik [(=)Sesuai]                                   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan pelatihan ASN</li> </ul>   |
| 253 | Administrasi pada instansi pemerintah   | Sudah Baik [(=)Sesuai]                                   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas SDM</li> <li>2. Peningkatan sarana dan prasarana</li> <li>3. Kesesuaian terhadap undang-undang</li> </ul> |
| 254 | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah                      | Sudah Baik [(=)Sesuai]                                   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan pelatihan ASN</li> </ul>   |



| No  | Masalah Pokok   | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan  | Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan   |
|-----|---|--|---|--|
| 255 | Belum optimalnya Pemanfaatan hasil kelitbangaan                                   | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Perencanaan pembangunan belum didasarkan pada hasil penelitian dan pengembangan  | 1. Kajian kelitbangaan<br>2. Implementasi kajian kelitbangaan  |
| 256 | Rendahnya persentase tindak lanjut temuan   | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Masih rendahnya jumlah temuan yang ditindaklanjuti   | 1. Tindak lanjut temuan  |
| 257 | Masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai PEMDA                        | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Masih rendahnya tingkat profesionalisme ASN  | 1. Profesionalisme ASN   |
| 258 | Terjadi temuan berulang di bidang fisik dan non fisik sarana prasarana            | Belum Tercapai (<)                                       | 1. Penyedia tidak mematuhi Aturan yang berlaku<br>2. PPK, PPTK dan PHO kurang cermat dalam menjalankan tugas dan fungsinya<br>3. Konsultan Pengawas kurang cermat dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya | 1. UKPBJ untuk lebih selektif dalam menentukan pemenang terkait Pengadaan Barang dan Jasa<br>2. PA harus lebih cermat untuk >memilih PPK sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya<br>3. Melakukan Bimtek kepada PPK, PPTK dan PHO untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya |
| 259 | Evaluasi implementasi SPIP belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan | Melampaui (>)  | 1. Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas SDM Inspektorat<br>2. Ketidakfahaman SKPD terkait dengan Implementasi SPIP  | 1. Pengajuan tambahan pegawai pengawas internal kepada BKPSDM<br>2. Bimtek dan Pendampingan dari BPKP<br>3. Melaksanakan Sosialisasi dan Bimtek bagi SKPD  |
| 260 | SKPD belum seluruhnya memahami terkait AKIP                                       | Melampaui (>)  | SKPD belum bisa mengimplementasi dan Pemenuhan Administrasi AKIP  | 1. Adanya asistensi atau pendampingan dalam penyusunan dokumen SAKIP<br>2. Melakukan monitoring SAKIP terhadap OPD<br>3. Pemberian reward and punishment kepada OPD yang terlambat melakukan pengumpulan laporan   |
| 261 | Belum Optimalnya komitmen dan integritas SDM dalam meningkatkan Nilai SAKIP       | Melampaui (>)  | SDM yang diberi tanggung jawab belum mematuhi tugas pokok dan fungsinya   | 1. Melakukan Studi Banding, Konsul-tasi dengan BPKP<br>2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala  |



| No  | Masalah Pokok   | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan   | Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan  |
|-----|---|--|--|---|
| 262 | Belum adanya komitmen dari tiap OPD terkait PMPRB Online  | Belum Tercapai (<)                                       | Kurangnya pemahaman OPD terkait dengan PMPRB Online  | Sosialisasi kepada OPD secara optimal terkait PMPRB Online (melakukan asistensi, pendampingan, dll) |
|     | Belum adanya komitmen dari tiap OPD terkait Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM  | Belum Tercapai (<)                                       | Kurangnya pemahaman OPD terkait dengan Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM            | Sosialisasi kepada OPD secara optimal terkait Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM              |
| 263 | Masih adanya temuan oleh BPK  | Belum Tercapai (<)                                       | 4. Kurangnya auditor dari inspektorat<br>5. masih kurang sarana pendukung dalam pengawasan | 4. Peningkatan kapasitas dan kuantitas auditor  |
| 264 | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab /Kota   | Ada [(=) Sesuai]   |  | 1. Peningkatan kapasitas SDM<br>2. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung                       |
| 265 | Tersusun dan terintegrasi program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKP) | Ada [(=) Sesuai]   |  | 1. Kegiatan koordinasi yang efektif<br>2. Penggunaan sistem terpadu<br>3. Peningkatan kualitas SDM  |
| 266 | Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran Setwan   | Ada [(=) Sesuai]   |  | 1. Kegiatan koordinasi yang efektif<br>2. Penggunaan sistem terpadu<br>3. Peningkatan kualitas SDM  |

(Sumber : Diolah Penyusun, 2021)



## 4.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

### 4.2.1 Keterkaitan Isu Strategis Nasional, Provinsi dan Daerah

Isu nasional merupakan suatu hal yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri yang memberikan dampak terhadap kondisi nasional. Apabila tidak ditangani secara tepat, akan memberikan efek negative bagi negara. Isu nasional dapat dipengaruhi oleh isu dari negara lain maupun isu dalam negeri. Beberapa isu nasional pada RPJMD Kabupaten Pangandaran antara lain :

1. Ketahanan Ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan SDM Berkualitas Dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental Dan Pengembangan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur
6. Lingkungan Hidup
7. Stabilitas Politik

Selain isu Nasional, terdapat isu regional yang harus diselaraskan dengan isu strategis yang ada pada daerah. Isu Regional merupakan suatu hal yang terjadi di dalam daerah atau di luar daerah yang apabila tidak ditangani secara tepat akan memberikan dampak negative terhadap daerah tersebut. Beberapa



isu regional pada RPJMD Kabupaten Pangandaran antara lain :

1. Kualitas Nilai Kehidupan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2. Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah Sosial
3. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
4. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Yang Berkelanjutan
5. Reformasi Birokrasi

**Tabel 4. 3 Keterkaitan Isu Strategis Nasional dan Isu Strategis Provinsi**

| Isu Strategis Nasional   | Keterkaitan | Isu Strategis Provinsi  |
|--|-------------|---|
| Ketahanan Ekonomi  |             | Kualitas Nilai Kehidupan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                           |
| Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |             | Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah Sosial   |
| Meningkatkan SDM Berkualitas Dan Berdaya Saing                             |             | Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan |
| Revolusi Mental Dan Pengembangan Kebudayaan                                |             | Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Yang Berkelanjutan                               |
| Memperkuat Infrastruktur   |             | Reformasi Birokrasi   |
| Lingkungan Hidup   |             |   |
| Stabilitas Polhukhankam  |             |   |

(Sumber : Diolah Penyusun, 2021)



**Tabel 4. 4 Keterkaitan Isu Strategis Provinsi dan Isu Strategis Kabupaten Pangandaran**

| Isu Strategis Provinsi  | Keterkaitan | Isu Strategis Kabupaten Pangandaran   |
|---|-------------|---|
| Kualitas Nilai Kehidupan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                           |             | Belum optimalnya pemenuhan kriteria <i>Global Sustainable Tourism Council</i> (GSTC-D)                    |
|   |             | Akhir pandemi covid-19 masih belum dapat diprediksi   |
|   |             | Belum tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)           |
| Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah Sosial   |             | Menurunnya perekonomian nasional  |
|   |             | Perlunya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana tsunami dan gempa bumi                |
|   |             | Masih rendahnya cakupan layanan air minum, sanitasi dan permukiman  |
| Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan |             | Belum optimalnya Prasarana Transportasi Wilayah   |
|   |             | Sarana dan prasarana pemerintahan masih belum memadai   |
|   |             | Belum optimalnya sistem kesehatan daerah, kualitas pelayanan pendidikan, dan peningkatan peran kepemudaan |
| Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Yang Berkelanjutan                               |             | Perlunya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan perdesaan dalam mendukung pengembangan ekonomi    |
|   |             | Sektor unggulan (Pariwisata) belum memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten                    |
| Produktivitas dan Daya  |             | Belum optimalnya  |



| Isu Strategis Provinsi           | Keterkaitan | Isu Strategis Kabupaten Pangandaran  |
|----------------------------------|-------------|--|
| Saing Ekonomi Yang Berkelanjutan |             | kemampuan fiskal daerah  |
| Reformasi Birokrasi              |             | Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM, IKM, Koperasi, dan Ketenagakerjaan                       |
|                                  |             | Masih rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan   |
|                                  |             | Belum tersedianya ciri khas arsitektur kawasan, standarisasi pelayanan, serta kurangnya promosi dan event pariwisata |
|                                  | →           | Belum optimalnya tata kelola pemerintah dan pengendalian pembangunan daerah  |
|                                  | →           | Perlunya peningkatan sistem perlindungan sosial  |

(Sumber : Diolah Penyusun, 2021)

#### 4.2.2 Hasil Penelaahan dan Rekomendasi KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi lingkungan hidup dari suatu usulan kebijakan, rencana atau program sebagai upaya untuk menjamin bahwa konsekuensi yang dimaksud dalam kajian tersebut telah dipertimbangkan. Penelaahan KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Hasil dan rekomendasi KLHS pada Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel 4.5 Identifikasi Isu Strategis Daerah Kabupaten Pangandaran**

| <b>Tujuan Pembangunan Berkelanjutan</b>  | <b>Permasalahan</b>   | <b>Isu Strategis</b>  |
|--|---|---|
| Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan  | Jangkauan rumah tangga mendapatkan bantuan tunai masih belum mencapai target. Masih terdapat gap/ kekurangan sebesar 9,59 persen  | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat /Program Keluarga Harapan.   |
|  | Masih perlunya peningkatan sistem perlindungan sosial   |   |
| Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan  | Jangkauan pelayanan listrik untuk rumah tangga miskin masih belum tercapai. Masih adanya gap sebesar 27 persen  | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.                    |
| Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan  | Proporsi pelayanan untuk pendidikan. Kesehatan dan perlindungan sosial belum optimal. Masih terdapat gap sebesar 50,2 persen  | Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. |
| Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan | Belum tercapainya target untuk kualitas konsumsi pangan. Masih terdapat gap sebesar 5,3 persen  | Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.              |
|  | LP2B belum by address. LP2B tidak boleh diganggu dan beralih fungsi.  |   |
| Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia                          | Tidak terprediksinya selesainya masa covid  | Akhir pandemi covid-19 masih belum diprediksi   |
| Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia                          | Gap yang terjadi tidak terlalu signifikan namun perlu adanya peningkatan. Masih perlu ada upaya-upaya peningkatan fasilitas kesehatan untuk melahirkan. Rentang gap sebesar 2,62 persen | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.                     |



| <b>Tujuan Pembangunan BerkelaJutan</b>   | <b>Permasalahan</b>   | <b>Isu Strategis</b>   |
|--|---|--|
| Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia                                | Gap yang terjadi tidak terlalu signifikan namun perlu adanya peningkatan. Masih perlu ada upaya-upaya peningkatan keterampilan tenaga kesehatan dan persebaran tenaga kesehatan yang lebih merata. Gap sebesar 1,58 | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.   |
| Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua | Masih adanya gap dengan target capaian yaitu sebesar 4,1 persen   | Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.  |
| Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua | Gap capaiannya masih belum mencapai lama sekolah 9 tahun masih sampai hanya 7 tahun   | Rata-rata lama sekolah penduduk umur $\geq 15$ tahun.  |
| Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan   | Belum optimalnya pelayanan pendampingan, konsultasi, pelaporan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak.  | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. |
| Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang BerkelaJutan                                       | Masih rendahnya layanan sumber air minum layak sumber PDAM masih terdapat gap 27,76 persen  | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.   |
| Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang BerkelaJutan                                       | masih rendahnya akses terhadap sanitasi layak. Masih terdapat gap 27,1  | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.   |
|  | dari 3 desa baru 14 desa ODF  |  |
| Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara  | Ada beberapa masih terjadi ketimpangan. Perlu adanya upaya-upaya untuk menurunkan ketimpangan terutama antara di pedesaan dan perkotaan   | Koefisien Gini.  |
| Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan BerkelaJutan  |   | Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.   |



| <b>Tujuan Pembangunan Berkelanjutan</b>   | <b>Permasalahan</b>  | <b>Isu Strategis</b>   |
|---|--|--|
| Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan  | Peningkatan hunian layak huni di Kabupaten Pangandaran. Kondisi ekoregion memiliki akarakteristik tanah dinamis susut kembang dapat menyebabkan mudahnya keretakan bangunan  | Persentase sampah perkotaan yang tertangani.   |
| Tujuan 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan  | Peningkatan penanganan persampahan perkotaan sebesar 3,26 %. Dampak risiko dari adanya tekanan penduduk tidak terlalu signifikan tetapi risiko sampah muncul eksternal dengan adanya peningkatan wisatawan           | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.  |
| Tujuan 13 Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya  | TES masih kurang berfungsi, banjir, peringatan dini, pemeliharaan fasilitas tanggap bencana.   | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.                                  |
| Tujuan 14   |  | Jumlah nelayan yang terlindungi  |
| Tujuan 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan | Perlu adanya peningkatan persentase anak memiliki akta kelahiran.  | Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. |
| Tujuan 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan   | Perlu adanya upaya peningkatan terhadap total pendapatan pemerintah terutama dari pariwisata yang belum optimal. Identifikasi sumber pendapatan lain yang dapat menjadi pendorong peningkatan pendapatan pemerintah. | Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.                                   |
|   | Peternakan bisa menjadi salah satu sektor untuk pemulihan ekonomi nasional   |  |

(Sumber : Diolah Penyusun, 2021)

Dalam merumuskan isu strategis dilakukan langkah sebagai berikut:



## 1. Penentuan Isu Strategis

Dalam menentukan isu strategis, harus disesuaikan dengan jenis dokumen yang akan disusun, apakah itu jangka panjang (20 tahun) jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Jika suatu isu strategis berpotensi muncul dalam kurun waktu sesuai masing-masing jenis dokumen, maka isu strategis itu dapat dimasukkan. Namun jika suatu isu strategis berpotensi muncul diluar (lebih dari) kurun waktu sesuai masing-masing jenis dokumen, maka sebaiknya tidak usah dimasukkan ke dalam dokumen.

**Tabel 4. 6 Penjabaran Identifikasi Isu Strategis Daerah Kabupaten Pangandaran**

| No | Tingkat Isu   | Isu Strategis Pembangunan Daerah  | Faktor Penentu Keberhasilan  |
|----|---------------|---|--|
| 1  | Internasional | 1) Belum optimalnya pemenuhan kriteria <i>Global Sustainable Tourism Council (GSTC-D)</i><br><br>2) Akhir pandemi Covid-19 masih belum dapat diprediksi<br><br>3) Belum tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> | 1. Mekanisme strategi destinasi berkelanjutan<br>2. Penetapan strategi Organisasi Manajemen Destinasi<br>3. Standar (SOP) sistem pengawasan, sistem pelaporan kepada publik, dan tanggap terhadap permasalahan lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, pariwisata dan hak asasi manusia.<br>4. Strategi Pengelolaan Pariwisata Musiman<br>5. Strategi pengembangan destinasi tahun jamak yang fokus serta memperhatikan isu-isu lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, kualitas, Kesehatan dan keselamatan yang mudah diakses<br>6. Rencana atau strategi pengembangan destinasi bertahun jamak terkini dan mudah diakses oleh umum<br><br>Adaptasi kebiasaan baru pada berbagai bidang |
|    |               |   |  |
| 2  | Nasional      | 1) Menurunnya perekonomian nasional<br><br>2) Perlunya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana tsunami dan gempa bumi  | Pemulihan ekonomi nasional<br><br>1. Ketersediaan regulasi<br>2. Penegakan regulasi<br>3. Daya dukung dan daya tampung lingkungan  |
|    |               |   |  |



| No | Tingkat Isu | Isu Strategis Pembangunan Daerah  | Faktor Penentu Keberhasilan  |
|----|-------------|---|--|
| 3  | Daerah      | 1) Masih rendahnya cakupan layanan air minum, sanitasi dan permukiman<br>2) Belum optimalnya Prasarana Transportasi Wilayah<br>3) Sarana dan prasarana pemerintahan masih belum memadai<br>4) Belum optimalnya sistem kesehatan daerah, kualitas pelayanan pendidikan, dan peningkatan peran kepemudaan<br>5) Perlunya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan pedesaan dalam mendukung pengembangan ekonomi<br>6) Sektor unggulan (Pariwisata) belum memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten<br>7) Belum optimalnya kemampuan fiskal daerah<br>8) Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM, IKM, Koperasi, dan Ketenagakerjaan<br>9) Masih rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan | 1. Ketersediaan SPAM perkotaan dan pedesaan<br>2. Ketersediaan TPA<br>3. Ketersediaan IPAL<br>1. Keterhubungan antar pusat-pusat kegiatan<br>2. Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas<br>3. Penambahan trayek angkutan umum antar objek pariwisata<br>1. Ketersediaan kawasan perkantoran yang terintegrasi<br>1. Regulasi penyelenggaraan pelayanan Kesehatan daerah<br>2. Terpenuhinya SPM Pendidikan<br>3. Partisipasi pemuda dalam pembangunan<br>1. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar<br>2. Peningkatan kualitas infrastruktur<br>3. Akses menuju daerah dengan aktivitas ekonomi tinggi<br>1. Regulasi yang mengatur mengenai usaha pariwisata sehingga produksi barang dan jasa perusahaan masuk kedalam perhitungan PDRB Kabupaten<br>2. Pariwisata menjadi sektor basis terhadap sektor-sektor lainnya<br>1. Meningkatnya pendapatan asli daerah<br>2. Sistem informasi pajak dan retribusi pariwisata<br>Pelatihan peningkatan kapasitas UMKM, IKM, Koperasi, dan Ketenagakerjaan<br>1. Ketersediaan Nilai Tukar Petani sebagai tolok ukur kesejahteraan Petani<br>2. Peningkatan nilai tukar dan produksi petani dan nelayan<br>3. Inovasi bidang pertanian dan perikanan |



| No | Tingkat Isu | Isu Strategis Pembangunan Daerah   | Faktor Penentu Keberhasilan   |
|----|-------------|--|---|
|    |             | 10) Belum tersedianya ciri khas arsitektur kawasan, standarisasi pelayanan, serta kurangnya promosi dan event pariwisata | <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan mengenai arsitektur ciri khas kabupaten</li> <li>Diterapkannya ciri khas arsitektur kabupaten</li> <li>Promosi pariwisata</li> <li>Event pariwisata</li> <li>Pengembangan kearifan lokal</li> <li>Infrastruktur pendukung</li> <li>Ekonomi kreatif</li> <li>Pelaksanaan festival seni dan budaya secara rutin</li> </ol> |
|    |             | 11) Belum optimalnya tata kelola pemerintah dan pengendalian pembangunan daerah  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Implementasi reformasi birokrasi</li> <li>Keterlibatan multi sektor dalam pembangunan daerah</li> <li>Penguatan pengendalian pembangunan daerah</li> </ol>   |
|    |             | 12) Perlunya peningkatan sistem perlindungan sosial  | Jaminan perlindungan sosial   |

(Sumber : Diolah Penyusun, 2021)

## 2. Pembobotan

Setelah diidentifikasi isu strategis yang ada kemudian masing-masing isu di bobot. Dalam menentukan pembobotan dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi. Pembobotan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.7 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis**

| No           | Kriteria   | Bobot      |
|--------------|--|------------|
| 1            | Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional | 25         |
| 2            | Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah                                     | 15         |
| 3            | Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat                                | 25         |
| 4            | Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah                         | 15         |
| 5            | Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani  | 20         |
| <b>Total</b> |  | <b>100</b> |

(Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)



Dengan menggunakan bobot skor yang telah ditentukan pada tabel di atas, kemudian dilakukan penilaian dengan memberikan skor pada setiap isu strategis. Penilaian diberikan pada rentang skor 1-5, dengan 1 menunjukkan sangat tidak setuju dan 5 menunjukkan sangat setuju dengan kriteria. Pemberian skor pada isu strategis hasil identifikasi dilakukan melalui pengisian kuesioner yang diisi oleh perwakilan dari perangkat daerah yang menunjukkan perwakilan setiap urusan. Rata-rata skor isu strategis hasil dari pengisian kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 4.8 Skor Kriteria Rata-rata**

| No | Isu Strategis  | Skor Kriteria Rata-rata |       |       |       |       |
|----|--|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
|    |  | 1                       | 2     | 3     | 4     | 5     |
| 1  | Belum optimalnya pemenuhan kriteria <i>Global Sustainable Tourism Council</i> (GSTC-D)                               | 4.222                   | 3.944 | 4.056 | 4.556 | 3.389 |
| 2  | Akhir pandemi covid-19 masih belum dapat diprediksi  | 4.722                   | 3.667 | 4.5   | 4.056 | 3.222 |
| 3  | Belum tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)                      | 4.556                   | 4.111 | 4.222 | 4.444 | 3.556 |
| 4  | Menurunnya perekonomian nasional   | 4.778                   | 3.833 | 4.5   | 4.389 | 3.5   |
| 5  | Perlunya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana tsunami dan gempa bumi                           | 4.500                   | 4.056 | 4.444 | 4.222 | 3.444 |
| 6  | Masih rendahnya cakupan layanan air minum, sanitasi dan permukiman   | 4.389                   | 4.167 | 4.444 | 4.333 | 3.667 |
| 7  | Belum optimalnya Prasarana Transportasi Wilayah  | 4.722                   | 4.278 | 4.611 | 4.833 | 3.778 |
| 8  | Sarana dan prasarana pemerintahan masih belum memadai  | 4.167                   | 4.167 | 4.000 | 4.111 | 3.722 |
| 9  | Belum optimalnya sistem kesehatan daerah, kualitas pelayanan pendidikan, dan peningkatan peran kepemudaan            | 4.333                   | 4.278 | 4.667 | 4.722 | 3.889 |
| 10 | Perlunya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan pedesaan dalam mendukung pengembangan ekonomi                | 4.667                   | 4.333 | 4.611 | 4.611 | 4.056 |
| 11 | Sektor unggulan (Pariwisata) belum memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten                               | 4.556                   | 4.5   | 4.5   | 4.722 | 3.889 |
| 12 | Belum optimalnya kemampuan fiskal daerah   | 4.444                   | 4.167 | 4.222 | 4.444 | 3.667 |
| 13 | Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM, IKM, Koperasi, dan Ketenagakerjaan                       | 4.444                   | 4.333 | 4.611 | 4.500 | 4.000 |
| 14 | Masih rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan   | 4.5                     | 4.389 | 4.389 | 4.278 | 4.056 |
| 15 | Belum tersedianya ciri khas arsitektur kawasan, standarisasi pelayanan, serta kurangnya promosi dan event pariwisata | 4.222                   | 4.444 | 4.222 | 4.278 | 3.889 |
| 16 | Belum optimalnya tata kelola pemerintah dan pengendalian pembangunan daerah  | 4.500                   | 4.611 | 4.222 | 4.333 | 3.944 |
| 17 | Perlunya peningkatan sistem perlindungan sosial  | 4.500                   | 4.333 | 4.444 | 4.444 | 3.889 |

(Sumber : Diolah penyusun, 2021)

Rata-rata skor yang didapatkan berdasarkan pengisian kuesioner kemudian dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria sesuai dengan ketentuan bobot yang sebelumnya telah dijelaskan. Hasil perkalian skor dengan bobot menghasilkan nilai dari masing-masing isu yang menunjukkan tingkat urgensi dari isu tersebut. Berikut dapat dilihat tabel hasil perkalian skor terhadap bobot masing-masing kriteria.



**Tabel 4. 9 Hasil Pembobotan Skor**

| No | Isu Strategis  | Skor X Bobot |       |       |       |       | Jumlah<br>Nilai |
|----|--|--------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
|    |  | 1            | 2     | 3     | 4     | 5     |                 |
| 1  | Belum optimalnya pemenuhan kriteria <i>Global Sustainable Tourism Council</i> (GSTC-D)                               | 1.056        | 0.592 | 1.014 | 0.683 | 0.678 | 4.022           |
| 2  | Akhir pandemi covid-19 masih belum dapat diprediksi  | 1.181        | 0.550 | 1.125 | 0.608 | 0.644 | 4.108           |
| 3  | Belum tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)                      | 1.139        | 0.617 | 1.056 | 0.667 | 0.711 | 4.189           |
| 4  | Menurunnya perekonomian nasional   | 1.195        | 0.575 | 1.125 | 0.658 | 0.700 | 4.253           |
| 5  | Perlunya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana tsunami dan gempa bumi                           | 1.125        | 0.608 | 1.111 | 0.633 | 0.689 | 4.167           |
| 6  | Masih rendahnya cakupan layanan air minum, sanitasi dan permukiman   | 1.097        | 0.625 | 1.111 | 0.650 | 0.733 | 4.217           |
| 7  | Belum optimalnya Prasarana Transportasi Wilayah  | 1.181        | 0.642 | 1.153 | 0.725 | 0.756 | 4.456           |
| 8  | Sarana dan prasarana pemerintahan masih belum memadai  | 1.042        | 0.625 | 1.000 | 0.617 | 0.744 | 4.028           |
| 9  | Belum optimalnya sistem kesehatan daerah, kualitas pelayanan pendidikan, dan peningkatan peran kepemudaan            | 1.083        | 0.642 | 1.167 | 0.708 | 0.778 | 4.378           |
| 10 | Perlunya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan peresaan dalam mendukung pengembangan ekonomi                | 1.167        | 0.650 | 1.153 | 0.692 | 0.811 | 4.472           |
| 11 | Sektor unggulan (Pariwisata) belum memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten                               | 1.139        | 0.675 | 1.125 | 0.708 | 0.778 | 4.425           |
| 12 | Belum optimalnya kemampuan fiskal daerah   | 1.111        | 0.625 | 1.056 | 0.667 | 0.733 | 4.192           |
| 13 | Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan daya saing AUMKM, IKM, Koperasi, dan Ketenagakerjaan                      | 1.111        | 0.650 | 1.153 | 0.675 | 0.800 | 4.389           |
| 14 | Masih rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan   | 1.125        | 0.658 | 1.097 | 0.642 | 0.811 | 4.334           |
| 15 | Belum tersedianya ciri khas arsitektur kawasan, standarisasi pelayanan, serta kurangnya promosi dan event pariwisata | 1.056        | 0.667 | 1.056 | 0.642 | 0.778 | 4.197           |
| 16 | Belum optimalnya tata kelola pemerintah dan pengendalian pembangunan daerah  | 1.125        | 0.692 | 1.056 | 0.650 | 0.789 | 4.311           |
| 17 | Perlunya peningkatan sistem perlindungan sosial  | 1.125        | 0.650 | 1.111 | 0.667 | 0.778 | 4.330           |

(Sumber : Diolah Penulis, 2021)

Hasil perkalian skor dengan bobot menjadi nilai dari setiap isu yang menunjukkan urgensi dari isu tersebut. Dengan demikian isu dengan nilai tertinggi merupakan isu yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya. Berikut tabel urutan urgensi isu strategis berdasarkan nilai masing-masing isu.



**Tabel 4. 10 Urutan Isu Strategis berdasarkan Urgensi**

| Urutan Urgensi Isu | Isu-Isu Strategis  | Nilai |
|--------------------|--|-------|
| 1                  | Perlunya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan pedesaan dalam mendukung pengembangan ekonomi                | 4.472 |
| 2                  | Belum optimalnya Prasarana Transportasi Wilayah  | 4.456 |
| 3                  | Sektor unggulan (Pariwisata) belum memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten                               | 4.425 |
| 4                  | Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM, IKM, Koperasi, dan Ketenagakerjaan                       | 4.389 |
| 5                  | Belum optimalnya sistem kesehatan daerah, kualitas pelayanan pendidikan, dan peningkatan peran kepemudaan            | 4.378 |
| 6                  | Masih rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan   | 4.333 |
| 7                  | Perlunya peningkatan sistem perlindungan sosial  | 4.331 |
| 8                  | Belum optimalnya tata kelola pemerintah dan pengendalian pembangunan daerah  | 4.311 |
| 9                  | Menurunnya perekonomian nasional   | 4.253 |
| 10                 | Masih rendahnya cakupan layanan air minum, sanitasi dan permukiman   | 4.217 |
| 11                 | Belum tersedianya ciri khas arsitektur kawasan, standarisasi pelayanan, serta kurangnya promosi dan event pariwisata | 4.197 |
| 12                 | Belum optimalnya kemampuan fiskal daerah   | 4.192 |
| 13                 | Belum tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs)                              | 4.189 |
| 14                 | Perlunya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana tsunami dan gempa bumi                           | 4.167 |
| 15                 | Akhir pandemi covid-19 masih belum dapat diprediksi  | 4.108 |
| 16                 | Sarana dan prasarana pemerintahan masih belum memadai  | 4.028 |
| 17                 | Belum optimalnya pemenuhan kriteria <i>Global Sustainable Tourism Council</i> (GSTC-D)                               | 4.022 |

(Sumber : Diolah Penyusun, 2021



**RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN**

---

2021 - 2026

# BAB V

---

## VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN



## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bagian ini disajikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026. Rumusan visi dan misi dalam dokumen RPJMD ini merupakan visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu H. Jeje Wiradinata dan H. Ujang Endin Indrawan, SH, M. Hum. Sesuai pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Visi, Misi dan Program Strategis yang merupakan Janji Politik yang harus diimplementasikan dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD) agar dapat diwujudkan secara konsisten selama 5 (lima) tahun.

Visi dan misi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan memperhatikan terkait permasalahan pembangunan daerah beserta isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran. Penjelasan terkait visi dan misi bupati dan wakil bupati dengan kondisi empiris permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah merupakan bagian penting dalam rangka memastikan bahwa langkah strategi dan arah kebijakan pada dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026 ini menjadi fokus utama dalam mewujudkan kesejahteraan di Kabupaten Pangandaran.



## 5.1 Visi

Visi mencerminkan arah pembangunan atau keadaan masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Pada penjabaran visi harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang dapat diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Berdasarkan pertimbangan kondisi daerah Kabupaten Pangandaran, permasalahan-permasalahan pembangunan, tantangan-tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan terkait visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Visi Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 adalah:

### ***“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”***

Agar rumusan visi di atas dapat diimplementasikan lebih operasional, maka perlu dijabarkan pada pokok-pokok visi berikut penjelasannya sebagaimana yang telah disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

**Tabel 5.1 Pokok-Pokok Visi Kabupaten Pangandaran**

| Visi   | Pokok – Pokok Visi | Penjelasan   |
|--|--------------------|--|
| <i>“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”</i> | Pangandaran Juara  | Pangandaran juara mencerminkan kondisi masyarakat yang terpenuhi secara layak akan kebutuhan baik itu ekonomi, sosial, politik, hingga keamanan yang mencangkup aspek-aspek dalam kehidupan berbasis potensi lokal. Dalam hal ini digambarkan melalui tingkat kualitas pendidikan, indeks pembangunan manusia, tingkat pendapatan per kapita, dan indikator-indikator yang lain. |



| Visi | Pokok – Pokok Visi                         | Penjelasan  |
|------|--|---|
|      | Pariwisata Pangandaran yang berkelas dunia | Pembangunan berbasis pariwisata yang ingin diwujudkan dalam visi ini tidak hanya berskala nasional namun ditekankan pada skala internasional. Pariwisata Berkelas Dunia menggambarkan potensi pariwisata Kabupaten Pangandaran yang mampu ditingkatkan secara sinergis dan berkualitas dengan melakukan inovasi-inovasi berkelanjutan pada pengembangan pariwisata, sehingga tidak hanya berkembang secara nasional namun juga mencapai tingkat internasional.  |
|      | Berdasarkan nilai-nilai karakter bangsa    | Nilai ( <i>value</i> ) merupakan dasar dari semangat juang serta pola hidup masyarakat yang memiliki peran penting dalam sebuah proses pembangunan. Pada nilai-nilai karakter bangsa terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup dalam rangka mencapai derajat kemanusiaan yang lebih tinggi, hidup yang lebih bermanfaat, penuh kedamaian, serta kebahagiaan. Karakteristik masyarakat Kabupaten Pangandaran yang mawas diri dan memiliki sikap silih asah mencerminkan masyarakat yang Kabupaten Pangandaran yang hidup bersama dan saling mengembangkan nilai-nilai kepribadian serta berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi modal besar bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran kedepannya. |

(Sumber: Diolah Penyusun, 2021)



Ketiga pokok-pokok visi di atas, selanjutnya dijabarkan ke dalam misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026. Penjabaran misi pembangunan akan memperjelas serta mempertegas arah pembangunan akan diprioritaskan dan diarahkan selama lima tahun mendatang.

## 5.2 Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi yang kemudian disusun dalam rangka implementasi terkait langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi daerah. Visi yang telah dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi, selanjutnya disajikan dalam bagian keterkaitannya antara visi dan misi pembangunan Kabupaten Pangandaran pada kurun waktu lima tahun ke depan. Keterkaitan tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 5.2 Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah  
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026**

| Visi   | Pokok -<br>Pokok Visi                      | Misi  |
|--|--|---|
| <i>“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”</i> | Pangandaran Juara                          | Misi 1: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama  |
|  |  | Misi 5: mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel   |
|  | Pariwisata Pangandaran yang berkelas dunia | Misi 2: Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan<br>Misi 6: Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan  |
|  | Berdasarkan nilai-nilai karakter bangsa    | Misi 3: Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan<br>Misi 4: Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal |

(Sumber: Diolah penulis, 2021)



Pada hasil pemetaan Misi sesuai dengan pokok-pokok Visi di atas, maka dihasilkan enam Misi Pembangunan Kabupaten Pangandaran selama tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut:

**1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Beriman Taqwa dan Mewujudkan Kerukunan Kehidupan Beragama**

Nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat memiliki peranan yang penting dalam proses pembangunan di suatu daerah. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khusus atau khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Pangandaran yang ramah, mawas diri, dan memiliki sikap silih asah mencerminkan masyarakat yang Kabupaten Pangandaran yang hidup bersama dan saling mengembangkan nilai-nilai kepribadian serta berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran di masa depan. Bertumpu pada nilai-nilai tersebut, dapat diyakini akan memunculkan tatanan masyarakat yang tentram, tertib, toleransi dan saling menghargai terhadap kesetaraan gender.

**2. Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan**

Pariwisata merupakan sektor yang diandalkan dalam pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi pada peluang perluasan lapangan kerja. Pembangunan berbasis pengembangan wisata memberikan kesadaran bahwa investasi pembangunan berbasis wisata merupakan sebuah kerangka yang dapat digunakan pemerintah untuk menggali serta mengembangkan industri pariwisata secara berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya pengembangan dan penguatan daya tarik wisata di Kabupaten Pangandaran.



### **3. Mengembangkan Aksesibilitas Kesehatan dan Pendidikan Sampai Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peningkatan Kompetensi Lulusan**

Sebagai bentuk perwujudan memperluas akses masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan hingga perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan sebagai sebuah kesepakatan bahwa manusia merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan. Pembangunan berpusat pada manusia (*people centered development*) ini juga memberikan kesadaran bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia atau *human resource* akan berkontribusi besar memberikan dampak bagi percepatan pembangunan. Oleh karena itu, dalam misi kedua ini terfokus pada penguatan sumber daya manusia yaitu pada pengembangan aksesibilitas pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan.

### **4. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal**

Stabilitas dan ketahanan ekonomi dapat ditentukan dari kondisi makro ekonomi yang meliputi kebijakan jangka menengah ke panjang, kinerja pemerintah dan juga perilaku masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, ketahanan ekonomi daerah dilihat melalui indikator laju inflasi, PDRB, dan lain sebagainya, sehingga dalam hal ini peningkatan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal. Hal ini guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian.



## **5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel**

Penerapan prinsip-prinsip birokrasi sudah seharusnya terfokus pada melayani masyarakat tanpa memandang siapa yang dilayani untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel merupakan syarat wajib bagi percepatan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang merupakan upaya suatu pembaharuan dan perubahan yang mendasar pada sistem penyelenggaraan pemerintah harus dengan membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah dalam pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan proses serta hasil akhir (output) yang menggambarkan bagaimana fungsi pemerintah dijalankan.

## **6. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Mitigasi Bencana Yang Terintegrasi, Dan Berkelaanjutan**

Misi keenam ini terfokus pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata, kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat, serta menciptakan masyarakat yang tangguh bencana. Dalam pelaksanaan pembangunan pada segala sektor dukungan dari ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata harus diperhatikan. Pada hal ini Kabupaten Pangandaran membutuhkan adanya daya dukung infrastruktur sebagai pendorong pengembangan sektor pariwisata, dan sektor potensial lainnya. Di samping itu, Kabupaten Pangandaran sebagai daerah rawan bencana perlu adanya untuk mewujudkan masyarakat yang tanggung bencana sebagai upaya dalam pengurangan risiko bencana. Selanjutnya, untuk menghindari dampak negatif dari pembangunan dan dampak dari pasca bencana bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi bagian penting dalam rangkaian misi ini.



### 5.3 Tujuan dan Sasaran

Hasil telaah kesesuaian dengan visi misi kepala daerah yang telah dijelaskan di atas, selanjutnya visi misi tersebut diuraikan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Tujuan dan sasaran merupakan tahapan perumusan pada sasaran yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026 yang menjadi landasan dalam penyusunan kerangka kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh. Perumusan tujuan menjadi salah satu tahapan yang dalam perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang terdapat titik kritis (*critical point*) pada penyusunan RPJMD.

Pentingnya pada tahap ini dikarenakan apabila penjabaran visi misi kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dalam tujuan-tujuannya, maka akan berpengaruh pada sistem penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam hal ini, rumusan dari tujuan-tujuan merupakan turunan yang lebih operasional dari pada misi pembangunan daerah, serta menggambarkan kondisi yang akan dicapai dan sebagai pendukung dalam pencapaian misi daerah. Tujuan yang telah dirumuskan dapat diukur keberhasilan maupun pencapaiannya dalam waktu yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan paradigma dari penganggaran berbasis kinerja, sehingga perencanaan pembangunan daerah pun berbasis pada kinerja, yaitu ditekankan pada target kinerja yang meliputi hasil akhir (*outcome*), dampak (*impact*), maupun keluaran (*output*) dari capaian sebuah sasaran, program, maupun kegiatan. Pelaksanaan perumusan tujuan perlu memperhatikan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, yang selanjutnya perumusan tujuan digunakan sebagai landasan



dalam penyusunan kerangka rencana strategis perangkat daerah untuk periode lima tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah, berikut disajikan tujuan dan sasaran Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026:

1. Menguatkan Nilai-Nilai Karakter Bangsa Berbasis Nilai Luhur dan Budaya Lokal.
2. Terwujudnya Pengelolaan Pariwisata yang Efektif dan Efisien yang Menjunjung Nilai-Nilai Kearifan Lokal
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter dan Berdaya Saing.
4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Untuk Menjamin Kesejahteraan Masyarakat.
5. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah yang Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Prima.
6. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Layanan Infrastruktur yang tangguh bencana

Sementara itu, sasaran merupakan rumusan kondisi yang mengartikulasikan tujuan serta menggambarkan tahap untuk mencapai sebuah tujuan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Merujuk pada rumusan tujuan di atas maka berikut disajikan hasil rumusan sasaran Kabupaten Pangandaran tahun 2021- 2026:

1. Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
3. Peningkatan Akses Dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata



4. Meningkatkan Aksesibilitas Dan Kualitas Layanan Kependidikan Dan Kesehatan Secara Komprehensif
5. Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi di tingkat nasional dan internasional
6. Melambatnya Laju Pertumbuhan Penduduk
7. Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan
8. Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
9. Meningkatnya Permukiman Layak Huni
10. Meningkatnya Kualitas Dan Daya Saing Tenaga Kerja
11. Meningkatnya Cakupan Penanganan PPKS
12. Meningkatkan Kualitas Dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)
13. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Cepat Dan Responsif
14. Meningkatnya Kualitas Dan Konektivitas Infrastruktur Daerah
15. Meningkatkan Kemampuan Mitigasi Bencana Daerah
16. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan tujuan dan sasaran di atas maka, perlu menjabarkan lebih lanjut tujuan dan sasaran tersebut ke dalam beberapa indikator dan perangkat daerah yang akan mengampu tujuan dan sasaran tersebut. Berikut ini akan dilampirkan *cascading kinerja* (visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja)



**Tabel 5.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran 2021-2026**

| No | Misi   | Tujuan   | Sasaran | Indikator Kinerja  | Kondisi Awal   | Target      |             |             |             |             |             | Kondisi Akhir |       |
|----|--|--|---------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------|
|    |  |  |         |  | 2020   | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |             |               |       |
| 1  | Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama   | Menguatkan nilai-nilai karakter bangsa berbasis nilai luhur dan budaya lokal                           |         | Indeks Kesalehan Sosial  | N/A  | 60,00       | 61,00       | 62,00       | 63,00       | 64,00       | 64,00       | 64,00         |       |
|    |  |  |         | Meningkatkan penye-lenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama | Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani | N/A         | 0,2344      | 0,2344      | 0,2579      | 0,2814      | 0,3048      |               |       |
|    |  |  |         | Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa  | N/A  | 80          | 82,5        | 85          | 87,5        | 90          | 90          |               |       |
| 2  | Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan BerkelaJutan   | Terwujudnya pengelolaan pariwisata yang efektif dan efisien yang menjunjung nilai-nilai kearifan lokal |         | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa  | Indeks Desa Membangun  | 0,7059      | 0,7689      | 0,7691      | 0,7693      | 0,7696      | 0,7770      | 0,7770        |       |
|    |  |  |         | Persentase pemenuhan kriteria GSTC di destinasi pariwisata   | N/A  | 20          | 30          | 40          | 50          | 60          | 60          | 60            |       |
|    |  |  |         | Peningkatan akses dan daya tarik destinasi pariwisata  | Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan                              | N/A         | 600.000     | 630.000     | 660.000     | 690.000     | 720.000     | 720.000       |       |
| 3  | Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan | Terwujudnya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing                                     |         | Indeks Pembangunan Manusia   | 68,06  | 68,50-69,12 | 69,12-69,59 | 69,59-70,06 | 70,06-70,53 | 70,53-71,00 | 70,53-71,00 | 70,53-71,00   |       |
|    |  |  |         | Indeks Pembangunan Gender  | 89,78  | 89,95       | 90,01       | 90,07       | 90,12       | 90,12       | 90,12       |               |       |
|    |  |  |         | Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif                                 | Indeks Kesehatan   | 79,08       | 79,88       | 80,28       | 80,68       | 81,08       | 81,48       | 81,48         |       |
|    |  |  |         | Indeks Pendidikan  | 59,33  | 59,76       | 60,02       | 60,33       | 60,64       | 60,95       | 60,95       | 60,95         |       |
|    |  |  |         | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat   | 16,37  | 18,56       | 19,16       | 19,61       | 19,95       | 20,24       | 20,24       |               |       |
|    |  |  |         | Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi   | Persentase pemuda yang mendapatkan penghargaan               | N/A         | 5           | 7,5         | 10          | 12,5        | 15          | 15            | 20,24 |
|    |  |  |         | Melambatnya laju pertumbuhan penduduk  | Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk                         | 0,76%       | 0,74%       | 0,73%       | 0,72%       | 0,71%       | 0,71%       | 0,71%         |       |



| No | Misi  | Tujuan  | Sasaran  | Indikator Kinerja   | Kondisi Awal   | Target |           |           |           |           | Kondisi Akhir |           |
|----|---|---|--|---|--|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
|    |   |   |  |   | 2020   | 2022   | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |               |           |
|    |   |   | Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan | Indeks Pemberdayaan Gender  | 74,57  | 74,57  | 74,58     | 74,59     | 74,60     | 74,61     | 74,61         |           |
| 4  | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Untuk Menjamin Kesejahteraan Masyarakat.         |  | Laju Pertumbuhan Ekonomi  | -0,05  | 5,13   | 5,48      | 5,82      | 6,16      | 6,50      | 6,50          |           |
|    |   |   |  | Persentase Penduduk Miskin  | 8,99   | 7,33   | 6,75      | 6,17      | 5,58      | 5,00      | 5,00          |           |
|    |   |   |  | Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan  | PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun) | 4,597  | 4,667     | 4,923     | 5,109     | 5,310     | 5,520         | 5,520     |
|    |   |   |  | Persentase Realisasi Nilai Investasi  | 6,25   | 6,89   | 7,24      | 7,60      | 7,98      | 8,38      | 8,38          |           |
|    |   |   |  | Rasio Kewirausahaan   | 2,54   | 3,75   | 3,95      | 4,15      | 4,30      | 4,50      | 4,50          |           |
|    |   |   |  | Indeks Ketahanan Pangan   | 81,99  | 81,5   | 82        | 82,5      | 83        | 83,5      | 83,5          |           |
|    |   |   |  | Meningkatnya permukiman layak huni  | Persentase Rumah Layak Huni  | 73     | 74        | 74        | 74        | 75        | 75            |           |
|    |   |   |  | Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja   | Tingkat Pengangguran Terbuka   | 5,08   | 5,00-4,50 | 4,90-4,25 | 4,80-4,00 | 4,70-3,75 | 4,60-3,50     | 4,60-3,50 |
|    |   |   |  | Meningkatnya cakupan penanganan PPKS  | Persentase PPKS yang Mandiri   | 27     | 37        | 47        | 57        | 67        | 77            | 77        |
|    |   |   |  |   | Indeks Reformasi Birokrasi   | B      | B         | B         | BB        | BB        | A             | A         |
| 5  | Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel     | Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima |  | Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ) | Nilai SAKIP  | B      | 68        | 70        | 73        | 80        | 82            | 82        |
|    |   |   |  |   | Tingkat Maturitas SPIP   | 3      | 3         | 3         | 3         | 3         | 3             | 3         |
|    |   |   |  |   | Indeks SPBE  | 3,02   | 3         | 3,05      | 3,1       | 3,2       | 3,25          | 3,25      |
|    |   |   |  |   | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah                                   | 69,00  | 71,00     | 72,00     | 73,00     | 74,00     | 75,00         | 75,00     |
|    |   |   |  |   | Indeks Profesionalitas ASN   | 38,92  | 42,42     | 45,92     | 49,42     | 52,92     | 56,42         | 56,42     |



| No | Misi  | Tujuan  | Sasaran   | Indikator Kinerja                        | Kondisi Awal | Target    |           |           |           |           |           | Kondisi Akhir |
|----|---|---|---|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|    |   |   |   |  | 2020         | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |           |               |
|    |   |   | Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif     | Indeks Pelayanan Publik                  | N/A          | 2,61-2,65 | 2,66-2,75 | 2,86-2,95 | 2,96-3,05 | 3,06-3,15 | 3,06-3,15 |               |
| 6  | Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan | Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan infrastruktur yang tangguh bencana |   | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur    | 78           | 80        | 81        | 82        | 83        | 84        | 84        |               |
|    |   |   | Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah | Indeks Konektivitas Wilayah              | 1,635        | 1,731     | 1,788     | 1,808     | 1,846     | 1,865     | 1,865     |               |
|    |   |   |   | Persentase cakupan layanan infrastruktur | 37,64        | 41,37     | 44,94     | 48,28     | 51,47     | 54,64     | 54,64     |               |
|    |   |   | Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah                      | Indeks Risiko Bencana                    | 145          | 143       | 141       | 139       | 137       | 135       | 135       |               |
|    |   |   | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup                              | Indeks Kapasitas Daerah                  | 145,45       | 143,4     | 142       | 139,2     | 137,84    | 136,44    | 136,44    |               |
|    |   |   |   | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup         | 65,22        | 65,54     | 65,76     | 65,98     | 66,20     | 66,43     | 66,43     |               |

(Sumber: Diolah Penyusun, 2021)



Perumusan tujuan dan sasaran pada RPJMD merupakan salah satu tahapan yang penting. Karena tujuan dan sasaran merupakan penjabaran dari misi-misi pembangunan daerah. Tujuan juga perlu menggambarkan kondisi ideal yang akan dicapai dalam misi daerah. Sedangkan sasaran perlu mendukung serta menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, tujuan dan sasaran pada RPJMD akan dijadikan sebuah landasan bagi perangkat daerah dalam menyusun berbagai program, kegiatan dan indikator secara menyeluruh lima tahun ke depan.

Mengingat pentingnya tujuan dan sasaran pada RPJMD, maka perlu adanya sinkronisasi antara tujuan dan sasaran dengan janji politik kepala daerah terpilih. Sehingga, tujuan dan sasaran dengan janji politik bupati akan terkolaborasikan dan saling mendukung guna mencapai pembangunan daerah yang diinginkan. Selain itu, urgensi sinkronisasi janji politik dengan tujuan dan sasaran RPJMD yakni adanya sinkronisasi antara kepala daerah dengan perangkat daerah yang akan menjalankan roda pemerintahan. Berikut ini disajikan tabel sinkronisasi antara janji politik bupati dengan tujuan dan sasaran RPJMD.

**Tabel 5.4 Korelasi Sasaran RPJMD dengan Janji Politik Bupati Terpilih**

| No | Sasaran   | Janji Politik Bupati   |
|----|---|--|
| 1. | Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama | <ul style="list-style-type: none"><li>- Program penguatan kehidupan kerukunan beragama</li><li>- Peningkatan sarana keagamaan</li><li>- Menyelenggarakan Gerakan Maghrib ke masjid</li><li>- Mengembangkan dan memperkuat Pendidikan keagamaan (RA/Madrasah dan TPQ)</li><li>- Bantuan Pesantren</li></ul> |
| 2. | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang kuat</li><li>- Penguatan LPM</li><li>- Mendorong Bumdes Juara</li><li>- Kenaikan insentif perangkat desa, RT, RW, Linmas, BPD</li></ul>   |
| 3. | Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Beasiswa untuk santri yang berprestasi</li><li>- Peningkatan insentif guru honor</li><li>- Ajangan Masuk Sekolah Plus</li></ul>  |



| No | Sasaran  | Janji Politik Bupati   |
|----|--|--|
|    | secara komprehensif  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Melanjutkan serta meningkatkan Pendidikan dan Kesehatan gratis</li><li>- Memperluas beasiswa sampai perguruan tinggi</li><li>- Melanjutkan Pendidikan gratis</li><li>- Penguatan sistem Kesehatan daerah melalui penerapan adaptasi kebiasaan baru</li><li>- Penyelenggaraan layanan kesehatan dasar gratis</li><li>- Kartu sehat untuk lansia</li><li>- Penyelenggaraan Pendidikan berbasis pariwisata</li><li>- Penyelenggaraan Pendidikan gratis dan beasiswa untuk lulusan SMA/SMK melanjutkan ke Perguruan Tinggi</li><li>- Penyelenggaraan Pendidikan karakter</li><li>- Beasiswa bagi tenaga pendidik</li></ul>   |
| 4. | Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi di tingkat nasional dan internasional | <ul style="list-style-type: none"><li>- Membangun sport center</li><li>- Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan minat dan bakat pemuda</li></ul>  |
|    | Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Peningkatan kesejahteraan petani melalui intervensi pupuk/pakan, bibit, teknologi tepat guna, pengolahan pasca panen, dan penciptaan pasar</li><li>- Mempermudah investasi, mulai dari perizinan dan lainnya</li><li>- Peningkatan kemandirian pengusaha mikro dan kecil</li><li>- Peningkatan dukungan dan fasilitasi bagi wirausaha baru</li><li>- Pelatihan keterampilan dan peningkatan kompetensi lulusan</li><li>- Pelatihan dan pendampingan kewirausahaan era industry 4.0 bagi Angkatan kerja</li><li>- Membuat toko Pangandaran Juara</li><li>- Tambahan untuk subsidi pupuk</li><li>- Penajaman PKH</li><li>- Percepatan pengentasan kemiskinan</li><li>- Memperluas kepesertaan BPJS dan Kartu Kertawaluya serta memberikan asuransi jiwa bagi penderes kelapa, nelayan, dan kelompok usaha masyarakat mempunyai risiko tinggi</li><li>- Mencetak lima ribu wirausaha muda dan pengembangan pelaku industri kreatif</li><li>- Gerakan kelapa hibrida</li><li>- Mendorong BUMD sehat dan Bumdes juara</li><li>- Revitalisasi pasar tradisional</li><li>- Pembebasan pajak bumi bangunan bagi masyarakat kecil</li></ul> |
| 6. | Meningkatnya permukiman layak huni   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Bedah rumah tiap tahun</li><li>- Pangandaran bebas rumah tak layak huni</li><li>- Pembebasan pajak bumi bangunan bagi masyarakat kecil</li></ul>   |
| 7. | Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan peningkatan kompetensi lulusan</li></ul>   |



| No  | Sasaran   | Janji Politik Bupati   |
|-----|---|--|
|     |   | SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi<br>- Pelatihan calon CPNS asal Pangandaran   |
| 8.  | Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ) | - Optimalisasi penerapan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik<br>- Peningkatan efektivitas dan efisiensi hubungan kerja antar PD |
| 9.  | Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif                                   | - Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi sistem terintegrasi  |
| 10. | Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur daerah                                       | - Penerbangan masuk pangandaran  |

(Sumber: Diolah Penyusun, 2021)

**RPJMD**

**RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN**

---

**2021 - 2026**

# **BAB IV**

---

**PERMASALAHAN  
DAN ISU-ISU STRATEGIS**



## **BAB VI**

### **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM**

### **PEMBANGUNAN DAERAH**

Berdasarkan permasalahan serta isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah pada periode 2021-2026.

#### **6.1 Strategi**

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Perumusan strategi sebagai upaya pencapaian visi dan misi dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT. Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) merupakan teknik perencanaan untuk mengetahui strategi yang tepat berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT yang dilakukan untuk menghasilkan strategi disajikan dalam bentuk matriks daftar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta persilangan diantaranya yang kemudian menjadi strategi pembangunan.

Faktor analisis ini dibagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari *strength* (kekuatan) dan *weakness* (kelemahan) sedangkan faktor internal terdiri dari *opportunity* (peluang) dan *threat* (ancaman). Daftar yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 6.1 Analisis SWOT dan Strategi Pembangunan Kabupaten Pangandaran**

| No. | Sasaran   | Strength  | Build on Strength  | Weakness  | Overcome Weakness   | Opportunity  | Exploit Opportunities   | Threats  | Block Threats  | Strategic Issues/Problems  | Strategy   |
|-----|---|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|
| 1   | Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat secara menyeluruh | 1. Jumlah kejadian konflik yang cenderung rendah pada tahun 2016-2020                             | 1. Meningkatkan jumlah penyelesaian konflik dan K3                           | 1. Menurunnya jumlah cakupan mitra dalam pengembangan wawasan kebangsaan              | 1. Optimalisasi pendataan dan kemampuan cakupan kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan | 1. Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat | 1. Meningkatkan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | 1. Menurunnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan ketahanan negara | 1. Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dan ketahanan negara melalui pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | 1. Masih kurangnya pemahaman wawasan kebangsaan dan penyelegaran ketertiban, keamanan masyarakat | 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban dan keamanan melalui peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dan optimalisasi Linmas dalam masyarakat |
|     |   | 2. Menurunnya jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP | 2. Optimalisasi peran Linmas di Masyarakat guna meminimalisir pelanggaran K3 | 2. Menurunnya jumlah masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan dan ketahanan negara | 2. Optimalisasi pengelolaan wawasan kebangsaan  |  | 2. Meningkatkan Pembinaan kerukunan antar suku                      | 2. Menurunnya ketertiban dan keten-traman Umum serta perlindu-nungan masyarakat    | 2. Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat   |  |  |
|     |   | 3. Penurunan K3 yang terselesaikan  |  | 3. Belum optimalnya pengelolaan wawasan kebangsaan                                    | 3. Optimalisasi peran dan jumlah Linmas di Kabupaten/Kota                                       |  | 3. Meningkatkan pengembangan demokrasi berdasar Pancasila           |  |  |  |  |
|     |   |   |  | 4. Masih fluktuatifnya jumlah Linmas di Kabupaten/Kota tahun 2016-2020                |   |  | 4. Meningkatkan Peran dan jumlah Linmas di Kabupaten/Kota           |  |  |  |  |
| 2   | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa                                     | 1. Meningkatnya jumlah desa kategori swasembada tahun 2019-2020                                   | 1. Meningkatkan jumlah desa kategori swasembada                              | 1. Belum terdapatnya klasifikasi kategori dari desa swasembada                        | 1. Pembuatan klasifikasi kategori dari desa swasembada  | 1. Meningkatnya kemandirian desa                   | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat                               | 1. Terham-batnya kemandirian desa  | 1. Meningkatkan kemandirian desa   | 1. Perlunya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan pedesaan                              | 1. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dan pedesaan dalam mendukung  |



| No. | Sasaran                               | Strength   | Build on Strength  | Weakness   | Overcome Weakness   | Opportunity  | Exploit Opportunities  | Threats  | Block Threats  | Strategic Issues/Problems  | Strategy  |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|
|     |                                       | 2. Meningkatnya lembaga ekonomi desa yang aktif tahun 2017-2020                            | 2. Meningkatkan kualitas dan pemberdayaan lembaga ekonomi desa                   | 2. Tidak terdapat peningkatan jumlah PKK aktif                   | 2. Meningkatkan jumlah PKK yang aktif                               | 2. Meningkatnya kualitas lembaga ekonomi desa yang berdaya |  | 2. Penurunan kualitas pembangunan desa                           | 2. Meningkatkan kualitas pembangunan desa  | dalam mendukung pengembangan ekonomi                                   | pengembangan ekonomi  |
|     |                                       | 3. Meningkatnya persentase penyelenggaraan pemerintahan desa kategori baik tahun 2016-2020 | 3. Meningkatkan kualitas dan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa |  |   | 3. Meningkatnya peran dan kualitas pembangunan desa        |  |  |  |  |   |
| 3   | Meningkatnya pelestarian budaya lokal | 1. Tingginya persentase kelompok budaya aktif pada tahun 2020                              | 1. Meningkatkan dan mengoptimalkan kelompok budaya aktif                         | 1. Menurunnya penyelenggaraan festival seni dan budaya           | 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kesenian                 | 1. Meningkatnya kuantitas SDM kesenian                     | 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya lokal | 1. Menurunnya kualitas SDM kesenian yang terdampak Covid-19      | 1. Meningkatkan pelatihan dan pembinaan setiap SDM kesenian secara online dengan seminar online dan pameran online | 1. Belum optimalnya cagar budaya yang dikelola secara terpadu          | Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku kesenian melalui optimisasi cagar budaya dan peningkatan pembinaan serta pelatihan setiap SDM kesenian |
|     |                                       |  |  | 2. Kurangnya karya budaya yang di revitalisasi dan inventarisasi | 2. Meningkatkan karya budaya yang di revitalisasi dan inventarisasi |  |  | 2. Kurang optimalnya dinas teknis dalam pengelolaan cagar budaya | 2. Menurunnya kualitas pelaku kesenian dalam beradaptasi dari Covid-19   | 2. Menurunnya kualitas pelaku kesenian dalam beradaptasi dari Covid-19 |   |
|     |                                       |  |  | 3. Belum optimalnya cagar budaya yang dikeola secara terpadu     | 3. Meningkatkan pendataan kelompok budaya aktif                     |  |  |  |  |  |   |
|     |                                       |  |  | 4. Kurang adanya pendataan kelompok budaya aktif                 | 4. Meningkatkan jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu    |  |  |  |  |  |   |



| No. | Sasaran  | Strength   | Build on Strength   | Weakness  | Overcome Weakness  | Opportunity  | Exploit Opportunities  | Threats  | Block Threats   | Strategic Issues/Problems   | Strategy   |
|-----|--|--|---|---|--|--|--|--|---|---|--|
| 4   | Peningkatan akses dan daya tarik destinasi pariwisata  | 1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata yang direncanakan atau tidak direncanakan                  | 1. Mengoptimalkan sikan potensi daerah sektor pariwisata daerah dengan melakukan promosi pariwisata | 1. Tidak adanya peningkatan jumlah destinasi wisata daerah dari tahun 2016 - 2020 | 1. Meningkatkan jumlah destinasi wisata daerah<br>2. Mengembangkan citra obyek pariwisata  | 1. Meningkatnya PAD sektor pariwisata Kab. Pangandaran   | 1. Optimalisasi pengelolaan retribusi obyek wisata   | 1. Menurunnya jumlah wisatawan akibat Covid-19                   | 1. Kembali melakukan promosi pariwisata dengan meningkatkan jumlah destinasi pariwisata | Belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif | Meningkatkan daya tarik destinasi wisata guna menciptakan perekonomian inklusif  |
| 5   | Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif | 1. Meningkatnya jumlah tenaga ahli bidang kesehatan  | 1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat                          | 1. Kurangnya dokter spesialis   | 1. Penguatan peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi melalui sosialisasi advokasi dan capacity building. | 1. Meningkatnya kualitas pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan yang diterima oleh masyarakat | 1. Meningkatkan jaminan pelayanan kesehatan  | 1. kurang optimalnya pelayanan kesehatan                         | Memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat  | 1. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)       | 1. Meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan tindakan tenaga ahli kesehatan   |
|     |  | 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berobat atau melahirkan di RS/Tenaga Kesehatan Terlatih | 2. Mencegah dan melindungi masyarakat dari masalah kesehatan;                                       | 2. Tingginya angkat kesakitan diare   | 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan kebersihan dan gizi seimbang   | 2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada tenaga ahli kesehatan                              | 2. Memperbaiki edukasi bahwa Kab. Pangandaran mempunyai tenaga ahli Kesehatan yang memadai | 2. kurang optimalnya edukasi kesehatan dan kebersihan lingkungan |   | 2. Rasio balita per satuan posyandu menurun                                     | 2. Meningkatkan jumlah posyandu dan pelaksanaan edukasi pentingnya vaksin balita |
|     |  | 3. Sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar                        | 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berobat ke tempat layanan kesehatan yang seharusnya      | 3. Tingginya angka gizi buruk   |  |  |  |  |   |   |  |



| No. | Sasaran  | Strength   | Build on Strength   | Weakness   | Overcome Weakness   | Opportunity                             | Exploit Opportunities   | Threats  | Block Threats   | Strategic Issues/Problems   | Strategy  |
|-----|--|--|---|--|---|---|---|--|---|---|---|
| 6   | Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi di tingkat nasional dan internasional | 1. Meningkatnya jumlah klub olahraga pada tahun 2020 menjadi 146 klub<br>2. Meningkatnya jumlah gedung olah raga dari 2018-2019<br>3. Melimpahnya sumber daya manusia usia produktif | 1. Optimalisasi Sarana dan Prasarana penunjang minat bakat dalam bidang keolahragaan maupun dalam bidang lain | 1. Masih dominannya penduduk dengan tingkat pendidikan SD  | 1. Meningkatkan jumlah destinasi wisata daerah<br>2. Meningkatkan akses pendidikan<br>3. Meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan                             | Terfasilitasinya minat bakat masyarakat | Meningkatkan prestasi dan minat bakat masyarakat terhadap bidang keolahragaan | Jumlah peraih prestasi stagnan atau menurun akibat kurangnya sumberdaya manusia yang potensial | 1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana penunjang minat bakat dalam bidang keolahragaan maupun dalam bidang lain<br>2. Optimalisasi pembinaan dan pelatihan sumberdaya potensial | 1. Belum optimalnya sistem kesehatan daerah, kualitas pelayanan pendidikan, dan peningkatan peran kepemudaan            | 1. Optimalisasi kualitas pelayanan, sarana dan Prasarana Pendidikan serta peningkatan peran, pelatihan kepemudaan dalam bidang keolahragaan |
| 7   | Menurunkan laju partum buhan penduduk  | Meningkatnya peserta KB aktif  | Meningkatkan pemahaman masyarakat akan program KB   | 1. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap program keluarga berencana<br><br>2. Masih rendahnya prevalensi peserta KB aktif<br><br>3. Belum optimalnya rasio petugas lapangan KB/PKB | 1. Meningkatkan sosialisasi program KB<br><br>2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas lapangan KB<br><br>3. Belum optimalnya rasio petugas lapangan KB/PKB | Optimalnya program KB                   | 1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk                                       | 1. Meningkatnya pertumbuhan penduduk<br><br>2. Meningkatkan petugas lapangan program KB        | 1. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya program KB<br><br>2. Pemahaman masyarakat mengenai KB masih rendah   | 1. Tidak optimalnya pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB)<br><br>2. Pemahaman masyarakat mengenai KB masih rendah | Meningkatkan angka prevalensi peserta KB aktif melalui peningkatan pemahaman masyarakat dan petugas lapangan program KB                     |
| 8   | Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan                         | 1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender  | 1. Meningkatkan HLS dan RLS bagi kalangan perempuan   | 1. Masih kurangnya partisipasi angkatan kerja perempuan  | 1. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan  | Meningkatnya IPM Perempuan              | Meningkatkan kesejahteraan perempuan  | Masih adanya pemahaman masyarakat terkait ketidaksetaraan gender                               | Peningkatan pemahaman masyarakat terkait kesetaraan gender  | 1. Masih terjadinya diskriminasi pengupahan sektor informal terhadap perempuan  | Mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dengan memberikan edukasi keterampilan  |



| No. | Sasaran  | Strength  | Build on Strength  | Weakness   | Overcome Weakness  | Opportunity   | Exploit Opportunities   | Threats   | Block Threats  | Strategic Issues/Problems                                    | Strategy   |
|-----|--|---|--|--|--|---|---|---|--|--|--|
|     |  |   |  | 2. Kurang optimalnya Indeks Pemberdayaan Gender        | 2. Mengoptimalkan ketidakseimbangan dalam relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan<br><br>3. Mengurangi praktik-praktik diskriminasi gender di lapangan pekerjaan |   |   |   | 2. Kualitas tenaga kerja perempuan masih rendah                                      |  |  |
| 9   | Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan | 1. Meningkatnya produksi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2016 - 2020           | 1. Meningkatkan sarana prasarana penunjang produksi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1. Menurunnya persentase koperasi aktif                | 1. Meningkatkan infrastruktur penunjang produksi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan  | 1. Optimalisasi peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi nasional | 1. Menciptakan iklim yang konsumtif bagi pembangunan sektor ekonomi lainnya | 1. Menurunnya ketersediaan pangan di tengah-tengah masyarakat | 1. Meningkatkan ketersediaan pangan di tengah-tengah masyarakat                      | 1. Belum berkembangnya koperasi dan usaha kecil dan menengah | 1. Meningkatkan akses penunjang perekonomian melalui penyediaan modal koperasi/UMKM, sarana prasarana teknologi dan pemasaran, promosi investasi, dan peningkatan serapan tenaga kerja |
|     |  | 2. Meningkatnya Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2016 - 2020 | 2. Pengaruh kualitas SDM dan kelembagaan petani  | 2. Menurunnya persentase KSP/USP yang naik klasifikasi | 2. Optimalisasi pengawasan koperasi  |   |   | 2. Menurunnya PDRB sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan | 2. Meningkatkan akses dan infrastruktur produksi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 2. Akses modal KUKM terhadap dunia perbankan masih minim     |  |
|     |  | 3. Meningkatnya Transportasi dan Pergudangan 2016 - 2020                                  | 3. Optimalisasi kebijakan kemudahan dalam ber usaha  | 3. Kurangnya pemanfaatan teknologi di bidang pertanian | 3. Pemerataan akses wisata   |   |   | 3. Menurunnya pendapatan dari sektor pariwisata               | 3. Pemerataan akses infrastruktur pariwisata   | 3. Belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi          |  |



| No. | Sasaran | Strength  | Build on Strength                                       | Weakness  | Overcome Weakness                                     | Opportunity | Exploit Opportunities | Threats                                    | Block Threats  | Strategic Issues/Problems   | Strategy |
|-----|---------|---|---|---|---|-------------|-----------------------|--|--|---|----------|
|     |         | 4. Meningkatnya jumlah usaha mikro dan kecil dari tahun | 4. Meningkatkan kualitas perizinan                      | 4. Belum optimalnya infrastruktur penunjang produksi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 4. Optimalisasi pelatihan usaha bagi usaha baru       |             |                       | 4. Menurunnya pendapatan dari sektor usaha | 4. Meningkatkan keberagaman usaha dan usaha naik kelas | 4. Pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal |          |
|     |         | 5. Meningkatnya jumlah destinasi wisata dari tahun      | 5. Meningkatkan kepastian hukum untuk investor          |   | 5. Menentukan standardisasi produk usaha              |             |                       |  |  | 5. Belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil   |          |
|     |         | 6. Meningkatnya jumlah restoran dan hotel dari tahun    | 6. Pengembangan destinasi wisata berbasis potensi lokal |   | 6. Optimalisasi informasi untuk investor mengenai OSS |             |                       |  |  | 6. Realisasi investasi di kabupaten/kota belum merata   |          |
|     |         |   |   |   | 7. Meningkatkan akses pemasaran produk lokal          |             |                       |  |  | 7. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata   |          |
|     |         |   |   |   |   |             |                       |  |  | 8. Dinamika sosial mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha   |          |
|     |         |   |   |   |   |             |                       |  |  | 9. Belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada   |          |



| No. | Sasaran   | Strength  | Build on Strength   | Weakness  | Overcome Weakness   | Opportunity   | Exploit Opportunities                                     | Threats  | Block Threats   | Strategic Issues/Problems  | Strategy  |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|---|
|     |   |   |   |   |   |   |   |  |   | perusahaan/kegiatan PMA/PMDN   |   |
| 10  | Meningkatnya permukiman layak huni                | 1. Rasio jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik sebesar 104 pada tahun 2020                                       | 1. Meningkatkan pemeliharaan dan penyelenggaraan jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik<br><br>2. Meningkatkan pengembangan kawasan permukiman layak huni | 1. Persentase rumah tinggal bersanitasi sangat minim  | 1. Meningkatkan sanitasi pada rumah tinggal melalui kegiatan kerjasama penyediaan/pengelolaan PSU permukiman<br><br>2. Meningkatkan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat miskin     | 1. Meningkatnya permukiman layak huni                 | 1. Mewujudkan akses air minum dan sanitasi yang layak     | 1. Meningkatnya kawasan kumuh  | 1. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak                                   | 1. Masih rendahnya cakupan layanan air minum, sanitasi dan permukiman<br><br>2. Meningkatkan kualitas permukiman   | 1. Menerapkan arsitektur kawasan pada bangunan milik pemerintah daerah                                  |
| 11  | Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja | 1. Menurunnya angka pengangguran pada tahun 2017-2019<br><br>2. Meningkatnya lapangan pekerjaan mulai tahun 2017-2020 | 1. Meningkatkan pelatihan tenaga kerja<br><br>2. . Maksimalisasi acara job fair   | 1. Masih fluktuatifnya rasio penduduk yang bekerja<br><br>2. Meningkatkan kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja | 1. Meningkatkan kualitas masyarakat siap kerja<br><br>2. Meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan berdaya saing<br><br>3. Optimalisasi infrastruktur pelatihan tenaga kerja | 1. Menurunnya jumlah pengangguran di Kab. Pangandaran | Meningkatnya lapangan pekerjaan dan kualitas tenaga kerja | 1. Peningkatan pengangguran pada usia kerja akibat kurangnya jumlah lapangan pekerjaan<br><br>2. Rendahnya kualitas tenaga kerja | 1. Meningkatkan kuantitas lapangan pekerjaan<br><br>2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja | 1. Masih kurangnya kuantitas lapangan kerja<br><br>2. Masih kurangnya kapabilitas calon tenaga kerja<br><br>3. Mengoptimalkan pencocokan keahlian dengan kebutuhan dunia kerja | 1. Peningkatan kualitas tenaga kerja dan kuantitas lapangan pekerjaan serta sarana, prasarana penunjang |
| 12  | Meningkatnya cakupan penanganan PPKS              | 1. Meningkatnya jumlah PPKS penerima bansos tahun 2019-2020   | 1. Meningkatkan bantuan dan perlindungan sosial terhadap PPKS   | 1. Masih fluktuatifnya jumlah PPKS yang tertangani  | 1. Optimalisasi peran PSKS  | 1. Meningkatnya kesejahteraan PPKS                    | 1. Meningkatkan kesejahteraan sosial PPKS                 | 1. Rendahnya bantuan dan penanganan terhadap PPKS  | 1. Meningkatkan bantuan dan penanganan terhadap PPKS                                      | 1. Perlunya peningkatan sistem perlindungan dan kesejahteraan  | 1. Peningkatan sistem perlindungan dan kesejahteraan  |



| No. | Sasaran  | Strength  | Build on Strength   | Weakness   | Overcome Weakness  | Opportunity  | Exploit Opportunities  | Threats  | Block Threats  | Strategic Issues/Problems   | Strategy  |
|-----|--|---|---|--|--|--|--|--|--|---|---|
|     |  |   | 2. Meningkatkan bantuan pangan non tunai  |  |  |  |  |  |  | kesejahteraan sosial  | sosial  |
| 13  | Nilai LAKE (Laporan Audit Kearsipan Eksternal) sebagai lembaga kearsipan daerah (LD)     | 1. meningkatnya penyelenggaraan kegiatan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola kearsipan | 1. Peningkatan kegiatan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola kearsipan                  | 1. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip tidak mengalami kenaikan yaitu stagnan di angka 18% setiap tahunnya  | 1. Meningkatkan jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip 2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan arsip pada perangkat daerah melalui pelatihan 3. Meningkatkan sarana dan prasarana karsipan | 1. Meningkatkan jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip 2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan arsip pada perangkat daerah | 1. Optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pelatihan pengelolaan karsipan di perangkat daerah  | 1. Masih terbatasnya jumlah pengelola arsip perangkat daerah                             | 1. Optimalisasi pengelolaan arsip di perangkat daerah                              | 1. Belum optimal nya tata kelola pemerintah dan pengendalian pembangunan daerah   | 1. Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya urusan karsipan                         |
| 14  | Meningkatkan kualitas dan Kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) | 1. Survey kepuasan masyarakat ber predikat baik   | 1. Optimalisasi kualitas layanan masyarakat, sarana dan prasarana pemerintahan                      | 1. Belum optimalnya implementasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik 2. Kurangnya sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik | 1. Optimalisasi pemanfaatan teknologi serta implementasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik 2. Peningkatan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik       | 1. Meningkatnya masyarakat yang terlayani dengan baik 2. Meningkatnya mutu tata kelola pemerintahan                            | 1. Peningkatan kualitas layanan masyarakat dengan naiknya predikat indeks kepuasan masyarakat 2. Peningkatan mutu tata kelola pemerintahan | 1. Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik belum berjalan secara efektif | 1. Peningkatan efektivitas Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik | 1. Belum optimalnya tata kelola pemerintah dan pengendalian pembangunan daerah 2. Sarana dan prasarana pemerintahan masih belum memadai | 1. Pembangunan mall pelayanan publik 2. Melakukan penataan lingkungan pusat pemerintahan                          |
| 15  | Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif                          | 1.Meningkatnya Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik                             | 1.Meningkatkan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya dokumen kependudukan kepada masyarakat | 1.Menurunnya Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga   | 1.Meningkatkan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya dokumen kependudukan kepada masyarakat  | 1.Meningkatnya masyarakat yang telah terdata dalam kependudukan  | 1.Meningkatnya kesejahteraan dan kepuasan masyarakat   | 1.Tidak optimalnya proses pembangunan di desa  | 1.Meningkatkan pelatihan dan pembinaan SDM aparatur desa                           | 1.Belum optimalnya pelayanan publik   | 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis sistem |



| No. | Sasaran   | Strength  | Build on Strength  | Weakness  | Overcome Weakness   | Opportunity   | Exploit Opportunities   | Threats   | Block Threats  | Strategic Issues/Problems   | Strategy  |
|-----|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|
|     |   | 2.Meningkatnya Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik | 2.Meningkatkan proses validasi database kependudukan   | 2.Masih rendahnya Cakupan Perekaman KTP Elektronik  | 2.Meningkatkan kualitas pendataan kepada keluarga baru                  | 2.Terjaminnya identitas dan pelayanan publik untuk masyarakat | 2.Optimalisasi tugas pokok dan fungsi dari DPRD               | 2.Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPRD | 2.Meningkatkan kualitas pendataan kepada keluarga baru   | 2.Rendahnya perhatian dinas teknis terhadap database kependudukan           | informasi dan peningkatan pembinaan serta pelatihan SDM aparatur desa dengan optimalisasi reses DPRD              |
|     |   | 3.Meningkatnya Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan               | 3.Meningkatkan sistem informasi yang terintegrasi database   | 3.Masih rendahnya Penduduk yang memiliki KK   | 3.Meningkatkan pelatihan dan pembinaan SDM aparatur desa                | 3.Meningkatnya pembangunan di desa                            |   | 3.Kurang optimalnya pendataan dokumen kependudukan        | 3.Optimalisasi tugas pokok dan fungsi dari DPRD          | 3.Belum optimalnya sistem informasi yang terintegrasi database kependudukan |   |
|     |   | 4. Meningkatnya Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian                | 4. Meningkatnya Persentase validasi database kependudukan  | 4.Optimalisasi tugas pokok dan fungsi dari DPRD   | 4.Rendahnya proses vali-dasi database kependudukan                      | 4.Optimalisasi tugas pokok dan fungsi dari DPRD               |   |   |  |   |   |
|     |   | 5.Meningkatkan kualitas pendataan kepada keluarga baru                  | 5.Rendahnya Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)  | 5.Meningkatkan kualitas pendataan kepada keluarga baru                                      | 5.Meningkatkan sistem informasi yang terintegrasi database kependudukan |   |   |   |  |   |   |
| 16  | Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur daerah | 1.Meningkatnya panjang jalan dalam kondisi baik                         | 1.Meningkatkan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan sarana prasarana perhubungan | 1.Belum optimalnya jaringan irigasi dalam kondisi baik untuk peningkatan budidaya pertanian | 1.Meningkatkan jaringan irigasi penunjang produksi pertanian            | 1.Meningkatnya mobilitas perekonomian masyarakat              | 1.Mewujudkan permukiman layak huni bagi masyarakat            | 1.Menurunnya jumlah produksi pertanian                    | 1.Meningkatkan kualitas sarana prasarana perhubungan     | 1.Belum optimalnya sarana dan prasarana perhubungan                         | 1. Meningkatkan kualitas dan konektivitas infrastruktur daerah melalui peningkatan, pengadaan dan pemeliharaan    |
|     |   | 2.Meningkatnya persentase jalan dalam kondisi mantap                    | 2.Meningkatkan pengembangan kawasan lingkungan layak huni  | 2.Masih kurangnya luas lahan budidaya pertanian   | 2.Meningkatkan kualitas permukiman layak huni                           | 2.Meningkatnya pola hidup sehat masyarakat                    | 2.Meningkatkan sosialisasi pola hidup sehat kepada masyarakat | 2.Tidak optimalnya infrastruktur jalan                    | 2.Meningkatkan kualitas pemeliharaan infrastruktur jalan | 2.Masih minimnya perumahan dan permukiman yang berkelanjutan                | 2. Meningkatkan infrastruktur, pemenuhan kualitas pemukiman layak huni, dan peningkatan kualitas sarana prasarana |



| No. | Sasaran  | Strength   | Build on Strength   | Weakness   | Overcome Weakness   | Opportunity  | Exploit Opportunities  | Threats  | Block Threats   | Strategic Issues/Problems   | Strategy  |
|-----|--|--|---|--|---|--|--|--|---|---|---|
|     |  |  |   |  |   |  |  |  |   |   | perhubungan   |
|     |  | 3.Meningkatnya persentase irigasi dalam kondisi baik             | 3.Meningkatkan jumlah trayek angkutan umum yang saling terintegrasi | 3.Masih kurangnya jumlah tempat ibadah   | 3.Meningkatkan jumlah angkutan umum yang memiliki KIR                                     | 3.Meningkatnya layanan angkutan umum yang terintegrasi   | 3.Meningkatkan layanan sarana prasarana perhubungan                                      | 3.Meningkatnya kawasan kumuh   | 3.Mewujudkan sistem drainase yang terpadu                             | 3.Masih kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang mendukung lintas sektor |   |
|     |  | 4.Meningkatnya luas saluran irigasi                              |   | 4.Masih rendahnya pendataan pemeliharaan terhadap jumlah jembatan yang terbangun         | 4.Meningkatkan kualitas pemeliharaan infrastruktur jalan dan sarana prasarana perhubungan | 4.Meningkatnya penduduk yang memiliki akses air minum  | 4.Meningkatkan kemudahan mobilitas perekonomian masyarakat                               | 4.Meningkatnya kejadian laka lantas                                    | 4.Pembangunan embung untuk irigasi pertanian                          |   |   |
|     |  | 5.Meningkatnya persentase penduduk yang memiliki akses air minum |   | 5.Masih rendahnya persentase rumah tinggal ber sanitasi                                  |   | 5.Optimalnya layanan perhubungan bagi masyarakat   |  |  |   |   |   |
| 17  | Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah | 1.Meningkatnya persentase desa/kelurahan tangguh bencana         | 1.Optimalisasi desa/kelurahan tangguh bencana yang ada              | 1.Menurunnya persentase desa/kelurahan yang memperoleh informasi peringatan dini bencana | 1.Meningkatkan kualitas pelayanan pusdalops dan sarana prasarana penanggulangan bencana   | 1.Meningkatnya penduduk yang mendapatkan pelayanan pusdalops dan sarana prasarana penanggulangan bencana | 1.Meningkatka n kualitas pelayanan pusdalops dan sarana prasarana penanggulangan bencana | 1.Meningkatnya jumlah kerugian materi atau nyawa atas kejadian bencana | 1.Meningkatkan pelatihan dan pembinaan desa/kelurahan tangguh bencana | 1. Masih minimnya desa/kelurahan tangguh bencana                                    | 1. Meningkatkan kualitas pelayanan pusdalops dan sarana prasarana penanggulangan bencana dengan membentuk dan |



| No. | Sasaran                                | Strength   | Build on Strength   | Weakness  | Overcome Weakness  | Opportunity  | Exploit Opportunities                                       | Threats   | Block Threats   | Strategic Issues/Problems | Strategy  |
|-----|--|--|---|---|--|--|---|---|---|---------------------------|---|
|     |  | 2.Meningkatnya persentase korban bencana yang mendapatkan penanganan | 2.Meningkatkan jumlah desa/kelurahan tangguh bencana                                    | 2.Masih rendahnya persentase desa/kelurahan tangguh bencana             | 2.Meningkatkan pelatihan dan pembinaan desa/kelurahan tangguh bencana                  | 2.Meningkatnya desa/kelurahan tangguh bencana                | 2.Optimalisasi desa/kelurahan tangguh bencana yang ada      | 2.Rendahnya pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana                  | 2.Meningkatkan sosialisasi/penyuluhan informasi peringatan dini bencana   |                           | meningkatkan pelatihan serta pembinaan desa/kelurahan tangguh bencana                   |
|     |  | 3.Tinnginya jangkauan luas WMK                                       | 3.Optimalisasi wilayah manajemen kebakaran  | 3.Masih rendahnya persentase korban bencana yang mendapatkan penanganan | 3.Meningkatkan sosialisasi/penyuluhan informasi peringatan dini bencana                | 3.Meningkatnya korban selamat dari bencana                   |   |   |   |                           |   |
|     |  | 4.Menurunnya jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK              | 4.Meningkatkan kualitas pelayanan pusdalops dan sarana prasarana penanggulangan bencana | 4.Rendahnya indeks kapasitas daerah                                     | 4.Meningkatkan jumlah desa/kelurahan tangguh bencana                                   |  |   |   |   |                           |   |
|     |  | 5.Meningkatnya nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana              |   | 5.Belum optimalnya kasus kebakaran di WMK yang tertangani               |  |  |   |   |   |                           |   |
| 18  | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup |  | 1.Meningkatkan pemahaman kebersihan dan pola hidup sehat di masyarakat                  | 1.Meningkatnya volume produksi sampah                                   | 1.Meningkatkan pemahaman dan kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat | 1.Meningkatnya kualitas pola hidup sehat                     | 1. Meningkatkan pemahaman dan kedisiplinan masyarakat       | 1.Penampungan sampah atau TPS yang overload                             | 1.Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana dalam pengelolaan sampah |                           | 1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang sehat melalui pemahaman pola hidup sehat |
|     |  | 1.Meningkatnya volume sampah yang tertangani                         | 2.Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana dalam pengelolaan sampah               | 2.Menurunnya nilai indeks kualitas air                                  | 2.Optimalisasi pengelolaan sampah 3R   | 2.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat | 2. Menurunnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat | 2.Meningkatkan kualitas SDM dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup | 2.Meningkatkan kualitas SDM dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup   |                           | 2. Meningkatkan kualitas SDM serta sarana   |



| No. | Sasaran | Strength                                      | Build on Strength   | Weakness   | Overcome Weakness   | Opportunity | Exploit Opportunities | Threats               | Block Threats                        | Strategic Issues/Problems                     | Strategy                     |
|-----|---------|---|---|--|---|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|
|     |         | 2.Meningkatnya persentase penanganan sampah   | 3.Optimalisasi pengelolaan sampah 3R                            | 3.Menurunnya nilai indeks kualitas udara                           | 3.Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana dalam pengelolaan sampah                             |             |                       | 3.Meningkatnya polusi | 3.Optimalisasi pengelolaan sampah 3R | Masih tingginya tingkat pencemaran lingkungan | prasarana pengelolaan sampah |
|     |         | 3.Meningkatnya nilai indeks kualitas vegetasi | 4.Meningkatkan kualitas SDM dalam peningkatan kualitas vegetasi | 4.Kurang optimalnya jumlah daya tampung TPS                        | 4.Meningkatkan sosialisasi/penyuluhan terkait perizinan pelaku usaha dalam mengelola lingkungan hidup |             |                       |                       |                                      |   |                              |
|     |         | 4.Meningkatnya sampah 3R                      |   | 5.Kurang optimalnya pelaku usaha dalam ketaatan izin               | 5.Meningkatkan kualitas SDM dalam peningkatan kualitas air dan udara                                  |             |                       |                       |                                      |   |                              |
|     |         |   |   | 6.Kurang optimalnya pemberian penghargaan lingkungan hidup         | 6.Optimalisasi pemberian penghargaan terhadap pemeliharaan lingkungan hidup                           |             |                       |                       |                                      |   |                              |
|     |         |   |   | 7.Belum optimalnya pengaduan masyarakat yang ditangani dan terdata |   |             |                       |                       |                                      |   |                              |
|     |         |   |   | 8.Belum optimalnya timbunan sampah yang tertangani                 |   |             |                       |                       |                                      |   |                              |
|     |         |   |   | 9.Belum optimalnya sampah yang tertangani                          |   |             |                       |                       |                                      |   |                              |
|     |         |   |   |  |   |             |                       |                       |                                      |   |                              |

(Sumber: Diolah penyusun, 2021)



Dengan menggunakan daftar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada tabel diatas, dilakukan analisis SWOT untuk mendapatkan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan daerah. Matrik SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik SWOT sebagai alat untuk mendapatkan strategi mengembangkan empat tipe strategi yaitu SO (*strength- opportunities*), WO (*weakness- opportunities*), ST (*strength- threat*) dan WT (*weakness- threat*). Hasil persilangan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada tabel di atas kemudian disesuaikan dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang sebelumnya telah ditetapkan. Strategi yang dianggap sesuai dengan kemudian menjadi strategi atas upaya pencapaian masing-masing sasaran. Strategi untuk setiap sasaran dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 6. 2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kabupaten Pangandaran**

| Visi Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa                 |   |   |
|--|---|---|
| Tujuan   | Sasaran   | Strategi  |
| <b>Misi 1 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama</b> |   |   |
| Tujuan 1:<br>Menguatkan nilai-nilai karakter bangsa berbasis nilai luhur dan                                 | Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat secara menyeluruh | Memberdayakan masyarakat untuk saling menjaga kamtibmas |



| Visi Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa  |  |  |
|---|--|--|
| Tujuan  | Sasaran  | Strategi   |
| budaya lokal  | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa  | Pengurangan biaya produksi, Pemutusan rantai distribusi, inovasi TTG, pemberian bantuan bibit unggul, jaminan BPJS pada pelaku usaha resiko tinggi                       |
|   | Meningkatnya pelestarian budaya lokal  | Revitalisasi pasar tradisional Pemda<br>Mengoptimalkan kelembagaan<br>Pembangunan lumbung pangan baru<br>Penyediaan lahan untuk membangun gedung kesenian (pusat budaya) |
| Misi 2 Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan  |  |  |
| Tujuan 2:<br>Terwujudnya pengelolaan pariwisata yang efektif dan efisien yang menjunjung nilai-nilai kearifan lokal   | Sasaran 2.1:<br>Peningkatan akses dan kualitas destinasi pariwisata                          | Mengoptimalkan destinasi pariwisata yang sudah ada   |
|   |  | Melanjutkan penataan kawasan destinasi wisata yang sudah ada   |
|   |  | Pembukaan rute penerbangan, simpul transportasi, dan pembukaan trayek  |
|   |  | Pembentukan dan pengelolaan desa wisata mandiri (awal dari desa presisi)   |
|   |  | Penetapan ciri khas tata bangunan/arsitektur gedung dan bangunan   |
|   |  | Pemenuhan sarpras dan pelayanan sesuai GSTC  |
|   |  | Peningkatan pelayanan pariwisata   |
|   |  | Mengundang investor penyelenggaraan wisata   |
| Misi 3 Mengembangkan Aksesibilitas Kesehatan dan Pendidikan Sampai Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peningkatan Kompetensi Lulusan |  |  |
| Tujuan 3:<br>Terwujudnya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing   | Sasaran 3.1:<br>Meningkatkan pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat                    | Pemberian beasiswa bagi dokter PNS   |
|   |  | Pembentukan Perda  |
|   |  | Integrasi/perluasan cakupan JKN  |
|   | Sasaran 3.2:<br>Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi di tingkat nasional dan internasional | Pemberian bantuan ambulance bagi desa yang jauh dari puskesmas   |
|   |  | Pembayaran JKN oleh Pemda untuk para Lansia  |
|   |  | Optimalisasi kualitas pelayanan, sarana dan Prasarana Pendidikan serta peningkatan peran, pelatihan kepemudaan dalam bidang keolahragaan                                 |
|   | Sasaran 3.3:<br>Menurunnya laju pertumbuhan penduduk   | Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui Program Keluarga Berencana  |
|   |  | Meningkatkan kapasitas perempuan melalui pelatihan pemberdayaan perempuan  |
|   | Sasaran 3.4:<br>Meningkatnya partisipasi perempuan dalam                                     |  |



| Visi Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa                                  |  |   |
|---|--|---|
| Tujuan  | Sasaran  | Strategi  |
| <b>Misi 4 Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal</b>                               |  |   |
| Tujuan 4:<br>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat                         | Sasaran 4.1:<br>Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan   | Meningkatkan koneksi antar pusat kegiatan, tempat-tempat wisata, dan lokasi-lokasi yang memiliki potensi tinggi bagi pengembangan ekonomi masyarakat    |
|   | Sasaran 4.2:<br>Meningkatnya permukiman layak huni   | Menerapkan arsitektur kawasan pada bangunan milik pemerintah daerah   |
|   | Sasaran 4.3 :<br>Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja                                       | Pemberian beasiswa bagi guru yang belum S1  |
|   | Sasaran 4.4:<br>Meningkatnya cakupan penanganan PPKS   | Pelayanan Sosial pada PPKS melalui peningkatan alat bantu dan Peningkatan SPM Sosial serta Peningkatan kualitas dan kemampuan PSKS dalam menangani PPKS |
| <b>Misi 5 Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel</b>                                   |  |   |
| Tujuan 5:<br>Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima                | Sasaran 5.1:<br>Nilai LAKE (Laporan Audit Kearsipan Eksternal) sebagai lembaga karsipan daerah (LD)      | Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya urusan karsipan  |
|   | Sasaran 5.2:<br>Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) | Pembangunan mall pelayanan publik   |
|   | Sasaran 5.3:<br>Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif                          | Melakukan penataan lingkungan pusat pemerintahan  |
| <b>Misi 6 Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan</b> |  |   |
| Tujuan 6:<br>Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan infrastruktur yang ramah terhadap lingkungan                        | Sasaran 6.1:<br>Meningkatnya kualitas dan koneksi infrastruktur daerah                                   | Melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni   |
|   |  | Memenuhi kebutuhan ruang untuk pelaksanaan pembangunan  |
|   | Sasaran 6.2:<br>Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah   | Membangun sarana dan prasarana perkantoran<br>Meningkatkan akses air minum dan sanitasi<br>Menyelenggarakan pelatihan<br>mitigasi kebencanaan           |



| Visi Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa |  |   |
|--|--|---|
| Tujuan   | Sasaran  | Strategi  |
|  | Sasaran 6.3:<br>Meningkatkan kualitas lingkungan hidup | Menyusun dan melaksanakan RPPLH, mengawasi pelaksanaan izin lingkungan hidup, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menerapkan adiwiyata pada lingkungan pemerintah. |
|  |  | Meningkatkan cakupan layanan persampahan  |
|  |  | Pembentukan hutan kota  |

(Sumber: Diolah Penyusun, 2021)

## 6.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan pembangunan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama periode perencanaan kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Arah kebijakan ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder



sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama periode perencanaan. Berikut merupakan arah kebijakan untuk masing-masing strategi pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran daerah.

**Tabel 6.3 Perumusan Arah Kebijakan Kabupaten Pangandaran  
Tahun 2022-2026**

| <b>Tujuan</b>  | <b>Sasaran</b>   | <b>Strategi</b>  | <b>Arah Kebijakan</b>   |
|--|--|--|---|
| Tujuan 1:<br>Menguatkan nilai-nilai karakter bangsa berbasis nilai luhur dan budaya lokal                          | 1.1: Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat secara menyeluruh | Memberdayakan masyarakat untuk saling menjaga kamtibmas  | Tahun Pertama:<br>Pemantapan<br>Pemulihan Ekonomi<br>untuk<br>Meningkatkan Daya<br>Saing Berbasis<br>Kearifan Lokal |
|  | 1.2: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa                                     | Pengurangan biaya produksi, Pemutusan rantai distribusi, inovasi TTG, pemberian bantuan bibit unggul, jaminan BPJS pada pelaku usaha resiko tinggi |   |
|  |  | Revitalisasi pasar tradisional Pemda   |   |
|  |  | Mengoptimalkan kelembagaan   |   |
|  | 1.3: Meningkatnya pelestarian budaya lokal   | Pembangunan lumbung pangan baru<br><br>Penyediaan lahan untuk membangun gedung kesenian (pusat budaya)   |   |
| Tujuan 2:<br>Terwujudnya pengelolaan pariwisata yang efektif dan efisien yang menunjung nilai-nilai kearifan lokal | Sasaran 2.1:<br>Peningkatan akses dan kualitas destinasi pariwisata                    | Mengoptimalkan destinasi pariwisata yang sudah ada   |   |
|  |  | Melanjutkan penataan kawasan destinasi wisata yang sudah ada   |   |
|  |  | Pembukaan rute penerbangan, simpul transportasi, dan pembukaan trayek  |   |
|  |  | Pembentukan dan pengelolaan desa wisata mandiri (awal dari desa presisi)   |   |



| Tujuan  | Sasaran  | Strategi  | Arah Kebijakan                                  |
|---|--|---|---|
|   |  | Penetapan ciri khas tata bangunan/arsitektur gedung dan bangunan<br>Pemenuhan sarpras dan pelayanan sesuai GSTC<br>Peningkatan pelayanan pariwisata<br>Mengundang investor penyelenggaraan wisata           |   |
| Tujuan 3:<br>Terwujudnya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing                       | Sasaran 3.1:<br>Meningkatkan pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat                    | Pemberian beasiswa bagi dokter PNS<br>Pembentukan Perda<br>Integrasi/perluasan cakupan JKN<br>Pemberian bantuan ambulance bagi desa yang jauh dari puskesmas<br>Pembayaran JKN oleh Pemda untuk para Lansia | Tahun Keempat:<br>Peningkatan Daya Saing Daerah |
|   | Sasaran 3.2:<br>Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi di tingkat nasional dan internasional | Optimalisasi kualitas pelayanan, sarana dan Prasarana Pendidikan serta peningkatan peran, pelatihan kepemudaan dalam bidang keolahragaan  |   |
|   | Sasaran 3.3:<br>Menurunnya laju pertumbuhan penduduk   | Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui Program Keluarga Berencana   |   |
|   | Sasaran 3.4:<br>Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan                         | Meningkatkan kapasitas perempuan melalui pelatihan pemberdayaan perempuan   |   |
| Tujuan 4:<br>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat | Sasaran 4.1:<br>Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan                             | Meningkatkan konektivitas antar pusat kegiatan, tempat-tempat wisata, dan lokasi-lokasi yang memiliki potensi tinggi bagi pengembangan ekonomi masyarakat   |   |
|   | Sasaran 4.2:<br>Meningkatnya permukiman layak huni   | Menerapkan arsitektur kawasan pada bangunan milik pemerintah daerah   |   |



| <b>Tujuan</b>   | <b>Sasaran</b>  | <b>Strategi</b>  | <b>Arah Kebijakan</b>   |
|---|---|--|---|
|   | Sasaran 4.3 : Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja                                       | Pemberian beasiswa bagi guru yang belum S1   |   |
|   | Sasaran 4.4: Meningkatnya cakupan penanganan PPKS   | Pelayanan Sosial pada PPKS melalui peningkatan alat bantu dan Peningkatan SPM Sosial serta Peningkatan kualitas dan kemampuan PSKS dalam menangani PPKS  |   |
| Tujuan 5: Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima | Sasaran 5.1: Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) | Melakukan penataan lingkungan pusat pemerintahan   | Tahun Kelima:<br>Akselerasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi |
|   | Sasaran 5.2: Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif                          | Implementasi OSS   |   |
| Tujuan 6: Meningkatkan kualitas dan pemerataaan layanan infrastruktur yang ramah terhadap lingkungan        | Sasaran 6.1: Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur daerah                              | Melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni<br>Memenuhi kebutuhan ruang untuk pelaksanaan pembangunan<br>Membangun sarana dan prasarana perkantoran<br>Meningkatkan akses air minum dan sanitasi | Tahun Ketiga:<br>Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar   |
|   | Sasaran 6.2: Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah   | Menyelenggarakan pelatihan<br>mitigasi kebencanaan   |   |
|   | Sasaran 6.3: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup   | Menyusun dan melaksanakan RPPLH, mengawasi pelaksanaan izin lingkungan hidup, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menerapkan adiwiyata pada lingkungan pemerintah.                              |   |



| Tujuan | Sasaran | Strategi                                 | Arah Kebijakan |
|--------|---------|--|----------------|
|        |         | Meningkatkan cakupan layanan persampahan |                |
|        |         | Pembentukan hutan kota                   |                |

(Sumber: Diolah Penyusun, 2021)

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Setelah merumuskan arah kebijakan, setiap pernyataan arah kebijakan dirumuskan secara spesifik tahun pelaksanaan. Dalam satu periode perencanaan ditetapkan tema pembangunan yang menjadi fokus pembangunan.

Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada. Pentahapan pembangunan berdasarkan arah kebijakan dan waktu pelaksanaannya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 6.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pangandaran**

| Arah Kebijakan   |  |  |                               |  |
|--|--|--|-------------------------------|--|
| Tahun-1  | Tahun-2  | Tahun-3                                  | Tahun-4                       | Tahun-5  |
| Pemantapan Pemulihan Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing Berbasis Kearifan Lokal | Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar | Peningkatan Daya Saing Daerah | Akselerasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi |



Visi dan Misi dalam pembangunan Kabupaten Pangandaran tahun 2022-2026 perlu diterjemahkan dalam rumusan kebijakan umum dan program pembangunan secara konsisten dan spesifik. Oleh karena itu, implementasi dari setiap visi dan misi akan dihubungkan dengan program pembangunan dengan capaian tahunnya. Secara konseptual, program pembangunan daerah merupakan program prioritas yang akan dilaksanakan selama satu periode yang diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah dan isu strategis yang dihadapi dan memenuhi berbagai kebutuhan yang dirasakan dan lebih mendayagunakan pemanfaatan potensi daerah.

Program pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022-2026 merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2022-2026 menjadi pernyataan program kepala daerah Kabupaten Pangandaran yang berisi program prioritas bersifat strategis. Program pembangunan berdasarkan pencapaian visi misi dan pagu indikatifnya dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 6.5 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Pangandaran**

| Kode  | Misi/ Tujuan/<br>Sasaran/ Program<br>Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja<br>(Tujuan/ Impact/<br>Outcome)  | Kondisi<br>Kinerja<br>Awal<br>RPJMD<br>(Tahun 0)                         | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |   |      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                                  |
|---|---|--|--|--|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|---|------|--------------------------------------|----------------------------------|
|   |   |  |  | 2022   |      | 2023                 |      | 2024                 |      | 2025                 |      | 2026                 |      | Kondisi Kinerja pada<br>Akhir Periode RPJMD |      |                                      |                                  |
|   |   |  |  | Target   | Rp   | Target               | Rp   | Target               | Rp   | Target               | Rp   | Target               | Rp   | Target                                      | Rp   |                                      |                                  |
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6    | 7                    | 8    | 9                    | 10   | 11                   | 12   | 13                   | 14   | 15  | 16   | 17                                   |                                  |
| Misi 1 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama |   |  |  |  |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |   |      |                                      |                                  |
|   |   | Tujuan 1: Menguatkan nilai-nilai karakter bangsa berbasis nilai luhur dan budaya lokal         | Indeks Kesalehan Sosial  |  |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |   |      |                                      |                                  |
|   |   | Sasaran 1.1: Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat secara menyeluruh | Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani             |  |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |   |      |                                      |                                  |
|   |   | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum   | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) | n.a  | 100% | 5.906.901,96<br>2,00 | 100% | 5.965.000,00<br>0,00 | 100  | 6.175.000,00<br>0,00 | 100% | 6.495.600,00<br>0,00 | 100% | 6.695.000,00<br>0,00                        | 100% | 6.695.000,00<br>0,00                 | Satuan Polisi Pamong Praja, BPBD |
|   |   |  | Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa  |  |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |   |      |                                      |                                  |
|   |   | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum   | Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum                    |  | 100% | 3.500.000,00         | 100% | 3.850.000,00         | 100% | 4.325.000,00         | 100% | 4.658.500,00         | 100% | 5.124.350,00                                | 100% | 5.124.350,00                         | Kecamatan Cigugur                |
|   |   | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum   | Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum                    |  | 100% | 890.000,00           | 100% | 979.000,00           | 100% | 1.076.900,00         | 100% | 1.184.590,00         | 100% | 1.303.049,00                                | 100% | 1.303.049,00                         | Kecamatan Cijulang               |
|   |   | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum   | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                    |  | 100% | 7.691.000,00         | 100% | 8.460.100,00         | 100% | 9.306.110,00         | 100% | 10.236.721,0<br>0    | 100% | 11.260.393,0<br>0                           | 100% | 11.260.393,0<br>0                    | Kecamatan Cimerak                |
|   |   | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum   | persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum                    |  | 100% | 3.000.000,00         | 100% | 3.300.000,00         | 100% | 3.630.000,00         | 100% | 3.993.000,00         | 100% | 4.392.300,00                                | 100% | 4.392.300,00                         | Kecamatan Langkaplancar          |
|   |   | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum   | Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum                    |  | 100% | 3.235.000,00         | 100% | 3.283.525,00         | 100% | 3.332.778,00         | 100% | 3.382.770,00         | 100% | 3.433.511,00                                | 100% | 3.433.511,00                         | Kecamatan Mangunjaya             |
|   |   | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum   | Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum                    |  | 100% | 7.000.000,00         | 100% | 7.700.000,00         | 100% | 8.470.000,00         | 100% | 9.317.000,00         | 100% | 10.248.700,0<br>0                           | 100% | 10.248.700,0<br>0                    | Kecamatan Padaherang             |
|   |   | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum   | Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum                    |  | 100% | 1.000.000,00         | 100% | 1.100.000,00         | 100% | 1.210.000,00         | 100% | 1.331.000,00         | 100% | 1.464.100,00                                | 100% | 1.464.100,00                         | Kecamatan Parigi                 |
|   |   | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum   | Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum                    |  | 100% | 890.000,00           | 100% | 979.000,00           | 100% | 1.076.900,00         | 100% | 1.184.590,00         | 100% | 1.303.049,00                                | 100% | 1.303.049,00                         | Kecamatan Pangandaran            |
|   |   | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum   | Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum                    |  | 100% | 3.235.000,00         | 100% | 3.558.500,00         | 100% | 3.914.350,00         | 100% | 4.305.785,00         | 100% | 4.736.364,00                                | 100% | 4.736.364,00                         | Kecamatan Sidamulih              |
|   |   | Program Koordinasi   | Persentase koordinasi  |  | 100% | 3.460.000,00         | 100% | 3.806.000,00         | 100% | 4.186.600,00         | 100% | 4.605.260,00         | 100% | 5.065.786,00                                | 100% | 5.065.786,00                         | Kecamatan Kalipucang             |



| Kode | Misi/ Tujuan/<br>Sasaran/ Program<br>Pembangunan Daerah  | Indikator Kinerja<br>(Tujuan/ Impact/<br>Outcome)                 | Kondisi<br>Kinerja<br>Awal<br>RPJMD<br>(Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |                       |   |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|------|--|---|--|--|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|--|
|      |  |   |  | 2022   |                       | 2023   |                       | 2024   |                       | 2025   |                       | 2026   |                       | Kondisi Kinerja pada<br>Akhir Periode RPJMD |                       |                                      |  |
|      |  |   |  | Target   | Rp                    | Target | Rp                    | Target | Rp                    | Target | Rp                    | Target | Rp                    | Target                                      | Rp                    |                                      |  |
| 1    | 2  | 3   | 4  | 5  | 6                     | 7      | 8                     | 9      | 10                    | 11     | 12                    | 13     | 14                    | 15  | 16                    | 17                                   |  |
|      | Ketentraman Dan<br>Ketertiban Umum   | ketentraman dan<br>ketertiban umum                                |  |  |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |                       |   |                       |                                      |  |
|      | Sasaran 1.2:<br>Meningkatnya<br>pemberdayaan<br>masyarakat dan desa  | Indeks Desa Membangun   |  |  |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |                       |   |                       |                                      |  |
|      | Program Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa Dan<br>Kelurahan   | persentase Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa                        |  | 100%   | 3.996.110,00          | 100%   | 4.395.721,00          | 100%   | 4.835.293,10          | 100%   | 5.318.822,41          | 100%   | 5.850.704,65          | 100%  | 5.850.704,65          | Kecamatan<br>Langkaplancar           |  |
|      | Program Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa Dan<br>Kelurahan   | Persentase Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa                        |  | 100%   | 2.795.000,00          | 100%   | 3.074.500,00          | 100%   | 3.381.950,00          | 100%   | 3.720.145,00          | 100%   | 4.092.160,00          | 100%  | 4.092.160,00          | Kecamatan Cijulang                   |  |
|      | Program Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa Dan<br>Kelurahan   | Persentase<br>penyelenggaraan urusan<br>pemerintahan umum         |  | 100%   | 3.633.500,00          | 100%   | 3.996.850,00          | 100%   | 4.396.535,00          | 100%   | 4.836.189,00          | 100%   | 5.319.807,00          | 100%  | 5.319.807,00          | Kecamatan Cimerak                    |  |
|      | Program Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa Dan<br>Kelurahan   | Persentase Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa                        |  | 100%   | 3.235.000,00          | 100%   | 3.283.525,00          | 100%   | 3.332.778,00          | 100%   | 3.382.770,00          | 100%   | 3.433.511,00          | 100%  | 3.433.511,00          | Kecamatan<br>Mangunjaya              |  |
|      | Program Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa Dan<br>Kelurahan   | Persentase Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa                        |  | 100%   | 10.000.000,0<br>0     | 100%   | 11.000.000,0<br>0     | 100%   | 12.100.000,0<br>0     | 100%   | 13.310.000,0<br>0     | 100%   | 14.641.000,0<br>0     | 100%  | 14.641.000,0<br>0     | Kecamatan<br>Padaherang              |  |
|      | Program Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa Dan<br>Kelurahan   | Persentase Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa                        |  | 100%   | 3.500.000,00          | 100%   | 3.850.000,00          | 100%   | 4.235.000,00          | 100%   | 4.658.500,00          | 100%   | 5.124.350,00          | 100%  | 5.124.350,00          | Kecamatan Parigi                     |  |
|      | Program Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa Dan<br>Kelurahan   | Persentase Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa                        |  | 100%   | 2.795.000,00          | 100%   | 3.074.500,00          | 100%   | 3.381.950,00          | 100%   | 3.720.145,00          | 100%   | 4.092.160,00          | 100%  | 4.092.160,00          | Kecamatan<br>Pangandaran             |  |
|      | Program Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa Dan<br>Kelurahan   | Persentase Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa                        |  | 100%   | 3.633.500,00          | 100%   | 3.996.850,00          | 100%   | 4.396.535,00          | 100%   | 4.836.189,00          | 100%   | 5.319.807,00          | 100%  | 5.319.807,00          | Kecamatan Kalipucang                 |  |
|      | Program Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa Dan<br>Kelurahan   | Persentase Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa                        |  | 100%   | 3.500.000,00          | 100%   | 3.850.000,00          | 100%   | 4.235.000,00          | 100%   | 4.658.500,00          | 100%   | 5.124.350,00          | 100%  | 5.124.350,00          | Kecamatan Cigugur                    |  |
|      | Program Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa Dan<br>Kelurahan   | Persentase Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa                        |  | 100%   | 3.235.000,00          | 100%   | 3.558.500,00          | 100%   | 3.914.350,00          | 100%   | 4.305.785,00          | 100%   | 4.736.364,00          | 100%  | 4.736.364,00          | Kecamatan Sidamulih                  |  |
|      | Misi 2 Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan   |   |  |  |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |                       |   |                       |                                      |  |
|      | Tujuan 2: Terwujudnya<br>pengelolaan pariwisata<br>yang efektif dan efisien<br>yang menjunjung nilai-nilai<br>kearifan lokal | Persentase peme-nuhan<br>kriteria GSTC di destinasi<br>pariwisata |  |  |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |                       |   |                       |                                      |  |
|      | Sasaran 2.1:<br>Peningkatan akses dan<br>kualitas destinasi<br>pariwisata  | Rata-Rata Pengeluaran<br>Wisatawan                                |  |  |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |                       |   |                       |                                      |  |
|      | Program Penyelenggaraan Jalan  | Presentase Jalan Dalam<br>Kondisi Mantap                          | 74,50%   | 78,50<br>%                                     | 39.401.733,8<br>19,00 | 82,50  | 39.985.707,1<br>81,00 | 87,50  | 42.144.564,1<br>74,00 | 89,50  | 44.707.852,5<br>99,00 | 95,40  | 46.624.332,8<br>11,00 | 95,40                                       | 46.624.332,8<br>11,00 | Dinas Pekerjaan<br>Umum dan Tata     |  |



| Kode | Misi/ Tujuan/<br>Sasaran/ Program<br>Pembangunan Daerah   | Indikator Kinerja<br>(Tujuan/ Impact/<br>Outcome)                                     | Kondisi<br>Kinerja<br>Awal<br>RPJMD<br>(Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |   |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab       |  |
|------|---|---|--|--|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---|--------------------|--|--|
|      |   |   |  | 2022   |                    | 2023   |                    | 2024   |                    | 2025   |                    | 2026   |                    | Kondisi Kinerja pada<br>Akhir Periode RPJMD |                    |  |  |
|      |   |   |  | Target   | Rp                 | Target | Rp                 | Target | Rp                 | Target | Rp                 | Target | Rp                 | Target                                      | Rp                 |  |  |
| 1    | 2   | 3   | 4  | 5  | 6                  | 7      | 8                  | 9      | 10                 | 11     | 12                 | 13     | 14                 | 15  | 16                 | 17   |  |
|      |   |   |  |  |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |   |                    | Ruang                                      |  |
|      | Misi 3 Mengembangkan aksesibilitas Pendidikan sampai perguruan tinggi, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan |   |  |  |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |   |                    |  |  |
|      | Tujuan 3: Terwujudnya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing  | Indeks Pembangunan Manusia  |  |  |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |   |                    |  |  |
|      |   | Indeks Pembangunan Gender   |  |  |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |   |                    |  |  |
|      | Sasaran 3.1: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif   | Indeks Kesehatan  |  |  |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |   |                    |  |  |
|      | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan   | Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat                                 |  | 90%  | 5.739.011.00 0,00  | 90%    | 6.949.543.72 0,00  | 90%    | 6.918.498.42 0,00  | 90%    | 7.618.407.55 0,00  | 90%    | 8.389.919.93 5,00  | 90%   | 8.389.919.93 5,00  | Dinas Kesehatan                            |  |
|      | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan  | Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Kesehatan yang Diberdayakan       |  | 90%  | 694.441.698, 00    | 90%    | 291.918.000, 00    | 90%    | 321.509.800, 00    | 90%    | 353.260.000, 00    | 90%    | 389.286.000, 00    | 90%   | 389.286.000, 00    | Dinas Kesehatan                            |  |
|      |   | Indeks Pendidikan   |  |  |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |   |                    |  |  |
|      | Program Pengembangan Kurikulum  | persentase Capaian Standar Nasional Pendidikan Untuk Standar Isi                      |  | 50%  | 4.600.000.00 0,00  | 52%    | 4.600.000.00 0,00  | 54%    | 5.120.000.00 0,00  | 56%    | 5.100.000.00 0,00  | 58%    | 5.400.000.00 0,00  | 58%   | 5.400.000.00 0,00  | Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga |  |
|      | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan  | persentase Capaian Standar Nasional Pendidikan Untuk Pendidik Dan Tenaga Kependidikan |  | 50%  | 37.421.800.0 00,00 | 52%    | 37.421.800.0 00,00 | 54%    | 37.421.800.0 00,00 | 56%    | 37.421.800.0 00,00 | 58%    | 37.421.800.0 00,00 | 58%   | 37.421.800.0 00,00 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga |  |
|      |   | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat  |  |  |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |   |                    |  |  |
|      | Program Pembinaan Peustakaan  | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat  | 16,37  | 18,56  | 687.501.629, 00    | 19,16  | 641.776.980, 00    | 19,61  | 569.568.845, 00    | 19,95  | 671.555.924, 00    | 20,24  | 671.281.031, 00    | 20,24                                       | 671.281.031, 00    | Dinas Perpustakaan dan Arsip               |  |
|      | Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno  | Persentase Pengingkatan Bahan Pustaka dan Naskah Kuno yang dilestarikan               | -  | 10   | 194.229.980, 00    | 10     | 181.312.050, 00    | 10     | 160.912.121, 00    | 10     | 189.725.068, 00    | 10     | 189.647.407, 00    | 10  | 189.647.407, 00    | Dinas Perpustakaan dan Arsip               |  |
|      | Sasaran 3.2: Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi   | Persentase pemuda yang mendapatkan penghargaan  |  |  |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |   |                    |  |  |
|      | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan  | Cakupan Prestasi Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional                               |  | 80%  | 16.487.669.4 86,00 | 80%    | 16.650.919.2 12,00 | 80%    | 18.507.811.3 56,00 | 80%    | 20.333.103.4 98,00 | 80%    | 22.177.195.0 80,00 | 80%   | 22.177.195.0 80,00 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga |  |
|      | Sasaran 3.3: Menurunnya laju pertumbuhan penduduk   | Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk  |  |  |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |   |                    |  |  |
|      | Program Pengendalian  | Persentase laporan  | 20%  | 100%   | 324.166.425,       | 100%   | 310.629.718,       | 100%   | 314.111.746,       | 100%   | 318.246.082,       | 100%   | 350.294.431,       | 100%  | 350.294.431,       | Dinas Keluarga                             |  |



| Kode | Misi/ Tujuan/<br>Sasaran/ Program<br>Pembangunan Daerah  | Indikator Kinerja<br>(Tujuan/ Impact/<br>Outcome)   | Kondisi<br>Kinerja<br>Awal<br>RPJMD<br>(Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |   |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                         |  |
|------|--|---|--|--|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---|----------------------|--|--|
|      |  |   |  | 2022   |                      | 2023    |                      | 2024    |                      | 2025    |                      | 2026    |                      | Kondisi Kinerja pada<br>Akhir Periode RPJMD |                      |  |  |
|      |  |   |  | Target   | Rp                   | Target  | Rp                   | Target  | Rp                   | Target  | Rp                   | Target  | Rp                   | Target                                      | Rp                   |  |  |
| 1    | 2  | 3   | 4  | 5  | 6                    | 7       | 8                    | 9       | 10                   | 11      | 12                   | 13      | 14                   | 15  | 16                   | 17   |  |
|      | Penduduk   | pengendalian lapangan tingkat kecamatan sistem informasi kependudukan dan keluarga (SIGA) |  |  | 00                   |         | 00                   |         | 00                   |         | 00                   |         | 00                   |   | 00                   | Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak                |  |
|      | Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)  | Prevalensi peserta KB aktif   | 75,78%   | 75,64 %  | 2.953.121,09<br>6,00 | 75,69 % | 3.019.149,63<br>6,00 | 75,74 % | 3.179.719,57<br>3,00 | 75,79 % | 3.304.929,35<br>8,00 | 75,84 % | 3.330.904,53<br>5,00 | 75,84 %                                     | 3.330.904,53<br>5,00 | Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak |  |
|      | Sasaran 3.4: Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan                                  | Indeks Pemberdayaan Gender  |  |  |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |   |                      |  |  |
|      | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan  | 1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah                                 | 01.09,4  | 01,11<br>,3                                    | 86.806.437,0<br>0    | 13,14   | 92.945.267,0<br>0    | 14,98   | 101.577.593,<br>00   | 16,79   | 109.900.000,<br>00   | 18,55   | 118.100.000,<br>00   | 18,55                                       | 118.100.000,<br>00   | Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak |  |
|      |  | 2. Persentase kelembagaan PUG aktif   | 0,1458   | 03,32<br>,3                                    | 56.689.628,0<br>0    | 93,85   | 57.598.502,0<br>0    | 94,62   | 58.000.000,0<br>0    | 95,38   | 59.398.496,0<br>0    | 96,15   | 59.980.483,0<br>0    | 96,15                                       | 59.980.483,0<br>0    |  |  |
|      | Misi 4 Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal           |   |  |  |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |   |                      |  |  |
|      | Tujuan 4: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat | Laju Pertumbuhan Ekonomi  |  |  |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |   |                      |  |  |
|      |  | Persentase Penduduk Miskin  |  |  |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |   |                      |  |  |
|      | Sasaran 4.1: Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan                                      | PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)                      |  |  |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |   |                      |  |  |
|      | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian  | Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian                                     |  | 1  | 3.150.000,00<br>0    | 1,2     | 3.457.257,66<br>3    | 1,5     | 2.649.513,87<br>7    | 2       | 3.723.830,38<br>9    | 2       | 2.482.018,78<br>8    | 2   | 2.482.018,78<br>8    | Dinas Pertanian  |  |
|      |  | Persentase Realisasi Nilai Investasi  |  |  |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |   |                      |  |  |
|      | Program Pelayanan Penanaman Modal  | Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal                                 | 70%  | 75%  | 261.393.203,<br>00   | 75%     | 284.264.455,<br>00   | 80%     | 305.827.957,<br>00   | 80%     | 332.979.280,<br>00   | 85%     | 366.277.208,<br>00   | 85%   | 366.277.208,<br>00   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Teadu Satu Pintu         |  |
|      |  | Rasio Kewirausahaan   |  |  |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |   |                      |  |  |
|      | Program Perencanaan Tenaga Kerja   | Persentase Dokumen RTK yang Dislesaikan   |  | 60%  | 169.292.737,<br>00   | 70%     | 224.763.641,<br>00   | 80%     | 171.504.498,<br>00   | 90%     | 210.571.481,<br>00   | 100%    | 220.116.890,<br>00   | 100%  | 220.116.890,<br>00   | Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi          |  |
|      |  | Indeks Ketahanan Pangan   |  |  |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |   |                      |  |  |
|      | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif                                    | Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi keratif yang                        |  | 30   | Rp1.185.000.         | 35      | Rp1.196.850.         | 40      | Rp1.208.818.         | 45      | Rp1.220.906.         | 50      | Rp1.233.115.         | 50  | Rp1.233.115.         | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                              |  |



| Kode | Misi/ Tujuan/<br>Sasaran/ Program<br>Pembangunan Daerah   | Indikator Kinerja<br>(Tujuan/ Impact/<br>Outcome)   | Kondisi<br>Kinerja<br>Awal<br>RPJMD<br>(Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                        |            |                        |            |                        |            |                        |        |                        |   |                        | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab          |  |
|------|---|---|--|--|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|--------|------------------------|---|------------------------|---|--|
|      |   |   |  | 2022   |                        | 2023       |                        | 2024       |                        | 2025       |                        | 2026   |                        | Kondisi Kinerja pada<br>Akhir Periode RPJMD |                        |   |  |
|      |   |   |  | Target   | Rp                     | Target     | Rp                     | Target     | Rp                     | Target     | Rp                     | Target | Rp                     | Target                                      | Rp                     |   |  |
| 1    | 2   | 3   | 4  | 5  | 6                      | 7          | 8                      | 9          | 10                     | 11         | 12                     | 13     | 14                     | 15  | 16                     | 17  |  |
|      |   | berdaya saing   |  | Perse<br>n                                     | 000,00                 | Perse<br>n | 000,00                 | Perse<br>n | 500,00                 | Perse<br>n | 685,00                 | Persen | 752,00                 | Persen                                      | 752,00                 |   |  |
|      | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual          | Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing                                      |  | 10%  | 1.470.000.00<br>0,00   | 12%        | 1.484.700.00<br>0,00   | 14%        | 1.499.547.00<br>0,00   | 16%        | 1.514.542.47<br>0,00   | 18%    | 1.529.687.89<br>5,00   | 18%   | 1.529.687.89<br>5,00   | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan               |  |
|      | Program Pengembangan UMKM   | Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya  | N/A  | 1  | 844.108.610,<br>00     | 1          | 1.185.659.77<br>1,00   | 1          | 1.200.000.00<br>0,00   | 1          | 1.555.753.05<br>9,00   | 1      | 1.555.753.05<br>9,00   | 5   | 1.555.753.05<br>9,00   | Dinas Perdagangan dan Koperasi, UMKM          |  |
|      | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)                                    | Persentase pertumbuhan wirausaha baru   | N/A  | 10   | 750,000,000            | 10         | 795,000,000            | 10         | 795,000,000            | 10         | 855,000,000            | 10     | 895,000,000            | 10  | 895,000,000            | Dinas Perdagangan dan Koperasi, UMKM          |  |
|      | Program Pemberdayaan Sosial   | Presentase meningkatkan peran lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial      |  | 50%  | 385.800.000,<br>00     | 50%        | 394.380.000,<br>00     | 60%        | 400.000.000,<br>00     | 70%        | 410.000.000,<br>00     | 70%    | 421.000.000,<br>00     | 70%   | 421.000.000,<br>00     | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa |  |
|      |   | Presentase meningkatkan peran perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial |  | 70%  |                        | 70%        |                        | 80%        |                        | 90%        |                        | 90%    |                        | 90%   |                        | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa |  |
|      | Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel                       |   |  |  |                        |            |                        |            |                        |            |                        |        |                        |   |                        |   |  |
|      | Tujuan 5: Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima | Indeks Reformasi Birokrasi  |  |  |                        |            |                        |            |                        |            |                        |        |                        |   |                        |   |  |
|      | Sasaran 5.1: Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)       | Nilai SAKIP   |  |  |                        |            |                        |            |                        |            |                        |        |                        |   |                        |   |  |
|      | Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah  | Peningkatan kualitas dan cakupan pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah          | 83   | 85,71  | Rp1.380.307.<br>330,00 | 88,57      | Rp1.399.145.<br>180,00 | 91,42      | Rp1.468.785.<br>728,00 | 94,28      | Rp1.551.472.<br>452,00 | 97,14  | Rp1.613.294.<br>394,00 | 97,14                                       | Rp1.613.294.<br>394,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah          |  |
|      |   | Tingkat Maturitas SPIP  |  |  |                        |            |                        |            |                        |            |                        |        |                        |   |                        |   |  |
|      | Program Penyelenggaraan Pengawasan  | Nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)  | 66,73  | 71,5   | 2.905.000.00<br>0,00   | 76,5       | 3.045.750.00<br>0,00   | 81,5       | 3.208.250.00<br>0,00   | 83,5       | 3.317.000.00<br>0,00   | 85     | 3.415.000.00<br>0,00   | 85  | 3.415.000.00<br>0,00   | Inspektorat                                   |  |



| Kode | Misi/ Tujuan/<br>Sasaran/ Program<br>Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja<br>(Tujuan/ Impact/<br>Outcome)   | Kondisi<br>Kinerja<br>Awal<br>RPJMD<br>(Tahun 0)  | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |                      |                  |                      |                  |                      |                      |                      |                     |   |                     | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |   |
|------|---|---|---|--|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---|---------------------|--------------------------------------|---|
|      |   |   |   | 2022   |                 | 2023                 |                  | 2024                 |                  | 2025                 |                      | 2026                 |                     | Kondisi Kinerja pada<br>Akhir Periode RPJMD |                     |                                      |   |
|      |   |   |   | Target   | Rp              | Target               | Rp               | Target               | Rp               | Target               | Rp                   | Target               | Rp                  | Target                                      | Rp                  |                                      |   |
| 1    | 2   | 3   | 4   | 5  | 6               | 7                    | 8                | 9                    | 10               | 11                   | 12                   | 13                   | 14                  | 15  | 16                  | 17                                   |   |
|      |   | OPD   |   |  |                 |                      |                  |                      |                  |                      |                      |                      |                     |   |                     |                                      |   |
|      |   | Nilai rata-rata maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) OPD  | 3,03  | 3,05   |                 | 3,1                  |                  | 3,15                 |                  | 3,25                 |                      | 3,3                  |                     | 3,3   |                     | Inspektorat                          |   |
|      |   | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi   | Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PPMRB)   | 52.06  | 62.00           | 1,465,341,686.00     | 65.00            | 1,543,508,770.30     | 72.00            | 1,592,000,000.00     | 75.00                | 1,655,000,000.00     | 82.00               | 1,667,000,000.00                            | 82.00               | 1,667,000,000.00                     | Inspektorat                             |
|      |   | Jumlah Usulan Unit Kerja Zona Integritas  | 4 Unit Kerja  | 4 Unit Kerja                                   |                 | 4 Unit Kerja         |                  | 4 Unit Kerja         |                  | 4 Unit Kerja         |                      | 4 Unit Kerja         |                     | 4 Unit Kerja                                |                     |                                      |   |
|      |   | Indeks SPBE   |   |  |                 |                      |                  |                      |                  |                      |                      |                      |                     |   |                     |                                      |   |
|      |   | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika  | tingkat kematangan tata kelola spbe   |  | rintisan<br>3,1 | 1.630.000.00<br>0,00 | terkelola<br>3,2 | 1.575.000.00<br>0,00 | terkelola<br>3,3 | 1.612.000.00<br>0,00 | terstardisasi<br>3,4 | 1.980.000.00<br>0,00 | Terintegrasi<br>3,5 | 1.970.000.00<br>0,00                        | Terintegrasi<br>3,5 | 1.970.000.00<br>0,00                 | Dinas Komunikasi dan Informatika        |
|      |   | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah  |   |  |                 |                      |                  |                      |                  |                      |                      |                      |                     |   |                     |                                      |   |
|      |   | Program Pengelolaan Keuangan Daerah   | Persentase OPD yang menyampaikan dokumen keuangan dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan   | 80%  | 85%             | 309.718.970.000,00   | 90%              | 318.037.404.000      | 100%             | 346.943.845.500      | 100                  | 378.834.709.750,00   | 100                 | 414.059.070.000,00                          | 100%                | 414.059.070.000,00                   | Badan pengelola Keuangan Daerah         |
|      |   | Indeks Profesionalitas ASN  |   |  |                 |                      |                  |                      |                  |                      |                      |                      |                     |   |                     |                                      |   |
|      |   | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia  | Persentase ASN yang mendapatkan sertifikat dalam pengembangan kompetensi jabatan fungsional kepemimpinan, manajerial dan prajabatan | 100%   | 100%            | 4.373.703.00<br>0,00 | 100%             | 4,517,624,00<br>0.00 | 100%             | 4,499,475,00<br>0.00 | 100%                 | 4,594,260,00<br>0.00 | 100%                | 4,630,521,00<br>0.00                        | 100%                | 4,630,521,00<br>0.00                 | Badan Kepegawai dan Sumber Daya Manusia |
|      |   | Sasaran 5.2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif   | Indeks Pelayanan Publik   |  |                 |                      |                  |                      |                  |                      |                      |                      |                     |   |                     |                                      |   |
|      |   | Program Pencatatan Sipil  | Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil   |  | 100             | 232.846.775,00       | 100              | 234.259.614,00       | 100              | 239.482.655,00       | 100                  | 245.684.160,00       | 100                 | 250.320.805,00                              | 100                 | 250.320.805,00                       | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|      |   | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan   | Persentase data kependudukan yang dikelola secara elektronik  |  | 100             | 151.453.624,00       | 100              | 152.348.422,00       | 100              | 155.656.348,00       | 100                  | 159.583.968,00       | 100                 | 162.520.510,00                              | 100                 | 162.520.510,00                       | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|      |   | Misi 6: Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan |   |  |                 |                      |                  |                      |                  |                      |                      |                      |                     |   |                     |                                      |   |
|      |   | Tujuan 6: Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan infrastruktur yang tangguh bencana                               | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur   |  |                 |                      |                  |                      |                  |                      |                      |                      |                     |   |                     |                                      |   |
|      |   | Sasaran 6.1: Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah   | Indeks Konektifitas Wilayah   |  |                 |                      |                  |                      |                  |                      |                      |                      |                     |   |                     |                                      |   |



| Kode | Misi/ Tujuan/<br>Sasaran/ Program<br>Pembangunan Daerah   | Indikator Kinerja<br>(Tujuan/ Impact/<br>Outcome)  | Kondisi<br>Kinerja<br>Awal<br>RPJMD<br>(Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |         |                   |         |                   |         |                   |         |                   |   |                   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab          |  |
|------|---|--|--|--|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---|-------------------|---|--|
|      |   |  |  | 2022   |                   | 2023    |                   | 2024    |                   | 2025    |                   | 2026    |                   | Kondisi Kinerja pada<br>Akhir Periode RPJMD |                   |   |  |
|      |   |  |  | Target   | Rp                | Target  | Rp                | Target  | Rp                | Target  | Rp                | Target  | Rp                | Target                                      | Rp                |   |  |
| 1    | 2   | 3  | 4  | 5  | 6                 | 7       | 8                 | 9       | 10                | 11      | 12                | 13      | 14                | 15  | 16                | 17  |  |
|      | dan konektivitas wilayah  |  |  |  |                   |         |                   |         |                   |         |                   |         |                   |   |                   |   |  |
|      | Program Penyelenggaraan Jalan   | Presentase Jalan Dalam Kondisi Mantap  | 74.50%   | 78,50 %  | 39.401.733,8 19   | 82,50 % | 39.985.707,1 81   | 87,50 % | 42.144.564,1 74   | 89,50 % | 44.707.852,5 99   | 95,40 % | 46.624.332,8 11   | 95,40 %                                     | 46.624.332,8 11   | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang           |  |
|      |   | Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur   |  |  |                   |         |                   |         |                   |         |                   |         |                   |   |                   |   |  |
|      | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LlaJ)   | Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LlaJ)                                     |  | 55%  | 5.767.031,00 0,00 | 60%     | 5.010.590,00 0,00 | 65%     | 5.345.580,00 0,00 | 70%     | 6.081.826,00 0,00 | 75%     | 6.034.642,00 0,00 | 75%   | 6.034.642,00 0,00 | Dinas Perhubungan                             |  |
|      | Sasaran 6.2: Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah   | Indeks Risiko Bencana  |  |  |                   |         |                   |         |                   |         |                   |         |                   |   |                   |   |  |
|      | Program Penanggulangan Bencana  | Persentase Penanggulangan Bencana  |  | 100%   | 1.798.271,50 7,00 | 100%    | 2.325.580,71 5,00 | 100%    | 1.954.464,67 5,00 | 100%    | 2.273.933,50 4,00 | 100%    | 2.048.494,62 6,00 | 100%  | 2.048.494,62 6,00 | BPBD  |  |
|      | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran                               | Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran         |  | 100%   | 941.804.734,00    | 100%    | 1.302.875,59 2,00 | 100%    | 1.806.579,49 4,00 | 100%    | 1.239.349,72 0,00 | 100%    | 1.128.059,35 8,00 | 100%  | 1.128.059,35 8,00 | BPBD  |  |
|      |   | Indeks Kapasitas Daerah  |  |  |                   |         |                   |         |                   |         |                   |         |                   |   |                   |   |  |
|      | Program Penanganan Bencana  | Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup |  | 100%   | 666.000.000,00    | 100%    | 1.192.000.00 0,00 | 100%    | 1.302.000.00 0,00 | 100%    | 1.397.000.00 0,00 | 100%    | 1.495.500.00 0,00 | 100%  | 1.495.500.00 0,00 | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa |  |
|      | Sasaran 6.3: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup   | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup   |  |  |                   |         |                   |         |                   |         |                   |         |                   |   |                   |   |  |
|      | Program Perencanaan Lingkungan Hidup  | Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Telah Dimiliki/Disusun                          | N/A  | 42,86 %  | 629.000.000       | 57,14 % | 510.000.000       | 78,57 % | 460.000.000       | 92,86 % | 410.000.000       | 100%    | 410.000.000       | 100%  | 410.000.000       | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan         |  |
|      | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) | Persentase Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan Yang Melaksanakan Komitmen Izin Lingkungan                 | N/A  | 50,00 %  | 55.000.000        | 56,67 % | 105.000.000       | 66,67 % | 65.000.000        | 73,33 % | 95.000.000        | 83,33 % | 65.000.000        | 83,33 %                                     | 65.000.000        | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan         |  |

(Sumber:

Diolah

Penyusun,

2021)

# *RPJMD*

**RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN**

---

2021 - 2026

# **BAB VII**

---

**KERANGKA PENDANAAN  
PEMBANGUNAN DAN  
PROGRAM PERANGKAT  
DAERAH**



## **BAB VII**

### **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Untuk menggambarkan keterkaitan program dalam mencapai sasaran pembangunan, program pembangunan daerah dalam RPJMD disusun melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Dalam merumuskan program pembangunan Daerah tersebut dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menjabarkan secara teknis upaya mewujudkan sasaran RPJMD. Program pembangunan yang dimaksud yaitu program yang sifatnya strategis menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan.

Untuk mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih, dirumuskan dalam program dan kegiatan perangkat daerah berdasarkan prioritas yang disertai dengan pendanaan/pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tabel 7.1 berikut ini merupakan kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2021 – 2026:



**Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah 2022 – 2026 Kabupaten Pangandaran**

| Kode  | Kapasitas Belanja           | Proyeksi             |                      |                      |                      |                      |
|-------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|       |                             | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 |
| 2     | Belanja Daerah              | 1.511.345.161.785,54 | 1.754.312.446.883,69 | 1.811.936.384.876,45 | 1.913.928.921.795,04 | 2.005.452.715.839,99 |
| 2.1   | Belanja Operasi             | 726.445.161.785,54   | 976.510.359.774,69   | 1.030.049.178.972,78 | 1.085.163.622.032,03 | 1.149.537.994.746,72 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai             | 407.943.945.273,72   | 432.461.376.384,33   | 458.582.043.517,94   | 489.307.040.433,64   | 523.558.533.264,00   |
| 2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa     | 270.501.216.511,82   | 443.163.883.390,36   | 517.493.946.004,84   | 538.267.188.455,24   | 564.416.400.212,70   |
| 2.1.3 | Belanja Bunga               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.1.4 | Belanja Subsidi             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.1.5 | Belanja Hibah               | 45.000.000.000,00    | 97.704.500.000,00    | 50.600.163.150,00    | 53.990.374.081,05    | 57.715.709.892,64    |
| 2.1.6 | Belanja Bantuan Sosial      | 3.000.000.000,00     | 3.180.600.000,00     | 3.373.026.300,00     | 3.599.019.062,10     | 3.847.351.377,38     |
| 2.2.  | Belanja Modal               | 581.900.000.000,00   | 562.692.087.109,00   | 553.901.209.903,67   | 586.097.978.343,01   | 596.828.007.115,31   |
| 2.2.1 | Belanja Tanah               | 5.000.000.000,00     | 5.300.000.000,00     | 5.620.650.000,00     | 5.997.233.550,00     | 6.415.840.451,79     |
| 2.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 150.000.000.000,00   | 159.000.000.000,00   | 168.555.900.000,00   | 179.680.589.400,00   | 192.078.550.068,60   |
| 2.2.3 | Belanja Bangunan dan Gedung | 276.400.000.000,00   | 238.862.087.109,00   | 210.590.900.903,67   | 220.123.006.340,01   | 135.531.616.783,81   |
| 2.2.4 | Belanja Jalan               | 150.000.000.000,00   | 159.000.000.000,00   | 168.571.800.000,00   | 179.697.538.800,00   | 262.160.416.840,40   |
| 2.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya  | 500.000.000,00       | 530.000.000,00       | 561.959.000,00       | 599.610.253,00       | 641.582.970,71       |
| 2.2.6 | Belanja Aset Lainnya        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.3   | Belanja Tidak Terduga       | 7.000.000.000,00     | 7.350.000.000,00     | 7.732.200.000,00     | 8.142.006.600,00     | 8.589.816.963,00     |
| 2.4   | Belanja Transfer            | 196.000.000.000,00   | 207.760.000.000,00   | 220.253.796.000,00   | 234.525.314.820,00   | 250.496.897.014,96   |
| 2.4.1 | Belanja Bagi Hasil          | 10.000.000.000,00    | 10.600.000.000,00    | 11.244.480.000,00    | 11.930.393.280,00    | 12.765.520.810,24    |
| 2.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan    | 186.000.000.000,00   | 197.160.000.000,00   | 209.009.316.000,00   | 222.594.921.540,00   | 237.731.376.204,72   |

(Sumber: BPKDDiolah, 2021)



Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Pangandaran berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Sebagai wujud kebutuhan pendanaan, adapun pagu indikatif yang mana merupakan jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Propinsi, serta sumber-sumber pendanaan lainnya). Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra Perangkat Daerah. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



**Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 – 2026**

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Data Kinerja Awal RPJMD (2021) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                           |  |        |                        |        |                        |        |                        |        |                        |   |                        |        |  |
|------|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|--|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|---|------------------------|--------|--|
|      |  |                                     |                                | 2022  |  | 2023   |                        | 2024   |                        | 2025   |                        | 2026   |                        | Kondisi Kinerja pada akhir periode (2026) |                        |        |  |
|      |  |                                     |                                | Target  | Rp.  | Target | Rp.                    | Target | Rp.                    | Target | Rp.                    | Target | Rp.                    | Target                                    | Rp.                    |        |  |
| 1    | 2  | 3                                   | 4                              | 5   | 6  | 7      | 8                      | 9      | 10                     | 11     | 12                     | 13     | 14                     | 13  | 14                     | 17     |  |
|      | Urusan Wajib   |                                     |                                |   |  |        |                        |        |                        |        |                        |        |                        |   |                        |        |  |
|      | Terkait Pelayanan Dasar                                      |                                     |                                |   |  |        |                        |        |                        |        |                        |        |                        |   |                        |        |  |
|      | Pendidikan   |                                     |                                |   |  |        |                        |        |                        |        |                        |        |                        |   |                        |        |  |
| X    | X  | X                                   | 1                              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi                                    | 81%    | 14.438.263,71<br>9,00  | 82%    | 14.635.259,289,<br>00  | 83%    | 14.835.836,544,<br>00  | 84%    | 14.896.036,417<br>,00  | 85%                                       | 15.062.310,79<br>6,00  | 85%    | Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga |
|      |  |                                     |                                |   | Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik                                     | 91%    |                        | 92%    |                        | 93%    |                        | 94%    |                        | 95%                                       |                        | 95%    |  |
|      |  |                                     |                                |   | Persentase peningkatan kompetensi aparatur   | 91%    |                        | 92%    |                        | 93%    |                        | 94%    |                        | 95%                                       |                        | 95%    |  |
|      |  |                                     |                                |   | Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas                         | 92%    |                        | 93%    |                        | 94%    |                        | 95%    |                        | 96%                                       |                        | 96%    |  |
| 1    | 1  | 2                                   |                                | Program Pengelolaan Pendidikan                              | Persentase Layanan Pendidikan Non Formal Dan Informal                                | 80%    | 219.354.737.<br>734,00 | 82%    | 222.699.281,05<br>7,00 | 84%    | 235.866.641,46<br>2,00 | 86%    | 252.878.609,95<br>0,00 | 88%                                       | 264.468.334,1<br>83,00 | 88%    | Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga |
|      |  |                                     |                                |   | Persentase Pemenuhan Spm Pendidikan  | 72%    |                        | 74%    |                        | 76%    |                        | 78%    |                        | 80%                                       |                        | 80%    |  |
|      |  |                                     |                                |   | Persentase Pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Pada Masa Dan Pasca Pandemi | 86,60% |                        | 89,60% |                        | 92,85% |                        | 96,35% |                        | 100%                                      |                        | 100%   |  |
|      |  |                                     |                                |   | Persentase Pelaksanaan Sistem Pencapaian Mutu Pendidikan Pada Masa Dan Pasca Pandemi | 84%    |                        | 87%    |                        | 90,25% |                        | 93,75% |                        | 97,50%                                    |                        | 97,50% |  |
|      |  |                                     |                                |   | Persentase Penerapan Pendidikan Berbasis Pariwisata                                  | 86,50% |                        | 89,50% |                        | 92,75% |                        | 96,25% |                        | 100%                                      |                        | 100%   |  |
|      |  |                                     |                                |   | Persentase Tingkat Budi Pekerti Peserta Didik  | 84,25% |                        | 86,75% |                        | 89,50% |                        | 92,50% |                        | 95,75%                                    |                        | 95,75% |  |



| Kode |   | Bidang Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program Prioritas<br>Pembangunan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome)                                      | Data<br>Kinerja<br>Awal<br>RPJMD<br>(2021)  | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                        |  |                    |  |                 |  |
|------|---|---|---|---|--------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|------------------------|--|--------------------|--|-----------------|--|
|      |   |   |   |   | 2022                                 |                    | 2023   |                    | 2024   |                    | 2025   |                    | 2026   |                        | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode (2026) |                    |  |                 |  |
|      |   |   |   |   | Target                               | Rp.                | Target | Rp.                | Target | Rp.                | Target | Rp.                | Target | Rp.                    | Target                                       | Rp.                |  |                 |  |
| 1    | 2 | 3   | 4   | 5   | 6                                    | 7                  | 8      | 9                  | 10     | 11                 | 12     | 13                 | 14     | 15                     | 16   | 17                 |  |                 |  |
| 1    | 1 | 3   | Program Pengembangan Kurikulum  | persentase Capaian Standar Nasional Pendidikan Untuk Standar Isi                        | 50%                                  | 4.600.000,00       | 52%    | 4.600.000,00       | 54%    | 5.120.000,00       | 56%    | 5.100.000,00       | 58%    | 5.400.000,00           | 58%  | 5.400.000,00       | Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga |                 |  |
| 1    | 1 | 4   | Program Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan                                  | persentase Capaian Standar Nasional Pendidikan Untuk Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan | 50%                                  | 37.421.800,00      | 52%    | 37.421.800,00      | 54%    | 37.421.800,00      | 56%    | 37.421.800,00      | 58%    | 37.421.800,00          | 58%  | 37.421.800,00      | Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga |                 |  |
| 1    | 1 | 6   | Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra                                      | persentase Layanan Literasi Siswa   | 60%                                  | 1.005.000,00       | 61%    | 1.005.000,00       | 62%    | 1.005.000,00       | 63%    | 1.005.000,00       | 64%    | 1.005.000,00           | 64%  | 1.005.000,00       | Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga |                 |  |
|      |   |   | Kesehatan   |   |                                      |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                        |  |                    |  |                 |  |
| 1    | 2 | 2   | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1. Persentase sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang terpenuhi dan layak fungsi  | 1. 90%                               |                    | 1. 90% |                    | 1. 90% |                    | 1. 90% |                    | 1. 90% |                        | 1. 90%                                       |                    |  | Dinas Kesehatan |  |
|      |   |   |   | 2. Persentase pelayanan kesehatan masyarakat yang terpenuhi                             | 2. 90%                               | 184.862.337,529,00 | 2. 90% | 181.255.392,751,00 | 2. 90% | 195.808.046,749,00 | 2. 90% | 211.960.930,261,10 | 2. 90% | 229.846.747,747,879,11 | 2. 90%                                       | 229.846.747,879,11 |  |                 |  |
|      |   |   |   | 3. Persentase sistem informasi yang terkelola   | 3. 90%                               |                    | 3. 90% |                    | 3. 90% |                    | 3. 90% |                    | 3. 90% |                        | 3. 90%                                       |                    |  |                 |  |
|      |   |   |   | 4. Persentase izin yang diterbitkan   | 4. 90%                               |                    | 4. 90% |                    | 4. 90% |                    | 4. 90% |                    | 4. 90% |                        | 4. 90%                                       |                    |  |                 |  |
| 1    | 2 | 3   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | Percentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat                                   | 90%                                  | 5.739.011,00       | 90%    | 6.949.543.720,0    | 90%    | 6.918.498.420,0    | 90%    | 7.618.407.550,0    | 90%    | 8.389.919.935,00       | 90%  | 8.389.919.935,00   | Dinas Kesehatan                            |                 |  |
| 1    | 2 | 4   | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman                 | Percentase farmasi, alat kesehatan yang terpenuhi                                       | 90%                                  | 457.884.414,00     | 90%    | 449.120.499,00     | 90%    | 576.529.428        | 90%    | 545.866.624,00     | 90%    | 603.690.392,0          | 90%  | 603.690.392,00     | Dinas Kesehatan                            |                 |  |
| 1    | 2 | 5   | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                            | Percentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Kesehatan yang Diberdayakan         | 90%                                  | 694.441.698,00     | 90%    | 291.918.000,00     | 90%    | 321.509.800,00     | 90%    | 353.260.000,00     | 90%    | 389.286.000,0          | 90%  | 389.286.000,00     | Dinas Kesehatan                            |                 |  |
| X    | X | 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                 | 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi                                    | 1. 90%                               | 81.411.920,00      | 1. 90% | 321.465.131,613,00 | 1. 90% | 327.713.338,774,00 | 1. 90% | 333.180.366,652,00 | 1. 90% | 328.568.372,985,00     | 1. 90%                                       | 328.568.372,985,00 | Dinas Kesehatan                            |                 |  |



| Kode |   | Bidang Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program Prioritas<br>Pembangunan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome)  | Data<br>Kinerja<br>Awal<br>RPJMD<br>(2021)   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                      |                    |                      |                |                      |                |                      |                |                       |  |                  |  |
|------|---|---|---|--|--------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|--|------------------|--|
|      |   |   |   |  | 2022                                 |                      | 2023               |                      | 2024           |                      | 2025           |                      | 2026           |                       | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode (2026) |                  |  |
|      |   |   |   |  | Target                               | Rp.                  | Target             | Rp.                  | Target         | Rp.                  | Target         | Rp.                  | Target         | Rp.                   | Target                                       | Rp.              |  |
| 1    | 2 | 3   | 4   | 5  | 6                                    | 7                    | 8                  | 9                    | 10             | 11                   | 12             | 13                   | 14             | 13                    | 14   | 17               |  |
|      |   |   | 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik<br><br>3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur<br><br>4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas | 2. 90%<br><br>3. 90%<br><br>4. 90%   |                                      |                      |                    |                      |                |                      |                |                      |                |                       |  |                  |  |
| X    | X | 1   |   |  |                                      |                      |                    |                      |                |                      |                |                      |                |                       |  |                  |  |
|      |   |   |   |  |                                      |                      |                    |                      |                |                      |                |                      |                |                       |  |                  |  |
|      |   |   |   |  |                                      |                      |                    |                      |                |                      |                |                      |                |                       |  |                  |  |
|      |   |   | Pekerjaan Umum Dan<br>Penataan Ruang  |  |                                      |                      |                    |                      |                |                      |                |                      |                |                       |  |                  |  |
| X    | X | 1   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase sarana<br>prasarana kantor yang<br>terpenuhi<br><br>Persentase laporan<br>keuangan dengan kualitas<br>baik<br><br>Persentase peningkatan<br>kompetensi aparatur<br><br>Persentase perencanaan<br>dan evaluasi kinerja yang<br>berkualitas | 80%                                  | 6.044.773.57<br>7,54 | 98,54%             | 6.134.363.207,4<br>4 | 94,88%         | 6.465.561.874,1<br>6 | 94,27%         | 6.858.805.943,<br>43 | 95,89%         | 7.152.820.643,<br>,38 | 95,89%                                       | 7.152.820.643,38 | Dinas Pekerjaan Umum dan<br>Tata Ruang |
| 1    | 3 | 2   |   |  |                                      |                      |                    |                      |                |                      |                |                      |                |                       |  |                  |  |
| 1    | 3 | 3   |   |  |                                      |                      |                    |                      |                |                      |                |                      |                |                       |  |                  |  |
| 1    | 3 | 10  |   |  |                                      |                      |                    |                      |                |                      |                |                      |                |                       |  |                  |  |
| 1    | 3 | 4   | Program Pengelolaan<br>Sumberdaya Air (SDA)   | Persentase Jaringan Irigasi<br>dalam Kondisi Baik  | 67,57 %                              | 69,57%               | 30.700.000,0<br>00 | 70,57%               | 24.900.000,000 | 71,57%               | 29.900.000,000 | 72,57%               | 29.900.000,000 | 72,57%                | 29.900.000,0<br>0                            | 73,57%           | 29.900.000,000                         |
| 1    | 3 | 5   | Program Pengelolaan Dan<br>Pengembangan Sistem<br>Penyediaan Air Minum  | Cakupan Layanan Teknis<br>Air Minum Dan Air Bersih   | 70,00 %                              | 72%                  | 3.177.559,17<br>9  | 73%                  | 3.224.653,805  | 74%                  | 3.398.755,175  | 75%                  | 3.605.471,984  | 76%                   | 3.760.026,840                                | 76%              | 3.760.026,840                          |
| 1    | 3 | 6   | Program Pengelolaan Dan<br>Pengembangan Sistem<br>Drainase  | Presentase Jalan Dalam<br>Kondisi Mantap   | 74,50 %                              | 78,50%               | 39.401.733,8<br>19 | 82,50%               | 39.985.707,181 | 87,50%               | 42.144.564,174 | 89,50%               | 44.707.852,599 | 95,40%                | 46.624.332,81<br>1                           | 95,40%           | 46.624.332,811                         |
| 1    | 3 | 7   | Program Pengelolaan Dan<br>Pengembangan Sistem<br>Air Limbah  | Persentase Pemenuhan<br>Kebutuhan Sarana<br>Persampahan  | 15%                                  | 38%                  | 1.906.535,50<br>7  | 62%                  | 1.934.792,283  | 85%                  | 2.039.253,105  | 100%                 | 2.163.283,190  | 100%                  | 2.256.016,104                                | 100%             | 2.256.016,104                          |
| 1    | 3 | 8   | Program Pengelolaan Dan<br>Pengembangan Sistem<br>Drainase  | Cakupan ketersediaan<br>layanan air limbah   | 53,60 %                              | 56,00%               | 2.542.047,34<br>3  | 60,00%               | 2.579.723,044  | 60,50%               | 2.719.004,140  | 61,00%               | 2.884.377,587  | 61,50%                | 3.008.021,472                                | 61,50%           | 3.008.021,472                          |
| 1    | 3 | 9   | Program Pengelolaan Dan<br>Pengembangan Sistem<br>Drainase  | Proporsi Drainase Dan<br>Gorong - Gorong<br>Kabupaten Dalam Kondisi<br>Baik  | 50,0Z<br>0%                          | 53,00%               | 1.906.535,507      | 56,00%               | 1.934.792,283  | 59,00%               | 2.039.253,105  | 62,00%               | 2.163.283,190  | 65,00%                | 2.256.016,104                                | 65,00%           | 2.256.016,104                          |



| Kode |   | Bidang Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program Prioritas<br>Pembangunan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome) | Data<br>Kinerja<br>Awal<br>RPJMD<br>(2021)  | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab  |         |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |  |                  |        |   |   |
|------|---|---|--|---|---|---------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--|------------------|--------|---|---|
|      |   |   |  |   | 2022  |         | 2023   |                  | 2024   |                  | 2025   |                  | 2026   |                  | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode (2026) |                  |        |   |   |
|      |   |   |  |   | Target  | Rp.     | Target | Rp.              | Target | Rp.              | Target | Rp.              | Target | Rp.              | Target                                       | Rp.              |        |   |   |
| 1    | 3 | 7   | 1                                      | 2   | 3   | 4       | 5      | 6                | 7      | 8                | 9      | 10               | 11     | 12               | 13   | 14               | 17     |   |   |
| 1    | 3 | 7   |  | Program Pengembangan Permukiman             | Persentase Infrastruktur Kawasan Permukiman Dalam Kondisi Baik  | n/a     | 56,00% | 3.177.559.179    | 59,00% | 3.224.653.805    | 62,00% | 3.398.755.175    | 65,00% | 3.605.471.984    | 68,00%                                       | 3.760.026.840    | 68,00% | 3.760.026.840                                 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang           |
| 1    | 3 | 8   |  | Program Penataan Bangunan Gedung            | Persentase Sarana Pemerintahan Yang Terbangun   | 6%      | 28,50% | 101.681.893.726  | 42,80% | 103.188.921.757  | 57,10% | 108.760.165.610  | 71,40% | 115.375.103.481  | 85,70%                                       | 120.320.858.866  | 85,70% | 120.320.858.866                               | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang           |
| 1    | 3 | 9   |  | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | Persentase Penerapan Arsitektur Kawasan Khas Pangandaran Pada Bangunan Pemerintah                                     | 0,00 %  | 1,00%  | 1.271.023.672    | 3,00%  | 1.289.861.522    | 6,00%  | 1.359.502.070    | 8,00%  | 1.442.188.794    | 10,00%                                       | 1.504.010.736    | 10,00% | 1.504.010.736                                 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang           |
| 1    | 3 | 12  |  | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang      | Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah   | 35,04 % | 40,04% | 635.511.836      | 42,54% | 644.930.761      | 45,04% | 679.751.035      | 47,54% | 721.094.397      | 50,00%                                       | 752.005.368      | 50,00% | 752.005.368                                   | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang           |
|      |   |   |  | Sosial                                      |   |         |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |  |                  |        |   |   |
|      |   |   |  | Program Pemberdayaan Sosial                 | Presentase meningkatkan peran lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial      |         | 50%    |                  | 60%    |                  | 70%    |                  | 75%    |                  | 80%  |                  | 80%    | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa |   |
| 1    | 6 | 2   |  |   | Presentase meningkatkan peran perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial |         | 70%    | 385.800.000,00   | 80%    | 394.380.000,00   | 90%    | 400.000.000,00   | 95%    | 410.000.000,00   | 100%   | 421.000.000,00   | 90%    | 421.000.000,00                                | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| 1    | 6 | 4   |  | Program Rehabilitasi Sosial                 | Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial  | 0,2%    | 8%     | 2.799.427.585,00 | 8%     | 2.278.191.631,00 | 8%     | 2.359.450.059,00 | 8%     | 2.494.720.175,90 | 8%   | 2.542.923.526,99 | 8%     | 2.542.923.526,99                              | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| 1    | 6 | 5   |  | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial     | Presentase Keluarga Miskin yang Meningkat Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik             |         | 10%    | 751.560.000,00   | 10%    | 797.916.000,00   | 10%    | 847.707.600,00   | 10%    | 901.278.360,00   | 10%  | 959.006.196,00   | 10%    | 959.006.196,00                                | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| 1    | 6 | 6   |  | Program Penanganan Bencana                  | Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup                  |         | 100%   | 666.000.000,00   | 100%   | 1.192.000.000,00 | 100%   | 1.302.000.000,00 | 100%   | 1.397.000.000,00 | 100%   | 1.495.500.000,00 | 100%   | 1.495.500.000,00                              | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa |



| Kode |   |   | Bidang Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program Prioritas<br>Pembangunan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome)                        | Data<br>Kinerja<br>Awal<br>RPJMD<br>(2021)  | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |      |  |      |   |                            |
|------|---|---|---|---|---|--------------------------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|--|------|---|----------------------------|
|      |   |   |   |   |   | 2022                                 |      | 2023             |      | 2024             |      | 2025             |      | 2026             |      | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode (2026) |      |   |                            |
|      |   |   |   |   |   | Target                               | Rp.  | Target           | Rp.  | Target           | Rp.  | Target           | Rp.  | Target           | Rp.  | Target                                       | Rp.  |   |                            |
| 1    | 6 | 7 | 8   | 9   | 10  | 11                                   | 12   | 13               | 14   | 15               | 16   | 17               | 18   | 19               | 20   | 21   | 22   |   |                            |
| 1    | 6 | 7 | 8   | 9   | 10  | 11                                   | 12   | 13               | 14   | 15               | 16   | 17               | 18   | 19               | 20   | 21   | 22   |   |                            |
|      |   |   |   | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                      | Persentase Taman Makam Pahlawan yang di Kelola  | 90                                   | 100% | 100.000.000,00   | 100% | 110.000.000,00   | 100% | 121.000.000,00   | 100% | 133.100.000,00   | 100% | 146.410.000,00                               | 100% | 146.410.000,00                                |                            |
|      |   |   |   | Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |   |                                      |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |      |  |      | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa |                            |
| 1    | 5 | 2 | 3   | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum          | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)  | n.a                                  | 100  | 5.906.901.962,00 | 100  | 5.965.000.000,00 | 100  | 6.175.000.000,00 | 100  | 6.495.600.000,00 | 100  | 6.695.000.000,00                             | 100  | 6.695.000.000,00                              |                            |
| X    | X | X | 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi   | n.a                                  | 100% | 3.615.136.529,00 | 100% | 3.655.442.802,00 | 100% | 3.809.227.946,00 | 100% | 3.920.563.113,00 | 100% | 4.044.105.777,00                             | 100% | 4.044.105.777,00                              | Satuan Polisi Pamong Praja |
|      |   |   |   |   | Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik  | n.a                                  | 100% |                  | 100% |                  | 100% |                  | 100% |                  | 100% |  | 100% | Satuan Polisi Pamong Praja                    |                            |
|      |   |   |   |   | Persentase peningkatan kompetensi aparatur  | n.a                                  | 100% |                  | 100% |                  | 100% |                  | 100% |                  | 100% |  | 100% | Satuan Polisi Pamong Praja                    |                            |
|      |   |   |   |   | Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas  | n.a                                  | 100% |                  | 100% |                  | 100% |                  | 100% |                  | 100% |  | 100% | Satuan Polisi Pamong Praja                    |                            |
| X    | X | X | 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota   | 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi<br>2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik<br>3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur<br>4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas |                                      | 100% | 4.850.729.864,00 | 100% | 4.018.448.459,00 | 100% | 4.093.248.459,00 | 100% | 4.587.248.459,00 | 100% | 5.108.081.943,00                             | 100% | 5.108.081.943,00                              | BPBD                       |
| 1    | 5 | 3 | 4   | Program Penanggulangan Bencana                                | Persentase Penanggulangan Bencana   |                                      | 100% | 1.798.271.507,00 | 100% | 2.325.580.715,00 | 100% | 1.954.464.675,00 | 100% | 2.273.933.504,00 | 100% | 2.048.494.626,00                             | 100% | 2.048.494.626,00                              | BPBD                       |



| Kode |   | Bidang Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program Prioritas<br>Pembangunan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome)  | Data<br>Kinerja<br>Awal<br>RPJMD<br>(2021)   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                |                 |                 |               |                 |               |                |                 |               |  |                  |   |  |                  |  |
|------|---|---|---|--|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|--|------------------|---|--|------------------|--|
|      |   |   |   |  | 2022                                 |                | 2023            |                 | 2024          |                 | 2025          |                | 2026            |               | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode (2026) |                  |   |  |                  |  |
|      |   |   |   |  | Target                               | Rp.            | Target          | Rp.             | Target        | Rp.             | Target        | Rp.            | Target          | Rp.           | Target                                       | Rp.              |   |  |                  |  |
| 1    | 2 | 3   | 4   | 5  | 6                                    | 7              | 8               | 9               | 10            | 11              | 12            | 13             | 14              | 13            | 14   | 17               |   |  |                  |  |
| 1    | 5 | 4   | Program Pencegahan,<br>Penanggulangan,<br>Penyelamatan Kebakaran<br>Dan Penyelamatan Non<br>Kebakaran | Persentase Pencegahan,<br>Penanggulangan,<br>Penyelamatan Kebakaran<br>Dan Penyelamatan Non<br>Kebakaran | 100%                                 | 941.804.734,00 | 100%            | 1.302.875.592,0 | 100%          | 1.806.579.494,0 | 100%          | 1.239.349.720, | 100%            | 1.128.059.358 | 100%   | 1.128.059.358,00 | BPBD  |  |                  |  |
|      |   |   | <b>Perumahan Dan Kawasan<br/>Permukiman</b>   |  |                                      |                |                 |                 |               |                 |               |                |                 |               |  |                  |   |  |                  |  |
| 1    | 4 | 3   | Program Kawasan<br>Permukiman   | Persentase Rumah Tidak<br>Layak Huni   | 27%                                  | 26,39%         | 11.439.213.044, | 00              | 26,14%        | 11.608.753.698, | 00            | 25,89%         | 12.235.518.631, | 00            | 25,64%                                       | 12.979.699.142   | ,00   | 25,39%   | 13.536.096.622,0 | 0 Dinas Pekerjaan Umum dan<br>Tata Ruang |
| 1    | 4 | 2   | Program Pengembangan<br>Perumahan   | Jumlah Rumah Korban<br>Bencana yang ditangani  | 0,00<br>%                            | 50             | 1.250.000.000   | 50              | 1.250.000.000 | 50              | 1.250.000.000 | 50             | 1.250.000.000   | 50            | 1.250.000.000                                | 50               | 1.250.000.000   | Dinas Pekerjaan Umum dan<br>Tata Ruang                             |                  |  |
|      |   |   | <b>Tidak Terkait Pelayanan<br/>Dasar</b>  |  |                                      |                |                 |                 |               |                 |               |                |                 |               |  |                  |   |  |                  |  |
|      |   |   | <b>Tenaga Kerja</b>   |  |                                      |                |                 |                 |               |                 |               |                |                 |               |  |                  |   |  |                  |  |
| 2    | 7 | 2   | Program Perencanaan<br>Tenaga Kerja   | Persentase Dokumen RTK<br>yang Diselesaikan  | 60%                                  | 169.292.737,00 | 70%             | 224.763.641,00  | 80%           | 171.504.498,00  | 90%           | 210.571.481,00 | 100%            | 220.116.890,0 | 100%   | 220.116.890,00   | Dinas Tenaga Kerja,<br>Perindustrian, dan<br>Transmigrasi |  |                  |  |
| 2    | 7 | 3   | Program Pelatihan Kerja<br>Dan Produktivitas Tenaga<br>Kerja  | Persentase Kualitas dan<br>Produktifitas Tenaga kerja<br>Meningkat                                       | 50%                                  | 608.082.581,00 | 60%             | 556.827.308,00  | 70%           | 679.743.484,00  | 80%           | 698.432.990,00 | 90%             | 751.303.841,0 | 90%  | 751.303.841,00   | Dinas Tenaga Kerja,<br>Perindustrian, dan<br>Transmigrasi |  |                  |  |
| 2    | 7 | 4   | Program Penempatan<br>Tenaga Kerja  | Persentase Tenaga Kerja<br>yang diserap  | 50%                                  | 160.636.422,00 | 60%             | 173.461.846,00  | 70%           | 198.906.990,00  | 75%           | 241.308.884,00 | 85%             | 224.581.342,0 | 85%  | 224.581.342,00   | Dinas Tenaga Kerja,<br>Perindustrian, dan<br>Transmigrasi |  |                  |  |
| 2    | 7 | 5   | Program Hubungan<br>Industrial  | Persentase Kasus<br>Ketenagakerjaan pada<br>Perusahaan Menurun   | 80%                                  | 95.000.000,00  | 80%             | 95.000.000,00   | 90%           | 100.000.000,00  | 90%           | 175.000.000,00 | 100%            | 170.000.000,0 | 100%   | 170.000.000,00   | Dinas Tenaga Kerja,<br>Perindustrian, dan<br>Transmigrasi |  |                  |  |
|      |   |   | <b>Pemberdayaan<br/>Perempuan Dan<br/>Perlindungan Anak</b>   |  |                                      |                |                 |                 |               |                 |               |                |                 |               |  |                  |   |  |                  |  |
| 2    | 8 | 2   | Program Pengarusutamaan Gender<br>Dan Pemberdayaan<br>Perempuan                                       | 1. Persentase partisipasi<br>perempuan di lembaga<br>pemerintah  | 01,09<br>,4                          | 01.11,3        | 86.806.437      | 01.13,1         | 92.945.267    | 01.15,0         | 101.577.593   | 01.16,8        | 109.900.000     | 01.18,5       | 118.100.000                                  | 01.18,5          | 118.100.000   | Dinas Keluarga Berencana dan<br>Perlindungan Perempuan dan<br>Anak |                  |  |
|      |   |   |   | 2. Persentase kelembagaan<br>PUG aktif   | 0,145<br>8333<br>33                  | 03.32,3        | 56.689.628      | 03.33,8         | 57.598.502    | 03.34,6         | 58.000.000    | 03.35,4        | 59.398.496      | 03.36,2       | 59.980.483                                   | 03.36,2          | 59.980.483  | Dinas Keluarga Berencana dan<br>Perlindungan Perempuan dan<br>Anak |                  |  |



| Kode |    | Bidang Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program Prioritas<br>Pembangunan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome)  | Data<br>Kinerja<br>Awal<br>RPJMD<br>(2021)                                 | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |      |                 |      |                 |      |                 |      |                      |      |  |      |                  |  |
|------|----|---|---|--|--------------------------------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|----------------------|------|--|------|------------------|--|
|      |    |   |   |  | 2022                                 |      | 2023            |      | 2024            |      | 2025            |      | 2026                 |      | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode (2026) |      |                  |  |
|      |    |   |   |  | Target                               | Rp.  | Target          | Rp.  | Target          | Rp.  | Target          | Rp.  | Target               | Rp.  | Target                                       | Rp.  |                  |  |
| 1    | 2  | 3   | 4   | 5  | 6                                    | 7    | 8               | 9    | 10              | 11   | 12              | 13   | 14                   | 13   | 14   | 17   |                  |  |
| 2    | 8  | 3   | Program Perlindungan Perempuan  | Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar | 80%                                  | 83%  | 88.151.184      | 84%  | 87.793.076      | 85%  | 89.975.104      | 88%  | 92.809.440           | 90%  | 94.600.537                                   | 90%  | 94.600.537       | Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak |
| 2    | 8  | 4   | Program Peningkatan Kualitas Keluarga   | Persentase kemandirian PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga)                   | 0                                    | 20%  | 43.775.592      | 40%  | 44.246.538      | 60%  | 45.987.552      | 80%  | 48.054.720           | 100% | 49.600.268                                   | 100% | 49.600.268       | Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak |
| 2    | 8  | 5   | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak                                 | Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang terkelola dan valid            | 0                                    | 60%  | 15.887.796      | 65%  | 28.123.269      | 70%  | 28.993.776      | 75%  | 30.027.360           | 80%  | 30.800.134                                   | 80%  | 30.800.134       | Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak |
| 2    | 8  | 6   | Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)  | Persentase pemenuhan kelompok hak anak                                     | 100%                                 | 100% | 91.175.592      | 100% | 97.646.538      | 100% | 105.387.552     | 100% | 113.454.720          | 100% | 121.000.268                                  | 100% | 121.000.268      | Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak |
| 2    | 8  | 7   | Program Perlindungan Khusus Anak  | Persentase penurunan kekerasan terhadap anak                               | 20%                                  | 18%  | 70.175.592      | 16%  | 71.946.538      | 14%  | 74.987.552      | 12%  | 78.354.720           | 10%  | 81.200.268                                   | 10%  | 81.200.268       | Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak |
|      |    |   | <b>Pangan</b>   |  |                                      |      |                 |      |                 |      |                 |      |                      |      |  |      |                  |  |
| 2    | 9  | 0<br>2  | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan                        | 51%                                  | 8%   | 5.750.000.000,0 | 8%   | 6.325.000.000,0 | 8%   | 6.957.500.000,0 | 8%   | 7.653.250.000,<br>00 | 8%   | 8.418.575.000<br>0,00                        | 8%   | 8.418.575.000,00 | Dinas Keluatan, Perikanan, dan Pangan                        |
| 2    | 9  | 0<br>3  | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat               | 1. Angka Kecukupan Energi  | 2150                                 | 2100 | 2.180.000.000,0 | 2100 | 2.398.000.000,0 | 2100 | 2.637.800.000,0 | 2100 | 2.901.580.000,<br>00 | 2100 | 3.191.738.000<br>0,00                        | 2100 | 3.191.738.000,00 | Dinas Keluatan, Perikanan, dan Pangan                        |
|      |    |   |   | 2. Angka Kecukupan Protein   | 57                                   | 57   | 0               | 57   | 0               | 57   | 0               | 57   | 00                   | 57   | 0,00   | 57   |                  |  |
| 2    | 9  | 0<br>4  | Program Penanganan Kerawanan Pangan   | Persentase desa rentan rawan pangan (jumlah)                               | 5,38                                 | 5%   | 480.000.000,00  | 4%   | 528.000.000,00  | 3%   | 580.800.000,00  | 2%   | 638.880.000,00       | 1%   | 702.768.000,<br>00                           | 1%   | 702.768.000,00   | Dinas Keluatan, Perikanan, dan Pangan                        |
| 2    | 9  | 0<br>5  | Program Pengawasan Keamanan Pangan  | Persentase pangan segar aman   | N/A                                  | 55%  | 150.000.000,00  | 60%  | 165.000.000,00  | 65%  | 181.500.000,00  | 70%  | 199.650.000,00       | 75%  | 219.615.000,<br>00                           | 75%  | 219.615.000,00   | Dinas Keluatan, Perikanan, dan Pangan                        |
|      |    |   | <b>Pertanahan</b>   |  |                                      |      |                 |      |                 |      |                 |      |                      |      |  |      |                  |  |
| 2    | 10 | 2   | Program Pengelolaan Izin Lokasi   | Persentase Izin Lokasi dan/atau izin Penetapan Lokasi yang diterbitkan     |                                      | 100% | 150.000.000,00  | 100% | 151.500.000,00  | 100% | 153.015.000,00  | 100% | 154.545.150,00       | 100% | 156.090.602,0<br>0                           | 100% | 156.090.602,00   | Sekretariat Daerah   |
| 2    | 10 | 4   | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan                                     | Persentase Sengketa Tanah hak dan/atau tanah Garapan Yang Dislesaikan      |                                      | 100% | 770.000.000,00  | 100% | 777.700.000,00  | 100% | 785.477.000,00  | 100% | 793.331.770,00       | 100% | 801.265.088,0<br>0                           | 100% | 801.265.088,00   | Sekretariat Daerah   |



| Kode |        |        | Bidang Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program Prioritas<br>Pembangunan  | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome)   | Data<br>Kinerja<br>Awal<br>RPJMD<br>(2021) | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab     |                |  |                |  |                |  |                |  |                    |  |                |   |
|------|--------|--------|--|--|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|--------------------|--|----------------|---|
|      |        |        |  |  |  | 2022                                     |                | 2023                                     |                | 2024                                     |                | 2025                                     |                | 2026                                     |                    | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode (2026) |                |   |
|      |        |        |  |  |  | Target                                   | Rp.                | Target                                       | Rp.            |   |
| 1    | 2      | 3      | 4  | 5  | 6  | 7  | 8              | 9  | 10             | 11                                       | 12             | 13                                       | 14             | 13                                       | 14                 | 17   |                |   |
| 2    | 1<br>0 | 5      | Program Penyelesaian<br>Ganti Kerugian Dan<br>Santunan Tanah Untuk<br>Pembangunan  | Persentase Ganti Rugi<br>Tanah Untuk<br>Pembangunan Yang<br>Diselesaikan   |  | 100%                                     | 50.000.000,00  | 100%                                     | 50.500.000,00  | 100%                                     | 51.005.000,00  | 100%                                     | 51.515.050,00  | 100%                                     | 52.030.201,00      | 100%   | 52.030.201,00  | Sekretariat Daerah                      |
| 2    | 1<br>0 | 1<br>0 | Program Penatagunaan<br>Tanah  | Cakupan Penggunaan<br>Tanah Dalam Satu Daerah<br>Kabupaten Pangandaran   |  | 100%                                     | 451.023.663,00 | 100%                                     | 455.533.900,00 | 100%                                     | 460.089.239,00 | 100%                                     | 464.690.131,00 | 100%                                     | 469.337.032,0<br>0 | 100%   | 469.337.032,00 | Sekretariat Daerah                      |
|      |        |        | Lingkungan Hidup   |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                |  |                    |  |                |   |
| X    | X<br>X | 1      | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota  | 1. Persentase sarana<br>prasarana kantor yang<br>terpenuhi<br>2. Persentase laporan<br>keuangan dengan kualitas<br>baik<br>3. Persentase peningkatan<br>kompetensi aparatur<br>4. Persentase perencanaan<br>dan evaluasi kinerja yang<br>berkualitas | N/A  | 1. 100%<br>2. 100%<br>3. 100%<br>4. 100% | 1.792.300.000  | 1. 100%<br>2. 100%<br>3. 100%<br>4. 100% | 1.759.550.000  | 1. 100%<br>2. 100%<br>3. 100%<br>4. 100% | 1.802.445.000  | 1. 100%<br>2. 100%<br>3. 100%<br>4. 100% | 2.213.824.543  | 1. 100%<br>2. 100%<br>3. 100%<br>4. 100% | 1.880.638.887      | 1. 100%<br>2. 100%<br>3. 100%<br>4. 100%     | 1.880.638.887  | Dinas Lingkunga Hidup dan<br>Kebersihan |
| 2    | 1<br>1 | 2      | Program Perencanaan<br>Lingkungan Hidup  | Persentase Dokumen<br>Perencanaan Lingkungan<br>Hidup Yang Telah<br>Dimiliki/Disusun   | N/A  | 42,86%                                   | 629.000.000    | 57, 14 %                                 | 510.000.000    | 78,57%                                   | 460.000.000    | 92,86%                                   | 410.000.000    | 100%                                     | 410.000.000        | 100%   | 410.000.000    | Dinas Lingkunga Hidup dan<br>Kebersihan |
| 2    | 1<br>1 | 6      | Program Pembinaan Dan<br>Pengawasan Terhadap Izin<br>Lingkungan Dan Izin<br>Perlindungan Dan<br>Pengelolaan Lingkungan<br>Hidup (Pplh) | Persentase Ketaatan<br>Pelaku Usaha/Kegiatan<br>Yang Melaksanakan<br>Komitmen Izin Lingkungan  | N/A  | 50,00%                                   | 55.000.000     | 56,67%                                   | 105.000.000    | 66,67%                                   | 65.000.000     | 73,33%                                   | 95.000.000     | 83,33%                                   | 65.000.000         | 83,33%                                       | 65.000.000     | Dinas Lingkunga Hidup dan<br>Kebersihan |
| 2    | 1<br>1 | 1<br>0 | Program Penanganan<br>Pengaduan Lingkungan<br>Hidup  | Persentase Pengaduan<br>Masyarakat yang ditangani  | N/A  | 73,33%                                   | 35.000.000     | 75%                                      | 45.000.000     | 77,28%                                   | 50.000.000     | 79,17%                                   | 55.000.000     | 80,77%                                   | 60.000.000         | 80,77%                                       | 60.000.000     | Dinas Lingkunga Hidup dan<br>Kebersihan |
| 2    | 1<br>1 | 5      | Program Pengendalian<br>Bahan Berbahaya Dan<br>Berasun (B3) Dan Limbah<br>Bahan Berbahaya Dan<br>Berasun (Limbah B3)                   | Persentase Usaha<br>Dan/Atau Kegiatan<br>penghasil Limbah B3 yang<br>memenuhi ketentuan  | N/A  | 53%                                      | 68.000.000     | 58%                                      | 75.000.000     | 63%                                      | 85.000.000     | 68%                                      | 95.000.000     | 73%                                      | 103.000.000        | 73%  | 103.000.000    | Dinas Lingkunga Hidup dan<br>Kebersihan |
| 2    | 1<br>1 | 8      | Program Peningkatan<br>Pendidikan, Pelatihan Dan<br>Penyaluran Lingkungan<br>Hidup Untuk Masyarakat                                    | Persentase Perilaku Peduli<br>Lingkungan   | N/A  | 28%                                      | 115.000.000    | 32%                                      | 118.000.000    | 36%                                      | 123.000.000    | 40%                                      | 126.000.000    | 44%                                      | 130.000.000        | 44%  | 130.000.000    | Dinas Lingkunga Hidup dan<br>Kebersihan |
| 2    | 1<br>1 | 9      | Program Penghargaan<br>Lingkungan Hidup Untuk<br>Masyarakat  | Persentase Penerapan<br>Adiwiyata Di Lingkungan<br>Pemerintah Daerah   | N/A  | 13%                                      | 35.000.000     | 17%                                      | 45.000.000     | 20%                                      | 50.000.000     | 23%                                      | 60.000.000     | 27%                                      | 65.000.000         | 27%  | 65.000.000     | Dinas Lingkunga Hidup dan<br>Kebersihan |



| Kode |        | Bidang Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program Prioritas<br>Pembangunan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome)  | Data<br>Kinerja<br>Awal<br>RPJMD<br>(2021)  | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                          |                      |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |                      |                  |   |
|------|--------|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------|---|
|      |        |   |   |   | 2022                                 |                          | 2023                 |                          | 2024                     |                          | 2025                     |                          | 2026                     |                          | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode (2026) |                      |                  |   |
|      |        |   |   |   | Target                               | Rp.                      | Target               | Rp.                      | Target                   | Rp.                      | Target                   | Rp.                      | Target                   | Rp.                      | Target                                       | Rp.                  |                  |   |
| 1    | 2      | 3   | 4   | 5   | 6                                    | 7                        | 8                    | 9                        | 10                       | 11                       | 12                       | 13                       | 14                       | 13                       | 14   | 17                   |                  |   |
| 2    | 1<br>1 | 1<br>1  | Program Pengelolaan Persampahan   | Persentase pengelolaan Sampah yang ditangani  | N/A                                  | 20%                      | 4.042.225.457        | 22%                      | 4.082.675.420            | 24%                      | 4.314.976.226            | 26%                      | 4.536.200.000            | 28%                      | 5.453.400.000                                | 2%                   | 5.453.400.000    | Dinas Lingkunga Hidup dan Kebersihan          |
| 2    | 1<br>1 | 3   | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup   | Persentase Kualitas Air dan Udara yang memenuhi Baku Mutu   | N/A                                  | 27,50%                   | 220.000.000          | 28,50%                   | 220.000.000              | 29,50%                   | 320.000.000              | 30,50%                   | 320.000.000              | 31,50%                   | 220.000.000                                  | 31,50%               | 220.000.000      | Dinas Lingkunga Hidup dan Kebersihan          |
| 2    | 1<br>1 | 4   | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)  | Persentase Tutupan Lahan yang dikelola  | N/A                                  | 0,97%                    | 1.724.427.705        | 1,16%                    | 1.883.870.475            | 1,36%                    | 2.053.870.470            | 1,55%                    | 1.983.870.475            | 1,74%                    | 1.933.870.475                                | 1,74%                | 1.933.870.475    | Dinas Lingkunga Hidup dan Kebersihan          |
| 2    | 1<br>1 | 7   | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh | Persentase MHA yang Terdaftar dan terdata   | N/A                                  | 15%                      | 40.000.000           | 20%                      | 40.000.000               | 25%                      | 40.000.000               | 30%                      | 40.000.000               | 35%                      | 40.000.000                                   | 35%                  | 40.000.000       | Dinas Lingkunga Hidup dan Kebersihan          |
|      |        |   | <b>Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</b>   |   |                                      |                          |                      |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |                      |                  |   |
| X    | X<br>X | 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota   | 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi<br>2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik<br>3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur<br>4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas |                                      | 100<br>100<br>100<br>100 | 7.403.972.164,0<br>0 | 100<br>100<br>100<br>100                     | 8.202.558.086<br>,00 | 8.202.558.086,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil       |
| 2    | 1<br>2 | 2   | Program Pendaftaran Penduduk  | Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan   |                                      | 100                      | 493.822.367,00       | 100                      | 495.706.152,00           | 100                      | 502.670.207,00           | 100                      | 515.938.879,00           | 100                      | 522.121.074,0<br>0                           | 100                  | 522.121.074,00   |   |
| 2    | 1<br>2 | 3   | Program Pencatatan Sipil  | Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil   |                                      | 100                      | 232.846.775,00       | 100                      | 234.259.614,00           | 100                      | 239.482.655,00           | 100                      | 245.684.160,00           | 100                      | 250.320.805,0<br>0                           | 100                  | 250.320.805,00   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil       |
| 2    | 1<br>2 | 4   | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan   | Persentase data kependudukan yang dikelola secara elektronik  |                                      | 100                      | 151.453.624,00       | 100                      | 152.348.422,00           | 100                      | 155.656.348,00           | 100                      | 159.583.968,00           | 100                      | 162.520.510,0<br>0                           | 100                  | 162.520.510,00   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil       |
|      |        |   | <b>Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</b>   |   |                                      |                          |                      |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |                      |                  |   |
| X    | X<br>X | 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota   | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah  |                                      | 90                       | 5.190.421.356,0<br>0 | 91                       | 5.488.468.575,5<br>8     | 92                       | 5.916.176.728,9<br>3     | 93                       | 6.399.070.477,<br>48     | 94                       | 6.870.785.027,<br>50                         | 94                   | 6.870.785.027,50 | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa |



| Kode |        |   | Bidang Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program Prioritas<br>Pembangunan               | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome)  | Data<br>Kinerja<br>Awal<br>RPJMD<br>(2021) | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                          |                       |  |                   |  |
|------|--------|---|---|---|--|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--|-------------------|--|
|      |        |   |   |   |  | 2022                                 |                       | 2023                   |                       | 2024                   |                       | 2025                   |                       | 2026                     |                       | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode (2026) |                   |  |
|      |        |   |   |   |  | Target                               | Rp.                   | Target                 | Rp.                   | Target                 | Rp.                   | Target                 | Rp.                   | Target                   | Rp.                   | Target                                       | Rp.               |  |
| 1    | 2      | 3 | 4   | 5   | 6  | 7                                    | 8                     | 9                      | 10                    | 11                     | 12                    | 13                     | 14                    | 13                       | 14                    | 17   |                   |  |
| 2    | 1<br>3 | 2 | Program Penataan Desa   | Persentase penataan desa yang dibina  |  | 50                                   | 160.000.000,00        | 55                     | 173.000.000,00        | 60                     | 190.300.000,00        | 65                     | 209.330.000,00        | 70                       | 230.263.000,00        | 70   | 230.263.000,00    | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa                |
| 2    | 1<br>3 | 3 | Program Peningkatan Kerjasama Desa  | Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa  |  | 4%                                   | 25.000.000,00         | 8                      | 27.500.000,00         | 12                     | 100.000.000,00        | 16                     | 110.000.000,00        | 20                       | 121.000.000,00        | 20   | 121.000.000,00    | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa                |
| 2    | 1<br>3 | 4 | Program Administrasi Pemerintahan Desa  | Persentase Administrasi Desa yang baik dan tertib   | 45   | 50                                   | 3.255.116.885,00      | 55                     | 3.357.423.730,00      | 60                     | 3.067.089.594,00      | 65                     | 3.571.850.994,23      | 70                       | 3.711.697.687,57      | 70   | 3.711.697.687,57  | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa                |
| 2    | 1<br>3 | 5 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif   |  | 100                                  | 5.520.600.000,00      | 100                    | 5.535.600.000,00      | 100                    | 6.227.100.000,00      | 100                    | 6.276.250.000,00      | 100                      | 6.540.315.000,00      | 100  | 6.540.315.000,00  | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa                |
|      |        |   | Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana  |   |  |                                      |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                          |                       |  |                   |  |
| X    | X<br>X | 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                         | 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi<br>2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik<br>3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur<br>4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas | 1. 75<br>2.<br>100<br>3. 75<br>4.<br>100   | 1. 80<br>2. 100<br>3. 80<br>4. 100   | 2.531.992.381         | 85<br>100<br>85<br>100 | 2.606.992.381         | 90<br>100<br>90<br>100 | 2.694.992.381         | 95<br>100<br>95<br>100 | 2.790.792.381         | 100<br>100<br>100<br>100 | 2.883.992.382         | 100<br>100<br>100<br>100                     | 2.883.992.382     | Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak |
| 2    | 1<br>4 | 2 | Program Pengendalian Penduduk   | Persentase laporan pengendalian lapangan tingkat kecamatan sistem informasi kependudukan dan keluarga (SIGA)  | 20   | 100                                  | 324.166.452,00        | 100                    | 310.629.718,00        | 100                    | 314.111.746,00        | 100                    | 318.246.082,00        | 100                      | 350.294.431,00        | 100  | 350.294.431,00    | Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak |
| 2    | 1<br>4 | 3 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)   | Prevalensi peserta KB aktif   | 75.78                                      | 75.64                                | 2,953,121,096         | 75.69                  | 3,019,149,636         | 75.74                  | 3,179,719,573         | 75.79                  | 3,304,929,358         | 75.84                    | 3,330,904,535         | 75.84  | 3,330,904,535     | Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak |
| 2    | 1<br>4 | 4 | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)                        | Persentase peningkatan pemberdayaan Keluarga Sejahtera (Ks)   | 75,02                                      | 76,02                                | 604.168.722,00        | 77,02                  | 719.118.294,00        | 78,02                  | 806,380,682           | 79,02                  | 883,447,850           | 80,02                    | 884,993,398           | 80,02  | 884,993,398       |  |
|      |        |   | Perhubungan   |   |  |                                      |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                          |                       |  |                   |  |
| X    | X<br>X | 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                         | 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi  |  | 1. 80%                               | 12.229.547.274,<br>00 | 1. 85%                 | 13.204.534.208,<br>00 | 1. 90%                 | 13.677.473.900,<br>00 | 1. 95%                 | 13.900.511.833,<br>00 | 1. 100%                  | 14.504.918.54<br>4,00 | 1. 100%                                      | 14.504.918.544,00 | Dinas Perhubungan  |



| Kode |        | Bidang Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program Prioritas<br>Pembangunan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome)  | Data<br>Kinerja<br>Awal<br>RPJMD<br>(2021)                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                 |                  |                 |                  |                 |                            |                      |                     |                      |  |                  |                                  |                                      |
|------|--------|---|---|--|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|      |        |   |   |  | 2022                                 |                 | 2023             |                 | 2024             |                 | 2025                       |                      | 2026                |                      | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode (2026) |                  |                                  |                                      |
|      |        |   |   |  | Target                               | Rp.             | Target           | Rp.             | Target           | Rp.             | Target                     | Rp.                  | Target              | Rp.                  | Target                                       | Rp.              |                                  |                                      |
| 1    | 2      | 3   | 4   | 5  | 6                                    | 7               | 8                | 9               | 10               | 11              | 12                         | 13                   | 14                  | 13                   | 14   | 17               |                                  |                                      |
|      |        |   | 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik<br><br>3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur<br><br>4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas | 2. 100%<br><br>3. 80%<br><br>4. 100%                             | 2. 100%                              |                 | 2. 100%          |                 | 2. 100%          |                 | 2. 100%                    |                      | 2100%               |                      | 2100%  |                  |                                  |                                      |
| 2    | 1<br>5 | 2   |   |  | 3. 80%                               |                 | 3. 85%           |                 | 3. 90%           |                 | 3. 95%                     |                      | 3100%               |                      | 3100%  |                  |                                  |                                      |
|      |        |   |   |  | 4. 100%                              |                 | 4. 100%          |                 | 4. 100%          |                 | 4. 100%                    |                      | 4100%               |                      | 4100%  |                  |                                  |                                      |
| 2    | 1<br>5 | 2   | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)   | Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 55%                                  | 5.767.031.000,0 | 60%              | 5.010.590.000,0 | 65%              | 5.345.580.000,0 | 70%                        | 6.081.826.000,<br>00 | 75%                 | 6.034.642.000,<br>00 | 75%  | 6.034.642.000,00 | Dinas Perhubungan                |                                      |
|      |        |   | Komunikasi Dan Informatika  |  |                                      |                 |                  |                 |                  |                 |                            |                      |                     |                      |  |                  |                                  |                                      |
| X    | X<br>X | 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota   | 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi             | 91%                                  |                 | 92%              |                 | 93%              |                 | 94%                        |                      | 95%                 |                      | 95%  |                  | Dinas Komunikasi dan Informatika |                                      |
|      |        |   |   | 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik              | 91%                                  | 4.489.831.000,0 | 92%              | 4.442.100.000,0 | 93%              | 4.672.738.000,0 | 94%                        | 4.640.561.000,<br>00 | 95%                 | 4.855.600.000,<br>00 | 95%  | 4.855.600.000,00 |                                  |                                      |
|      |        |   |   | 3. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas  | 91%                                  |                 | 92%              |                 | 93%              |                 | 94%                        |                      | 95%                 |                      | 95%  |                  |                                  |                                      |
| 2    | 1<br>6 | 2   | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik   | Persentase tata kelola layanan informasi publik                  | 55%                                  | 1.673.000.000,0 | 60%              | 1.933.000.000,0 | 65%              | 2.021.000.000,0 | 75%                        | 2.170.000.000,<br>00 | 80%                 | 2.360.000.000,<br>00 | 80%  | 2.360.000.000,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |                                      |
|      |        |   |   | Persentase tata kelola komunikasi publik                         | 55%                                  |                 | 60%              |                 | 65%              |                 | 75%                        |                      | 80%                 |                      | 80%  |                  | Dinas Komunikasi dan Informatika |                                      |
| 2    | 1<br>6 | 3   | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika  | tingkat kematangan tata kelola spbe                              | rintisan<br>3,1                      | 1.630.000.000,0 | terkelola<br>3,2 | 1.575.000.000,0 | terkelola<br>3,3 | 1.612.000.000,0 | terstanda<br>risasi<br>3,4 | 1.980.000.000,<br>00 | Terintegrasi<br>3,5 | 1.970.000.000,<br>00 | Terintegrasi<br>3,5                          | 1.970.000.000,00 | 1.970.000.000,00                 | Dinas Komunikasi dan Informatika     |
|      |        |   | Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah   |  |                                      |                 |                  |                 |                  |                 |                            |                      |                     |                      |  |                  |                                  |                                      |
| 2    | 1<br>7 | 2   | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam  | Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam                  | 0%                                   | 0               | -                | 50              | 55.000.000       | 60              | 56.000.000                 | 70                   | 57.000.000          | 70                   | 62.700.000                                   | 70               | 62.700.000                       | Dinas Perdagangan dan Koperasi, UMKM |
| 2    | 1<br>7 | 3   | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi   | Persentase Koperasi yang patuh                                   | N/A                                  | 50              | 225.000.000      | 50.68           | 255.000.000      | 51.35.00        | 255.000.000                | 52                   | 265.000.000         | 55                   | 270.000.000                                  | 55               | 270.000.000                      | Dinas Perdagangan dan Koperasi, UMKM |
| 2    | 1<br>7 | 4   | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi  | Persentase Koperasi sehat dan cukup sehat                        | 47.62 %                              | 50              | 125.000.000,00   | 55              | 155.000.000      | 60              | 155.000.000                | 65                   | 165.000.000         | 70                   | 170.000.000                                  | 70               | 170.000.000                      | Dinas Perdagangan dan Koperasi, UMKM |



| Kode |        |        | Bidang Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program Prioritas<br>Pembangunan    | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome)   | Data<br>Kinerja<br>Awal<br>RPJMD<br>(2021) | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                  |                      |                  |                      |                  |                      |                  |                      |                  |  |                  |  |
|------|--------|--------|--|--|--|--------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|--|------------------|--|
|      |        |        |  |  |  | 2022                                 |                  | 2023                 |                  | 2024                 |                  | 2025                 |                  | 2026                 |                  | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode (2026) |                  |  |
|      |        |        |  |  |  | Target                               | Rp.              | Target               | Rp.              | Target               | Rp.              | Target               | Rp.              | Target               | Rp.              | Target                                       | Rp.              |  |
| 1    | 2      | 3      | 4  | 5  | 6  | 7                                    | 8                | 9                    | 10               | 11                   | 12               | 13                   | 14               | 13                   | 14               | 17   |                  |  |
| 2    | 1<br>7 | 5      | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian                             | Percentase Peningkatan SDM Pengelola Koperasi bersertifikat  | N/A  | 30                                   | 80,000,000       | 35                   | 80,000,000       | 40                   | 80,000,000       | 45                   | 80,000,000       | 50                   | 80,000,000       | 50   | 80,000,000       | Dinas Perdagangan dan Koperasi, UMKM                   |
| 2    | 1<br>7 | 6      | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi                           | Percentase Pertumbuhan Volume Usaha  | N/A  | 5                                    | 200,000,000      | 5                    | 200,000,000      | 5                    | 200,000,000      | 5                    | 200,000,000      | 5                    | 200,000,000      | 5  | 200,000,000      | Dinas Perdagangan dan Koperasi, UMKM                   |
| 2    | 1<br>7 | 7      | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Percentase pertumbuhan wirausaha baru  | N/A  | 10                                   | 750,000,000      | 10                   | 795,000,000      | 10                   | 795,000,000      | 10                   | 855,000,000      | 10                   | 895,000,000      | 50   | 895,000,000      | Dinas Perdagangan dan Koperasi, UMKM                   |
| 2    | 1<br>7 | 8      | Program Pengembangan UMKM  | Percentase usaha mikro yang meningkat omsetnya   | N/A  | 1                                    | 844,108,610      | 1                    | 1,185,659,771    | 1                    | 1,200,000,000    | 1                    | 1,555,753,059    | 1                    | 1,555,753,059    | 5  | 1,555,753,059    | Dinas Perdagangan dan Koperasi, UMKM                   |
|      |        |        | <b>Penanaman Modal</b>   |  |  |                                      |                  |                      |                  |                      |                  |                      |                  |                      |                  |  |                  |  |
| X    | X<br>X | 0<br>1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota              | 1. Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas                                    | BB   | BB                                   | 2.808.493.129,00 | BB                   | 2.871.368.190,00 | A                    | 2.941.283.387,00 | A                    | 3.092.836.892,00 | A                    | 3.136.475.052,00 | A  | 3.136.475.052,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|      |        |        |  | 2. Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas Baik  | BB   | BB                                   |                  | BB                   |                  | A                    |                  | A                    |                  | A                    |                  |  |                  |  |
|      |        |        |  | 3. Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi   | 77%  | 77%                                  |                  | 77%                  |                  | A                    |                  | A                    |                  | A                    |                  |  |                  |  |
|      |        |        |  | 4. Persentase Sarana Prasarana Kantor yang Terpenuhi   | 55%  | 55%                                  |                  | 55%                  |                  | 56%                  |                  | 56%                  |                  | 56%                  |                  |  |                  |  |
|      |        |        |  | 5. Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur  | 17%  | 17%                                  |                  | 17%                  |                  | 18%                  |                  | 18%                  |                  | 18%                  |                  |  |                  |  |
| 2    | 1<br>8 | 0<br>2 |  | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal   | Cakupan Pertumbuhan Jumlah Investor        | 137 Investor                         | 166 Investor     | 107.874.500,00       | 183 Investor     | 109.902.141,00       | 201 Investor     | 109.902.141,00       | 221 Investor     | 114.902.141,00       | 243 Investor     | 224.804.282,00                               | 243 Investor     | 224.804.282,00   |
| 2    | 1<br>8 | 0<br>3 | Program Promosi Penanaman Modal  | Cakupan Peningkatan Peluang Investasi Yang Terpublikasi  | N/A  | 10%                                  | 2.500.000,00     | 10%                  | 2.500.000,00     | 10%                  | 22.612.430,00    | 10%                  | 24.873.673,00    | 10%                  | 27.361.040,00    | 10%  | 27.361.040,00    | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2    | 1<br>8 | 0<br>4 | Program Pelayanan Penanaman Modal  | Cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal   | 70%  | 75%                                  | 261.393.203,00   | 75%                  | 284.264.455,00   | 80%                  | 305.827.957,00   | 80%                  | 332.979.280,00   | 85%                  | 366.277.208,00   | 85%  | 366.277.208,00   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2    | 1<br>8 | 0<br>5 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                         | Cakupan Kepatuhan Pendataan Nilai Investasi PMDN & PMA Terhadap Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah | 322,1 Milyar Rupiah                        | 354,31 Miliar Rupiah                 | 2.342.200,00     | 389,74 Miliar Rupiah | 2.342.200,00     | 428,71 Miliar Rupiah | 2.576.420,00     | 471,58 Miliar Rupiah | 33.176.262,00    | 518,73 Miliar Rupiah | 36.493.888,00    | 518,73 Miliar Rupiah                         | 36.493.888,00    | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2    | 1<br>8 | 0<br>6 | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal            | Cakupan Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman                                   | N/A  | 3%                                   | 3.000.000,00     | 3%                   | 3.000.000,00     | 3%                   | 7.000.000,00     | 3%                   | 7.000.000,00     | 3%                   | 7.000.000,00     | 3%   | 7.000.000,00     | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |



| Kode |        | Bidang Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program Prioritas<br>Pembangunan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome)                                     | Data<br>Kinerja<br>Awal<br>RPJMD<br>(2021)   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                       |                      |                       |                 |                       |                      |                       |                      |                       |  |                       |   |                                 |
|------|--------|---|--|--|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|-----------------------|---|---------------------------------|
|      |        |   |  |  | 2022                                 |                       | 2023                 |                       | 2024            |                       | 2025                 |                       | 2026                 |                       | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode (2026) |                       |   |                                 |
|      |        |   |  |  | Target                               | Rp.                   | Target               | Rp.                   | Target          | Rp.                   | Target               | Rp.                   | Target               | Rp.                   | Target                                       | Rp.                   |   |                                 |
| 1    | 2      | 3   | 4  | 5  | 6                                    | 7                     | 8                    | 9                     | 10              | 11                    | 12                   | 13                    | 14                   | 13                    | 14   | 17                    |   |                                 |
|      |        |   | Modal  |  |                                      |                       |                      |                       |                 |                       |                      |                       |                      |                       |  |                       |   |                                 |
|      |        |   | <b>Kepemudaan Dan<br/>Olahraga</b>   |  |                                      |                       |                      |                       |                 |                       |                      |                       |                      |                       |  |                       |   |                                 |
| 2    | 1<br>9 | 2   | Program Pengembangan<br>Kapasitas Daya Saing<br>Kepemudaan                 | Cakupan pembinaan<br>wirausaha muda dan<br>Persentase pemuda yang<br>aktif dalam pembangunan | 80%                                  | 16.487.669.486,<br>00 | 80%                  | 16.650.919.212,<br>00 | 80%             | 18.507.811.356,<br>00 | 80%                  | 20.333.103.498<br>,00 | 80%                  | 22.177.195.080,<br>00 | 80%  | 22.177.195.080,0<br>0 | Dinas Pendidikan,<br>Kepemudaan, dan Olahraga |                                 |
| 2    | 1<br>9 | 3   | Program Pengembangan<br>Kapasitas Daya Saing<br>Keolahragaan               | Cakupan Prestasi Olahraga<br>tingkat Provinsi dan<br>Nasional                                | 80%                                  | 9.047.697.700,0<br>0  | 80%                  | 9.825.723.200,0<br>0  | 80%             | 10.650.059.100,<br>00 | 80%                  | 11.421.529.800<br>,00 | 80%                  | 12.222.710.500,<br>00 | 80%  | 12.222.710.500,0<br>0 | Dinas Pendidikan,<br>Kepemudaan, dan Olahraga |                                 |
| 2    | 1<br>9 | 4   | Program Pengembangan<br>Kapasitas Kepramukaan                              | Pemuda yang Aktif Dalam<br>Kepramukaan   | 80%                                  | 100.000.000,00        | 80%                  | 110.000.000,00        | 80%             | 120.000.000,00        | 80%                  | 130.000.000,00        | 80%                  | 140.000.000,0<br>0    | 80%  | 140.000.000,00        | Dinas Pendidikan,<br>Kepemudaan, dan Olahraga |                                 |
|      |        |   | <b>Persandian</b>  |  |                                      |                       |                      |                       |                 |                       |                      |                       |                      |                       |  |                       |   |                                 |
| 2    | 2<br>1 | 2   | Program Penyelenggaraan<br>Persandian Untuk<br>Pengamanan Informasi        | Persentase sistem<br>informasi dan data<br>elektronik yang aman                              | 20%                                  | 190.000.000,00        | 25%                  | 205.000.000,00        | 30%             | 220.000.000,00        | 35%                  | 240.000.000,00        | 40%                  | 260.000.000,0<br>0    | 40%  | 260.000.000,00        | Dinas Komunikasi dan<br>Informatika           |                                 |
|      |        |   | <b>Statistik</b>   |  |                                      |                       |                      |                       |                 |                       |                      |                       |                      |                       |  |                       |   |                                 |
| 2    | 2<br>0 | 2   | Program Penyelenggaraan<br>Statistik Sektoral                              | Persentase publikasi data<br>statistik sektoral  | 55%                                  | 470.000.000,00        | 60%                  | 470.000.000,00        | 65%             | 510.000.000,00        | 70%                  | 550.000.000,00        | 75%                  | 590.000.000,0<br>0    | 75%  | 590.000.000,00        | Dinas Komunikasi dan<br>Informatika           |                                 |
|      |        |   | <b>Kebudayaan</b>  |  |                                      |                       |                      |                       |                 |                       |                      |                       |                      |                       |  |                       |   |                                 |
| X    | X<br>X | 1   | <b>Program Penunjang<br/>Urusan Pemerintahan<br/>Daerah Kabupaten/Kota</b> | Persentase Kinerja<br>Perangkat Daerah yang<br>efektif dan efisien                           | 80<br>Persen                         | 11.663.993.226,<br>00 | 82 Persen            | 12.294.977.305,<br>00 | 84 Persen       | 12.983.705.639,<br>00 | 86<br>Persen         | 13.735.899.113<br>,00 | 88 Persen            | 14.557.850.16<br>3,00 | 88<br>Persen                                 | 14.557.850.163,0<br>0 | Dinas Pariwisata dan<br>Kebudayaan            |                                 |
| 2    | 2<br>2 | 2   | Program Pengembangan<br>Kebudayaan   | Persentase objek pemajuan<br>kebudayaan yang<br>dikembangkan                                 | 60<br>Persen                         | 2.410.000.000,0<br>0  | 62 Persen            | 2.434.100.000,0<br>0  | 64 Persen       | 2.458.441.000,0<br>0  | 66<br>Persen         | 2.483.025.410,<br>00  | 68 Persen            | 2.507.855.664<br>,00  | 68<br>Persen                                 | 2.507.855.664,00      | Dinas Pariwisata dan<br>Kebudayaan            |                                 |
| 2    | 2<br>2 | 3   | Program Pengembangan<br>Kesenian Tradisional                               | Persentase kesenian<br>tradisional yang<br>dikembangkan                                      | 20<br>Persen                         | 250.000.000,00        | 22 Persen            | 252.500.000,00        | 24 Persen       | 255.025.000,00        | 26<br>Persen         | 257.575.250,00        | 28 Persen            | 260.151.003,0<br>0    | 28<br>Persen                                 | 260.151.003,00        | Dinas Pariwisata dan<br>Kebudayaan            |                                 |
| 2    | 2<br>2 | 4   | Program Pembinaan<br>Sejarah   | Persentase sejarah lokal<br>yang dikembangkan  | 20<br>Persen                         | 100.000.000,00        | 22 Persen            | 101.000.000,00        | 24 Persen       | 102.010.000,00        | 26<br>Persen         | 103.030.100,00        | 28 Persen            | 104.060.401,0<br>0    | 28<br>Persen                                 | 104.060.401,00        | Dinas Pariwisata dan<br>Kebudayaan            |                                 |
| 2    | 2<br>2 | 5   | Program Pelestarian Dan<br>Pengelolaan Cagar Budaya                        | Persentase cagar budaya<br>yang dilestarikan dan<br>dikelola                                 | 10<br>Persen                         | 345.000.000,00        | 12 Persen            | 348.450.000,00        | 14 Persen       | 351.934.500,00        | 16<br>Persen         | 355.453.845,00        | 18 Persen            | 359.008.383,0<br>0    | 18<br>Persen                                 | 359.008.383,00        | Dinas Pariwisata dan<br>Kebudayaan            |                                 |
|      |        |   | <b>Perpustakaan</b>  |  |                                      |                       |                      |                       |                 |                       |                      |                       |                      |                       |  |                       |   |                                 |
| X    | X<br>X | 1   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota          | Cakupan pelayanan<br>penunjang urusan<br>pemerintahan daerah                                 | 80                                   | 90                    | 4.619.018.266,0<br>0 | 91                    | 5.008.111.072,0 | 92                    | 5.554.496.151,0<br>0 | 93                    | 5.863.401.065,<br>00 | 94                    | 6.281.401.123,<br>00                         | 94                    | 6.281.401.123,00                              | Dinas Perpustakaan dan<br>Arsip |



| Kode |        |   | Bidang Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program Prioritas<br>Pembangunan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome)                      | Data<br>Kinerja<br>Awal<br>RPJMD<br>(2021)                              | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |        |                       |       |                       |        |                       |        |                        |        |  |        |                   |                                       |
|------|--------|---|---|---|---|--------------------------------------|--------|-----------------------|-------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|------------------------|--------|--|--------|-------------------|---------------------------------------|
|      |        |   |   |   |   | 2022                                 |        | 2023                  |       | 2024                  |        | 2025                  |        | 2026                   |        | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode (2026) |        |                   |                                       |
|      |        |   |   |   |   | Target                               | Rp.    | Target                | Rp.   | Target                | Rp.    | Target                | Rp.    | Target                 | Rp.    | Target                                       | Rp.    |                   |                                       |
| 1    | 2      | 3 | 4   | 5   | 6   | 7                                    | 8      | 9                     | 10    | 11                    | 12     | 13                    | 14     | 13                     | 14     | 17   |        |                   |                                       |
| 2    | 2<br>3 | 2 |   | Program Pembinaan Perpustakaan                              | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat                                  | 16,37                                | 18,56  | 687.501.629,00        | 19,16 | 641.776.980,00        | 19,61  | 569.568.845,00        | 19,95  | 671.555.924,00         | 20,24  | 671.281.031,00                               | 20,24  | 671.281.031,00    | Dinas Perpustakaan dan Arsip          |
| 2    | 2<br>3 | 3 |   | Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno        | Persentase Pengingkatan Bahan Pustaka dan Naskah Kuno yang dilestarikan | -                                    | 10     | 194.229.980,00        | 10    | 181.312.050,00        | 10     | 160.912.121,00        | 10     | 189.725.068,00         | 10     | 189.647.407,00                               | 10     | 189.647.407,00    | Dinas Perpustakaan dan Arsip          |
|      |        |   |   | <b>Kearsipan</b>  |   |                                      |        |                       |       |                       |        |                       |        |                        |        |  |        |                   |                                       |
| 2    | 2<br>4 | 2 |   | Program Pengelolaan Arsip                                   | Nilai LAKE Kabupaten/Kota   | CC                                   | B      | 233.090.000,00        | BB    | 220.806.296,00        | A      | 221.297.658,00        | A      | 234.000.463,00         | AA     | 235.894.670,00                               | AA     | 235.894.670,00    | Dinas Perpustakaan dan Arsip          |
| 2    | 2<br>4 | 3 |   | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip                 | Persentase LAKE Kabupaten/Kota  | 50,84                                | 66,13  | 82.371.858,00         | 72,23 | 78.137.005,00         | 80,22  | 63.412.644,00         | 89,29  | 82.806.041,00          | 100    | 83.476.347,00                                | 100    | 83.476.347,00     | Dinas Perpustakaan dan Arsip          |
|      |        |   |   | <b>Urusan Pemerintah Pilihan</b>                            |   |                                      |        |                       |       |                       |        |                       |        |                        |        |  |        |                   |                                       |
|      |        |   |   | <b>Kelautan Dan Perikanan</b>                               |   |                                      |        |                       |       |                       |        |                       |        |                        |        |  |        |                   |                                       |
| X    | X<br>X | 1 |   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi                    | 1. 90%                               | 1. 90% | 4.212.064.013,0       | 0     | 5.122.279.752,0       | 1. 90% | 5.362.186.807,0       | 1. 90% | 5.694.598.111,<br>00   | 1. 90% | 5.961.617.75,75                              | 1. 90% | 5.961.617.753,00  | Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pangan |
|      |        |   |   |   | 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik                     | 2. 90%                               | 2. 90% |                       |       |                       | 2. 90% |                       |        |                        | 2. 90% |  |        |                   |                                       |
|      |        |   |   |   | 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur                           | 3. 90%                               | 3. 90% |                       |       |                       | 3. 90% |                       |        |                        | 3. 90% |  |        |                   |                                       |
|      |        |   |   |   | 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas         | 4. 90%                               | 4. 90% |                       |       |                       | 4. 90% |                       |        |                        | 4. 90% |  |        |                   |                                       |
| 3    | 2<br>5 | 3 |   | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                       | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap                       | -                                    | 0,30%  | 21.713.000.000,<br>00 | 0,30% | 21.169.500.000,<br>00 | 0,30%  | 23.286.450.000,<br>00 | 0,30%  | 25.615.095.000,<br>,00 | 0,30%  | 28.176.604.5<br>0,00                         | 0,30%  | 28.176.604.500,00 | Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pangan |
| 3    | 2<br>5 | 5 |   | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan       | Persentase Usaha Perikanan Darat yang Memenuhi Ketentuan                | N/A                                  | 5%     | 2.280.774.000,0<br>0  | 5%    | 2.508.851.400,0<br>0  | 5%     | 2.759.736.540,0<br>0  | 5%     | 3.035.710.194,<br>00   | 5%     | 3.339.281.21<br>3,00                         | 5%     | 3.339.281.213,00  | Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pangan |
| 3    | 2<br>5 | 4 |   | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                      | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya                      | -                                    | 0,20%  | 12.580.000.000,<br>00 | 0,20% | 6.154.760.500,0<br>0  | 0,20%  | 5.674.051.900,0<br>0  | 0,20%  | 6.211.853.555,<br>00   | 0,20%  | 6.803.586.57<br>5,50                         | 0,20%  | 6.803.586.575,50  | Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pangan |



| Kode |   |   | Bidang Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program Prioritas<br>Pembangunan                              | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome)   | Data<br>Kinerja<br>Awal<br>RPJMD<br>(2021) | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                   |           |                   |           |                   |           |                   |           |                   |  |                   |                                       |
|------|---|---|--|--|--|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|--|-------------------|---------------------------------------|
|      |   |   |  |  |  | 2022                                 |                   | 2023      |                   | 2024      |                   | 2025      |                   | 2026      |                   | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode (2026) |                   |                                       |
|      |   |   |  |  |  | Target                               | Rp.               | Target    | Rp.               | Target    | Rp.               | Target    | Rp.               | Target    | Rp.               | Target                                       | Rp.               |                                       |
| 1    | 2 | 3 | 4  | 5  | 6  | 7                                    | 8                 | 9         | 10                | 11        | 12                | 13        | 14                | 13        | 14                | 17   |                   |                                       |
| 3    | 2 | 6 | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan   | Persentase penyediaan pasar terhadap produksi hasil perikanan                    | N/A  | 90%                                  | 1.068.384.765,0   | 90%       | 1.141.446.006,0   | 90%       | 1.219.503.524,0   | 90%       | 1.302.898.986,    | 90%       | 1.308.601.96      | 90%  | 1.308.601.965,00  | Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pangan |
|      |   |   | <b>Pariwisata</b>  |  |  |                                      |                   |           |                   |           |                   |           |                   |           |                   |  |                   |                                       |
| X    | X | 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase Kinerja Perangkat Daerah yang efektif dan efisien                     |  | 80 Persen                            | 11.663.993.226,00 | 82 Persen | 12.294.977.305,00 | 84 Persen | 12.983.705.639,00 | 86 Persen | 13.735.899.113,00 | 88 Persen | 14.557.850.163,00 | 88 Persen                                    | 14.557.850.163,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan       |
| 3    | 2 | 2 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata  | Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan                     |  | 10 Persen                            | 18.396.560.000,00 | 12 Persen | 18.580.525.600,00 | 14 Persen | 18.766.330.856,00 | 16 Persen | 18.953.994.165,00 | 18 Persen | 19.143.534.106,00 | 18 Persen                                    | 19.143.534.106,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan       |
| 3    | 2 | 3 | Program Pemasaran Pariwisata   | Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dipasarkan                       |  | 20 Persen                            | 3.625.000.000,00  | 25 Persen | 3.661.250.000,00  | 30 Persen | 3.697.862.500,00  | 35 Persen | 3.734.841.125,00  | 40 Persen | 3.772.189.536,00  | 40 Persen                                    | 3.772.189.536,00  | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan       |
| 3    | 2 | 4 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan dan dilindungi            |  | 10 Persen                            | 1.470.000.000,00  | 12 Persen | 1.484.700.000,00  | 14 Persen | 1.499.547.000,00  | 16 Persen | 1.514.542.470,00  | 18 Persen | 1.529.687.895,00  | 18 Persen                                    | 1.529.687.895,00  | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan       |
| 3    | 2 | 5 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif                                    | Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi keratif yang berdaya saing |  | 30 Persen                            | 1.185.000.000,00  | 35 Persen | 1.196.850.000,00  | 40 Persen | 1.208.818.500,00  | 45 Persen | 1.220.906.685,00  | 50 Persen | 1.233.115.752,00  | 50 Persen                                    | 1.233.115.752,00  | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan       |
|      |   |   | <b>Pertanian</b>   |  |  |                                      |                   |           |                   |           |                   |           |                   |           |                   |  |                   |                                       |
| X    | X | 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas                     | 90   | 90                                   | 7.807.268.131     | 90        | 7.962.215.831     | 90        | 8.130.779.131     | 90        | 8.314.507.981     | 90        | 9.279.842.581     | 90   | 9.279.842.581     | Dinas Pertanian                       |
|      |   |   |  | Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik                                 | 90   | 90                                   |                   | 90        |                   | 90        |                   | 90        |                   | 90        |                   | 90   |                   | Dinas Pertanian                       |
|      |   |   |  | Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi                                | 90   | 20                                   |                   | 20        |                   | 20        |                   | 20        |                   | 20        |                   | 20   |                   | Dinas Pertanian                       |
|      |   |   |  | Persentase peningkatan kompetensi aparatur                                       |  | 90                                   |                   | 90        |                   | 90        |                   | 90        |                   | 90        |                   | 90   |                   | Dinas Pertanian                       |
| 3    | 2 | 2 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian   | Indeks Pertanaman  | 289  | 200                                  | 1.717.260.070     | 200       | 1.303.692.474     | 200       | 2.155.452.277     | 200       | 2.241.218.522     | 200       | 2.514.411.810     | 200  | 2.514.411.810     | Dinas Pertanian                       |
|      |   |   |  | Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan & Hortikultura                    | 39   | 1                                    |                   | 1,2       |                   | 1,5       |                   | 2         |                   | 2         |                   | 2  |                   | Dinas Pertanian                       |



| Kode |        | Bidang Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program Prioritas<br>Pembangunan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome)   | Data<br>Kinerja<br>Awal<br>RPJMD<br>(2021)  | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |        |                      |        |               |        |               |        |               |        |  |        |  |  |
|------|--------|---|--|---|--------------------------------------|--------|----------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|--|--------|--|--|
|      |        |   |  |   | 2022                                 |        | 2023                 |        | 2024          |        | 2025          |        | 2026          |        | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode (2026) |        |  |  |
|      |        |   |  |   | Target                               | Rp.    | Target               | Rp.    | Target        | Rp.    | Target        | Rp.    | Target        | Rp.    | Target                                       | Rp.    |  |  |
| 1    | 2      | 3   | 4  | 5   | 6                                    | 7      | 8                    | 9      | 10            | 11     | 12            | 13     | 14            | 13     | 14   | 17     |  |  |
|      |        |   | Percentase Peningkatan<br>Produksi Perkebunan                                    | 12  | 3                                    |        | 3                    |        |               | 3      |               |        | 3             |        | 3  |        | Dinas Pertanian                          |  |
|      |        |   |  | 105   | 1                                    |        | 1,3                  |        |               | 1,6    |               |        | 2             |        | 2,3  |        | Dinas Pertanian                          |  |
| 3    | 2<br>7 | 3   | Program Penyediaan Dan<br>Pengembangan Prasarana<br>Pertanian                    | Percentase Peningkatan<br>Penyediaan Prasarana<br>Pertanian   |                                      | 1      | 3,150,000,000        | 1,2    | 3,457,257,663 | 1,5    | 2,649,513,877 | 2      | 3,723,830,389 | 2      | 2,482,018,788                                | 2      | 2,482,018,788                            | Dinas Pertanian                          |
| 3    | 2<br>7 | 4   | Program Pengendalian<br>Kesehatan Hewan Dan<br>Kesehatan Masyarakat<br>Veteriner | Percentase Peningkatan<br>Bahan Pangan Asal Hewan<br>Yang Asuh & Peningkatan<br>Pencegahan Penyakit<br>Menular Ternak |                                      | 10     | 675,000,000          | 10     | 707,246,538   | 10     | 708,987,552   | 10     | 36,054,720    | 10     | 712,600,268                                  | 10     | 712,600,268                              | Dinas Pertanian                          |
| 3    | 2<br>7 | 5   | Program Pengendalian<br>Dan Penanggulangan<br>Bencana Pertanian                  | Percentase Luas<br>Pengendalian dan<br>Penanggulangan Bencana<br>Pertanian  |                                      | 60     | 800,000,000          | 65     | 883,343,910   | 70     | 1,241,329,000 | 72     | 1,250,000,000 | 75     | 1,084,759,349                                | 75     | 1,084,759,349                            | Dinas Pertanian                          |
| 3    | 2<br>7 | 7   | Program Penyuluhan<br>Pertanian  | Percentase Kenaikan Skor<br>Kelas Kelompok Tani   | 10                                   | 10     | 3,128,330,761        | 10     | 3,128,330,761 | 10     | 3,163,151,035 | 10     | 3,204,463,397 | 10     | 3,235,405,368                                | 10     | 3,235,405,368                            | Dinas Pertanian                          |
| 3    | 2<br>7 | 6   | Program Perizinan Usaha<br>Pertanian   | Percentase Izin Usaha<br>Pertanian Yang Diterbitkan   | 100                                  | 100    | 15.887.796,00        | 100    | 16,123,269    | 100    | 16,993,776    | 100    | 18,027,360    | 100    | 18,800,134                                   | 100    | 18,800,134                               | Dinas Pertanian                          |
|      |        |   | Pedagangan   |   |                                      |        |                      |        |               |        |               |        |               |        |  |        |  |  |
| X    | X<br>X | 1   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/ Kota               | 1. Percentase sarana<br>prasarana kantor yang<br>terpenuhi  |                                      | 100    |                      | 100    |               | 100    |               | 100    |               | 100    |  | 100    | Dinas Perdagangan,<br>Koperasi, dan UMKM |  |
|      |        |   |  | 2. Percentase laporan<br>keuangan dengan kualitas<br>baik   |                                      | 100    | 2.139.156.200,0<br>0 | 100    |               | 100    |               | 100    |               | 100    |  | 100    |  |  |
|      |        |   |  | 3. Percentase peningkatan<br>kompetensi aparatur  |                                      | 100    |                      | 100    |               | 100    |               | 100    |               | 100    |  | 100    |  |  |
|      |        |   |  | 4. Percentase perencanaan<br>dan evaluasi kinerja yang<br>berkualitas   |                                      | 100    |                      | 100    |               | 100    |               | 100    |               | 100    |  | 100    |  |  |
| 3    | 3<br>0 | 2   | Program Perizinan Dan<br>Pendaftaran Perusahaan                                  | Percentase Peningkatan<br>Perizinan dan Pendaftaran<br>Perusahaan   |                                      | 00.00  | -                    | 01.30  | 22,000,000    | 01.40  | 24,200,000    | 01.50  | 26,420,000    | 02.00  | 29,062,000                                   | 02.00  | 29,062,000                               | Dinas Perdagangan,<br>Koperasi, dan UMKM |
| 3    | 3<br>0 | 3   | Program Peningkatan<br>Sarana Distribusi<br>Perdagangan                          | Percentase sarana<br>distribusi perdagangan<br>yang dibangun dan<br>direvitalisasi                                    |                                      | 23.08% | 1.320.000.000,0<br>0 | 26.92% | 690,000,000   | 30.77% | 930,000,000   | 34.62% | 966,000,000   | 38.46% | 1,357,000,000                                | 38.46% | 1,357,000,000                            | Dinas Perdagangan,<br>Koperasi, dan UMKM |



| Kode |        | Bidang Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program Prioritas<br>Pembangunan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome) | Data<br>Kinerja<br>Awal<br>RPJMD<br>(2021)                                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab   |            |                |                      |             |                      |             |                      |             |                      |  |                      |             |  |   |
|------|--------|---|--|---|--|------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--|----------------------|-------------|--|---|
|      |        |   |  |   | 2022   |            | 2023           |                      | 2024        |                      | 2025        |                      | 2026        |                      | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode (2026) |                      |             |  |   |
|      |        |   |  |   | Target   | Rp.        | Target         | Rp.                  | Target      | Rp.                  | Target      | Rp.                  | Target      | Rp.                  | Target                                       | Rp.                  |             |  |   |
| 1    | 2      | 3   | 4                                      | 5   | 6  | 7          | 8              | 9                    | 10          | 11                   | 12          | 13                   | 14          | 13                   | 14   | 17                   |             |  |   |
| 3    | 3<br>0 | 4   |  | Program Stabilisasi Harga<br>Barang Kebutuhan Pokok<br>Dan Barang Penting | Percentase barang<br>kebutuhan pokok dan<br>barang penting yang<br>harganya stabil           | 61.11.00   | 670.000.000,00 | 66.67                | 670.000.000 | 72.22.00             | 670.000.000 | 77.08.00             | 670.000.000 | 83                   | 677.500.000                                  | 83                   | 677.500.000 | Dinas Perdagangan,<br>Koperasi, dan UMKM |   |
| 3    | 3<br>0 | 5   |  | Program Pengembangan<br>Ekspor  | Percentase peningkatan<br>nilai ekspor   | 81,88<br>% | 6,36%          | 169.500.000,00       | 6,80%       | 169.500.000          | 7,29%       | 169.500.000          | 7,86%       | 185.000.000          | 8,54%  | 203.500.000          | 8,54%       | 203.500.000                              | Dinas Perdagangan,<br>Koperasi, dan UMKM                  |
| 3    | 3<br>0 | 6   |  | Program Standardisasi<br>Dan Perlindungan<br>Konsumen                     | Percentase UTTP yang<br>tertitik ukur  | 51.28.00   | 300.000.000,00 | 52.56.00             | 315.000.000 | 53.85                | 315.000.000 | 55.12.00             | 335.000.000 | 56.41.00             | 351.500.000                                  | 56.41.00             | 351.500.000 | Dinas Perdagangan,<br>Koperasi, dan UMKM |   |
| 3    | 3<br>0 | 7   |  | Program Penggunaan Dan<br>Pemasaran Produk Dalam<br>Negeri                | Percentase produk lokal<br>yang meningkat omsetnya   | 01.00      | 140.000.000,00 | 01.50                | 155.000.000 | 02.00                | 155.000.000 | 02.50                | 170.000.000 | 03.00                | 187.000.000                                  | 03.00                | 187.000.000 | Dinas Perdagangan,<br>Koperasi, dan UMKM |   |
|      |        |   |  | <b>Perindustrian</b>  |  |            |                |                      |             |                      |             |                      |             |                      |  |                      |             |  |   |
| 3    | 3<br>1 | 2   |  | Program Perencanaan Dan<br>Pembangunan Industri                           | Percentase Pengembangan<br>Industri yang Ditangani   |            | 40%            | 504.544.910,00       | 60%         | 465.580.928,00       | 75%         | 615.000.000,00       | 85%         | 631.000.000,00       | 100%   | 734.173.170,0<br>0   | 100%        | 734.173.170,00                           | Dinas Tenaga Kerja,<br>Perindustrian, dan<br>Transmigrasi |
| 3    | 3<br>1 | 3   |  | Program Pengendalian Izin<br>Usaha Industri<br>Kabupaten/Kota             | Percentase Industri Kecil<br>dan menengah yang berizin                                       |            | 100%           | 60.000.000,00        | 100%        | 70.000.000,00        | 100%        | 90.000.000,00        | 100%        | 90.000.000,00        | 100%   | 100.000.000,0<br>0   | 100%        | 100.000.000,00                           | Dinas Tenaga Kerja,<br>Perindustrian, dan<br>Transmigrasi |
| 3    | 3<br>1 | 4   |  | Program Pengelolaan<br>Sistem Informasi Industri<br>Nasional              | Percentase Jumlah Data<br>Informasi Industri<br>Kabupaten Pangandaran<br>yang diinformasikan |            | 10%            | 139.000.000,00       | 20%         | 144.000.000,00       | 30%         | 169.212.073,00       | 40%         | 192.082.844,00       | 50%  | 196.000.000,0<br>0   | 50%         | 196.000.000,00                           | Dinas Tenaga Kerja,<br>Perindustrian, dan<br>Transmigrasi |
|      |        |   |  | <b>Transmigrasi</b>   |  |            |                |                      |             |                      |             |                      |             |                      |  |                      |             |  |   |
| X    | X<br>X | 1   |  | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota         | Cakupan Pelayanan<br>Administrasi Perkantoran  |            | 80%            | 4.107.892.254,0<br>0 | 80%         | 4.152.892.254,0<br>0 | 90%         | 4.040.892.254,0<br>0 | 90%         | 4.027.892.254,<br>00 | 100%   | 4.027.892.254,<br>00 | 100%        | 4.027.892.254,00                         | Dinas Tenaga Kerja,<br>Perindustrian, dan<br>Transmigrasi |
| 3    | 3<br>2 | 2   |  | Program Perencanaan<br>Kawasan Transmigrasi                               | Percentase Rencana<br>Kawasan Transmigrasi<br>baru   |            | 10%            | 50.000.000,00        | 25%         | 50.000.000,00        | 50%         | 40.000.000,00        | 75%         | 45.000.000,00        | 100%   | 50.000.000,00        | 100%        | 50.000.000,00                            | Dinas Tenaga Kerja,<br>Perindustrian, dan<br>Transmigrasi |
| 3    | 3<br>2 | 2   |  | Program Pembangunan<br>Kawasan Transmigrasi                               | Jumlah Kawasan<br>Transmigrasi yang<br>Dibangun  |            | 1 Lokasi       | 50.000.000,00        | 1 Lokasi    | 60.000.000,00        | 1 Lokasi    | 65.000.000,00        | 1 Lokasi    | 70.000.000,00        | 1 Lokasi                                     | 75.000.000,00        | 1 Lokasi    | 75.000.000,00                            | Dinas Tenaga Kerja,<br>Perindustrian, dan<br>Transmigrasi |
| 3    | 3<br>2 | 2   |  | Program Pengembangan<br>Kawasan Transmigrasi                              | Percentase Laju<br>Kemandirian Transmigran   |            | 25%            | 32.090.948,00        | 40%         | 32.974.564,00        | 50%         | 35.937.993,00        | 60%         | 44.205.923,00        | 70%  | 40.387.562,00        | 70%         | 40.387.562,00                            | Dinas Tenaga Kerja,<br>Perindustrian, dan<br>Transmigrasi |
|      |        |   |  | <b>Fungsi Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan</b>                           |  |            |                |                      |             |                      |             |                      |             |                      |  |                      |             |  |   |
|      |        |   |  | <b>Perencanaan</b>  |  |            |                |                      |             |                      |             |                      |             |                      |  |                      |             |  |   |



| Kode  |   | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan       | Indikator Kinerja Program (Outcome)  | Data Kinerja Awal RPJMD (2021) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |                                      |                                      |
|-------|---|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
|       |   |  |  |                                | 2022                              |                   | 2023             |                   | 2024              |                   | 2025              |                   | 2026              |                   | Kondisi Kinerja pada akhir periode (2026) |                                      |                                      |
|       |   |  |  |                                | Target                            | Rp.               | Target           | Rp.               | Target            | Rp.               | Target            | Rp.               | Target            | Rp.               | Target                                    | Rp.                                  |                                      |
| 1     | 2 | 3  | 4  | 5                              | 6                                 | 7                 | 8                | 9                 | 10                | 11                | 12                | 13                | 14                | 13                | 14  | 17                                   |                                      |
| X X   | 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota        | Persentase Nilai Sakip Unsur Perencanaan yang efektif dan akuntabel bappeda                                  | 91                             | 9.037.187.347,00                  | 92                | 9.729.900.325,00 | 93                | 10.308.333.935,00 | 94                | 10.248.184.630,00 | 95                | 10.696.499.287,00 | 95                | 10.696.499.287,00                         | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |                                      |
| 5 1 2 |   | Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Peningkatan kualitas dan cakupan pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | 83                             | 85,71                             | 2.928.987.330,00  | 88,57            | 3.061.055.180,00  | 91,42             | 3.301.851.728,00  | 94,28             | 3.466.592.452,00  | 97,14             | 3.532.002.394,00  | 97,14                                     | 3.532.002.394,00                     | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 1 3 |   | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | - Prosentase perangkat daerah yang memiliki keselarasan program RPJMD dan RKPD                               | 81                             | 83                                | 5.349.410.153,00  | 86               | 5.246.484.779,00  | 89                | 5.900.272.393,00  | 91                | 4.777.322.958,00  | 93                | 4.931.877.815,00  | 93  | 4.931.877.815,00                     | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|       |   |  | - Prosentase perangkat daerah yang memiliki konsistensi perencanaan dan penganggaran                         | 82                             | 84                                |                   | 87               |                   | 89                |                   | 91                |                   | 93                |                   | 93  |                                      | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|       |   | Keuangan   |  |                                |                                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |                                      |                                      |
| X X   | 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota        | 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi   | 90                             | 91                                | 24.942.860.000,00 | 92               | 24.217.927.000,00 | 93                | 24.595.100.000,00 | 94                | 25.009.790.000,00 | 95                | 25.465.744.000,00 | 95  | 25.465.744.000,00                    | Badan pengelola Keuangan Daerah      |
|       |   |  | 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik  | 96                             | 97                                |                   | 98               |                   | 100               |                   | 100               |                   | 100               |                   | 100                                       |                                      |                                      |
|       |   |  | 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur  | 80                             | 85                                |                   | 90               |                   | 95                |                   | 96                |                   | 96                |                   | 96  |                                      |                                      |
|       |   |  | 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas  | 90                             | 92                                |                   | 95               |                   | 97                |                   | 97                |                   | 97                |                   | 97  |                                      |                                      |
| 5 2 2 |   | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                | Persentase OPD yang menyampaikan dokumen keuangan dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan                    | 80%                            | 85%                               | 309.718.970,00    | 90%              | 318.037.404,00    | 100%              | 346.943.845,50    | 100               | 378.834.709,75    | 100               | 414.059.070,00    | 100%                                      | 414.059.070,00                       | Badan pengelola Keuangan Daerah      |
| 5 2 3 |   | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                            | Persentase pengelolaan BMD yang tertib dan akuntabel oleh Perangkat Daerah                                   | 85%                            | 90%                               | 13.826.606.000,00 | 95               | 13.998.262.000,00 | 100               | 14.705.242.000,00 | 100               | 15.475.659.000,00 | 100               | 16.215.072.00     | 100                                       | 16.215.072.000,00                    | Badan pengelola Keuangan Daerah      |
| 5 2 4 |   | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                              | Persentase realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah   | 40                             | 50                                | 9.649.186.000,00  | 60               | 7.878.629.000,00  | 70                | 8.287.347.000,00  | 80                | 8.730.408.500,00  | 90                | 9.239.032.750,00  | 90  | 9.239.032.750,00                     | Badan pengelola Keuangan Daerah      |
|       |   | Kepengawian Dan Pendidikan Dan Pelatihan                           |  |                                |                                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |                                      |                                      |



| Kode |   |   | Bidang Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program Prioritas<br>Pembangunan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome)  | Data<br>Kinerja<br>Awal<br>RPJMD<br>(2021) | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |                       |  |                       |  |
|------|---|---|---|---|--|--------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--|-----------------------|--|
|      |   |   |   |   |  | 2022                                 |                       | 2023   |                       | 2024   |                       | 2025   |                       | 2026   |                       | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode (2026) |                       |  |
|      |   |   |   |   |  | Target                               | Rp.                   | Target | Rp.                   | Target | Rp.                   | Target | Rp.                   | Target | Rp.                   | Target                                       | Rp.                   |  |
| 1    | 2 | 3 | 4   | 5   | 6  | 7                                    | 8                     | 9      | 10                    | 11     | 12                    | 13     | 14                    | 13     | 14                    | 17   |                       |  |
| X    | X | 1 | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota     | Percentase sarana dan<br>prasarana kantor yang<br>terpenuhi   | 4,462,131,248.8<br>7                       | 95%                                  | 4,908,344,373.7<br>6  | 95%    | 4,482,778,540.1<br>3  | 95%    | 4,931,056,394.<br>14  | 95%    | 5,424,162,033<br>.56  | 95%    | 5,424,162,033.56      | Badan Kepegawai dan<br>Sumber Daya Manusia   |                       |  |
|      |   |   |   | Percentase laporan<br>keuangan dengan kualitas<br>baik  |  | 95%                                  |                       | 95%    |                       | 95%    |                       | 95%    | 95%                   | 95%    |                       |  |                       |  |
|      |   |   |   | Pesentase peningkatan<br>kompetensi aparatur  |  | 95%                                  |                       | 95%    |                       | 95%    |                       | 95%    | 95%                   | 95%    |                       |  |                       |  |
|      |   |   |   | Percentase perencanaan<br>dan evaluasi kinerja yang<br>berkualitas  |  | 95%                                  |                       | 95%    |                       | 95%    |                       | 95%    | 95%                   | 95%    |                       |  |                       |  |
| 5    | 3 | 2 | Program Kepegawaian<br>Daerah   | Percentase Cakupan<br>Layanan Kepegawaian<br>Daerah   | 100%                                       | 100%                                 | 3.775.381.500,0<br>0  | 100%   | 4,334,742,750.0<br>0  | 100%   | 4,819,252,125.0<br>0  | 100%   | 5,288,212,437.<br>50  | 100%   | 5,784,068,781<br>.25  | 100%   | 5,784,068,781.25      | Badan Kepegawaian dan<br>Sumber Daya Manusia |
| 5    | 4 | 2 | Program Pengembangan<br>Sumber Daya Manusia                           | Percentase ASN yang<br>mendapatkan sertifikat<br>dalam pengembangan<br>kompetensi jabatan<br>fungisional kepemimpinan,<br>manajerial dan prajabatan | 100%                                       | 100%                                 | 4.373.703.000,0<br>0  | 100%   | 4,517,624,000.0<br>0  | 100%   | 4,499,475,000.0<br>0  | 100%   | 4,594,260,000.<br>00  | 100%   | 4,630,521,000<br>.00  | 100%   | 4,630,521,000.00      | Badan Kepegawaian dan<br>Sumber Daya Manusia |
|      |   |   | Penelitian Dan<br>Pengembangan  |   |  |                                      |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |                       |  |                       |  |
| 5    | 5 | 2 | Program Penelitian Dan<br>Pengembangan Daerah                         | Percentase Hasil<br>kelitbang yang<br>ditindaklanjuti   | N/A  | 40                                   | 630.000.000,00        | 45     | 864.418.925,00        | 50     | 879.751.035,00        | 55     | 946.094.397,00        | 60     | 1.002.005.368<br>,00  | 60   | 1.002.005.368,00      | Badan Perencanaan<br>Pembangunan Daerah      |
|      |   |   | Pengawasan  |   |  |                                      |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |                       |  |                       |  |
| X    | X | 1 | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota     | 1. Persentase sarana<br>prasarana kantor yang<br>terpenuhi  | 100%                                       | 100%                                 | 10.862.668.404,<br>00 | 100%   | 11.038.157.148,<br>07 | 100%   | 11.497.665.755,<br>20 | 100%   | 12.336.332.789<br>,58 | 100%   | 13.065.089.77<br>4,10 | 100%   | 13.065.089.774,1<br>0 | Inspektorat                                  |
|      |   |   |   | 2. Persentase Laporan<br>Keuangan dengan Kualitas<br>Baik   | 75%  | 78%                                  |                       | 80%    |                       | 82%    |                       | 85%    | 90%                   | 90%    |                       |  |                       |  |
|      |   |   |   | 3. Persentase Peningkatan<br>Kompetensi Aparatur  | 75%  | 78%                                  |                       | 80%    |                       | 82%    |                       | 85%    | 90%                   | 90%    |                       |  |                       |  |
|      |   |   |   | 4. Persentase Perencanaan<br>dan Evaluasi Kinerja yang<br>berkualitas   | 75%  | 78%                                  |                       | 80%    |                       | 82%    |                       | 85%    | 90%                   | 90%    |                       |  |                       |  |
| 6    | 1 | 2 | Program Penyelenggaraan<br>Pengawasan                                 | Nilai rata-rata<br>Akuntabilitas Kinerja<br>Instansi Pemerintah (AKIP)<br>OPD   | 66,73                                      | 71,5                                 | 2.905.000.000,0<br>0  | 76,5   | 3.045.750.000,0<br>0  | 81,5   | 3.208.250.000,0<br>0  | 83,5   | 3.317.000.000,<br>00  | 85     | 3.415.000.000<br>,00  | 85   | 3.415.000.000,00      | Inspektorat                                  |



| Kode |   | Bidang Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program Prioritas<br>Pembangunan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome)                                     | Data<br>Kinerja<br>Awal<br>RPJMD<br>(2021)  | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                          |  |                       |                       |                    |
|------|---|---|--|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
|      |   |   |  |   | 2022                                 |                       | 2023                  |                       | 2024                  |                       | 2025                  |                       | 2026                  |                          | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode (2026) |                       |                       |                    |
|      |   |   |  |   | Target                               | Rp.                   | Target                | Rp.                   | Target                | Rp.                   | Target                | Rp.                   | Target                | Rp.                      | Target                                       | Rp.                   |                       |                    |
| 1    | 2 | 3   | 4  | 5   | 6                                    | 7                     | 8                     | 9                     | 10                    | 11                    | 12                    | 13                    | 14                    | 13                       | 14   | 17                    |                       |                    |
|      |   |   | Nilai rata-rata maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) OPD | 3,03  | 3,05                                 |                       | 3,1                   |                       | 3,15                  |                       | 3,25                  |                       | 3,3                   |                          | 3,3  |                       | Inspektorat           |                    |
| 6    | 1 | 3   | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, Dan Asistensi                   | Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)   | 52,06                                | 62                    | 1.465.341.686,0       | 65                    | 1.543.508.770,3       | 72                    | 1.592.000.000,0       | 75                    | 1.655.000.000,        | 82                       | 1.667.000.000                                | 82                    | Inspektorat           |                    |
|      |   |   |  | Jumlah Usulan Unit Kerja Zona Integritas  | 4<br>Unit<br>Kerja                   | 4 Unit<br>Kerja       | 0                     | 4 Unit<br>Kerja       | 0                     | 4 Unit<br>Kerja       | 0                     | 4 Unit<br>Kerja       | 00                    | 4 Unit<br>Kerja          | 00   | 1.667.000.000,00      | Inspektorat           |                    |
|      |   |   | Sekretariat Dewan  |   |                                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                          |  |                       |                       |                    |
| X    | X | 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                | 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi  | 90%                                  | 29.030.232.454,<br>00 | 90%                   | 29.320.534.778,<br>00 | 95%                   | 29.613.740.126,<br>13 | 95%                   | 31.245.066.514<br>,80 | 100%                  | 32.547.976.906,1<br>6,19 | 100%   | 32.547.976.906,1<br>9 | Sekretariat Dewan     |                    |
|      |   |   |  | 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik   |                                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                          |  |                       |                       |                    |
|      |   |   |  | 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur   |                                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                          |  |                       |                       |                    |
|      |   |   |  | 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas   |                                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                          |  |                       |                       |                    |
| 4    | 2 | 2   | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd                         | Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang telaksaan dengan baik  |                                      | 60                    | 14.555.847.040,<br>00 | 63                    | 15.201.374.055,<br>00 | 66                    | 16.876.703.797,<br>90 | 70                    | 18.147.520.835<br>,88 | 73                       | 19.233.996.04<br>4,24                        | 73                    | 19.233.996.044,2<br>4 | Sekretariat Dewan  |
|      |   |   | Sekretariat Daerah   |   |                                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                          |  |                       |                       |                    |
| 4    | 1 | 2   | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat                              | Persentase Keberhasilan Program Pemerintahan, Harmoniasi Produk Hukum Dan Kesejahteraan Rakyat                                  |                                      | 87                    | 14.831.248.709,<br>00 | 89                    | 14.979.561.196,<br>00 | 90                    | 15.129.356.808,<br>00 | 95                    | 15.280.650.376<br>,00 | 95                       | 15.433.456.88<br>0,00                        | 95                    | 15.433.456.880,0<br>0 | Sekretariat Daerah |
| 4    | 1 | 6   | Program Perekonomian Dan Pembangunan                                       | Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Program Perekonomian, Pembangunan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah |                                      | 87                    | 2.650.145.713,0<br>0  | 89                    | 2.676.647.170,0<br>0  | 90                    | 2.703.413.642,0<br>0  | 90                    | 2.730.447.778,<br>00  | 90                       | 2.757.752.256<br>,00                         | 90                    | 2.757.752.256,00      | Sekretariat Daerah |
| X    | X | 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                | 1. Persentase penunjang urusan pemerintah daerah dan dukungan pelaksanaan kegiatan KDH/WKD yang                                 |                                      | 84                    | 28.945.968.118,<br>00 | 88                    | 29.428.449.519,<br>00 | 92                    | 31.512.332.587,<br>00 | 96                    | 33.594.513.639<br>,00 | 96                       | 35.294.385.29<br>9,00                        | 96                    | 35.294.385.299,0<br>0 | Sekretariat Daerah |



| Kode |   | Bidang Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program Prioritas<br>Pembangunan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome)  | Data<br>Kinerja<br>Awal<br>RPJMD<br>(2021)                   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |  |                  |                   |                    |
|------|---|---|---|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--|------------------|-------------------|--------------------|
|      |   |   |   |  | 2022                                 |                 | 2023            |                 | 2024            |                 | 2025            |                  | 2026             |                  | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode (2026) |                  |                   |                    |
|      |   |   |   |  | Target                               | Rp.             | Target          | Rp.             | Target          | Rp.             | Target          | Rp.              | Target           | Rp.              | Target                                       | Rp.              |                   |                    |
| 1    | 2 | 3   | 4   | 5  | 6                                    | 7               | 8               | 9               | 10              | 11              | 12              | 13               | 14               | 13               | 14   | 17               |                   |                    |
|      |   |   | difasilitasi  |  |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |  |                  |                   |                    |
|      |   |   | 2. Persentase pelaksanaan Dokumentasi dan Informasi kegiatan KDH/WKDH yang dilaksanakan                                     |  |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |  |                  |                   |                    |
|      |   |   | 3. Persentase Keberhasilan Penataan Organisasi, Pelayanan Publik dan Evaluasi Kinerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah |  |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |  |                  |                   |                    |
|      |   |   | <b>Unsur Kewilayahan</b>  |  |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |  |                  |                   |                    |
| X    | X | 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota   | 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi         | 100%                                 | 1.504.255.338,0 | 100%            | 1.509.060.851,0 | 100%            | 1.526.826.074,0 | 100%            | 1.547.919.361,00 | 100%             | 1.563.690.067,00 | 100%   | 1.563.690.067,00 | Kecamatan Cigugur |                    |
|      |   |   | 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik   |  |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |  |                  |                   |                    |
|      |   |   | 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur   |  |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |  |                  |                   |                    |
|      |   |   | 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas   |  |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |  |                  |                   |                    |
| 7    | 1 | 2   | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik |                                      | 100%            | 60.000.000,00   | 100%            | 66.000.000,00   | 100%            | 146.300.000,00  | 100%             | 79.860.000,00    | 100%             | 87.846.000,00                                | 100%             | 87.846.000,00     | Kecamatan Cigugur  |
| 7    | 1 | 3   | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan  | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa                      |                                      | 100%            | 3.500.000,00    | 100%            | 3.850.000,00    | 100%            | 4.235.000,00    | 100%             | 4.658.500,00     | 100%             | 5.124.350,00                                 | 100%             | 5.124.350,00      | Kecamatan Cigugur  |
| 7    | 1 | 4   | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum  | Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum         |                                      | 100%            | 3.500.000,00    | 100%            | 3.850.000,00    | 100%            | 4.325.000,00    | 100%             | 4.658.500,00     | 100%             | 5.124.350,00                                 | 100%             | 5.124.350,00      | Kecamatan Cigugur  |
| 7    | 1 | 5   | Program Penyelenggaraan Urusan Pereintahan Umum   | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum          |                                      | 100%            | 2.900.000,00    | 100%            | 3.190.000,00    | 100%            | 3.509.000,00    | 100%             | 3.859.900,00     | 100%             | 4.245.890,00                                 | 100%             | 4.245.890,00      | Kecamatan Cigugur  |
| 7    | 1 | 6   | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa   | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa         |                                      | 1%              | 86.000.000,00   | 1%              | 72.600.000,00   | 1%              | 119.860.000,00  | 1%               | 87.846.000,00    | 1%               | 96.630.600,00                                | 1%               | 96.630.600,00     | Kecamatan Cigugur  |
| X    | X | 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota   | 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi         |                                      | 100%            | 2.111.007.461,0 | 100%            | 2.342.723.207,0 | 100%            | 2.623.922.028,0 | 100%             | 2.832.220.681,00 | 100%             | 3.092.953.134,00                             | 100%             | 3.092.953.134,00  | Kecamatan Cijulang |



| Kode |   | Bidang Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program Prioritas<br>Pembangunan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome)  | Data<br>Kinerja<br>Awal<br>RPJMD<br>(2021)  | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                      |  |  |                |                  |                |                  |                |                  |                |  |                |                    |                   |
|------|---|---|---|---|---|--|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--|----------------|--------------------|-------------------|
|      |   |   |   |   | 2022  |  | 2023   |                | 2024             |                | 2025             |                | 2026             |                | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode (2026) |                |                    |                   |
|      |   |   |   |   | Target  | Rp.  | Target   | Rp.            | Target           | Rp.            | Target           | Rp.            | Target           | Rp.            | Target                                       | Rp.            |                    |                   |
| 1    | 2 | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  | 8  | 9              | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 13             | 14   | 17             |                    |                   |
|      |   |   | 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik<br><br>3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur<br><br>4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas |   |   |  |  |                |                  |                |                  |                |                  |                |  |                |                    |                   |
| 7    | 1 | 2   |   |   | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100%   | 185.040.000,00 | 100%             | 203.544.000,00 | 100%             | 304.598.400,00 | 100%             | 246.288.240,00 | 100%   | 270.917.064,00 | Kecamatan Cijulang |                   |
| 7    | 1 | 3   |   |   | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa                      | 100%   | 2.795.000,00   | 100%             | 3.074.500,00   | 100%             | 3.381.950,00   | 100%             | 3.720.145,00   | 100%   | 4.092.160,00   | Kecamatan Cijulang |                   |
| 7    | 1 | 4   |   |   | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum        | Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum         | 100%   | 890.000,00     | 100%             | 979.000,00     | 100%             | 1.076.900,00   | 100%             | 1.184.590,00   | 100%   | 1.303.049,00   | Kecamatan Cijulang |                   |
| 7    | 1 | 5   | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum   | 100%  | 1.730.000,00   | 100%   | 1.903.000,00   | 100%             | 2.093.300,00   | 100%             | 2.302.630,00   | 100%             | 2.532.893,00   | 100%   | 2.532.893,00   | Kecamatan Cijulang |                   |
| 7    | 1 | 6   | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa  | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   | 100%  | 57.247.501,00  | 100%   | 59.897.751,00  | 100%             | 65.887.526,00  | 100%             | 72.476.279,00  | 100%             | 79.723.907,00  | 100%   | 79.723.907,00  | Kecamatan Cijulang |                   |
| X    | X | 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota   | 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi<br><br>2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik<br><br>3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur<br><br>4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas |   | 100%   | 1.979.179.275,00   | 100%           | 2.177.097.203,00 | 100%           | 2.285.228.923,00 | 100%           | 2.459.898.265,00 | 100%           | 2.683.638.477,00                             | 100%           | 2.683.638.477,00   | Kecamatan Cimerak |
| 7    | 1 | 2   |   |   |   | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum             | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100%           | 1.500.000,00     | 100%           | 1.650.000,00     | 100%           | 1.815.000,00     | 100%           | 1.996.500,00                                 | 100%           | 2.196.150,00       | Kecamatan Cimerak |
| 7    | 1 | 3   | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa  | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa   | 100%  | 74.173.852,00  | 100%   | 81.591.237,00  | 100%             | 89.750.361,00  | 100%             | 98.725.397,00  | 100%             | 108.597.937,00 | 100%   | 108.597.937,00 | Kecamatan Cimerak  |                   |



| Kode |   |   | Bidang Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program Prioritas<br>Pembangunan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome)  | Data<br>Kinerja<br>Awal<br>RPJMD<br>(2021) | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |  |                         |                         |
|------|---|---|---|---|--|--------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|
|      |   |   |   |   |  | 2022                                 |                | 2023             |                | 2024             |                | 2025             |                | 2026             |                | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode (2026) |                         |                         |
|      |   |   |   |   |  | Target                               | Rp.            | Target           | Rp.            | Target           | Rp.            | Target           | Rp.            | Target           | Rp.            | Target                                       | Rp.                     |                         |
| 1    | 2 | 3 | 4   | 5   | 6  | 7                                    | 8              | 9                | 10             | 11               | 12             | 13               | 14             | 13               | 14             | 17   |                         |                         |
| 7    | 1 | 4 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik             | Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum  |  | 100%                                 | 251.291.000,00 | 100%             | 276.420.100,00 | 100%             | 384.762.110,00 | 100%             | 334.468.321,00 | 100%             | 367.915.153,00 | 100%   | 367.915.153,00          | Kecamatan Cimerak       |
| 7    | 1 | 5 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan                    | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum   |  | 100%                                 | 3.633.500,00   | 100%             | 3.996.850,00   | 100%             | 4.396.535,00   | 100%             | 4.836.189,00   | 100%             | 5.319.807,00   | 100%   | 5.319.807,00            | Kecamatan Cimerak       |
| 7    | 1 | 6 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum                    | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   |  | 100%                                 | 7.691.000,00   | 100%             | 8.460.100,00   | 100%             | 9.306.110,00   | 100%             | 10.236.721,00  | 100%             | 11.260.393,00  | 100%   | 11.260.393,00           | Kecamatan Cimerak       |
| X    | X | 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota           | 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi<br>2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik<br>3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur<br>4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas | 100%                                       | 2.220.830.592,00                     | 100%           | 2.442.913.651,20 | 100%           | 2.687.205.016,32 | 100%           | 2.955.925.517,95 | 100%           | 3.251.518.069,75 | 100%           | 3.251.518.069,75                             | Kecamatan Langkaplancar |                         |
| 7    | 1 | 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik             | persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik  |  | 100%                                 | 309.000.000,00 | 100%             | 13.200.000,00  | 100%             | 14.520.000,00  | 100%             | 15.972.000,00  | 100%             | 17.569.200,00  | 100%   | 17.569.200,00           | Kecamatan Langkaplancar |
| 7    | 1 | 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan                    | persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa   |  | 100%                                 | 3.996.110,00   | 100%             | 4.395.721,00   | 100%             | 4.835.293,10   | 100%             | 5.318.822,41   | 100%             | 5.850.704,65   | 100%   | 5.850.704,65            | Kecamatan Langkaplancar |
| 7    | 1 | 4 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum                    | persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum  |  | 100%                                 | 3.000.000,00   | 100%             | 3.300.000,00   | 100%             | 3.630.000,00   | 100%             | 3.993.000,00   | 100%             | 4.392.300,00   | 100%   | 4.392.300,00            | Kecamatan Langkaplancar |
| 7    | 1 | 5 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                      | persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum   |  | 100%                                 | 3.750.000,00   | 100%             | 4.125.000,00   | 100%             | 4.537.500,00   | 100%             | 4.991.250,00   | 100%             | 5.490.375,00   | 100%   | 5.490.375,00            | Kecamatan Langkaplancar |
| 7    | 1 | 6 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa                    | persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   |  | 100%                                 | 76.500.000,00  | 100%             | 73.150.000,00  | 100%             | 80.465.000,00  | 100%             | 88.511.500,00  | 100%             | 97.362.650,00  | 100%   | 97.362.650,00           | Kecamatan Langkaplancar |
| X    | X | 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota           | 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi<br>2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik   |  | 100%                                 | 168.405.320,00 | 100%             | 168.405.320,00 | 100%             | 168.405.320,00 | 100%             | 168.405.320,00 | 100%             | 168.405.320,00 | 100%   | 168.405.320,00          | Kecamatan Mangunjaya    |



| Kode |   | Bidang Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program Prioritas<br>Pembangunan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome) | Data<br>Kinerja<br>Awal<br>RPJMD<br>(2021)                  | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                            |     |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |  |                  |      |                  |                      |
|------|---|---|--|---|---|-----|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--|------------------|------|------------------|----------------------|
|      |   |   |  |   | 2022  |     | 2023   |                  | 2024   |                  | 2025   |                  | 2026   |                  | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode (2026) |                  |      |                  |                      |
|      |   |   |  |   | Target  | Rp. | Target | Rp.              | Target | Rp.              | Target | Rp.              | Target | Rp.              | Target                                       | Rp.              |      |                  |                      |
| 1    | 2 | 3   | 4                                      | 5   | 6   | 7   | 8      | 9                | 10     | 11               | 12     | 13               | 14     | 13               | 14   | 17               |      |                  |                      |
|      |   |   |  |   | 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur                   |     | 100%   | 92.337.200,00    | 100%   | 92.337.200,00    | 100%   | 92.337.200,00    | 100%   | 92.337.200,00    | 100%   | 92.337.200,00    |      |                  |                      |
|      |   |   |  |   | 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas |     | 100%   | 194.874.032,00   | 100%   | 194.874.032,00   | 100%   | 194.874.032,00   | 100%   | 194.874.032,00   | 100%   | 194.874.032,00   |      |                  |                      |
| 7    | 1 | 2   |  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik    |     | 100%   | 126.698.000,00   | 100%   | 128.598.470,00   | 100%   | 130.527.447,00   | 100%   | 132.485.359,00   | 100%   | 134.472.639,00   | 100% | 134.472.639,00   | Kecamatan Mangunjaya |
| 7    | 1 | 3   |  | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa                         |     | 100%   | 3.235.000,00     | 100%   | 3.283.525,00     | 100%   | 3.332.778,00     | 100%   | 3.382.770,00     | 100%   | 3.433.511,00     | 100% | 3.433.511,00     | Kecamatan Mangunjaya |
| 7    | 1 | 4   |  | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum            |     | 100%   | 3.235.000,00     | 100%   | 3.283.525,00     | 100%   | 3.332.778,00     | 100%   | 3.382.770,00     | 100%   | 3.433.511,00     | 100% | 3.433.511,00     | Kecamatan Mangunjaya |
| 7    | 1 | 5   |  | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum             |     | 100%   | 3.485.000,00     | 100%   | 3.537.275,00     | 100%   | 3.590.334,00     | 100%   | 3.644.189,00     | 100%   | 3.698.852,00     | 100% | 3.698.852,00     | Kecamatan Mangunjaya |
| 7    | 1 | 6   |  | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa           |     | 100%   | 48.660.000,00    | 100%   | 49.389.900,00    | 100%   | 50.130.749,00    | 100%   | 50.882.710,00    | 100%   | 51.645.950,00    | 100% | 51.645.950,00    | Kecamatan Mangunjaya |
| X    | X | 1   |  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi            |     | 100%   | 2.214.072.451,00 | 100%   | 2.435.479.696,10 | 100%   | 2.679.027.665,71 | 100%   | 2.946.930.432,28 | 100%   | 3.241.623.475,51 | 100% | 3.241.623.475,51 | Kecamatan Padaherang |
| 7    | 1 | 2   |  |   | 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik             |     |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |  |                  |      |                  |                      |
| 7    | 1 | 3   |  |   | 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur                   |     |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |  |                  |      |                  |                      |
| 7    | 1 | 4   |  |   | 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas |     |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |  |                  |      |                  |                      |
| 7    | 1 | 2   |  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik    |     | 100%   | 191.160.000,00   | 100%   | 210.276.000,00   | 100%   | 231.303.600,00   | 100%   | 254.433.960,00   | 100%   | 279.877.356,00   | 100% | 279.877.356,00   | Kecamatan Padaherang |
| 7    | 1 | 3   |  | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa                         |     | 100%   | 10.000.000,00    | 100%   | 11.000.000,00    | 100%   | 12.100.000,00    | 100%   | 13.310.000,00    | 100%   | 14.641.000,00    | 100% | 14.641.000,00    | Kecamatan Padaherang |
| 7    | 1 | 4   |  | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum            |     | 100%   | 7.000.000,00     | 100%   | 7.700.000,00     | 100%   | 8.470.000,00     | 100%   | 9.317.000,00     | 100%   | 10.248.700,00    | 100% | 10.248.700,00    | Kecamatan Padaherang |



| Kode |   |   | Bidang Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program Prioritas<br>Pembangunan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome)                          | Data<br>Kinerja<br>Awal<br>RPJMD<br>(2021) | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |  |                  |                       |
|------|---|---|---|---|--|--------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--|------------------|-----------------------|
|      |   |   |   |   |  | 2022                                 |                  | 2023   |                  | 2024   |                  | 2025   |                  | 2026   |                  | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode (2026) |                  |                       |
|      |   |   |   |   |  | Target                               | Rp.              | Target | Rp.              | Target | Rp.              | Target | Rp.              | Target | Rp.              | Target                                       | Rp.              |                       |
| 1    | 2 | 3 | 4   | 5   | 6  | 7                                    | 8                | 9      | 10               | 11     | 12               | 13     | 14               | 13     | 14               | 17   |                  |                       |
| 7    | 1 | 5 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                      | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum             |  | 100%                                 | 2.000.000,00     | 100%   | 2.200.000,00     | 100%   | 2.420.000,00     | 100%   | 2.662.000,00     | 100%   | 2.928.200,00     | 100%   | 2.928.200,00     | Kecamatan Padaherang  |
| 7    | 1 | 6 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa                    | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa           |  | 100%                                 | 79.560.000,00    | 100%   |                  | 100%   | 96.267.600,00    | 100%   | 105.894.360,00   | 100%   | 116.483.796,00   | 100%   | 116.483.796,00   | Kecamatan Padaherang  |
| X    | X | 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota           | 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi            |  | 100%                                 | 1.641.675.766,00 | 100%   | 1.894.343.343,00 | 100%   | 2.066.127.677,00 | 100%   | 2.251.990.445,00 | 100%   | 2.470.739.489,00 | 100%   | 2.470.739.489,00 | Kecamatan Parigi      |
|      |   |   |   | 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik             |  |                                      |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |  |                  |                       |
|      |   |   |   | 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur                   |  |                                      |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |  |                  |                       |
|      |   |   |   | 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas |  |                                      |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |  |                  |                       |
| 7    | 1 | 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik             | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik    |  | 100%                                 | 219.500.000,00   | 100%   | 220.000.000,00   | 100%   | 301.250.000,00   | 100%   | 221.155.000,00   | 100%   | 302.520.500,00   | 100%   | 302.520.500,00   | Kecamatan Parigi      |
| 7    | 1 | 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan                    | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa                         |  | 100%                                 | 3.500.000,00     | 100%   | 3.850.000,00     | 100%   | 4.235.000,00     | 100%   | 4.658.500,00     | 100%   | 5.124.350,00     | 100%   | 5.124.350,00     | Kecamatan Parigi      |
| 7    | 1 | 4 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum                    | Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum            |  | 100%                                 | 1.000.000,00     | 100%   | 1.100.000,00     | 100%   | 1.210.000,00     | 100%   | 1.331.000,00     | 100%   | 1.464.100,00     | 100%   | 1.464.100,00     | Kecamatan Parigi      |
| 7    | 1 | 5 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                      | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum             |  | 100%                                 | 2.500.000,00     | 100%   | 2.750.000,00     | 100%   | 3.025.000,00     | 100%   | 3.327.500,00     | 100%   | 3.660.250,00     | 100%   | 3.660.250,00     | Kecamatan Parigi      |
| 7    | 1 | 6 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa                    | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa           |  | 100%                                 | 51.000.000,00    | 100%   | 50.600.000,00    | 100%   | 100.660.000,00   | 100%   | 61.226.000,00    | 100%   | 67.348.600,00    | 100%   | 67.348.600,00    | Kecamatan Parigi      |
| X    | X | 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota           | 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi            |  | 100%                                 | 2.043.238.764,00 | 100%   | 2.288.177.640,00 | 100%   | 2.541.921.904,00 | 100%   | 2.742.020.545,00 | 100%   | 2.993.732.985,00 | 100%   | 2.993.732.985,00 | Kecamatan Pangandaran |
|      |   |   |   | 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik             |  |                                      |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |  |                  |                       |
|      |   |   |   | 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur                   |  |                                      |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |  |                  |                       |
|      |   |   |   | 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas |  |                                      |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |  |                  |                       |



| Kode |   | Bidang Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program Prioritas<br>Pembangunan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome)                      | Data<br>Kinerja<br>Awal<br>RPJMD<br>(2021)                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |  |                  |                       |
|------|---|---|---|---|--------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--|------------------|-----------------------|
|      |   |   |   |   | 2022                                 |                  | 2023   |                  | 2024   |                  | 2025   |                  | 2026   |                  | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode (2026) |                  |                       |
|      |   |   |   |   | Target                               | Rp.              | Target | Rp.              | Target | Rp.              | Target | Rp.              | Target | Rp.              | Target                                       | Rp.              |                       |
| 1    | 2 | 3   | 4   | 5   | 6                                    | 7                | 8      | 9                | 10     | 11               | 12     | 13               | 14     | 13               | 14   | 17               |                       |
| 7    | 1 | 2   | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Percentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik    | 100%                                 | 185.040.000,00   | 100%   | 203.544.000,00   | 100%   | 304.598.400,00   | 100%   | 246.288.240,00   | 100%   | 270.917.064,00   | 100%   | 270.917.064,00   | Kecamatan Pangandaran |
| 7    | 1 | 3   | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | Percentase Pemberdayaan Masyarakat Desa                         | 100%                                 | 2.795.000,00     | 100%   | 3.074.500,00     | 100%   | 3.381.950,00     | 100%   | 3.720.145,00     | 100%   | 4.092.160,00     | 100%   | 4.092.160,00     | Kecamatan Pangandaran |
| 7    | 1 | 4   | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | Percentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum            | 100%                                 | 890.000,00       | 100%   | 979.000,00       | 100%   | 1.076.900,00     | 100%   | 1.184.590,00     | 100%   | 1.303.049,00     | 100%   | 1.303.049,00     | Kecamatan Pangandaran |
| 7    | 1 | 5   | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Percentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum             | 100%                                 | 1.730.000,00     | 100%   | 1.903.000,00     | 100%   | 2.093.300,00     | 100%   | 2.302.630,00     | 100%   | 2.532.893,00     | 100%   | 2.532.893,00     | Kecamatan Pangandaran |
| 7    | 1 | 6   | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | Percentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | 100%                                 | 57.247.501,00    | 100%   | 59.897.751,00    | 100%   | 65.887.526,00    | 100%   | 72.476.279,00    | 100%   | 79.723.907,00    | 100%   | 79.723.907,00    | Kecamatan Pangandaran |
| X    | X | 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1. Percentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi            | 100%                                 | 2.357.627.738,00 | 100%   | 2.593.390.512,00 | 100%   | 2.852.729.563,00 | 100%   | 3.138.002.519,00 | 100%   | 3.451.802.771,00 | 100%   | 3.451.802.771,00 | Kecamatan Sidamulih   |
|      |   |   |   | 2. Percentase laporan keuangan dengan kualitas baik             | 100%                                 |                  | 100%   |                  | 100%   |                  | 100%   |                  | 100%   |                  | 100%   |                  |                       |
|      |   |   |   | 3. Percentase peningkatan kompetensi aparatur                   | 100%                                 |                  | 100%   |                  | 100%   |                  | 100%   |                  | 100%   |                  | 100%   |                  |                       |
|      |   |   |   | 4. Percentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas | 100%                                 |                  | 100%   |                  | 100%   |                  | 100%   |                  | 100%   |                  | 100%   |                  |                       |
| 7    | 1 | 2   | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Percentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik    | 100%                                 | 185.040.000,00   | 100%   | 203.544.000,00   | 100%   | 223.898.400,00   | 100%   | 246.288.240,00   | 100%   | 270.917.064,00   | 100%   | 270.917.064,00   | Kecamatan Sidamulih   |
| 7    | 1 | 3   | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | Percentase Pemberdayaan Masyarakat Desa                         | 100%                                 | 3.235.000,00     | 100%   | 3.558.500,00     | 100%   | 3.914.350,00     | 100%   | 4.305.785,00     | 100%   | 4.736.364,00     | 100%   | 4.736.364,00     | Kecamatan Sidamulih   |
| 7    | 1 | 4   | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | Percentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum            | 100%                                 | 3.235.000,00     | 100%   | 3.558.500,00     | 100%   | 3.914.350,00     | 100%   | 4.305.785,00     | 100%   | 4.736.364,00     | 100%   | 4.736.364,00     | Kecamatan Sidamulih   |
| 7    | 1 | 5   | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Percentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum             | 100%                                 | 3.485.000,00     | 100%   | 3.833.500,00     | 100%   | 4.216.850,00     | 100%   | 4.638.535,00     | 100%   | 5.102.389,00     | 100%   | 5.102.389,00     | Kecamatan Sidamulih   |
| 7    | 1 | 6   | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | Percentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | 100%                                 | 55.906.000,00    | 100%   | 61.496.600,00    | 100%   | 67.646.260,00    | 100%   | 74.410.886,00    | 100%   | 81.851.975,00    | 100%   | 81.851.975,00    | Kecamatan Sidamulih   |



| Kode |   | Bidang Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program Prioritas<br>Pembangunan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome)                            | Data<br>Kinerja<br>Awal<br>RPJMD<br>(2021)  | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                   |  |                   |                      |
|------|---|---|---|---|--------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|-------------------|--|-------------------|----------------------|
|      |   |   |   |   | 2022                                 |                  | 2023   |                  | 2024   |                  | 2025   |                  | 2026   |                   | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode (2026) |                   |                      |
|      |   |   |   |   | Target                               | Rp.              | Target | Rp.              | Target | Rp.              | Target | Rp.              | Target | Rp.               | Target                                       | Rp.               |                      |
| 1    | 2 | 3   | 4   | 5   | 6                                    | 7                | 8      | 9                | 10     | 11               | 12     | 13               | 14     | 13                | 14   | 17                |                      |
| X    | X | 1   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota | 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi<br>2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik<br>3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur<br>4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas | 100%                                 | 2.289.012.030,00 | 100%   | 2.517.913.233,00 | 100%   | 2.769.704.556,00 | 100%   | 3.046.675.012,00 | 100%   | 3.351.342.513,00  | 100%   | 3.351.342.513,00  | Kecamatan Kalipucang |
| 7    | 1 | 2   |   |   |                                      |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                   |  |                   |                      |
| 7    | 1 | 3   |   |   |                                      |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                   |  |                   |                      |
| 7    | 1 | 4   |   |   |                                      |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                   |  |                   |                      |
| 7    | 1 | 5   |   |   |                                      |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                   |  |                   |                      |
| 7    | 1 | 6   |   |   |                                      |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                   |  |                   |                      |
|      |   |   | Unsur Pemerintahan<br>Umum  |   |                                      |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                   |  |                   |                      |
| X    | X | 1   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota | 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi<br>2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik<br>3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur<br>4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas | 100%                                 | 7.424.106.899,00 | 100%   | 8.213.289.399,00 | 100%   | 8.887.719.899,00 | 100%   | 9.594.827.096,00 | 100%   | 10.249.673.399,00 | 100%   | 10.249.673.399,00 | Bakesbangpol         |
| 8    | 1 | 2   |   |   |                                      |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                   |  |                   |                      |



| Kode |   |   | Bidang Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program Prioritas<br>Pembangunan  | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome)   | Data<br>Kinerja<br>Awal<br>RPJMD<br>(2021) | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |     |                             |     |                             |     |                             |     |                               |     |  |              |
|------|---|---|--|--|--|--------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|-----------------------------|-----|-----------------------------|-----|-------------------------------|-----|--|--------------|
|      |   |   |  |  |  | 2022                                 |     | 2023                        |     | 2024                        |     | 2025                        |     | 2026                          |     | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode (2026) |              |
|      |   |   |  |  |  | Target                               | Rp. | Target                      | Rp. | Target                      | Rp. | Target                      | Rp. | Target                        | Rp. | Target                                       | Rp.          |
| 1    | 2 | 3 | 4  | 5  | 6  | 7                                    | 8   | 9                           | 10  | 11                          | 12  | 13                          | 14  | 13                            | 14  | 17   |              |
| 8    | 1 | 3 | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Persentase Masyarakat yang memahami Politik Dalam Negeri                         | 90%  | 2.757.879.000,00                     | 91% | 44.148.920.00,00            | 92% | 3.175.420.00,00             | 93% | 3.201.920.00,00             | 94% | 3.228.420.00,00               | 94% | 3.228.420.000,00                             | Bakesbangpol |
| 8    | 1 | 4 | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  | Persentase Masyarakat yang Memahami tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas    | 90%  | 364.000.000,00                       | 91% | 1.174.000.00,00             | 92% | 1.385.000.00,00             | 93% | 1.597.000.00,00             | 94% | 1.809.000.00,00               | 94% | 1.809.000.000,00                             | Bakesbangpol |
| 8    | 1 | 5 | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya   | Persentase Masyarakat yang Memahami tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 75%  | 383.038.300,00                       | 78% | 421.068.813,00              | 81% | 491.763.600                 | 84% | 564.592.140,00              | 87% | 648.344.961,00                | 87% | 648.344.961,00                               | Bakesbangpol |
| 8    | 1 | 6 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial                             | Persentase Pelaksanaan koordinasi Kewaspadaan Daerah                             | 70%  | 1.822.536.710,00                     | 75% | 2.001.102.180,00            | 80% | 2.163.677.685,00            | 85% | 2.404.747.037,00            | 90% | 2.614.433.542,54              | 90% | 2.614.433.542,00                             | Bakesbangpol |
|      |   |   | <b>TOTAL</b>   |  |  | <b>1.511.345.161.785,54</b>          |     | <b>1.754.312.446.883,69</b> |     | <b>1.811.936.384.876,45</b> |     | <b>1.913.928.921.795,04</b> |     | <b>2.005.452.715.5.839,99</b> |     | <b>2.005.452.715.839,99</b>                  |              |

(Sumber: BPKD Diolah, 2021)

**RPJMD**

**RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**2021 - 2026**

# **BAB VIII**

---

**KINERJA PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DAERAH,**



## BAB VIII

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Sebagai sebuah daerah yang otonom, Kabupaten Pangandaran diwajibkan menetapkan target-target capaian dari indikator-indikator yang telah disepakati bersama antara pemerintah Kabupaten dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Pangandaran. Target pencapaian ini adalah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Target capaian indikator kinerja utama disajikan dalam tabel berikut



**Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021-2026**  
**Pemerintah Kabupaten Pangandaran**

| Indikator Kinerja Daerah   | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |             |             |             |             |             | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|--|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|  |   | 2020                        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |  |
| 1  | 2                                       | 3                           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           |  |
| Indeks Kesalehan Sosial  | N/A                                     | 60,00                       | 61,00       | 62,00       | 63,00       | 64,00       | 64,00       |  |
| Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani         | N/A                                     | 0,2344                      | 0,2344      | 0,2579      | 0,2814      | 0,3048      | 0,3048      |  |
| Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa                                    | N/A                                     | 80                          | 82,5        | 85          | 87,5        | 90          | 90          |  |
| Indeks Desa Membangun  | 0,7059                                  | 0,7689                      | 0,7691      | 0,7693      | 0,7696      | 0,7770      | 0,7770      |  |
| Persentase pemenuhan kriteria GSTC di destinasi pariwisata (Persen)  | N/A                                     | 20                          | 30          | 40          | 50          | 60          | 60          |  |
| Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan                                      | N/A                                     | 600.000                     | 630.000     | 660.000     | 690.000     | 720.000     | 720.000     |  |
| Indeks Pembangunan Manusia   | 68,06                                   | 68,50-69,12                 | 69,12-69,59 | 69,59-70,06 | 70,06-70,53 | 70,53-71,00 | 70,53-71,00 |  |
| Indeks Pembangunan Gender  | 89,78                                   | 89,95                       | 90,01       | 90,07       | 90,12       | 90,12       | 90,12       |  |
| Indeks Kesehatan   | 79,08                                   | 79,88                       | 80,28       | 80,68       | 81,08       | 81,48       | 81,48       |  |
| Indeks Pendidikan  | 59,33                                   | 59,76                       | 60,02       | 60,33       | 60,64       | 60,95       | 60,95       |  |
| Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat                               | 16,37                                   | 18,56                       | 19,16       | 19,61       | 19,95       | 20,24       | 20,24       |  |
| Jumlah Pemuda Berprestasi yang mendapat penghargaan                  | N/A                                     | 38                          | 38          | 40          | 40          | 45          | 45          |  |
| Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)                        | 0,55                                    | 0,55                        | 0,56        | 0,57        | 0,58        | 0,59        | 0,59        |  |
| Indeks Pemberdayaan Gender   | 74,57                                   | 74,57                       | 74,58       | 74,59       | 74,60       | 74,61       | 74,61       |  |
| Laju Pertumbuhan Ekonomi   | -0,05                                   | 5,13                        | 5,48        | 5,82        | 6,16        | 6,50        | 6,50        |  |
| Persentase Penduduk Miskin   | 8,99                                    | 7,5-7,0                     | 7,0-6,5     | 6,5-6,0     | 6,0-5,5     | 5,5-5,0     | 5,5-5,0     |  |
| PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun) | 4,597                                   | 4,667                       | 4,923       | 5,109       | 5,310       | 5,520       | 5,520       |  |
| Persentase Realisasi Nilai Investasi                                 | 6,25                                    | 6,89                        | 7,24        | 7,60        | 7,98        | 8,38        | 8,38        |  |
| Rasio Kewirausahaan  | 2,54                                    | 3,75                        | 3,95        | 4,15        | 4,30        | 4,50        | 4,50        |  |
| Indeks Ketahanan Pangan  | 81,99                                   | 81,5                        | 82          | 82,5        | 83          | 83,5        | 83,5        |  |
| Persentase Rumah Layak Huni (Persen)                                 | 73                                      | 74                          | 74          | 74          | 74          | 75          | 75          |  |
| Tingkat Pengangguran Terbuka   | 5,08                                    | 5,00-4,50                   | 4,90-4,25   | 4,80-4,00   | 4,70-3,75   | 4,60-3,50   | 4,60-3,50   |  |
| Persentase PPKS yang Mandiri   | 27                                      | 37                          | 47          | 57          | 67          | 77          | 77          |  |
| Indeks Reformasi Birokrasi   | B                                       | B                           | B           | BB          | BB          | A           | A           |  |
| Nilai SAKIP  | B                                       | 68                          | 70          | 73          | 80          | 82          | 82          |  |
| Tingkat Maturitas SPIP   | 3                                       | 3                           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           |  |
| Nilai LAKE Kabupaten/Kota  | CC                                      | B                           | BB          | A           | A           | AA          | AA          |  |
| Indeks SPBE  | 3,02                                    | 3                           | 3,05        | 3,1         | 3,2         | 3,25        | 3,25        |  |
| Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah                                   | 69,00                                   | 71,00                       | 72,00       | 73,00       | 74,00       | 75,00       | 75,00       |  |



| Indikator Kinerja Daerah                 | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |               |               |               |               |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|--|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|  |   | 2020                        | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |  |
| 1  | 2                                       | 3                           | 4             | 5             | 6             | 7             | 8             |  |
| Indeks Profesionalitas ASN               | 38,92                                   | 42,42                       | 45,92         | 49,42         | 52,92         | 56,42         | 56,42         |  |
| Indeks Pelayanan Publik                  | N/A                                     | 2,61-<br>2,65               | 2,66-<br>2,75 | 2,86-<br>2,95 | 2,96-<br>3,05 | 3,06-<br>3,15 | 3,06-<br>3,15 |  |
| Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur    | 78                                      | 80                          | 81            | 82            | 83            | 84            | 84            |  |
| Indeks Konektivitas Wilayah              | 1,635                                   | 1,731                       | 1,788         | 1,808         | 1,846         | 1,865         | 1,865         |  |
| Persentase cakupan layanan infrastruktur | 37,64                                   | 41,37                       | 44,94         | 48,28         | 51,47         | 54,64         | 54,64         |  |
| Indeks Risiko Bencana                    | 145                                     | 143                         | 141           | 139           | 137           | 135           | 135           |  |
| Indeks Kapasitas Daerah                  | 145,45                                  | 143,4                       | 142           | 139,2         | 137,84        | 136,44        | 136,44        |  |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup         | 65,22                                   | 65,54                       | 65,76         | 65,98         | 66,20         | 66,43         | 66,43         |  |

(Sumber: Penyusun Diolah, 2021)

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah mencakup seluruh perangkat daerah yang melaksanakan tugasnya dengan melihat pencapaian keberhasilan melalui indikator – indikator yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh perangkat daerah terkait. Untuk melihat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah sesuai dengan aspek pembangunan Kabupaten Pangandaran maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



## 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran

| No             | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah  | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |             |             |             |             |             | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----------------|---|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|                |   |   | 2020                        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |  |
| (1)            | (2)   | (3)                                     | (4)                         | (5)         | (6)         | (7)         | (8)         | (9)         |  |
| <b>2.2</b>     | <b>KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>                                 |   |                             |             |             |             |             |             |  |
| 2.2.1.1        | Pertumbuhan PDRB  | N/A                                     | 4,0-4,5                     | 4,5-5,0     | 5,0 -5,5    | 5,5-6,0     | 6,0-6,5     | 6,0-6,5     |  |
| 2.2.1.2        | Indeks Gini   | N/A                                     | 0,338-0,330                 | 0,330-0,326 | 0,326-0,318 | 0,318-0,310 | 0,310-0,302 | 0,310-0,302 |  |
| 2.2.1.3        | Tingkat Kemiskinan (%)  | 8,99                                    | 7,5-7,0                     | 7,0-6,5     | 6,5-6,0     | 6,0-5,5     | 5,5-5,0     | 5,5-5,0     |  |
| 2.2.1.4        | Laju Inflasi  | 1,61                                    | 1,06                        | 0,86        | 0,69        | 0,56        | 0,45        | 0,45        |  |
| 2.2.1.5        | Indeks Pembangunan Manusia                                      | 68,06                                   | 68,50-69,12                 | 69,12-69,59 | 69,59-70,06 | 70,06-70,53 | 70,53-71,00 | 70,53-71,00 |  |
| 2.2.2.2        | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)                       |   |                             |             |             |             |             |             |  |
|                | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)                              | 5,08                                    | 5,00-4,50                   | 4,90-4,25   | 4,80-4,00   | 4,70-3,75   | 4,60-3,50   | 4,60-3,50   |  |
| 2.2.3.1        | Penyelenggaraan Festival Seni Budaya                            | N/A                                     | 6                           | 8           | 8           | 8           | 8           | 8           |  |
| 2.2.3.1        | Jumlah Cabang Olahraga  | 30                                      | 30                          | 31          | 32          | 33          | 34          | 30          |  |
| <b>2.3</b>     | <b>PELAYANAN UMUM</b>   |   |                             |             |             |             |             |             |  |
| <b>2.3.1</b>   | <b>Pelayanan Umum Wajib Dasar</b>                               |   |                             |             |             |             |             |             |  |
| <b>2.3.1.1</b> | <b>Pendidikan</b>   |   |                             |             |             |             |             |             |  |
|                | Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A                           | 96 %                                    | 97,00                       | 97,50       | 98,00       | 98,50       | 99,00       | 99,00       |  |
|                | Angka Partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B                         | 98 %                                    | 98,50                       | 98,60       | 98,70       | 98,82       | 99,00       | 99,00       |  |
|                | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A                     | 91 %                                    | 92,00                       | 93,00       | 94,00       | 95,00       | 96,00       | 96,00       |  |
|                | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B                   | 69 %                                    | 69,50                       | 70,00       | 70,50       | 71,00       | 72,00       | 72,00       |  |
|                | Jumlah Guru Berijazah S1/DIV                                    | 3.735                                   | 3.795                       | 3.850       | 3.910       | 3.975       | 4.035       | 4.035       |  |
| <b>2.3.1.2</b> | <b>Kesehatan</b>  |   |                             |             |             |             |             |             |  |
|                | Prevalensi Balita Stunting                                      | 5,01%                                   | 5,0%                        | 4,7%        | 4,4%        | 4,1%        | 3,8%        | 3,8%        |  |
|                | Angka Harapan Hidup   | 71,4%                                   | 71,96%                      | 72,24%      | 72,52%      | 72,80%      | 73,08%      | 73,08%      |  |
|                | Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi | 0                                       | 100%                        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |  |
|                | Dokter  | 56                                      | 62                          | 68          | 75          | 82          | 90          | 90          |  |
|                | Dokter Gigi   | 13                                      | 14                          | 16          | 17          | 19          | 21          | 21          |  |
|                | Bidan   | 396                                     | 436                         | 479         | 527         | 580         | 638         | 638         |  |
|                | Ners  | 213                                     | 234                         | 258         | 284         | 312         | 343         | 343         |  |
|                | Perawat Terampil  | 280                                     | 308                         | 339         | 373         | 410         | 451         | 451         |  |
|                | Perawat Gigi  | 29                                      | 32                          | 35          | 39          | 42          | 47          | 47          |  |



| No             | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah     | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |        |        |        |        |         | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----------------|--|---|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--|
|                |  |   | 2020                        | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026    |  |
| (1)            | (2)  | (3)                                     | (4)                         | (5)    | (6)    | (7)    | (8)    | (9)     |  |
|                | Pranata Labkes   | 47                                      | 52                          | 57     | 63     | 69     | 76     | 76      |  |
|                | Perekam Medis dan Informasi Kesehatan                              | 22                                      | 24                          | 27     | 29     | 32     | 35     | 35      |  |
|                | Tenaga Gizi  | 15                                      | 17                          | 18     | 20     | 22     | 24     | 24      |  |
|                | Sanitarian/Kesling   | 11                                      | 12                          | 13     | 15     | 16     | 18     | 18      |  |
|                | Kesehatan Masyarakat   | 61                                      | 67                          | 74     | 81     | 89     | 98     | 98      |  |
|                | Fisioterapis   | 28                                      | 31                          | 34     | 37     | 41     | 45     | 45      |  |
|                | Apoteker   | 34                                      | 37                          | 41     | 45     | 50     | 55     | 55      |  |
|                | Asisten Apoteker   | 51                                      | 56                          | 62     | 68     | 75     | 82     | 82      |  |
|                | Analisis Obat dan Makanan  | 1                                       | 1                           | 1      | 1      | 1      | 2      | 2       |  |
|                | Dokter Spesialis   | 21                                      | 23                          | 25     | 28     | 31     | 34     | 34      |  |
|                | Radiografer  | 8                                       | 9                           | 10     | 11     | 12     | 13     | 13      |  |
|                | Teknisi Elektromedis   | 2                                       | 2                           | 2      | 3      | 3      | 3      | 3       |  |
|                | Asisten Penata Anestesi  | 3                                       | 3                           | 4      | 4      | 4      | 5      | 5       |  |
|                | Fisikawan Medis Ahli Pertama                                       | 1                                       | 1                           | 1      | 1      | 1      | 2      | 2       |  |
|                | Ahli Teknik Laboratorium Medik Terampil                            | 11                                      | 12                          | 13     | 15     | 16     | 18     | 18      |  |
|                | Analisis Patologi Anatomi  | 1                                       | 1                           | 1      | 1      | 1      | 2      | 2       |  |
|                | Ditesien   | 1                                       | 1                           | 1      | 1      | 1      | 2      | 2       |  |
|                | Nutrisionis Terampil   | 7                                       | 8                           | 8      | 9      | 10     | 11     | 11      |  |
|                | Sanitarian Ahli Pertama  | 5                                       | 6                           | 6      | 7      | 7      | 8      | 8       |  |
|                | Analisis Kebijakan Kesehatan                                       | 1                                       | 1                           | 1      | 1      | 1      | 2      | 2       |  |
|                | Penyuluhan Kesehatan Ahli  | 3                                       | 3                           | 4      | 4      | 4      | 5      | 5       |  |
|                | Petugas CSSD/Perawat   | 3                                       | 3                           | 4      | 4      | 4      | 5      | 5       |  |
|                | Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi                       | 100%                                    | 100%                        | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%    |  |
| <b>2.3.1.3</b> | <b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>                           |   |                             |        |        |        |        |         |  |
|                | Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)                | 67.57                                   | 69.57                       | 70.57  | 71.57  | 72.57  | 73.57  | 73.57   |  |
|                | Persentase penduduk berakses air minum (%)                         | 70%                                     | 71%                         | 72%    | 73%    | 74%    | 75%    | 76%     |  |
|                | Persentase Jalan Baru yang Terbangun                               | 0,000                                   | 1,262                       | 36,297 | 75,855 | 84,692 | 91,583 | 100,000 |  |
|                | Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap                              | 69,990                                  | 74,500                      | 78,500 | 82,500 | 87,500 | 89,500 | 95,400  |  |
|                | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Persampahan                  | 15%                                     | 15%                         | 38%    | 62%    | 85%    | 100%   | 100%    |  |
|                | Proporsi Drainase Dan Gorong - Gorong Kabupaten Dalam Kondisi Baik | 50%                                     | 50%                         | 53%    | 56%    | 59%    | 62%    | 65%     |  |
|                | Persentase Sarana Pemerintahan yang Terbangun                      | 6%                                      | 15%                         | 29%    | 43%    | 57%    | 71%    | 86%     |  |
|                | Persentase Penerapan Arsitektur Kawasan Khas                       | 0%                                      | 1%                          | 1%     | 3%     | 6%     | 8%     | 10%     |  |



| No             | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah  | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |        |        |        |        |        | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----------------|---|---|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
|                |   |   | 2020                        | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |  |
| (1)            | (2)   | (3)                                     | (4)                         | (5)    | (6)    | (7)    | (8)    | (9)    |  |
|                | Pangandaran Pada Bangunan Pemerintah  |   |                             |        |        |        |        |        |  |
|                | Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah  | 35,04%                                  | 37,54%                      | 40,04% | 42,54% | 45,04% | 47,54% | 50,00% |  |
| <b>2.3.1.4</b> | <b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>   |   |                             |        |        |        |        |        |  |
|                | Persentase Infrastruktur Kawasan Permukiman Dalam Kondisi Baik  | 0%                                      | 53%                         | 56%    | 59%    | 62%    | 65%    | 68%    |  |
|                | Persentase Rumah Tidak Layak Huni   | 27%                                     | 27%                         | 26,39% | 26,14% | 25,89% | 25,64% | 25,39% |  |
| <b>2.3.1.5</b> | <b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>  |   |                             |        |        |        |        |        |  |
|                | Kejadian Kebakaran Kabupaten Pangandaran  | 12                                      | 12                          | 10     | 9      | 8      | 6      | 6      |  |
|                | Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP   | 5                                       | 10                          | 10     | 11     | 12     | 13     | 13     |  |
| <b>2.3.1.6</b> | <b>Sosial</b>   |   |                             |        |        |        |        |        |  |
|                | Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial  | 0,2%                                    | 8%                          | 8%     | 8%     | 8%     | 8%     | 8%     |  |
|                | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator spm) | 87.55%                                  | 88%                         | 88.50% | 89.%   | 89.50% | 90 %   | 90 %   |  |
|                | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota                             | 98.03%                                  | 98.50%                      | 98.75% | 99%    | 99.50% | 100%   | 100%   |  |
| <b>2.3.2</b>   | <b>Layanan Urusan Wajib Non-Dasar</b>   |   |                             |        |        |        |        |        |  |
| <b>2.3.2.1</b> | <b>Tenaga Kerja</b>   |   |                             |        |        |        |        |        |  |
|                | Persentase pencari kerja yang ditempatkan (%)   | 98                                      | 60                          | 70     | 75     | 80     | 90     | 90     |  |
|                | Rasio Penduduk yang Bekerja (%)   | 80                                      | 70                          | 75     | 80     | 85     | 90     | 90     |  |
|                | Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (%)  | 24,70                                   | 25,09                       | 25,49  | 25,89  | 26,29  | 26,69  | 26,69  |  |
| <b>2.3.2.2</b> | <b>2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>   |   |                             |        |        |        |        |        |  |
|                | Indeks Pembangunan Gender (IPG)   | 89,78                                   | 89,95                       | 90,01  | 90,07  | 90,12  | 90,12  | 90,12  |  |
|                | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)  | 74,57                                   | 74,57                       | 74,58  | 74,59  | 74,60  | 74,61  | 74,61  |  |
|                | Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)  | 24,70                                   | 25,09                       | 25,49  | 25,89  | 26,29  | 26,69  | 26,69  |  |
| <b>2.3.2.3</b> | <b>Pangan</b>   |   |                             |        |        |        |        |        |  |
|                | Indeks Ketahanan Pangan   | 81,99                                   | 81,0                        | 81,5   | 82,0   | 82,5   | 83,0   | 83,0   |  |



| No             | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                            | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       |       | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----------------|---|---|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                |   |   | 2020                        | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |  |
| (1)            | (2)   | (3)                                     | (4)                         | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   |  |
|                | Skor PPH Konsumsi   | 94,5                                    | 75                          | 80    | 85    | 90    | 95    | 95    |  |
| <b>2.3.2.4</b> | <b>Pertanahan</b>   |   |                             |       |       |       |       |       |  |
|                | Persentase Izin Lokasi dan/atau izin Penetapan Lokasi yang diterbitkan                    | N/A                                     | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                                      |
|                | Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah hak dan/atau tanah Garapan Yang Diselesaikan | 100                                     | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                                      |
|                | Persentase Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan Yang Diselesaikan                           | N/A                                     | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                                      |
|                | Cakupan Penggunaan Tanah Dalam Satu Daerah Kabupaten Pangandaran                          | N/A                                     | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                                      |
| <b>2.3.2.5</b> | <b>Lingkungan Hidup</b>   |   |                             |       |       |       |       |       |  |
|                | Volume produksi sampah  | 62129                                   | 64639                       | 65932 | 67250 | 68595 | 69595 | 69595 |  |
|                | Persentase Penanganan sampah  | 16,84%                                  | 20%                         | 22%   | 24%   | 26%   | 28%   | 28%   |  |
|                | Indeks Kualitas Air   | 51,67                                   | 51,75                       | 51,8  | 51,85 | 51,9  | 51,95 | 51,95 |  |
|                | Indeks Kualitas Udara   | 77,79                                   | 78,5                        | 79    | 79,5  | 80    | 80,5  | 80,5  |  |
|                | Indeks Kualitas Vegetasi/IKTL   | 65,25                                   | 65,25                       | 65,37 | 65,45 | 65,64 | 65,82 | 65,82 |  |
| <b>2.3.2.6</b> | <b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>                                     |   |                             |       |       |       |       |       |  |
|                | Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik                                  | 96,95                                   | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                                      |
|                | Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga   | 26,78                                   | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                                      |
|                | Cakupan Perekaman KTP Elektronik  | 3,29                                    | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                                      |
|                | Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)   | 45,26                                   | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                                      |
|                | Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran  | 74,3                                    | 78                          | 80    | 82    | 84    | 85    | 85    |  |
|                | Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan  | 59,54                                   | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                                      |
|                | Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian  | 67,25                                   | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                                      |
|                | Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan   | 39,13                                   | 17                          | 35    | 57    | 78    | 100   | 100   |  |
| <b>2.3.2.7</b> | <b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>   |   |                             |       |       |       |       |       |  |
|                | Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri                                       | 40%                                     | 60%                         | 80%   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%                                     |
| <b>2.3.2.8</b> | <b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>                                       |   |                             |       |       |       |       |       |  |
|                | TFR / Total Fertility Rate  | 2,29                                    | 2,23                        | 2,20  | 2,18  | 2,16  | 2,16  | 2,16  | 2,16                                     |
|                | CPR / Contraceptive Prevalence Rate (%)   | 60,25                                   | 61,45                       | 61,96 | 62,43 | 62,86 | 62,86 | 62,86 | 62,86                                    |
|                | Unmet Need  | 17,33                                   | 15,95                       | 15,40 | 14,93 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52                                    |
|                | LPP / Laju Pertumbuhan Penduduk (%)   | 0,76                                    | 0,74                        | 0,73  | 0,72  | 0,71  | 0,71  | 0,71  | 0,71                                     |



| No              | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah             | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |        |        |        |        |        | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----------------|--|---|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
|                 |  |   | 2020                        | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |  |
| (1)             | (2)  | (3)                                     | (4)                         | (5)    | (6)    | (7)    | (8)    | (9)    |  |
|                 | Ratio Akseptor KB (%)  | 60,25                                   | 61,45                       | 61,96  | 62,43  | 62,86  | 62,86  | 62,86  | 62,86                                    |
|                 | ASFR / Age Spesific Fertility Rate   | 37                                      | 33                          | 32     | 31     | 30     | 30     | 30     | 30                                       |
| <b>2.3.2.9</b>  | <b>Perhubungan</b>   |   |                             |        |        |        |        |        |  |
|                 | Rasio Sarana Prasarana Perhubungan Yang Ada Dalam Kondisi Baik             | 76,9                                    | 56,03                       | 75,08  | 93,31  | 100    | 100    | 100    | 100                                      |
|                 | Persentase kecamatan yang terlayani angkutan umum (%)                      | 60                                      | 50                          | 72,22  | 88,89  | 100    | 100    | 100    | 100                                      |
| <b>2.3.2.10</b> | <b>Komunikasi dan Informatika</b>  |   |                             |        |        |        |        |        |  |
|                 | Persentase aplikasi yang dimanfaatkan secara baik (%)                      | n/a                                     | 79                          | 82     | 85     | 88     | 90     | 90     | 90                                       |
|                 | Persentase Penyebaran Informasi Publik (%)                                 | n/a                                     | 55                          | 60     | 65     | 70     | 75     | 75     | 75                                       |
| <b>2.3.2.11</b> | <b>Usaha Mikro Kecil Menengah</b>  |   |                             |        |        |        |        |        |  |
|                 | Persentase koperasi aktif  | 89,02                                   | 89,15                       | 89,28  | 89,41  | 89,53  | 89,65  | 89,65  | 89,65                                    |
|                 | Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)                                       | 100                                     | 100                         | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100                                      |
|                 | Persentase pertumbuhan usaha mikro (%)                                     | 5,18                                    | 15                          | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 75                                       |
| <b>2.3.2.12</b> | <b>Penanaman Modal</b>   |   |                             |        |        |        |        |        |  |
|                 | Jumlah Investor PMDN/PMA   | 123                                     | 166                         | 183    | 201    | 221    | 243    | 243    | 243                                      |
| <b>2.3.2.14</b> | <b>Statistik</b>   |   |                             |        |        |        |        |        |  |
|                 | Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral (%)              | N/A                                     | 25                          | 30     | 35     | 40     | 45     | 45     | 45                                       |
| <b>2.3.2.15</b> | <b>Persandian</b>  |   |                             |        |        |        |        |        |  |
|                 | Persentase Pengamanan Informasi Daerah (%)                                 | N/A                                     | 60                          | 65     | 70     | 75     | 80     | 80     | 80                                       |
| <b>2.3.2.16</b> | <b>Kebudayaan</b>  |   |                             |        |        |        |        |        |  |
|                 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya (festival)                        | N/A                                     | 6                           | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8  |
|                 | Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (%)                 | N/A                                     | 60                          | 62     | 64     | 66     | 68     | 68     | 68                                       |
|                 | Jumlah Objek diduga Cagar budaya yang dilestarikan (objek)                 | N/A                                     | 3                           | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3  |
| <b>2.3.2.17</b> | <b>Perpustakaan</b>  |   |                             |        |        |        |        |        |  |
|                 | Persentase Pengingkatan Bahan Pustaka dan Naskah Kuno yang dilestarikan    | N/A                                     | 10                          | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10                                       |
|                 | Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun (Orang)                    | 5,978                                   | 16,560                      | 16,560 | 27,720 | 33,840 | 39,960 | 39,960 | 39,960                                   |
|                 | Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah (Eksemplar) | 10,794                                  | 11,211                      | 11,628 | 12,184 | 12,879 | 13,713 | 13,713 | 13,713                                   |



| No              | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                  | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |                   |                   |                   |                   |                   | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----------------|---|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|                 |   |   | 2020                        | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |  |
| (1)             | (2)   | (3)                                     | (4)                         | (5)               | (6)               | (7)               | (8)               | (9)               |  |
|                 | Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai (Orang)                    | 224                                     | 306                         | 346               | 386               | 427               | 467               | 467               |  |
|                 | Jumlah masyarakat terlibat dalam kegiatan sosialisasi/promosi per tahun (Orang) | 5,978                                   | 7,178                       | 8,078             | 9,278             | 10,778            | 12,578            | 12,578            |  |
|                 | Jumlah Total Perpustakaan (Perpustakaan)  | 627                                     | 637                         | 642               | 648               | 654               | 654               | 654               |  |
|                 | Jumlah Perpustakaan yang telah memiliki SNP di suatu wilayah (Perpustakaan)     | 168                                     | 228                         | 258               | 288               | 318               | 348               | 348               |  |
|                 | Jumlah Anggota Perpustakaan (Orang)   | 3,009                                   | 3,573                       | 3,993             | 4,533             | 5,193             | 5,873             | 5,873             |  |
| <b>2.3.2.18</b> | <b>Kearsipan</b>  |   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                 | Kebijakan Kearsipan (%)   | 71,33                                   | 5,734                       | 5,734             | 5,734             | 5,734             | 5,734             | 5,734             |  |
|                 | Pembinaan Kearsipan (%)   | 34,17                                   | 13,166                      | 13,166            | 13,166            | 13,166            | 13,166            | 13,166            |  |
|                 | Pengolahan Arsip Inaktif Dengan Retensi Sekurang-Kurangnya 10 Tahun (%)         | 80                                      | 4                           | 4                 | 4                 | 4                 | 4                 | 4                 |  |
|                 | Pengelolaan Arsip Statis (%)  | 25,6                                    | 14,88                       | 14,88             | 14,88             | 14,88             | 14,88             | 14,88             |  |
|                 | Sdm Kearsipan (%)   | 31,3                                    | 13,74                       | 13,74             | 13,74             | 13,74             | 13,74             | 13,74             |  |
|                 | Persentase LAKE Kabupaten/Kota  | 50,84                                   | 66,13                       | 72,23             | 80,22             | 89,29             | 100               | 100               |  |
| <b>2.3.3</b>    | <b>Urusan Pilihan</b>   |   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>2.3.3.1</b>  | <b>Kelautan dan Perikanan</b>   |   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                 | Kontribusi Produksi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%)                          | 0,6                                     | 0,5                         | 0,6               | 0,7               | 0,8               | 0,9               | 0,9               |  |
|                 | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)                                   | 13,19                                   | 0,5                         | 0,5               | 0,5               | 0,5               | 0,5               | 0,5               |  |
| <b>2.3.3.2</b>  | <b>Pariwisata</b>   |   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                 | Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan (%)                           | N/A                                     | 2                           | 4                 | 6                 | 8                 | 10                | 10                |  |
|                 | Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata (Rp)                                   | 13.786.568.250,00                       | 17.500.000.000,00           | 20.000.000.000,00 | 22.000.000.000,00 | 25.000.000.000,00 | 27.500.000.000,00 | 27.500.000.000,00 |  |
|                 | Persentase Tingkat hunian Akomodasi (%)   | 6                                       | 7                           | 8                 | 9                 | 10                | 11                | 11                |  |
|                 | Pesentase Pengembangan Ekonomi Kreatif (%)                                      | 45                                      | 50                          | 55                | 60                | 65                | 70                | 70                |  |
| <b>2.3.3.3</b>  | <b>Pertanian</b>  |   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                 | PDRB sektor Pertanian (Rp)  | n/a                                     | 1.776.308.750.000           | 1.802.321.770.000 | 1.833.461.950.000 | 1.872.619.630.000 | 1.914.096.010.000 | 1.914.096.010.000 |  |
|                 | Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)                                   | n/a                                     | 15                          | 15                | 15                | 15                | 15                | 15                |  |



| No             | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                           | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |                 |                 |                 |                 |                 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----------------|--|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|                |  |   | 2020                        | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |  |
| (1)            | (2)  | (3)                                     | (4)                         | (5)             | (6)             | (7)             | (8)             | (9)             |  |
|                | Jumlah kontribusi PDRB konstan dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)        | 23,96                                   | 20                          | 20              | 20              | 20              | 20              | 20              | 20                                       |
|                | Jumlah kontribusi PDRB harga berlaku dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) | 27,34                                   | 25                          | 25              | 25              | 25              | 25              | 25              | 25                                       |
| <b>2.3.3.4</b> | <b>Perdagangan</b>   |   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |  |
|                | Nilai ekspor daerah (Miliar Rupiah)  | 108,82                                  | 111,00                      | 118,55          | 127,20          | 137,19          | 148,91          | 148,91          |  |
|                | Prosentase peningkatan nilai ekspor perdagangan (%)                                      | 81,88                                   | 6,36                        | 6,80            | 7,29            | 7,86            | 8,54            | 36,85           |  |
|                | Nilai PDRB sektor perdagangan (Miliar Rupiah)  | 2.243,97                                | 2.243,97                    | 2.454,37        | 2.585,97        | 2.717,57        | 2.849,16        | 2.849,16        |  |
| <b>2.3.3.5</b> | <b>Perindustrian</b>   |   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |  |
|                | Jumlah Industri Baru   | 13                                      | 20                          | 20              | 25              | 25              | 30              | 30              |  |
|                | Persentase Pertumbuhan Industri (%)  | 0,004                                   | 0,006                       | 0,006           | 0,007           | 0,007           | 0,008           | 0,008           |  |
|                | Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)  | 0,052                                   | 0,059                       | 0,059           | 0,064           | 0,067           | 0,069           | 0,069           |  |
|                | Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)   | 4,78                                    | 4,80                        | 4,83            | 4,85            | 4,90            | 4,95            | 4,95            |  |
|                | Nilai PDRB Sektor Industri (Rp)  | 594.570.910.000                         | 575.187.458.659             | 594.201.920.102 | 617.201.920.102 | 647.462.862.646 | 682.911.703.213 | 682.911.703.213 |  |
| <b>2.3.3.6</b> | <b>Transmigrasi</b>  |   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |  |
|                | Persentase Transmigran Swakarsa  | 0                                       | 3                           | 3               | 5               | 5               | 5               | 5               |  |
| <b>2.3.4</b>   | <b>Layanan Pendukung, Penunjang, Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>                      |   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| <b>2.3.4.1</b> | <b>Perencanaan</b>   |   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |  |
|                | Nilai SAKIP Unsur Perencanaan (%)  | 22,40                                   | 22,55                       | 22,70           | 22,85           | 23,00           | 23,15           | 23,15           |  |
|                | Persentase Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Daerah yang Berkualitas (%)                  | 95,00                                   | 96,00                       | 97,00           | 98,00           | 99,00           | 100,00          | 100,00          |  |
|                | Nilai SAKIP Bappeda (%)  | A<br>89.90                              | A<br>89.95                  | A<br>90.00      | AA<br>90.05     | AA<br>90.10     | AA<br>90.15     | AA<br>90.15     |  |
|                | Persentase Nilai SAKIP PD Unsur Perencanaan di atas 26% (%)                              | 65,71                                   | 68,57                       | 71,29           | 74,29           | 71,14           | 80,00           | 80,00           |  |
| <b>2.3.4.1</b> | <b>Keuangan</b>  |   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |  |
|                | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah   | WTP                                     | WTP                         | WTP             | WTP             | WTP             | WTP             | WTP             |  |
|                | Persentase SILPA Terhadap APBD   | 1,35                                    | 1,49                        | 1,29            | 1,55            | 1,46            | 1,14            | 1,14            |  |
|                | Persentase Belanja Pendidikan (20%)  | 28,49                                   | 21,15                       | 21,30           | 21,55           | 21,75           | 22,00           | 22,00           |  |
|                | Persentase Belanja Pendidikan (10%)  | 24,96                                   | 11,25                       | 11,50           | 11,74           | 11,82           | 12,00           | 12,00           |  |



| No             | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                       | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |             |             |             |             |             | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----------------|--|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|                |  |   | 2020                        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |  |
| (1)            | (2)  | (3)                                     | (4)                         | (5)         | (6)         | (7)         | (8)         | (9)         |  |
|                | Perbandingan antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung (BL)                 | 70 : 30                                 | 60 : 40                     | 60 : 40     | 60 : 40     | 60 : 40     | 60 : 40     | 60 : 40     | 60 : 40                                  |
|                | Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa   | 1,96                                    | 0,75                        | 0,68        | 0,87        | 0,87        | 0,73        | 0,73        |  |
| <b>2.3.4.2</b> | <b>Kepegawaian, Kependidikan, dan Pelatihan</b>                                      |   |                             |             |             |             |             |             |  |
|                | Persentase ASN yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi Teknis                           | 2%                                      | 8%                          | 14%         | 20%         | 27%         | 34%         | 34%         |  |
|                | Persentase Pejabat Struktural yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi Manajerial        | 17%                                     | 24%                         | 31%         | 40%         | 48%         | 57%         | 57%         |  |
| <b>2.3.4.3</b> | <b>Penelitian dan Pengembangan</b>   |   |                             |             |             |             |             |             |  |
|                | Persentase implementasi rencana kelitbangsan (%)                                     | N/A                                     | 65-85%                      | 65-85%      | 65-85%      | 65-85%      | 85-100%     | 85-100%     |  |
| <b>2.3.4.4</b> | <b>Pengawasan</b>  |   |                             |             |             |             |             |             |  |
|                | Nilai Hasil Evaluasi Sakip Komponen Evaluasi Internal                                | 7,39                                    | 7,60                        | 7,80        | 7,95        | 8,20        | 8,40        | 8,40        |  |
|                | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat                   | 89,5                                    | 90                          | 90          | 90          | 90          | 90          | 90          |  |
|                | Tingkat Kapabilitas APIP   | Level 2                                 | Level 3                     | Level 3     | Level 3     | Level 3     | Level 3     | Level 3     |  |
|                | Persentase OPD yang mengimplementasikan Manajemen Risiko (%)                         | 23                                      | 23                          | 26          | 29          | 31          | 34          | 34          |  |
|                | Persentase OPD yang membuat Kebijakan dan Pengendalian Korupsi                       | 30                                      | 32                          | 35          | 40          | 45          | 50          | 50          |  |
|                | Manajemen Risiko Indeks (MRI)  | n.a                                     | Level 3                     | Level 3     | Level 3     | Level 3     | Level 3     | Level 3     |  |
|                | Indek Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)  | n.a                                     | Level 3                     | Level 3     | Level 3     | Level 3     | Level 3     | Level 3     |  |
| <b>2.3.4.5</b> | <b>Pemerintahan Umum</b>   |   |                             |             |             |             |             |             |  |
|                | Persentase masyarakat yang memahami Kesatuan Bangsa                                  | N/A                                     | 75%                         | 78%         | 82%         | 83%         | 85%         | 85%         |  |
|                | Persentase masyarakat yang memahami demokrasi  | N/A                                     | 90%                         | 91%         | 92%         | 93%         | 94%         | 94%         |  |
|                | Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  | A                                       | A                           | A           | A           | A           | A           | A           |  |
| <b>2.3.4.6</b> | <b>Sekretariat Daerah</b>  |   |                             |             |             |             |             |             |  |
|                | Indeks Reformasi Birokrasi   | CC (52.06)                              | B                           | B           | BB          | BB          | A           | A           |  |
|                | Indeks Pelayanan Publik  | N/A                                     | 2,61 - 2,65                 | 2,66 - 2,75 | 2,86 - 2,95 | 2,96 - 3,05 | 3,06 - 3,15 | 3,06 - 3,15 |  |
|                | Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dengan Peraturan Perundang-undangan (%) | 166.67                                  | 80                          | 85          | 90          | 95          | 100         | 100         |  |



| No             | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah  | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |           |           |            |            |            | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----------------|---|---|-----------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--|
|                |   |   | 2020                        | 2022      | 2023      | 2024       | 2025       | 2026       |  |
| (1)            | (2)   | (3)                                     | (4)                         | (5)       | (6)       | (7)        | (8)        | (9)        |  |
| <b>2.3.4.7</b> | <b>Sekretariat Dewan</b>  |   |                             |           |           |            |            |            |  |
|                | Persentase Kenaikan Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan | 83%                                     | 60%                         | 63%       | 66%       | 70%        | 73%        | 73%        |  |
| <b>2.3.4.1</b> | <b>Penanggulangan Bencana</b>   |   |                             |           |           |            |            |            |  |
|                | Persentase/Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota  | 68,8                                    | 69,3                        | 70,2      | 71,6      | 72,8       | 74         | 74         |  |
|                | Persentase/Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana   | 20%                                     | 25%                         | 30%       | 35%       | 40%        | 45%        | 45%        |  |
|                | Persentase/Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  | 100%                                    | 100%                        | 100%      | 100%      | 100%       | 100%       | 100%       |  |
| <b>2.4</b>     | <b>DAYA SAING DAERAH</b>  |   |                             |           |           |            |            |            |  |
| <b>.4.1</b>    | <b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>   |   |                             |           |           |            |            |            |  |
|                | Pengeluaran Konsumsi per Kapita   | 9.084.000                               | 9.585.238                   | 9.758.190 | 9.931.143 | 10.104.095 | 10.277.048 | 10.277.048 |  |
| <b>2.4.2</b>   | <b>Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>  |   |                             |           |           |            |            |            |  |
|                | Jumlah arus penumpang angkutan umum   | 48.150                                  | 35.000                      | 37.500    | 40.000    | 45.000     | 47.500     | 47.500     |  |
|                | Jumlah izin trayek yang dikeluarkan   | 12                                      | 10                          | 15        | 20        | 25         | 35         | 35         |  |
| <b>2.4.3</b>   | <b>Fokus Iklim Investasi</b>  |   |                             |           |           |            |            |            |  |
|                | Jumlah Investor PMDN/PMA  | 123                                     | 166                         | 183       | 201       | 221        | 243        | 243        |  |
|                | PMDN/PMA (Nilai Investasi) (Milyar Rupiah)  | 292,82                                  | 354,31                      | 389,74    | 428,71    | 471,58     | 518,73     | 518,73     |  |
| <b>2.4.4</b>   | <b>Fokus Sumber Daya Manusia</b>  |   |                             |           |           |            |            |            |  |
|                | Lulusan S1  | 224                                     | 270                         | 320       | 370       | 420        | 470        | 470        |  |
|                | Lulusan S2  | 0                                       | 15                          | 20        | 25        | 30         | 35         | 35         |  |
| <b>2.4.5</b>   | <b>Fokus Daya Saing Pariwisata</b>  |   |                             |           |           |            |            |            |  |
|                | Jumlah Kunjungan Wisata   | 2.842.022                               | 3.570.286                   | 4.083.289 | 4.628.571 | 5.154.286  | 5.671.429  | 5.671.429  |  |
|                | PAD sektor pariwisata   | 13.786.568,25<br>0,00                   | 17,5 M                      | 20 M      | 22,5 M    | 25 M       | 27,5 M     | 27,5 M     |  |

(Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran 2021)



Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Selain itu, indikator kinerja suatu Kabupaten/Kota juga harus selaras dengan provinsi dan nasional guna mendukung rencana pembangunan kedepan sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 tanggal 16 Juni 2021. Keselarasan rencana pembangunan Jengka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran dengan Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel 8.3 Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional**

| No  | Indikator Pembangunan              | RPJMN |      |             | RPJMD Provinsi Jawa Barat |             | RPJMD Kabupaten Pangandaran |             |             |             |             |
|-----|------------------------------------|-------|------|-------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                    | 2022  | 2023 | 2024        | 2022                      | 2023        | 2022                        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
| (1) | (2)                                | (3)   | (4)  | (5)         | (7)                       | (8)         | (12)                        | (13)        | (14)        | (15)        | (16)        |
| 1.  | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)       | 5,90  | 6,10 | 6,20        | 5,20 -5,20                | 5,50 -5,50  | 4,0-4,5                     | 4,5-5,0     | 5,0 -5,5    | 5,5-6,0     | 6,0-6,5     |
| 2.  | Tingkat Kemiskinan (%)             | 9,00  | 8,55 | 8,15        | 6,39-6,06                 | 5,77-5,42   | 7,5-7,0                     | 7,0-6,5     | 6,5-6,0     | 6,0-5,5     | 5,5-5,0     |
| 3.  | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)   | 3,80  | 3,40 | 3,10        | 9,46-7,81                 | 8,03-6,21   | 5,00-4,50                   | 4,90-4,25   | 4,80-4,00   | 4,70-3,75   | 4,60-3,50   |
| 4.  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)   |       |      | 74,60-84,23 | 72,38-72,79               | 73,14-73,56 | 68,50-69,12                 | 69,12-69,59 | 69,59-70,06 | 70,06-70,53 | 70,53-71,00 |
| 5.  | Rasio Gini                         |       |      | 0,360-0,474 | 0,39-0,40                 | 0,38-0,39   | 0,338-0,330                 | 0,330-0,326 | 0,326-0,318 | 0,318-0,310 | 0,310-0,302 |
| 6.  | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%) |       |      | 27,3        | n/a                       | n/a         | 62,91                       | 64,91       | 66,91       | 66,91       | 70,01       |

(Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran 2021)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa target pembangunan jangka menengah Kabupaten Pangandaran telah sesuai dengan target pembangunan jangka menengah provinsi dan nasional. Pada indikator pembangunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), nasional menargetkan pada tahun 2024 TPT sebesar 6,70%. Selaras dengan hal tersebut, Kabupaten Pangandaran menargetkan TPT sebesar 4,80-4,00% pada tahun 2024. Angka tersebut lebih kecil nilainya, yang berarti target nasional secara otomatis dapat tercapai ketika target daerah telah tercapai. Hal tersebut, dapat diartikan bahwa pembangunan di Kabupaten Pangandaran telah selaras dan mendukung pembangunan secara nasional.

*RPJMD*

**RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN**

---

2021 - 2026

# BAB IX

---

## PENUTUP



## **BAB IX**

### **PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025, RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 dan RPJMN.

Dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur proses penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2027.

#### **9.1 Kaidah Pelaksanaan**

Dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi pemerintah Kabupaten dalam menyusun RKPD mulai Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026. Selain itu, RPJMD Kabupaten Pangandaran merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam menyusun dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dengan



berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta masyarakat termasuk dunia usaha.

2. Bupati Pangandaran dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
3. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya.
4. Bupati Pangandaran berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 kepada masyarakat.
5. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran berkewajiban menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

## 9.2 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang dilaksanakan pada Tahun 2026. Sebagaimana diketahui, Tahun 2026 adalah tahun terakhir RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dan RPJMD periode berikutnya belum disusun. Untuk itu, penyusunan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2027 berpedoman pada sasaran pokok dan



arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pangandaran, dan RPJPD Provinsi Jawa Barat serta RPJMPN.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2027 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/ terselesaikan sampai dengan tahun 2026, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan provinsi, dan lain-lain.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar menyukseskan dan mengawal terwujudnya Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa.





Pemerintah  
Kabupaten Pangandaran